TUGAS AKHIR
(SKRIPSI)

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SARANA PRASARANA DI TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI
DESA JIKUMERASA, KECAMATAN NAMLEA KABUPATEN BURU

MILIK
PERPUSTAKAAN
ITN MALANG

Disusun Oleh :

VITASARI LATUCONSINA

NIM 02.24.076

JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

2010

ITN MALANG
PERPUSTAKAAN
MILIK

PENGUKURAN DAN PEMETAAN KONTUR

UNTUK PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA

IR. SUKANTO REKSOHADIPRODJO

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR
(SKRIPSI)

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SARANA PRASARANA DI TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI DI DESA JIKUMERASA
(Studi Kasus: Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru)

Disusun Oleh:

Nama	**: Vitasari Latuconsina**
Nim	**: 02.24.076**

Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi
Jenjang Strata Satu (S1)
Di
Jurusan Teknik Sipil dan Perancanaan
Institut Teknologi Nasional Malang

Dinyatakan Lulus dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
Pada Hari : Jumat 20 Agustus 2010

Anggota Penguji

Penguji I	Penguji II	Penguji III
(DR. Ir.Ibnu Sasongko, MT)	(Ir. Hutomo Moestadjab)	(Endratno Budi Santosa, ST)

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
(Agung Witjaksono, ST, MTP)	(Ida Soewarni, ST)

Mengetahui

Dekan	Ketua Jurusan
Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan	Jurusan Teknik Planologi
Institut Teknologi Nasional Malang	FTSP-ITN Malang
(Ir. A. Agus Santoso, MT)	(Dr. Ir.Ibnu Sasongko,MTP)

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR
(SKRIPSI)

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SARANA PRASARANA DI TEMPAT PENAMPUNGAN
PENGUNGSI DI DESA JIKUMERASA
(Studi Kasus: Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru)

Disusun Oleh:
Nama : Vitasari Latuconsina
Nim : 02.24.076

Diperiksa dan Disetujui Tim Penguji Ujian Skripsi
Jenjang Strata Satu (S1)
Di
Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Nasional Malang

Diperiksa Lulus dan Disetujui Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
Pada Hari : Jumat 20 Agustus 2010

Anggota Penguji

Penguji I | Penguji II | Penguji III

(DR. Ir.Ibnu Sasongko, MT) (Ir. Hutomo Mursadjah) (Endrianto Budi Santosa, ST)

Mengetahui

Pembimbing I | Pembimbing II

(Agung Witjaksono, ST, MTP) (Ida Soewarni, ST)

Mengetahui

Ketua Jurusan
Jurusan Teknik Planologi
ITSP-ITN Malang

Dekan
Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan
Institut Teknologi Nasional Malang

(Ir. A. Agus Santoso, MT) (Dr. Ir.Ibnu Sasongko,MTP)

Identify Requirement Of Infrastructure Facilities In Place Relocation Of Refugee In Countryside Of Jikumerasa District Of Namlea, Sub Province Of Buru

ABSTRACT

Riots due to social conflicts in Ambon City in 1999 have resulted in significant changes, particularly on housing and settlement conditions. Among them there is damage to the social facilities, public facilities and infrastructure facilities of the city. Ambon City Government to make the place a new relocation policy, the new settlements in the District of Namlea, Buru district. Relocation to new settlements are done in addition to preventing new conflicts are also intended to organize this area in order to be better than a previous state, by comparing the condition of infrastructure facilities in shelters and in place of relocation, and use the people's aspirations of refugees in shelters on public opinion about desire to relocate and the wishes of the desired distance and infrastructure needs that must be available at the relocation site.

This study was a descriptive study with a qualitative approach, whereas the analysis done in several stages. The first stage analyzes the character of the community regarding the condition and activities of people using the analysis of data from the questionnaires and the use of participatory analysis, and infrastructure needs in shelters by using the projection method. The second phase of analysis to analyze the aspirations of the community by using frequency tables from the questionnaire that in giving to the community and using weighting (scoring). The third stage is to analyze the availability of infrastructure facilities in shelters and in places where the relocation of this analysis using comparative analysis (comparison) to determine the highest level of service in the shelter and place of relocation. From the stage of the analysis above, the main thing in a residential development is the availability of environmental infrastructure facilities are complete and in accordance with community needs.

Identify Requirement Of Infrastructure Facilities In Place Relocation Of Refugee In Community Of Jakarta Utara District Of Kamuja, Sub Province Of Bata

Knowing that the social conflict in Ambon City in 1999 have resulted in significant changes, particularly on housing and settlement conditions. Among them there is damage to the social facilities, public facilities and infrastructure facilities of the city. Ambon City government to make the place a new relocation policy, the new settlements in the District of Kamuja, Buru district. Relocation to new settlements are done in addition to preserving new conditions are also intended to organize this area in order to be better than a previous state, by combining the condition of infrastructure facilities in shelters and in place of relocation, and use the people's aspirations of refugees in shelters on public opinion about desire to relocate and the wishes of the desired distance and infrastructure needs that must be available at the relocation site.

This study was a descriptive study with a qualitative approach, whereas the analysis done in several stages. The first stage analyzes the character of the community regarding the condition and activities of people using the analysis of data from the questionnaires and the use of participatory analysis, and infrastructure needs in shelters by using the projection method. The second phase of analysis to analyze the aspirations of the community by using predictive tables from the questionnaire that in giving to the community and using *weighting* (scoring). The third stage is to analyze the availability of infrastructure facilities in shelters and in places where the relocation of this analysis using comparative analysis (comparison) to determine the highest level of service in the shelter and place of relocation. From the stage of the analysis above, the main thing in a residential development is the availability of environmental infrastructure facilities are complete and in accordance with community needs.

Keyword: Requirement, Infrastructure Facilities, Settlement, Relocation Place, Relocate ,Refugee.

Keyword: Requirement, Infrastructure Facilities, Settlement, Relocation Place, Relocate ,Refugee.

Identifikasi Kebutuhan Sarana Prasarana Di Tempat Penampungan Pengungsi Di Desa Jikumerasa Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru

ABSTRAKSI

Kerusuhan akibat konflik sosial yang terjadi di Kota Ambon pada tahun 1999 telah mengakibatkan perubahan yang cukup besar, terutama pada kondisi perumahan dan permukiman. Diantaranya terjadi kerusakan pada fasilitas sosial, fasilitas umum dan prasarana sarana kota.

Pemerintah Kota Ambon membuat kebijakan relokasi ketempat yang baru di Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru. Relokasi ke permukiman baru yang dilakukan ini selain untuk mencegah konflik baru juga bermaksud menata kawasan ini agar menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya, dengan membandingkan kondisi sarana prasarana di tempat penampungan dan di tempat relokasi, dan menggunakan aspirasi masyarakat pengungsi di tempat penampungan terhadap pendapat masyarakat tentang keinginan untuk relokasi serta keinginan mengenai jarak yang diinginkan dan kebutuhan sarana prasarana yang harus tersedia di tempat relokasi.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan analisa dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama menganalisa karakter masyarakat yang berkaitan dengan kondisi dan kegiatan masyarakat menggunakan analisis data dari hasil kuisioner dan menggunakan analisis partisipatif, serta kebutuhan sarana prasarana di tempat penampungan dengan menggunakan metode proyeksi. Tahap kedua menganalisa analisa aspirasi masyarakat dengan menggunakan tabel frekuensi dari kuisioner yang di sebarkan untuk masyarakat serta memakai pembobotan (scoring). Tahap ketiga adalah analisa ketersediaan sarana prasarana di tempat penampungan dan di tempat relokasi dimana analisa ini memakai analisa perbandingan (komparasi) untuk menentukan tingkat pelayanan yang paling tinggi di tempat penampungan dan tempat relokasi. Hal yang utama dalam pembangunan suatu permukiman adalah kebutuhan sarana prasarana serta ketersediaan sarana prasarana lingkungan yang

Identifikasi Kepatuhan Santri Terhadap Tata Tertib Pondok Pesantren Di Desa Tikomwetan Kecamatan Jamblas Kabupaten Bara

ABSTRAKSI

Kenakalan akibat konflik sosial yang terjadi di Kota Ambon baru-baru ini 1999 lalu mengakibatkan berapakan yang cukup pesat. termasuk bagi kondisi bermasalah dan bermoralitas. Diantaranya terjadi kenakalan baca tasliflas sosial tasliflas mutu dan bisnisnya semua kota.

Pemerintah Kota Ambon mempunai kepiflakan tolokan keramber yang pun di Kecamatan Jamblas Kabupaten Bara Kolokai ke bermaksuan pun yang diflakukan ini selain mutu mengecap konflik pun jug pemaksud mutun kewassan ini agar mendidi lebih baik dan kesadan sepatunya. dengan mempertahankan kondisi suasa bisnisnia di rumbai bermuangan dan di rumbai tolokai. dan mengimplikasikan aspirasi masyarakat berupaya di rumbai bermuangan tersebut dengan rumah tolokai kepiflakan mengacu pada kepuruhan semua bisnisnia suta kepiflakan mengacu pada kepuruhan dub yang diflakukan yang pun rumbai tolokai.

Penelitian ini adalah berupaya deskriptif dengan berpokasan kualitatif sedangkan subjek penelitian adalah pengurus dan pelaksana kegiatan pondok pesantren yang berkaitan dengan kepatuhan santri dalam kegiatan pondok pesantren. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. serta kepuruhan semua bisnisnia di rumbai bermuangan dengan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diteliti. serta kepuruhan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Teknik kedua wawancara dengan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik ketiga dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Teknik analisa data dengan menggunakan analisa kualitatif (komparasi) untuk mengetahui kepatuhan santri dalam pelaksanaan tata tertib pondok pesantren di Desa Tikomwetan Kecamatan Jamblas Kabupaten Bara. Hal yang utama dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk mengukur yang kepuruhan semua bisnisnia suta kepiflakan mengacu pada kepuruhan

lengkap agar nyaman di huni.

Kata-kata kunci: Kebutuhan Sarana Prasarana Permukiman Tempat Penampungan Dan Relokasi Pengungsi.

lengkap agar nyaman di huni.

Kata-kata kunci: Kebutuhan Sarana Prasarana Permukiman Tempat Penampungan Dan Relokasi Pengungsi.

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir (skripsi) dengan judul " Identifikasi Kebutuhan Sarana Prasarana di Tempat Penampungan Pengungsi Akibat Konflik Sosial di Desa Jikumerasa, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru".

Penyusunan tugas akhir ini bertujuan sebagai langkah akhir untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat sarjana pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di Institut Teknologi Nasional Malang.

Dengan selesainya penyusunan tugas akhir ini penyusun menyadari sepenuhnya bahwa tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta arahan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penyusun berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Ibnu Sasongko, MT, selaku ketua jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.
2. Bapak Arif Setiawan, ST, MTP, selaku sekretaris jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.
3. Bapak Agung Witjaksono, ST, MTP, selaku dosen pembimbing 1
4. Ibu Ida Soewarni, ST, selaku dosen pembimbing 2
5. Bapak Ir. Soekarno Wahab, selaku dosen wali PL 02 angkatan 2002 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.
6. Teman-teman, kakak-kakak tingkat dan adik-adik tingkat serta semua pihak yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini.

Penyusun juga menyadari sebagai seorang mahasiswa, tiada sesuatu yang sempurna, demikian juga dengan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penyusun mengharapkan saran serta masukan dari pembaca.

Wassalamu'allaikum Wr.Wb

Malang, Agustus 2010

Penyusun

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir (skripsi) dengan judul " Identifikasi Kebutuhan Sarana Prasarana di Tempat Penampungan Pengungsi Akibat Konflik Sosial di Desa Jikumerasa. Kecamatan Namlea. Kabupaten Buru".

Penyusunan tugas akhir ini bertujuan sebagai langkah akhir untuk memenuhi syarat dalam menempuh derajat sarjana pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di Institut Teknologi Nasional Malang.

Dengan selesainya penyusunan tugas akhir ini penyusun menyadari sepenuhnya bahwa tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta arahan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penyusun bertermina kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Ibnu Sasongko. MT. selaku ketua jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.
2. Bapak Anif Sutiawan. ST. MTP. selaku sekretaris jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.
3. Bapak Agung Witjaksono. ST. MTP. selaku dosen pembimbing 1
4. Ibu Ida Sochwani. ST. selaku dosen pembimbing 2
5. Bapak Ir. Sockarno Wahab. selaku dosen wali PI. 02 angkatan 2002 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.
6. Teman-teman. kakak-kakak tingkat dan adik-adik tingkat serta semua pihak yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini.

Penyusun juga menyadari sebagai seorang manusiawa. tidak sesuatu yang sempurna. demikian juga dengan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu. dengan kerendahan hati penyusun mengharapkan saran serta masukan dari pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Malang. Agustus 2010

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi ..... **i**
Daftar Tabel ..... **iii**
Daftar Peta ..... **iv**
Daftar Diagram ..... **v**
Lampiran ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Perumusan Masalah 6
1.3 Tujuan dan Sasaran 7
1.3.1 Tujuan 7
1.3.2 Sasaran 8
1.4 Ruang Lingkup Studi 8
1.4.1 Lingkup Lokasi 8
1.4.2 Lingkup Materi 11
1.5 Tinjauan Pustaka 11
1.5.1 Definisi Judul Penelitian 11
1.5.2. Tinjauan Terhadap Masyarakat Pengungsi Akibat Konflik 12
1.5.2.1 Karakteristik Masyarakat 15
1.5.2.2.Karakteristik masyarakat pengungsi akibat konflik 16
1.5.2.3.Ciri-ciri masyarakat pengungsi akibat konflik 19
1.5.2.4.Faktor Pembagian sistem Lapisan masyarakat

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi i

Daftar Tabel iii

Daftar Peta iv

Daftar Diagram v

Lampiran vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Permasalahan Masalah 6

1.3 Tujuan dan Sasaran 7

1.3.1 Tujuan 7

1.3.2 Sasaran 8

1.4 Ruang Lingkup Studi 8

1.4.1 Lingkup Lokasi 8

1.4.2 Lingkup Materi 11

1.5 Tinjauan Pustaka 11

1.5.1 Definisi Judul Penelitian 11

1.5.2. Tinjauan Terhadap Masyarakat Pengungsi Akibat Konflik 12

1.5.2.1 Karakteristik Masyarakat 15

1.5.2.2.Karakteristik masyarakat pengungsi akibat konflik 16

1.5.2.3.Ciri-ciri masyarakat pengungsi akibat konflik 19

1.5.2.4.Faktor Pembagian sistem Lapisan masyarakat

baru akibat kerusuhan yang terjadi 20
1.5.2.5 Aspirasi dan Persepsi Masyarakat 21
1.5.2.6 Partisipasi Masyarakat 22
1.5.3 Kajian permukiman untuk masyarakat pengungsi 27
1.5.3.1.Kajian Perumahan dan Permukiman 28
1.5.3.2.Pengertian, tujuan dan sasaran pembangunan
perumahan dan permukiman 33
1.5.3.3.Pembangunan Perumahan dan Permukiman 34
1.5.3.4 Pemenuhan Kebutuhan Perumahan dan Pemukiman
Akibat Dampak dari Kerusuhan yang Terjadi 39
1.5.3.5 Relokasi Permukiman Untuk Masyarakat Pengungsi 41
1.6 Landasan Penelitian 42
1.6.1 Masyarakat Pengungsi 43
1.6.2 Teori Relokasi 43
1.6.3 Teori Permukiman 44
1.6.4 Teori Aspirasi 45
1.6.5 Variabel Penelitian 45
1.7. Metode Penelitian 47
1.7.1 Tahapan Persiapan 47
1.7.2 Tahapan Pengumpulan Data 47
1.7.3 Tahapan Analisa 50
1.8 Sistematika Pembahasan 54
1.9 Kerangka Pemikiran 55

BAB II TINJAUAN KONDISI KONFLIK DI KECAMATAN NAMLEA KABUPATEN BURU

2.1 Gambaran Eksternal Propinsi Maluku dan Kabupaten Buru 56
2.1.1 Gambaran Umum Propinsi Maluku 56
2.1 2 Gambaran Umum Kabupaten Buru 57

1.5.2.6 Partisipasi Masyarakat 22
1.5.3 Kajian permukiman untuk masyarakat pengungsi 27
1.5.3.1.Kajian Perumahan dan Permukiman 28
perumahan dan permukiman 33
1.5.3.3.Pembangunan Perumahan dan Permukiman 34
Akibat Dampak dari Kerusuhan yang Terjadi 39
1.5.3.5 Relokasi Permukiman Untuk Masyarakat Pengungsi 41
1.6 Landasan Penelitian 42
1.6.1 Masyarakat Pengungsi 43
1.6.2 Teori Relokasi 43
1.6.3 Teori Permukiman 44
1.6.4 Teori Aspirasi 45
1.6.5 Variabel Penelitian 45
1.7. Metode Penelitian 47
1.7.1 Tahapan Persiapan 47
1.7.2 Tahapan Pengumpulan Data 47
1.7.3 Tahapan Analisa 50
1.8 Sistematika Pembahasan 54
1.9 Keranglka Pemikiran 55

BAB II TINJAUAN KONDISI KONFLIK DI KECAMATAN NAMLEA KABUPATEN BURU

2.1 Gambaran Eksternal Propinsi Maluku dan Kabupaten Buru 56
2.1.1 Gambaran Umum Propinsi Maluku 56
2.1.2 Gambaran Umum Kabupaten Buru 57

2.1 3 Kependudukan 59
2.1.3.1Distribusi Presentase Penduduk Dan Kepadatan Per Km^2 Menurut Kecamatan 60
2.1.3.2Jumlah Masyarakat Pengungsi Di Kabupaten Buru 61
2.2 Gambaran Kondisi Kecamatan Namlea 62
2.2.1 Kependudukan 62
2.2.1.1Jumlah Masyarakat Pengungsi 64
2.2.1.2Jumlah Masyarakat Pengungsi di Barak-barak Penampungan 65
2.2.2 Sosial Ekonomi 66
2.2.3 Fasilitas Umum 66
2.2.3.1 Sarana Pendidikan 66
2.2.3.2 Sarana Peribadatan 67
2.2.3.3 Sarana Kesehatan 68
2.2.3.4 Perkantoran, Listrik, Telepon, Air Bersih 69
2.2.4 Data Sarana dan Prasarana Penunjang 70
2.2.4.1 Angkutan Umum 70
2.2.4.2 Prasarana dan Sarana Transportasi 70
2.2.4.3 Komunikasi 70
2.3 Gambaran Lokasi Studi Pasca Konflik 71
2.3.1 Gambaran Kondisi Rumah Pasca Konflik 71
2.3.2 Gambaran Tempat Penampungan Pengungsi di Desa Jikumerasa Kecamatan Namlea 73
2.3.2.1 Jumlah Masyarakat Pengungsi di Tempat Penampungan 74
2.3.2.2 Kondisi Sarana Prasarana di Tempat Penampungan 76
2.3.3 Gambaran Tempat Relokasi di Kota Namlea 80
2.3.3.1 Kondisi Sarana Yang Terdapat di Tempat Relokasi 82
2.3.3.2 Kondisi Prasarana Yang Terdapat di Tempat Relokasi 86
2.3.4 Karakteristik Sosial 88
2.3.4.1Asal penduduk 88

2.1.3 Kependudukan 59
2.1.3.1 Distribusi Presentase Penduduk Dan Kepadatan Per Km^2
Menurut Kecamatan 60
2.1.3.2 Jumlah Masyarakat Pengungsi Di Kabupaten Buru 61
2.2 Gambaran Kondisi Kecamatan Namlea 62
2.2.1 Kependudukan 62
2.2.1.1 Jumlah Masyarakat Pengungsi 64
2.2.1.2 Jumlah Masyarakat Pengungsi di Barak-barak Penampungan 65
2.2.2 Sosial Ekonomi 66
2.2.3 Fasilitas Umum 66
2.2.3.1 Sarana Pendidikan 66
2.2.3.2 Sarana Peribadatan 67
2.2.3.3 Sarana Kesehatan 68
2.2.3.4 Perkantoran, Listrik, Telepon, Air Bersih 69
2.2.4 Data Sarana dan Prasarana Penunjang 70
2.2.4.1 Angkutan Umum 70
2.2.4.2 Prasarana dan Sarana Transportasi 70
2.2.4.3 Komunikasi 70
2.3 Gambaran Lokasi Studi Pasca Konflik 71
2.3.1 Gambaran Kondisi Rumah Pasca Konflik 71
2.3.2 Gambaran Tempat Penampungan Pengungsi di Desa Jikumerasa
Kecamatan Namlea 73
2.3.2.1 Jumlah Masyarakat Pengungsi di Tempat Penampungan 74
2.3.2.2 Kondisi Sarana Prasarana di Tempat Penampungan 76
2.3.3 Gambaran Tempat Relokasi di Kota Namlea 80
2.3.3.1 Kondisi Sarana Yang Terdapat di Tempat Relokasi 82
2.3.3.2 Kondisi Prasarana Yang Terdapat di Tempat Relokasi 86
2.3.4 Karakteristik Sosial 88
2.3.4.1 Asal penduduk 88

2.3.4.2Jenis kegiatan sosial 89
2.3.5 Karakteristik ekonomi 91
2.3.5.1 Jenis Mata Pencaharian Masyarakat 91
2.3.5.2 Kemampuan masyarakat 92
2.3.6 Aspirasi Masyarakat Mengenai Relokasi Permukiman Untuk Masyarakat Pengungsi 94
2.3.6.1 Aspirasi Masyarakat Mengenai Lokasi Permukiman 95
2.3.6.2 Aspirasi Masyarakat Mengenai Sarana Umum 99
2.3.6.3Aspirasi Masyarakat Mengenai Ketersediaan Prasaran 101

BAB III ANALISA IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SARANA PRASARANA DI TEMPAT PENAMPUNGAN 103
3.1 Analisa Karakter Masyarakat 103
3.1.1 Analisa Karakter Masyarakat Pengungsi 103
3.1.2 Analisa Kegiatan Masyarakat 106
3.2 Analisa Aspirasi Masyarakat 112
3.2.1 Aspirasi Masyarakat Mengenai Relokasi Permukiman 112
3.2.2 Aspirasi Masyarakat Mengenai Lokasi Permukiman 114
3.2.2.1 Analisa Lokasi Dengan Pusat Kegiatan 116
3.2.2.2 Aspirasi Masyarakat Mengenai Jarak Tempat Relokasi ke Tempat Kerja 116
3.2.2.3 Aspirasi Masyarakat Mengenai Jarak Tempat Relokasi ke Daerah Pendidikan 118
3.2.2.4 Aspirasi Masyarakat Mengenai Jarak Tempat Relokasi ke Tempat Peribadatan 120
3.2.2.5 Aspirasi Masyarakat Mengenai Jarak Tempat Relokasi ke Fasilitas Kesehatan 122
3.2.2.6 Aspirasi Masyarakat Mengenai Jarak Tempat Relokasi ke Daearah Perdagangan dan Jasa 124

2.3.4.2 Jenis kegiatan sosial 89
2.3.5 Karakteristik ekonomi 91
2.3.5.1 Jenis Mata Pencaharian Masyarakat 91
2.3.5.2 Kemampuan masyarakat 92
2.3.6 Aspirasi Masyarakat Mengenai Rekolasi Permukiman Untuk
Masyarakat Pengungsi 94
2.3.6.1 Aspirasi Masyarakat Mengenai Lokasi Permukiman 95
2.3.6.2 Aspirasi Masyarakat Mengenai Sarana Umum 99
2.3.6.3 Aspirasi Masyarakat Mengenai Ketersediaan Prasaran 101

BAB III ANALISA IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SARANA PRASARANA DI TEMPAT PENAMPUNGAN 103

3.1 Analisa Karakter Masyarakat 103
3.1.1 Analisa Karakter Masyarakat Pengungsi 103
3.1.2 Analisa Kegiatan Masyarakat 106
3.2 Analisa Aspirasi Masyarakat 112
3.2.1 Aspirasi Masyarakat Mengenai Rekolasi Permukiman 112
3.2.2 Aspirasi Masyarakat Mengenai Lokasi Permukiman 114
3.2.2.1 Analisa Lokasi Dengan Pusat Kegiatan 116
3.2.2.2 Aspirasi Masyarakat Mengenai Jarak Tempat Rekolasi ke
Tempat Kerja 116
3.2.2.3 Aspirasi Masyarakat Mengenai Jarak Tempat Rekolasi ke
Daerah Pondidikan 118
3.2.2.4 Aspirasi Masyarakat Mengenai Jarak Tempat Rekolasi ke
Tempat Peribadatan 120
3.2.2.5 Aspirasi Masyarakat Mengenai Jarak Tempat Rekolasi ke
Fasilitas Kesehatan 122
3.2.2.6 Aspirasi Masyarakat Mengenai Jarak Tempat Rekolasi ke
Daerah Perdagangan dan Jasa 124

3.2.3 Analisa Ekonomi Masyarakat 126
3.2.3.1 Analisa Mata Pencaharian Masyarakat 126
3.2.3.2 Analisa Kemampuan Masyarakat..... 128
3.2.4 Analisa Aspirasi Mayarakat Mengenai Ketersediaan Sarana Umum 131
3.2.5. Aspirasi Masyarakat Mengenai Prasarana Umum Pada Tempat Relokasi 134
3.2.6. Aspirasi Masyarakat Mengenai Sarana Transportasi Pada Tempat Relokasi..... 135
3.3 Analisa Kondisi Sarana Prasarana di Tempat Penampungan dan Tempat Relokasi 136
3.3.1 Analisa Kondisi Sarana Prasarana di Tempat Penampungan..... 136
3.3.1.1 Analisa Kondisi Sarana di Tempat Penampungan 136
3.3.1.2 Analisa Kondisi Prasarana di Tempat Penampungan..... 139
3.3.2 Analisa Kondisi Sarana Prasarana di Tempat Relokasi 140
3.3.2.1 Analisa Kondisi Sarana di Tempat Relokasi..... 140
3.3.2.2 Analisa Kondisi Prasarana di Tempat Relokasi 143
3.3.3 Analisa Perbandingan Kondisi Sarana Prasarana di Tempat Penampungan Dan di Tempat Relokasi..... 150
3.3.4 Analisa Skala Tingkat Pelayanan..... 160
3.4 Analisa Kebutuhan Masyarakat Terhadap Sarana Prasarana di Tempat Penampungan dan Tempat Relokasi 162
3.4.1. Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana di Tempat Relokasi 162
3.4.2 Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana di Tempat Penampungan 166
3.4.3 Skala Tingkat Pelayanan Sarana di Tempat Penampungan..... 170

BAB IV PENUTUP **175**
4.1 Kesimpulan..... 175
4.2 Rekomendasi 177

3.2.3 Analisa Ekonomi Masyarakat 126
3.2.3.1 Analisa Mata Pencaharian Masyarakat 126
3.2.3.2 Analisa Kemampuan Masyarakat 128
3.2.4 Analisa Aspirasi Masyarakat Mengenai Ketersediaan Sarana Umum 131
3.2.5. Aspirasi Masyarakat Mengenai Prasarana Umum Pada Tempat Relokasi 134
3.2.6. Aspirasi Masyarakat Mengenai Sarana Transportasi Pada
Tempat Relokasi 135
3.3 Analisa Kondisi Sarana Prasarana di Tempat Penampungan dan
Tempat Relokasi 136
3.3.1 Analisa Kondisi Sarana Prasarana di Tempat Penampungan 136
3.3.1.1 Analisa Kondisi Sarana di Tempat Penampungan 136
3.3.1.2 Analisa Kondisi Prasarana di Tempat Penampungan 139
3.3.2 Analisa Kondisi Sarana Prasarana di Tempat Relokasi 140
3.3.2.1 Analisa Kondisi Sarana di Tempat Relokasi 140
3.3.2.2 Analisa Kondisi Prasarana di Tempat Relokasi 143
3.3.3 Analisa Perbandingan Kondisi Sarana Prasarana di Tempat Penampungan
Dan di Tempat Relokasi 150
3.3.4 Analisa Skala Tingkat Pelayanan 160
3.4 Analisa Kebutuhan Masyarakat Terhadap Sarana Prasarana di
Tempat Penampungan dan Tempat Relokasi 162
3.4.1. Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana di Tempat Relokasi 162
3.4.2 Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana di Tempat Penampungan 166
3.4.3 Skala Tingkat Pelayanan Sarana di Tempat Penampungan 170

BAB IV PENUTUP 175
4.1 Kesimpulan 175
4.2 Rekomendasi 177

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Variabel Penelitian 45
Tabel 1.2 Metode Analisa Karakter Masyarakat 51
Tabel 1.3 Proses Analisa Aspirasi Masyarakat 52
Tabel 1.4 Proses Analisa Kondisi Sarana dan Prasarana Umum 54
Tabel 2.1 Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Buru pada tahun 2008 59
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten Buru Tahun 2008 60
Tabel 2.3 Distribusi Presentase Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Per Km^2 Menurut Kecamatan Tahun 2008 61
Tabel 2.4 Jumlah masyarakat pengungsi di Kabupaten Buru tahun 2008 61
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk di Kecamatan Namlea Tahun 2008 64
Tabel 2.6 Jumlah Masyarakat Pengungsi Kecamatan Namlea Tahun 2008 65
Tabel 2.7 Jumlah Masyarakat Pengungsi di Tempat Penampungan Tahun 2008 65
Tabel 2.8 Jumlah Sarana Ekonomi Di Kecamatan Namlea Tahun 2008 66
Tabel 2.9 Jumlah Sarana Pendidikan Di Kecamatan Namlea Tahun 2008..... 67
Tabel 2.10 Jumlah Sarana Peribadatan Di Kecamatan Namlea Pada Tahun 2008 68
Tabel 2.11 Jumlah Sarana Kesehatan Yang Terdapat Di Kecamatan Namlea Pada tahun 2008 69
Tabel 2.12 Kondisi Rumah Pasca Konflik..... 71
Tabel 2.13 Kondisi Tempat Tinggal di Tempat Pengungsian..... 73
Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Tempat Penampungan Tahun 2008..... 74
Tabel 2.15 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Tempat Penampungan Tahun 2008..... 75
Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Tempat Penampungan Tahun 2008.....76
Tabel 2.17 Jenis Sarana Yang Terdapat di Tempat Penampungan Pengungsi di

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Variabel Penelitian 45

Tabel 1.2 Metode Analisa Karakter Masyarakat 51

Tabel 1.3 Proses Analisa Aspirasi Masyarakat 52

Tabel 1.4 Proses Analisa Kondisi Sarana dan Prasarana Umum 54

Tabel 2.1 Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Buru pada tahun 2008 59

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten Buru Tahun 2008 60

Tabel 2.3 Distribusi Prosentase Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Per Km^2
Menurut Kecamatan Tahun 2008 61

Tabel 2.4 Jumlah masyarakat pengungsi di Kabupaten Buru tahun 2008 61

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk di Kecamatan Namlea Tahun 2008 64

Tabel 2.6 Jumlah Masyarakat Pengungsi Kecamatan Namlea Tahun 2008 65

Tabel 2.7 Jumlah Masyarakat Pengungsi di Tempat Penampungan Tahun 2008 65

Tabel 2.8 Jumlah Sarana Ekonomi Di Kecamatan Namlea Tahun 2008 66

Tabel 2.9 Jumlah Sarana Pendidikan Di Kecamatan Namlea Tahun 2008 67

Tabel 2.10 Jumlah Sarana Peribadatan Di Kecamatan Namlea Pada Tahun 2008 68

Tabel 2.11 Jumlah Sarana Kesehatan Yang Terdapat Di Kecamatan Namlea Pada
tahun 2008 69

Tabel 2.12 Kondisi Rumah Pasca Konflik 71

Tabel 2.13 Kondisi Tempat Tinggal di Tempat Pengungsian 73

Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Tempat Penampungan
Tahun 2008 74

Tabel 2.15 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Tempat Penampungan
Tahun 2008 75

Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Tempat Penampungan
Tahun 2008 76

Tabel 2.17 Jenis Sarana Yang Terdapat di Tempat Penampungan Pengungsi di

Desa Jikumerasa 78
Tabel 2.18 Jenis Prasarana Yang Terdapat di Tempat Penampungan Pengungsi di Desa Jikumerasa 79
Tabel 2.19 Jenis Sarana Yang Terdapat di Tempat Relokasi di Kota Namlea 85
Tabel 2.20 Jenis Prasarana Yang Terdapat di Tempat Relokasi di Kota Namlea 87
Tabel 2.21 Asal Penduduk 88
Tabel 2.22 Alasan Masyarakat Tinggal Di Lokasi Studi 89
Tabel 2.23 Hubungan Ketetanggaan Antara Warga 90
Tabel 2.24 Faktor penghambat interaksi Antar warga 90
Tabel 2.25 Jenis mata pencaharian masyarakat 91
Tabel 2.26 Pendapatan Perbulan KK 92
Tabel 2.27 Pengeluaran Perbulan KK 93
Tabel 2.28 Pendapat Masyarakat Mengenai Relokasi 94
Tabel 2.29 Aspirasi Masyarakat Mengenai Lokasi Permukiman 95
Tabel 2.30 Aspirasi Mengenai Jarak Ke Tempat Kerja 96
Tabel 3.1 Jumlah Masyarakat Pengungsi 104
Tabel 3.2 Kegiatan Masyarakat Di Tempat Pengungsian 109
Tabel 3.3 Aspirasi Masyarakat Mengenai Relokasi Permukiman 113
Tabel 3.4 Aspirasi Masyarakat Mengenai Lokasi Permukiman 115
Tabel 3.5 Jarak Tempat Relokasi dengan Tempat Kerja 117
Tabel 3.6 Skor Jarak Relokasi ke Tempat Kerja 118
Tabel 3.7 Aspirasi Jarak Tempat Relokasi dengan Daerah Pendidikan 119
Tabel 3.8 Skor Jarak Relokasi ke Daerah Pendidikan 120
Tabel 3.9 Aspirasi Jarak Tempat Relokasi dengan Tempat Peribadatan 121
Tabel 3.10 Skor Jarak Relokasi ke Daerah Peribadatan 122
Tabel 3.11Aspirasi Jarak Tempat Relokasi dengan Fasilitas Kesehatan 123
Tabel 3.12 Skor Jarak Relokasi Dengan Fasilitas Kesehatan 124
Tabel 3.13 Aspirasi Jarak Tempat Relokasi Ke Daerah Perdagangan dan Jasa 125
Tabel 3.14 Skor Jarak Relokasi Dengan Daerah Perdagangan dan Jasa 126

Desa Jikumerasa 78

Tabel 2.18 Jenis Prasarana Yang Terdapat di Tempat Penampungan Pengungsi di Desa Jikumerasa 79

Tabel 2.19 Jenis Sarana Yang Terdapat di Tempat Relokasi di Kota Namlea 85

Tabel 2.20 Jenis Prasarana Yang Terdapat di Tempat Relokasi di Kota Namlea 87

Tabel 2.21 Asal Penduduk 88

Tabel 2.22 Alasan Masyarakat Tinggal Di Lokasi Studi 89

Tabel 2.23 Hubungan Ketetanggaan Antara Warga 90

Tabel 2.24 Faktor penghambat interaksi Antar Warga 90

Tabel 2.25 Jenis mata pencaharian masyarakat 91

Tabel 2.26 Pendapatan Perbulan KK 92

Tabel 2.27 Pengeluaran Perbulan KK 93

Tabel 2.28 Pendapat Masyarakat Mengenai Relokasi 94

Tabel 2.29 Aspirasi Masyarakat Mengenai Lokasi Permukiman 95

Tabel 2.30 Aspirasi Mengenai Jarak Ke Tempat Kerja 96

Tabel 3.1 Jumlah Masyarakat Pengungsi 104

Tabel 3.2 Kegiatan Masyarakat Di Tempat Pengungsian 109

Tabel 3.3 Aspirasi Masyarakat Mengenai Relokasi Permukiman 113

Tabel 3.4 Aspirasi Masyarakat Mengenai Lokasi Permukiman 115

Tabel 3.5 Jarak Tempat Relokasi dengan Tempat Kerja 117

Tabel 3.6 Skor Jarak Relokasi ke Tempat Kerja 118

Tabel 3.7 Aspirasi Jarak Tempat Relokasi dengan Daerah Pendidikan 119

Tabel 3.8 Skor Jarak Relokasi ke Daerah Pendidikan 120

Tabel 3.9 Aspirasi Jarak Tempat Relokasi dengan Tempat Peribadatan 121

Tabel 3.10 Skor Jarak Relokasi ke Daerah Peribadatan 122

Tabel 3.11Aspirasi Jarak Tempat Relokasi dengan Fasilitas Kesehatan 123

Tabel 3.12 Skor Jarak Relokasi Dengan Fasilitas Kesehatan 124

Tabel 3.13 Aspirasi Jarak Tempat Relokasi Ke Daerah Perdagangan dan Jasa 125

Tabel 3.14 Skor Jarak Relokasi Dengan Daerah Perdagangan dan Jasa 126

Tabel 3.15 Analisa Mata Pencaharian Masyarakat 127
Tabel 3.16 Analisa Tingkat Pendapatan Masyarakat 128
Tabel 3.17 Tingkat Pengeluaran Masyarakat 130
Tabel 3.18 Tingkat Pemilihan Aspirasi Masyarakat Mengenai Sarana Umum Yang Harus Tersedia di Tempat Relokasi 132
Tabel 3.19 Tingkat Pemilihan Aspirasi Masyarakat Mengenai Prasarana yang Harus Tersedia Di Tempat Relokasi 135
Tabel 3.20 Hasil Perbandingan Sarana di Tempat Penampungan dan Tempat Relokasi..... 152
Tabel 3.21 Hasil Perbandingan Prasarana di Tempat Penampungan dan Tempat Relokasi..... 156
Tabel 3.22 Skala Tingkat Pelayanan di Tempat Penampungan dan Tempat Relokasi 163
Tabel 3.23 Kebutuhan Sarana di Tempat Penampungan 167
Tabel 3.21 Proyeksi Kebutuhan Prasarana di Tempat Penampungan..... 169
Tabel 3.22 Penentuan Skala Pelayanan Sarana di Tempat Penampungan 172

Tabel 3.12 Analisa Mata Pencaharian Masyarakat 127
Tabel 3.13 Analisa Tingkat Pendapatan Masyarakat 128
Tabel 3.14 Tingkat Pengetahuan Masyarakat 130
Tabel 3.15 Tingkat Pemahaman Aspirasi Masyarakat Mengenai Sarana Umum Yang
Harus Tersedia di Tambat Kolokasi 132
Tabel 3.16 Tingkat Pemahaman Aspirasi Masyarakat Mengenai Prasarana Yang
Harus Tersedia Di Tambat Kolokasi 132
Tabel 3.17 Hasil Perhitungan Sarana di Tambat Pemanfaatan dan Tambat Kolokasi 135
Tabel 3.18 Hasil Perhitungan Prasarana di Tambat Pemanfaatan dan
Tambat Kolokasi 139
Tabel 3.19 Skala Tingkat Pelayanan di Tambat Pemanfaatan dan Tambat Kolokasi 143
Tabel 3.20 Kapasitas Sarana di Tambat Pemanfaatan 147
Tabel 3.21 Proyeksi Kapasitas Prasarana di Tambat Pemanfaatan 150
Tabel 3.22 Perhitungan Skala Pelayanan Sarana di Tambat Pemanfaatan 153

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 2.1 Kondisi Rumah Pasca Konflik 72
Grafik 2.2 Kondisi Tempat Tinggal Di Tempat Pengungsian 73
Grafik 2.3 Alasan Masyarakat Tinggal Di Lokasi Studi 89
Grafik 2.4 Hubungan Ketetanggaan Antara Warga 90
Grafik 2.5 Jenis mata pencaharian masyarakat 91
Grafik 2.6 Pendapatan Perbulan KK 92
Grafik 2.7 Pengeluaran Perbulan KK 93
Grafik 2.8 Pendapat Masyarakat Mengenai Relokasi 94
Grafik 2.9 Aspirasi Masyarakat Mengenai Lokasi Permukiman 95
Grafik 2.10 Aspirasi Masyarakat Mengenai Ketersediaan Fasilitas Umum 96
Grafik 3.1 Jumlah Masyarakat Pengungsi Di Kecamatan Namlea Pada Tahun 2000-2007 105
Grafik 3.2 Aspirasi Masyarakat Mengenai Relokasi Permukiman 113
Grafik 3.3 Aspirasi Mengenai Lokasi Permukiman Menurut Aspirasi Masyarakat 115
Grafik 3.4 Aspirasi Jarak Tempat Relokasi Ke Tempat Kerja 118
Grafik 3.5 Aspirasi Jarak Tempat Relokasi Ke Daerah Pendidikan 120
Grafik 3.6 Aspirasi Jarak Tempat Relokasi Ke Daerah Peribadatan 121
Grafik 3.7 Aspirasi Jarak Tempat Relokasi Dengan Fasilitas Kesehatan 123
Grafik 3.8 Aspirasi Jarak Tempat Relokasi Dengan Daerah Perdagangan dan Jasa 125
Grafik 3.9 Analisa Mata Pencaharian Masyarakat 128
Grafik 3.10 Analisa Tingkat Pendapatan Masyarakat Pengungsi 129
Grafik 3.11 Analisa Tingkat Pengeluaran Masyarakat Pengungsi 130
Grafik 3.12 Analisa Aspirasi Masyarakat Mengenai Ketersediaan Fasilitas Umum 133

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 2.1 Kondisi Rumah Pasca Konflik 72

Grafik 2.2 Kondisi Tempat Tinggal Di Tempat Pengungsian 75

Grafik 2.3 Alasan Masyarakat Tinggal Di Lokasi Studi 89

Grafik 2.4 Hubungan Ketetanggaan Antara Warga 90

Grafik 2.5 Jenis mata pencaharian masyarakat 91

Grafik 2.6 Pendapatan Perbulan KK 92

Grafik 2.7 Pengeluaran Perbulan KK 93

Grafik 2.8 Pendapat Masyarakat Mengenai Relokasi 94

Grafik 2.9 Aspirasi Masyarakat Mengenai Lokasi Permukiman 95

Grafik 2.10 Aspirasi Masyarakat Mengenai Ketersediaan Fasilitas Umum 96

Grafik 3.1 Jumlah Masyarakat Pengungsi Di Kecamatan Namlea Pada Tahun
2000-2007 105

Grafik 3.2 Aspirasi Masyarakat Mengenai Relokasi Permukiman 113

Grafik 3.3 Aspirasi Mengenai Lokasi Permukiman Menurut Aspirasi
Masyarakat 115

Grafik 3.4 Aspirasi Jarak Tempat Relokasi Ke Tempat Kerja 118

Grafik 3.5 Aspirasi Jarak Tempat Relokasi Ke Daerah Pendidikan 120

Grafik 3.6 Aspirasi Jarak Tempat Relokasi Ke Daerah Perdagangan 121

Grafik 3.7 Aspirasi Jarak Tempat Relokasi Dengan Fasilitas Kesehatan 123

Grafik 3.8 Aspirasi Jarak Tempat Relokasi Dengan Daerah Perdagangan dan Jasa 125

Grafik 3.9 Analisa Mata Pencaharian Masyarakat 128

Grafik 3.10 Analisa Tingkat Pendapatan Masyarakat Pengungsi 129

Grafik 3.11 Analisa Tingkat Pengeluaran Masyarakat Pengungsi 130

Grafik 3.12 Analisa Aspirasi Masyarakat Mengenai Ketersediaan Fasilitas
Umum 133

DAFTAR PETA

Halaman

Peta 1.1 Peta Orientasi Studi 9
Peta 1.2 PetaLokasi Studi 10
Peta 2.1 Peta Kabupaten Buru 68
Peta 2.2 Peta Lokasi Studi 63
Peta 2.3 Peta Tempat Penampungan Di Desa Jikumerasa 77
Peta 2.4 Peta Tempat Relokasi 81
Peta 3.1 Peta Sarana Pendidikan di Tempat Relokasi 145
Peta 3.2 Peta Ketersediaan Sarana Perkantoran 146
Peta 3.3 Peta Ketersediaan Sarana Peribadatan 147
Peta 3.4 Peta Ketersediaan Sarana Kesehatan 148
Peta 3.2 Peta Ketersediaan Sarana Perdagangan dan Jasa 149

DAFTAR PETA

Halaman

Peta 1.1 Peta Orientasi Studi 9

Peta 1.2 Peta Lokasi Studi 10

Peta 2.1 Peta Kabupaten Buru 68

Peta 2.2 Peta Lokasi Studi 69

Peta 2.3 Peta Tempat Penambangan Di Desa Jikumerasa 77

Peta 2.4 Peta Tempat Relokasi 81

Peta 3.1 Peta Sarana Pendidikan di Tempat Relokasi 145

Peta 3.2 Peta Keteresediaan Sarana Perkantoran 146

Peta 3.3 Peta Keteresediaan Sarana Peribadatan 147

Peta 3.4 Peta Keteresediaan Sarana Kesehatan 148

Peta 3.2 Peta Keteresediaan Sarana Perdagangan dan Jasa 149

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Rumah Penduduk Yang Rata Dengan Tanah 3
Gambar 1.2 Rumah Penduduk yang Mengalami Kerusakan Berat Sehingga Tidak Bisa Ditempati Lagi 3
Gambar 1.3 Rumah Penduduk Yang Dibakar 3
Gambar 2.1 Tempat Tinggal Warga Yang Dibakar Pada Saat Kerusuhan Terjadi 72
Gambar 2.2 Kondisi Permukiman Yang Hancur Pada Saat Kerusuhan Terjadi 72
Gambar 2.3 Kondisi Tempat Tinggal Penduduk Yang Rusak Akibat Kerusuhan Yang Terjadi 72
Gambar 2.4 Kondisi Tempat Tinggal Penduduk Yang Rata Dengan Tanah Dan Tidak Bisa Ditinggali Lagi 72
Gambar 2.5 Kondisi Masyarakat Di Tempat Pengungsian 74
Gambar 2.6 Ruko Yang Dijadikan Tempat Pengungsian Oleh Masyarakat 74
Gambar 2.7 Tempat Relokasi di Kota Namlea 80
Gambar 2.8 Sarana Pendidikan Yang Terdapat di Kota Namlea 83
Gambar 2.9 Sarana Perkantoran Yang Terdapat di Kota Namlea 83
Gambar 2.10 Sarana Peribadatan Yang Terdapat di Kota Namlea 84
Gambar 2.11 Sarana Kesehatan Yang Terdapat di Kota Namlea 84
Gambar 2.12 Sarana Perdagangan dan Jasa Yang Terdapat di Tempat Relokasi dan di Kota Namlea 85

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Rumah Penduduk Yang Rata Dengan Tanah 3

Gambar 1.2 Rumah Penduduk yang Mengalami Kerusakan Berat Sehingga Tidak

Bisa Ditempati Lagi 3

Gambar 1.3 Rumah Penduduk Yang Dibakar 5

Gambar 2.1 Tempat Tinggal Warga Yang Dibakar Pada Saat Kerusuhan Terjadi 72

Gambar 2.2 Kondisi Permukiman Yang Hancur Pada Saat Kerusuhan Terjadi 72

Gambar 2.3 Kondisi Tempat Tinggal Penduduk Yang Rusak Akibat Kerusuhan

Yang Terjadi 72

Gambar 2.4 Kondisi Tempat Tinggal Penduduk Yang Rata Dengan Tanah Dan Tidak

Bisa Ditinggali Lagi 72

Gambar 2.5 Kondisi Masyarakat Di Tempat Pengungsian 74

Gambar 2.6 Ruko Yang Dijadikan Tempat Pengungsian Oleh Masyarakat 74

Gambar 2.7 Tempat Relokasi di Kota Ambon 80

Gambar 2.8 Sarana Pendidikan Yang Terdapat di Kota Ambon 83

Gambar 2.9 Sarana Perkantoran Yang Terdapat di Kota Ambon 83

Gambar 2.10 Sarana Peribadatan Yang Terdapat di Kota Ambon 84

Gambar 2.11 Sarana Kesehatan Yang Terdapat di Kota Ambon 84

Gambar 2.12 Sarana Perdagangan dan Jasa Yang Terdapat di Tempat Relokasi

dan di Kota Ambon 85

DAFTAR DIAGRAM

Halaman

Diagram 1.1 Kerangka Pemikiran 65

DAFTAR DIAGRAM

Halaman

Diagram 1.1 Kerangka Pemikiran 65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota adalah pusat berkumpulnya berbagai lapisan masyarakat baik dari segi profesi, tingkat pendidikan hingga perbedaan budaya (adat istiadat) yang dimiliki oleh masyakat tersebut. Perbedaan ini akan nyata dalam gagasan-gagasan dan hasil karya yang akhirnya dituangkan melalui interaksi antara individu dengan kelompok. Perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, adat dan kedaerahan tersebut seringkali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang bersifat *majemuk*. Suatu istilah yang awalnya diperkenalkan oleh *Furnivall* untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda.

Masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda menurut *Furnivall,* adalah merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural-societies*), yakni suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain didalam suatu kesatuan politik.[1] Kemajemukan ini merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa yang berpotensi sumber devisa bagi Indonesia. Akan tetapi, adakalanya perbedaan bisa menjadi pencetus permasalahan didalam masyarakat. Seperti beberapa kejadian yang terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini antara lain akibat adanya persaingan didalam masyarakat baik dibidang sosial, ekonomi maupun politik. Akibatnya akan muncul apa yang disebut sebagai kerusuhan atau konflik yang belakangan ini kerap terjadi disebagian besar Wilayah di Indonesia dengan latar belakang etnik dan Agama.

Kota Ambon dengan wilayah perkotaan utama Maluku dan tempat tindak kekerasan terkonsentrasi selama konflik, memiliki luas wilayah 377 km2 dan jumlah penduduk 206.210 jiwa. Kota ini terbelah menurut garis agama, dengan

---

[1] J.S. Furnivall, Netherlands India: A Study Of Plural Economy, Cambridge at The University Press, 1967, hal 446

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota adalah pusat berkumpulnya berbagai lapisan masyarakat baik dari segi profesi, tingkat pendidikan hingga perbedaan budaya (adat istiadat) yang dimiliki oleh masyakat tersebut. Perbedaan ini akan nyata dalam gaya-gaya dan hasil karya yang akhirnya ditunjukan melalui interaksi antara individu dengan kelompok. Perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, adat dan kedaerahan tersebut seringkali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk. Suatu istilah yang awalnya diperkenalkan oleh Furnivall untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda.

Masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda menurut Furnivall adalah merupakan suatu masyarakat majemuk (plural-society), yakni suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain didalam suatu kesatuan politik.[1] Kemajemukan ini merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa yang berpotensi sumber devisa bagi Indonesia. Akan tetapi, adakalanya perbedaan bisa menjadi pencetus permasalahan didalam masyarakat. Seperti beberapa kejadian yang terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini antara lain akibat adanya persaingan didalam masyarakat baik dibidang sosial, ekonomi maupun politik. Akibatnya akan muncul apa yang disebut sebagai kerusuhan atau konflik yang bolakangan ini kerap terjadi disebagian besar Wilayah di Indonesia dengan latar belakang etnik dan Agama.

Kota Ambon dengan wilayah perkotaan utama Nalulu dan tempat tindak kekerasan terkonsentrasi selama konflik, memiliki luas wilayah 377 km2 dan jumlah penduduk 206.210 jiwa. Kota ini terbelah menurut garis agama, dengan

---

[1] J.S. Furnivall, Netherlands India: A Study Of Plural Economy, (Cambridge at The University Press, 1967, hal 446

kawasan-kawasan tertentu hanya berpenduduk orang Kristiani atau Muslim saja. Sebagaimana kita ketahui bersama, sejak awal 1999 terjadi konflik sosial di Ambon yang kemudian menyebar hampir ke seluruh pelosok Maluku. Konflik ini menempatkan orang Islam—yang dalam bahasa setempat disebut Acang (dari kata Hasan) berhadapan dengan orang Kristen yang biasa dipanggil Obet (dari kata Robert). Dalam konflik ini, kelompok Acang menguasai permukiman di daerah pantai dan dataran rendah. Sementara kelompok Obet menguasai dataran tinggi dan perbukitan. Rumah, toko, dan segala bangunan milik kelompok Obet yang dikuasai kelompok Acang saat itu, sebagian besar habis dijarah dan dibakar. Demikian pula sebaliknya, bangunan dan harta kekayaan kelompok Acang yang ada di daerah kekuasaan Obet, sebagian besar habis dijarah dan dibakar. Akibatnya, dapat kita saksikan, antara lain ratusan bahkan ribuan rumah penduduk dan toko dibakar. Sarana dan prasarana dasar, seperti kantor pemerintah, sekolah, jaringan telkom, jaringan PAM, juga menjadi sasaran.

Hingga kini masih banyak terlihat puing-puing gedung dan rumah yang pernah terbakar. Gedung dan rumah yang pernah terbakar umumnya tidak segera diperbaiki karena para pemiliknya masih mempertimbangkan situasi keamanan. Sampah juga banyak berserakan hampir di setiap sudut kota. Got-got rusak, saluran PAM masih banyak yang belum diperbaiki, demikan pula jaringan telpon kabel. Pengemis juga banyak bermunculan. Pos-pos keamanan (tentara dan Brimob) masih dijumpai di berbagai sudut kota. Beberapa kelompok masyarakat mengaku masih menyimpan dendam terhadap yang lain. Masyarakat kini tinggal terkotak-kotak, berdasarkan kelompok dan golongan. Kelompok Obet tinggal di wilayah-wilayah dataran tinggi atau daerah atas, sementara kelompok Acang di wilayah dataran rendah/dekat pantai. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi antar kelompok sudah berjalan normal. Tapi, untuk tinggal berbaur dengan kelompok yang berbeda, masih dirasakan kurang "nyaman". Etnis tertentu, terutama Cina yang umumnya bekerja sebagai pedagang dengan modal besar, memilih strategi menunggu situasi kondusif. Tanah dan rumah mereka tidak dijual, tapi dititipkan pada orang lain, aparat, atau tokoh masyarakat untuk menjaganya. Para penjaga ini diuntungkan dari dua sisi. Yaitu, dari pemilik rumah, mereka mendapat uang

kawasan-kawasan tertentu hanya berpenduduk orang Kristiani atau Muslim saja. Sebagaimana kita ketahui bersama, sejak awal 1999 terjadi konflik sosial di Ambon yang kemudian menyebar hampir ke seluruh pelosok Maluku. Konflik ini mencemplakan orang Islam - yang dalam bahasa setempat disebut Acang (dari kata Hasan) berhadapan dengan orang Kristen yang biasa dipanggil Obet (dari kata Robert). Dalam konflik ini, kelompok Acang mengusasi permukiman di daerah pantai dan dataran rendah. Sementara kelompok Obet menguasai dataran tinggi dan perbukitan. Rumah, toko, dan segala bangunan milik kelompok Obet yang dikuasai kelompok Acang saat itu sebagian besar habis dijarah dan dibakar. Demikian pula sebaliknya, bangunan dan harta kekayaan kelompok Acang yang ada di daerah kekuasaan Obet, sebagian besar habis dijarah dan dibakar. Akibatnya, dapat kita saksikan, antara lain rutusan bahkan ribuan rumah penduduk dan toko dibakar. Sarana dan prasarana dasar, seperti kantor pemerintah, sekolah, jaringan telkom, jaringan PAM, juga menjadi sasaran.

Hingga kini masih banyak terlihat puing-puing gedung dan rumah yang pernah terbakar. Gedung dan rumah yang pernah terbakar umumnya tidak segera diperbaiki karena para pemilknya masih mempertimbangkan situasi kemanan. Sampah juga banyak berserakan hampir di setiap sudut kota. (lot-got mask, saluran PAM masih banyak yang belum diperbaiki, demikian pula jaringan telpon kabel. Pengemis juga banyak bermunculan. Pos-pos keamanan (tentara dan Brimob) masih dijumpai di berbagai sudut kota. Sebenarpa kelompok masyarakat mengaku masih menyimpan dendam terhadap yang lain. Masyarakat kini tinggal terkotak-kotak, berdasarkan kelompok dan golongan. Kelompok Obet tinggal di wilayah-wilayah dataran tinggi atau daerah atas, sementara kelompok Acang di wilayah dataran rendah/dekat pantai. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi antar kelompok sudah berjalan normal. Tapi, untuk tinggal berbaur dengan kelompok yang berbeda, masih dirasakan kurang "nyaman". Hanis tertentu, terutama Cina yang umumnya bekerja sebagai pedagang dengan modal besar, memilih strategi menunggu situasi kondusif. Tanah dan rumah mereka tidak dijual, tapi ditinggalkan pada orang lain, apatur, atau tokoh masyarakat untuk menjaganya. Para pengusaha ini diuntungkan dari dua sisi. Yaitu, dari pemilik rumah, mereka mendapat uang

jaga. Jika ada pendatang yang mau menempati rumah (bekas terbakar) tersebut, mereka pun mendapat uang sewa tambahan.

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

Keterangan Gambar:
Gambar 1 : Rumah Penduduk Yang rata dengan tanah
Gambar 2: Rumah Penduduk yang mengalami kerusakan berat sehingga tidak bisa ditempati lagi
Gambar 3: Rumah Penduduk yang dibakar

Kerusuhan di wilayah Buru Utara pada hari Rabu 22 Desember 1999, yang terjadi di wilayah Waenibe, Waekose & Waepoti, dikabarkan berawal dari& perselisihan antar dua karyawan PT.Wainebe Wood Industry (WWI) yang kebetulan masing-masing beragama Islam dan Kristen. Buntut dari perselisihan ini adalah aksi kekerasan individual yang kemudian berubah menjadi aksi kekerasan massal. Pada hari itu juga kontak kekerasan melebar ke Namlea, ibukota kecamatan Buru Utara, yang berjarak kurang lebih 1 jam perjalanan dari Waenibe. Diawali kurang lebih 30 rumah dirusak, massa kemudian membakar 7 rumah diantaranya dan 1 buah gedung Ibadah. Dikabarkan, estimasi rumah yang dihancurkan/dibakar mencapai 200-an. Akibat kekerasaan massa ini, situasi Namlea menjadi tegang.

Pemandangan bangunan yang hancur atau terbakar adalah bukti nyata yang menjadi saksi atas goretan emosi manusia-manusia yang ditimpakan padanya, meski yang menerima akibatnya bukan hanya fisik bangunan, tapi juga

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

Kerusuhan di wilayah Ituri Utara pada hari Rabu 22 Desember 1999, yang terjadi di wilayah *Mandro*, *Wadelose* & *Wacopoti*, dilakukan bersenjata dan/& perselisihan antar dua kelompok PT.*Wainebe Wood* Industry (*WWI*) yang kebentuk masing-masing berupaya Islam dan Kristen. Bentuk dari perselisihan ini adalah aksi kekerasan individual yang kemudian berubah menjadi aksi kekerasan massal. Pada hari itu juga kontak kekerasan meledak ke Nambea. Ibukota kecamatan Ituri Utara, yang berjarak kurang lebih 1 jam perjalanan dari *Wanebe*. Diawali kurang lebih 30 rumah dirusak, massa kemudian membakar 7 rumah dinantaranya dan 1 buah gedung Ibadah. Dikabarkan, setimasi rumah yang dibancurkan/dibakar mencapai 200-an. Akibat kekerasaan massa ini, situasi Nambea mencekam tegang.

Pemandangan berguguan yang hancur atau terbakar adalah bukti nyata yang menjadi saksi atas gorden cinosi manusia-manusia yang ditimpakan padanya, meski yang menerima akibatnya bukan hanya fisik bergunan, tapi juga

wilayah yang ditempati. Karena itu, pada saat itu, sektor konstruksi di kabupaten ini mengalami kejatuhan yang cukup berarti. Pembangunan tak berjalan. Akibatnya, nilai ekonomis lapangan usaha ini sangat kecil. Walaupun bukan andalan kegiatan ekonomi, daerah yang juga populer sebagai penghasil minyak kayu putih ini cukup merasakan kehilangan dari lapangan usaha konstruksi. Pada awal berdiri sebagai daerah otonom tahun 1999, perputaran uang dari lapangan usaha ini sekitar 14 persen.

Adapun faktor-faktor utama pemicu konflik sosial di Maluku, khususnya di Kabupaten Buru berdasarkan laporan komisi penyelidik pelanggaran HAM dan mediasi di Maluku, khususnya di Kabupaten Buru antara lain:

1. Kesenjangan ekonomi antara pendatang dan penduduk asli. Pada umumnya pendatang yang beretnis Bugis, Buton, Makassar, Sumatera dan Jawa lebih berhasil dibidang ekonomi karena memiliki kemampuan dalam memanfaatkan peluang yang ada, disamping adanya bantuan pemerintah melalui program transmigrasi.
2. Dugaan provokasi dari luar
3. Sikap tidak netral sebagian aparat keamanan dan oknum pemerintah daerah
4. Sentimen agama dan rasa dendam.

Akibat kerusuhan tersebut banyak masyarakat yang mengungsi baik ke luar wilayah Maluku maupun di dalam Maluku sendiri. Sebanyak 595.000 jiwa mengungsi ke Provinsi-provinsi lain, sedangkan 330.000 jiwa mengungsi ke Maluku Utara dan Maluku Tengah. Walaupun penanganan pengungsi telah dilakukan oleh Pemerintah Maluku dari berbagai pihak, seperti menyediakan tempat tinggal sementara sampai memukimkan kembali masyarakat korban kerusuhan namun hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Karena memukimkan kembali masyarakat korban kerusuhan menimbulkan konsekuensi baru yaitu terjadinya ledakan jumlah pengungsi ke salah satu kawasan yang kemudian juga akan menimbulkan permasalahan lanjutan. Faktor sosial budaya dari masyarakat pengungsi maupun masyarakat yang ditempati pengungsi hendaknya perlu diperhatikan dalam membuat pemukiman baru bagi korban

kerusuhan tersebut. Hal ini bertujuan agar integrasi bisa tercapai dan bisa mengeliminir kemungkinan terjadinya konflik ulang.

Dampak akibat konflik yang terjadi di Kabupaten Buru, menimbulkan banyak kerugian harta benda dan sarana sosial dan terjadi gelombang pengungsi pada tahun 2000 berjumlah 8.645 KK atau 43.225 jiwa. Pengungsi dimaksud adalah pengungsi lokal atau pengungsi internal karena pengungsi ini tidak keluar dari batas Negara. Lokasi pengungsian mereka terpencar-pencar yaitu di Ambon, Papua, Sulawesi serta ke daerah Jawa. Sedangkan pada tahun 2007 pengungsi yang masih tersisa adalah sebanyak 500 KK yang tersebar di berbagai barak penampungan di Kecamatan Namlea karena mereka pada umumnya tidak lagi memiliki tempat tinggal.

Kondisi para pengungsi selama dalam pengungsian, mereka tinggal dalam kamp-kamp pengungsian, barak-barak penampungan yang rata-rata hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, tergantung pada bantuan pemerintah yang sifatnya *emergency*, pemberian masyarakat sekitar dan ada yang tergantung pada hasil alam (bagi yang mengungsi ke hutan), dengan kondisi gizi dan kesehatan yang terancam, banyak anak-anak pustus sekolah dan terlantar, hidup dalam tekanan psikologis yang traumatis, was-was dan tidak tenang, rata-rata tinggal dalam tempat penampungan pengungsian selama beberapa tahun bahkan tidak ada yang mau kembali saat ini. Kondisi di tempat penampungan sendiri sangat buruk dan tidak di lengkapi oleh sarana prasarana penunjang yang memadai.

Penanganan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buru dalam rangka menangani masalah permukiman adalah dalam bentuk relokasi permukiman yang disediakan oleh pemerintah setempat dan siap ditempati oleh masyarakat pengungsi.

Berdasarkan tinjauan terhadap kebutuhan permukiman untuk para pengungsi yang telah dilakukan sebelumnya maka latar belakang studi ini adalah mengidentifikasi kebutuhan sarana prasarana ditempat penampungan pengungsi. Berdasarkan hal tersebut dapat ditentukan arahan tentang kebutuhan sarana prasarana penunjang di tempat penampungan dan kondisi tempat relokasi untuk masyarakat pengungsi yang ideal dan juga kemungkinan dapat juga digunakan

untuk mengarahkan pemecahan masalah yang terjadi di tempat relokasi ini yang juga disesuaikan oleh aspirasi masyarakat pengungsi.

1.2 Perumusan Masalah

Masalah permukiman kini menjadi potensi konflik baru di Ambon khususnya di Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, pasca-rangkaian kerusuhan yang melanda Maluku sejak 19 Januari 1999. Kerap terjadi, pengungsi yang hendak kembali ke rumah miliknya mendapati rumah tersebut sudah ditempati pengungsi lain sehingga mereka tidak dapat memiliki rumahnya kembali.

Dalam beberapa kasus lain, karena trauma dan tidak dapat kembali ke rumah miliknya, pemilik sah menjual rumah itu kepada pihak ketiga. Ketika pihak ketiga datang, rumah itu sudah dihuni pengungsi dari daerah lain yang baru mau meninggalkan rumah tersebut jika diberi ganti rugi oleh pihak ketiga. Alasannya macam-macam, antara lain kalau tidak mereka huni rumah itu pasti sudah dibakar.Kasus permukiman lainnya yang juga banyak terjadi adalah penyerobotan tanpa izin tanah kosong yang ditinggal mengungsi pemiliknya, di atas tanah kosong itu, pihak pendatang membangun rumah tanpa izin mendirikan bangunan.

Masyarakat pengungsi masih banyak yang tinggal di tempat penampungan yang terdapat di Desa Jikumerasa, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru. Kondisi di tempat penampungan sendiri sangatlah buruk dan tidak layak, hal ini dapat didukung oleh kurangnya sarana prasarana yang terdapat di tempat penampungan, sedangkan di tempat relokasi masyarakat harus berhadapan dengan ketersediaan sarana umum, prasarana publik yang kurang tersedia seperti air bersih, jalan dan listrik.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa faktor diatas, maka perumusan masalah yang didapat adalah mengidentifikasi kebutuhan sarana prasarana di tempat penampungan di Desa Jikumerasa. Dari hal tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Bagaimana karakter masyarakat pengungsi di tempat penampungan
2. Bagaimana aspirasi masyarakat pengungsi di tempat penampungan tentang relokasi permukiman.

untuk mengarahkan pemecahan masalah yang terjadi di tempat relokasi ini yang juga disesuaikan oleh aspirasi masyarakat pengungsi.

1.2 Permasalahan Masalah

Masalah permukiman kini menjadi potensi konflik baru di Ambon khususnya di Kecamatan Namlea Kabupaten Buru. pasca-rangkaian kerusuhan yang melanda Maluku sejak 19 Januari 1999. Kerap terjadi pengungsi yang hendak kembali ke rumah milikinya mendapati rumah terscbut sudah ditempati pengungsi lain schingga mereka tidak dapat memiliki rumahnya kembali.

Dalam beberapa kasus lain. karena trauma dan tidak dapat kembali ke rumah milikinya, pemilik sah menjual rumah itu kepada pihak ketiga. Ketika pihak ketiga datang. rumah itu sudah dihuni pengungsi dari daerah lain yang baru mau meninggalkan rumah terscbut jika diberi ganti rugi oleh pihak ketiga. Alasannya macam-macam. antara lain kalau tidak mereka huni rumah itu pasti sudah dibakar.Kasus permukiman lainnya yang juga banyak terjadi adalah penyerobotan tanpa izin tanah kosong yang ditinggal mengungsi pemiliknya, di atas tanah kosong itu, pihak pendatang membangun rumah tanpa izin mendirikan bangunan.

Masyarakat pengungsi masih banyak yang tinggal di tempat penampungan yang terdapat di Desa Jikumerasa. Kecamatan Namlea Kabupaten Buru. Kondisi di tempat penampungan sendiri sangatlah buruk dan tidak layak. hal ini dapat dibuktikan oleh kurangnya sarana prasarana yang terdapat di tempat penampungan. sedangkan di tempat relokasi masyarakat harus berhadapan dengan keterscdiaan sarana umum. prasarana publik yang kurang tersedia seperti air bersih. jalan dan listrik.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa faktor diatas. maka permusan masalah yang didapat adalah mengidentifikasi kebutuhan sarana prasarana di tempat penampungan di Desa Jikumerasa. Dari hal tersebut diatas. maka dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan yang akan dangkat adalah:

1. Bagaimana karakter masyarakat pengungsi di tempat penampungan
2. Bagaimana aspirasi masyarakat pengungsi di tempat penampungan tentang relokasi permukiman.

3. Bagaimana tingkat kebutuhan sarana prasarana di tempat penampungan pengungsi yang berada di Desa Jikumerasa serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang terdapat di tempat penampungan dan ditempat relokasi permukiman yang baru.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai adalah mengidentifikasi kebutuhan sarana prasarana di tempat penampungan pengungsi.

1.3.1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini adalah mengetahui karakter masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan dan kebutuhan sarana prasarana di tempat penampungan. mengetahui bagaimana aspirasi masyarakat pengungsi di tempat penampungan terhadap relokasi di Kota Namlea, Kabupaten Buru serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang di tempat penampungan dan di tempat relokasi

1.3.2. Sasaran

Sedangkan sasaran yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan diatas adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui karakter pengungsi serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat pengungsi di tempat penampungan
2. Mengetahui aspirasi masyarakat pengungsi tentang relokasi permukiman untuk masyarakat pengungsi.
3. Mengetahui kebutuhan sarana prasarana di tempat penampungan serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang ditempat penampungan dan ditempat relokasi permukiman yang baru.

1.4. Ruang Lingkup Studi

Ruang lingkup studi terdiri dari ruang lingkup lokasi dan ruang lingkup materi, sehingga dapat memberikan batasan-batasan mengenai studi yang akan dibahas:

3. Bagaimana tingkat kebutuhan sarana prasarana di tempat pemanpungan pengungsi yang berada di Desa Jikumerasa serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang terdapat di tempat pemanpungan dan diterapat relokasi permukiman yang baru.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan latar belakang dan permusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai adalah mengidentifikasi kebutuhan sarana prasarana di tempat pemanpungan pengungsi.

1.3.1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini adalah mengetahui karakter masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan dan kebutuhan sarana prasarana di tempat pemanpungan. mengetahui bagaimana aspirasi masyarakat pengungsi di tempat pemanpungan terhadap relokasi di Kota Namlea. Kabupaten Buru serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang di tempat pemanpungan dan di tempat relokasi

1.3.2. Sasaran

Sedangkan sasaran yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan diatas adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui karakter pengungsi serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat pengungsi di tempat pemanpungan
2. Mengetahui aspirasi masyarakat pengungsi tentang relokasi permukiman untuk masyarakat pengungsi.
3. Mengetahui kebutuhan sarana prasarana di tempat pemanpungan serta keterseidaan sarana dan prasarana penunjang ditempat pemanpungan dan ditempat relokasi permukiman yang baru.

1.4. Ruang Lingkup Studi

Ruang lingkup studi terdiri dari ruang lingkup lokasi dan ruang lingkup materi, sehingga dapat memberikan batasan-batasan mengenai studi yang akan dilakukan:

1.4.1. Ruang Lingkup Lokasi

Lingkup lokasi penelitian adalah dikota Ambon dengan fokus penelitian yaitu di Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dengan batas administrasinya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Sawa
- Sebelah Timur : Selat Manipa
- Sebelah Barat : Kecamatan Waplau dan Kecamatan Waepao
- Sebelah Selatan : Desa Sanleko

1.4.2. Ruang Lingkup Materi

Lingkup materi yang digunakan dalam penyusunan laporan ini dibatasi pada beberapa kajian sesuai dengan sasaran yaitu mengetahui aspirasi masyarakat pengungsi sehingga bisa diketahui ketepatan sasaran pembangunan permukiman di tempat relokasi serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang ditempat relokasi permukiman yang baru dan kondisi sarana prasarana ditempat penampungan dan juga kebutuhan sarana prasarana di tempat penampungan. Selanjutnya dapat dijadikan bahan kajian aspirasi masyarakat mengenai relokasi permukiman untuk masyarakat pengungsi.

Adapun secara lebih detail, materi yang dibahas dalam studi ini adalah sebagai berikut :

1. Karakter masyarakat pengungsi yaitu berhubungan dengan kondisi dan kegiatan yang dilakukan di tempat penampungan dan kebutuhan masyarakat akan sarana prasarana dan tempat tinggal yang baru.
2. Aspirasi masyarakat disini meliputi pendapat masyarakat mengenai Lokasi relokasi permukiman, kemampuan masyarakat meliputi mata pencaharian masyrakat, tingkat pendapatan dan pengeluaran, jarak lokasi dengan pusat kegiatan.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana umum berupa sarana dan prasarana dasar serta sarana transportasi yang terdapat ditempat penampungan dan di tempat relokasi apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

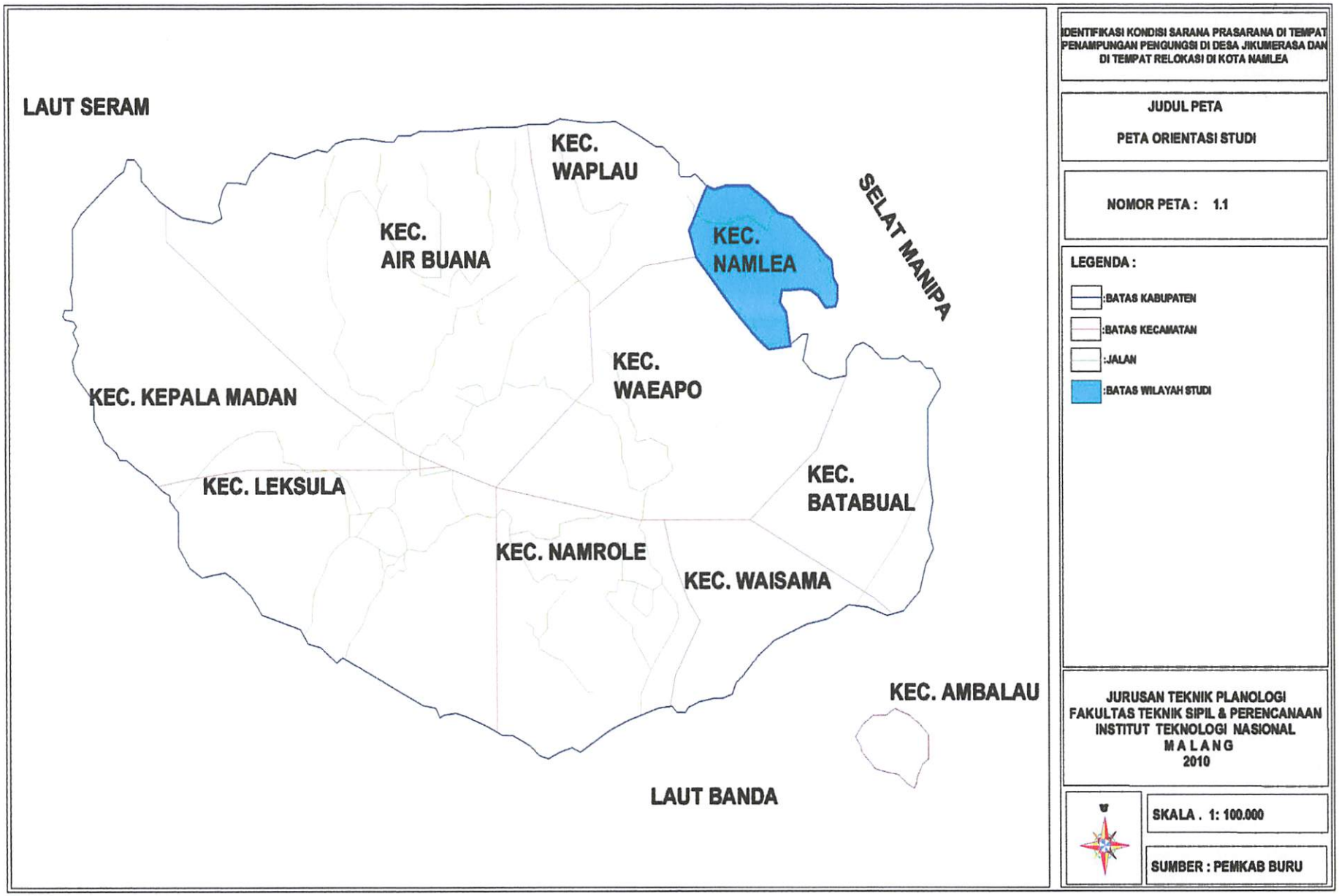
LAUT SERAM
KEC. WAPLAU
KEC. AIR BUANA
KEC. NAMLEA
SELAT MANIPA
KEC. WAEAPO
KEC. KEPALA MADAN
KEC. LEKSULA
KEC. BATABUAL
KEC. NAMROLE
KEC. WAISAMA
KEC. AMBALAU
LAUT BANDA
IDENTIFIKASI KONDISI SARANA PRASARANA DI TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI DI DESA JIKUMERASA DAN DI TEMPAT RELOKASI DI KOTA NAMLEA
JUDUL PETA
PETA ORIENTASI STUDI
NOMOR PETA : 1.1
LEGENDA :
:BATAS KABUPATEN
:BATAS KECAMATAN
:JALAN
:BATAS WILAYAH STUDI
JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
M A L A N G
2010
U
SKALA . 1: 100.000
SUMBER : PEMKAB BURU

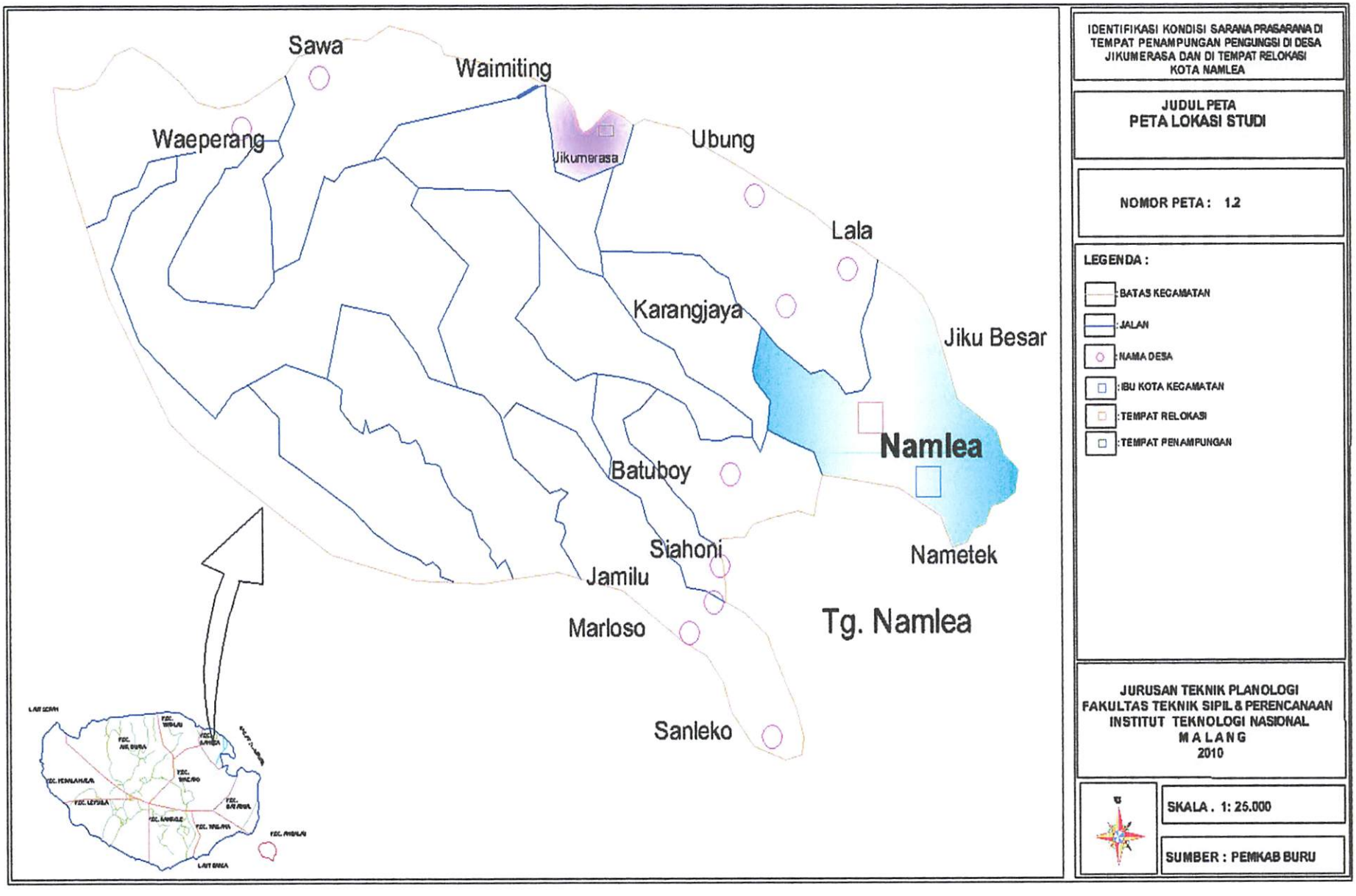
Sawa
Waimiting
Waeperang
Jikumerasa
Ubung
Lala
Karangjaya
Jiku Besar
Namlea
Batuboy
Siahoni
Nametek
Jamilu
Tg. Namlea
Marloso
Sanleko
IDENTIFIKASI KONDISI SARANA PRASARANA DI TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI DI DESA JIKUMERASA DAN DI TEMPAT RELOKASI KOTA NAMLEA
JUDUL PETA
PETA LOKASI STUDI
NOMOR PETA : 1.2
LEGENDA :
: BATAS KECAMATAN
: JALAN
: NAMA DESA
: IBU KOTA KECAMATAN
: TEMPAT RELOKASI
: TEMPAT PENAMPUNGAN
JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
M A L A N G
2010
SKALA . 1: 25.000
SUMBER : PEMKAB BURU

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini akan membahas dan merumuskan variabel-variabel yang ditelaah dari beberapa teori-teori menurut para nara sumber yang telah terpercaya sehingga dalam penjelasan terhadap judul " *Identifikasi Kebutuhan Sarana Prasarana Di Tempat Penampungan Pengungsi Akibat konflik Sosial di Desa Jikumerasa*". Dalam pembahasan ini akan diketahui aspirasi masyarakat pengungsi mengenai relokasi permukiman sehingga bisa dilakukan evaluasi terhadap ketepatan sasaran pembangunan permukiman di tempat relokasi serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang ditempat penampingan dan ditempat relokasi permukiman yang baru. Sehingga nantinya akan diketahui apakah pembangunan relokasi permukiman sudah sesuai dengan keinginan masyarakat atau tidak.

1.5.1. Definisi Judul Penelitian

Dalam sub bab ini membahas tentang definisi dan konsep penelitian tentang penelitian yang dilakukan yaitu "*Identifikasi Kondisi Sarana Prasarana Di Tempat Penampungan Pengungsi Akibat Konflik Sosial di Desa Jikumerasa*". Dimana penjabarannya adalah sebagai berikut:

Identifikasi [2] adalah tanda kenal diri, bukti diri, penentu atau penetapan identitas seseorang, benda, dsb. .

Kebutuhan[3] adalah keinginan yang timbul dalam diri manusia (secara individu) dan masyarakat dalam bentuk tuntutan untuk memperoleh pemenuhannya.

Sarana [4] adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.

Prasarana[5] adalah sistem bangunan yang diperlukan terlebih dahulu agar sistem transportasi, teknik penyehatan, pengairan, telekomunikasi, dsb.

---

[2] Drs.Roni Gunawan K, Kamus lengkap bahasa indonesia, Penerbit terbit terang, Surabaya, 2001, hal 188
[3] Ibid, hal 216
[4] Kamus tata ruang, Penerbit Jenderal penataan ruang departemen PU,2009, hal 63
[5] Ibid, hal 63

Di [6] adalah kata perangkai yang menyatakan ada pada suatu tempat

Tempat[7] adalah ruang, bidang, wilayah, daerah dan sebagainya yang didiami atau ditinggali.

Penampungan[8] adalah Proses, cara perbuatan, dan sebagainya menampung, penada-han, penyambutan.

Pengungsi [9] adalah : orang/sekelompok orang yang terusir atas dasar kemauan sendiri meninggalkan tempat kehidupan semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau adanya rasa ketakutan oleh karena ancaman dari kelompok/golongan tertentu sebagai akibat dari konflik atau kekerasan lain yang menyebabkan kekacauan di masyarakat lingkungannya

1.5.2. Tinjauan Terhadap Masyarakat Pengungsi

Dalam sub bab ini akan membahas tentang pengertian dan definisi tentang masyarakat pengungsi. Secara naluriah konflik yang terjadi di Ambon mengakibatkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat setempat baik fisik maupun nono-fisik dan secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat yang terkena konflik dan keluar dari tempat tinggalnya karena kondisi yang tidak aman adalah masyarakat pengungsi akibat konflik.

Dalam perkembangannya masyarakat merupakan elemen utama dari sebuah perencanaan, karena didalam sebuah perencanaan peran serta masyarakat menjadi acuan utama khususnya perencanaan terhadap perkembangan pembangunanannya. Dalam abad modern masyarakat dituntut secara aktif dalam peranannya terhadap perencanaan kota maupun perencanaan wilayahnya.

Para ahli telah mendefinisikan masyarakat yang sesuai dengan adat istiadat, karakteristk masyarakat, karakteristik wilayahnya yang secara langsung dapat mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu para ahli tersebut memiliki pengertian yang berbeda-

---

[6] Daryanto,s.s, Kamus Bahasa Indonesia, Appolo, Surabaya,1997 hal 8
[7] Ibid 98
[8] Daryanto,s.s, Kamus Bahasa Indonesia, Appolo, Surabaya,1997 hal 85
[9] Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) Indonesia ,Prinsip-prinsip panduan bagi pengungsian internal, http://www.google.com. 07-09.2007, 15.50.

beda tergantung terhadap keadaan masyarakatnya. Oleh karenanya masyarakat adalah simbol kehidupan itu sendiri karena didunia ini masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dan utama dalam menjalani roda-roda kehidupan.

Untuk memperkuat uraian diatas mengenai masyarakat menurut para ahli yang telah dipercaya disini maka akan dibahas mengenai bencana sosial di ambon yang mengakibatkan terjainya pengungsi.

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat beberapa pengertian tentang masyarakat pengungsi dibawah ini, yaitu:[10]

1. **Pengungsi adalah** : Orang/sekelompok orang yang terusir atas dasar kemauan sendiri meninggalkan tempat kehidupan semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau adanya rasa ketakutan oleh karena ancaman dari kelompok/golongan tertentu sebagai akibat dari konflik atau kekerasan lain yang menyebabkan kekacauan di masyarakat lingkungannya.
2. Pengertian lainnya dari masyarakat pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang keluar dari tempat asalnya dan tidak ingin atau tidak dapat kembali atau hilangnya perlindungan seseorang, karena alasan terancam kehidupan dan keamanannya sebagai akibat dari konflik bersenjata dan bentuk kekerasan lain yang menyebabkan kekacauan di masyarakat atau rasa ketakutan akan adanya ancaman perbedaan ras, agama, suku bangsa dan antar golongan sosial atau politik tertentu.
3. Kata pengungsi dalam konsep hukum dibagi menjadi dua, *pertama* pengungsi domestik (***internally displaced persons***) yaitu pengungsi yang tidak melewati batas territorial negara di mana dia tinggal. *Kedua*, pengungsi lintas batas negara (***refugee***) dimana tempat pengungsiannya melintasi teritorial negara dia/mereka tinggal.
   a. **Internally Displaced Person (Pengungsi Internal)**

      Yang dimaksudkan dengan para pengungsi internal ialah orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka atau tempat mereka dahulu biasa

[10] Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) Indonesia ,Prinsip-prinsip panduan bagi pengungsian internal, http://www.google.com. 07-09.2007, 15.50.

boda tergantung terhadap kesadaran masyarakatnya. Oleh karenanya masyarakat adalah simbol kehidupan itu sendiri karena dialamia ini masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dan utama dalam menjalani roda-roda kehidupan.

Untuk memperkuat uraian diatas mengenai masyarakat menurut para ahli yang telah diperoleh disini maka akan dibahas mengenai bencana sosial di antaon yang mengakibatkan terjainya pengungsi.

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat beberapa pengertian tentang masyarakat pengungsi dibawah ini, yaitu:[1]

1. **Pengungsi adalah** : Orang sekelompok orang yang terusir atas dasar kemauan sendiri meninggalkan tempat kediaman semula. karena terancam keselamatan dan kemanannya atau adanya rasa ketakutan oleh karena ancaman dari kelompok/golongan tertentu sebagai akibat dari konflik atau kekerasan lain yang menyebabkan kekacauan di masyarakat lingkungannya.
2. Pengertian lainnya dari masyarakat pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang keluar dari tempat asalnya dan tidak lagin atau tidak dapat kembali atau hilangnya perlindungan /seseorang. karena alasan terancam kehidupan dan kemanannya sebagai akibat dari konflik bersenjata dan bentuk kekerasan lain yang menyebabkan kekacauan di masyarakat atau rasa ketakutan akan adanya ancaman perbedaan ras, agama, suku bangsa dan antar golongan sosial atau politik tertentu.
3. Kata pengungsi dalam konsep hukum dibagi menjadi dua, pertama pengungsi domestik (**internally displaced persons**) yaitu pengungsi yang tidak meluwati batas territorial negara di mana dia tinggal. Kedua. pengungsi lintas batas negara (**refugee**) dimana tempat pengungsiannya melintasi territorial negara dia/mereka tinggal.

a. **Internally Displaced Person (Pengungsi Internal)**

Yang dimaksudkan dengan para pengungsi internal ialah orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka atau tempat mereka dahulu biasa

[1] Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) Indonesia .Prinsip-prinsip panduan bagi pengungsian internal. (07-09-2007, 15.50.

tinggal, terutama sebagai akibat dari, atau dalam rangka menghindarkan diri dari, dampak-dampak konflik bersenjata, situasisituasi rawan yang ditandai oleh maraknya tindak kekerasan secara umum, pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia, bencana-bencana alam, atau bencana-bencana akibat ulah manusia, dan yang tidak melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional

Masyarakat pengungsi di Ambon merupakan pengungsi internal disebabkan oleh adanya kerusuhan yang terjadi di kota Ambon yang mengakibatkan masyarakat terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka atau tempat mereka dahulu biasa tinggal karena ingin menghindarkan diri dari dampak-dampak konflik bersenjata yang terjadi di kota Ambon dan mencari tempat yang aman untuk ditempati atau di tinggali.

b. **Refugee (Pengungsi Lintas Batas)**

Menurut Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi, pengungsi lintas batas adalah Seseorang yang "oleh karena rasa takut yang wajar akan kemungkinan dianiaya berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada suatu kelompok social tertentu, atau pandangan politik, berada di luar negeri kebangsaannya, dan tidak bisa atau, karena rasa takut itu, tidak berkehendak berada di dalam perlindungan negeri tersebut."

Yang termasuk ke dalam pengungsi lintas batas (Refugee) adalah pengungsi yang berasal dari Timor-timur yang melintasi batas Negara dan mengungsi ke NTT karena adanya konflik di daerah tersebut. Sedangkan di Ambon tidak termasuk ke dalam pengungsi lintas batas (karena kebanyakan pengungsi di Ambon hanya mengungsi ke daerah lain tetapi tidak melintasi batas Negara).

Akibat kerusuhan yang terjadi di Ambon pada tahun 1999 banyak masyarakat yang mengungsi baik ke luar wilayah Maluku maupun di dalam Maluku sendiri. 595.000 jiwa mengungsi ke Propinsi-Propinsi lain, sedangkan 330.000 jiwa mengungsi ke Maluku Utara dan Maluku Tengah.

tinggal, terutama sebagai akibat dari, atau dalam rangka mengkhindarkan diri dari, dampak-dampak konflik bersenjata, situasi-situasi rawan yang ditandai oleh maraknya tindak kekerasan secara umum, pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia, bencana-bencana alam, atau bencana-bencana akibat ulah manusia, dan yang tidak melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional

Masyarakat pengungsi di Ambon merupakan pengungsi internal disebabkan oleh adanya kerusuhan yang terjadi di kota Ambon yang mengakibatkan masyarakat terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka atau tempat mereka dahulu biasa tinggal karena ingin menghindarkan diri dari dampak-dampak konflik bersenjata yang terjadi di kota Ambon dan mencari tempat yang aman untuk ditempati atau di tinggali.

b. **Refugee (Pengungsi Lintas Batas)**

Menurut Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi, pengungsi lintas batas adalah Seseorang yang "oleh karena rasa takut yang wajar akan kemungkinan dianiaya berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada suatu kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik, berada di luar negeri kebangsaannya, dan tidak bisa atau karena rasa takut itu, tidak berkeinginan berada di dalam perlindungan negeri tersebut."

Yang termasuk ke dalam pengungsi lintas batas (Refugee) adalah pengungsi yang berasal dari Timor-timur yang melintasi batas Negara dan mengungsi ke NTT karena adanya konflik di daerah tersebut. Sedangkan di Ambon tidak termasuk ke dalam pengungsi lintas batas (karena kebanyakan pengungsi di Ambon hanya mengungsi ke daerah lain tetapi tidak melintasi batas Negara).

Akibat kerusuhan yang terjadi di Ambon pada tahun 1999 banyak masyarakat yang mengungsi baik ke luar wilayah Maluku maupun di dalam Maluku sendiri. 595.000 jiwa mengungsi ke Propinsi-Propinsi lain, sedangkan 330.000 jiwa mengungsi ke Maluku Utara dan Maluku Tengah.

1.5.2.1 Karakteristik Masyarakat

A. Masyarakat Perkotaan

Mengingat bahwa kota adalah pertama-tama merupakan tempat permukiman dimana sejumlah manusia yang relatif besar menempati daerah yang relatif sempit maka keadaan yang demikian ini didaerah kota akan berlainan apabila dibandingkan dengan ciri-ciri kehidupan di daerah pedasaan. Ciri-ciri kehidupan didaerah kota antar lain:

1. Timbulnya berbagai macam kegiatan yang bukan pertanian guna memenuhi kebutuhan hidup penduduknya.
2. Bertitik tolak dari jenis kegiatan tersebut, maka masalah wakti dan ruang adalah merupakan barang yang sangat berharga.
3. Sebagai akibat dari kesibuka kota, sifat individualitas akan lebih menonjol, sehingga kadang-kadang identitas pribadi hampir tidak terkendali lagi.
4. Ketertiban dan kelancaran dalam penyediaan sarana dan fasilitas adalah merupakan tuntutan pokok yang sangat mempengaruhi kehidupan kota.

B. Masyarakat Pedesaan / Perkampungan

Prinsipnya daripada perkampungan perlu dipergunakan dalam merencanakan daerah-daerah tempat tinggal adalah suatu usaha di dalam suatu kota untuk mengadakan beberapa kesatuan masyarakat kecil yang diperlengkapi dengan alat-alat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan yang dalam banyak hal memiliki sifat-sifat yang sama dengan kehidupan di pedusunan. Masyarakat ini atau daerah perkampungan ini daerahnya harus kecil, hingga semua bagian-bagiannya dapat dicapai dengan berjalan kaki, tetapi cukup luas untuk dapat melayani keperluan pokok masyarakatnya, misal sekolah-sekolah rendah.

Desa dicirikan dengan hal-hal yang berlawanan dengan ciri kota dari aspek morfologi, bangunan rumah penduduk di indonesia umumnya jarang atau terpencar, hubungan antara anggota masyarakatnya intim, dengan ciri kekerabatan, persaudaraan atau gotong royong yang kuat.[11]

---

[11] Asyari Sapari Iman, Sosiologi Kota dan Desa, Penerbit Usaha Nasional Surabaya, 1993; hal-109

1.5.2.1 Karakteristik Masyarakat

A. Masyarakat Perkotaan

Menginjak dalam kota adalah pertama-tama merupakan tempat pemukiman dimana sejumlah manusia yang relatif besar menempati daerah yang relatif sempit maka kecuali yang demikian ini didaerah kota akan berlainan apabila dibandingkan dengan cini-cini kehidupan di daerah pedesaan. Cini-cini kehidupan didaerah kota antar lain:

1. Timbulnya berbagai macam kegiatan yang bukan pertanian guna memenuhi kebutuhan hidup penduduknya.
2. Bertitik tolak dari jenis kegiatan tersebut, maka masalah waktu dan ruang adalah merupakan barang yang sangat berharga.
3. Sebagai akibat dari kesibuka kota, sifat individualitas akan lebih menonjol. sehingga kadang-kadang identitas pribadi hampir tidak terkendali lagi.
4. Keterlibatan dan kelancaran dalam penyediaan sarana dan fasilitas adalah merupakan tuntutan pokok yang sangat mempengaruhi kehidupan kota.

B. Masyarakat Pedesaan / Perkampungan

Prinsipnya daripada perkampungan perlu dipergunakan dalam mereneanakan daerah-daerah tempat tinggal adalah suatu usaha di dalam suatu kota untuk mengadakan beberapa kesatuan masyarakat kecil yang dipercengkapi dengan alat-alat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan yang dalam banyak hal memiliki sifat-sifat yang sama dengan kehidupan di pedusunan. Masyarakat ini atau daerah perkampungan ini daerahnya harus kecil, hingga semua bagian-bagiannya dapat dicapai dengan berjalan kaki, tetapi cukup luas untuk dapat melayani keperluan pokok masyarakatnya, misal sekolah-sekolah rendah.

Desa diterikan dengan hal-hal yang berhubungan dengan ciri kota dari aspek morfologi, bangunan rumah penduduk di indonesia umumnya jarang atau terpencar. hubungan antara anggota masyarakatnya intim, dengan ciri kekerabatan, persaudaraan atau gotong royong yang kuat.[11]

---

[11] Aryani Sapari Imam, Sosiologi Kota dan Desa, Pengertian Lintas Masalah, Surabaya, 1993: hal-169

C. Masyarakat Tradisional

Ahli-ahli sosiologi kebanyakan mengikuti pembagian kotomi antara masyarakat desa dan masyarakat desa, masyarakat modern dan masyarakat tradisional, masyarakat yang sudah maju dan masyarakat yang terbelakang dan sebagainya. Dikotomi yang demikian dilewati oleh pandangan ahli sosiologi Jerman Ferdinand Tonnies yang membagi masyarakat menjadi *gemeins chaft* dan *ges selschaft*. Pandangan tersebut tidak selalu tetap sehingga timbul tiga pembagian yaitu urban, sub urban dan rural. Walaupun demikian pembagian menjadi tiga kategori itu belum memperjelas masalahnya, karena lebih banyak menekankan pada aspek wilayah geografis dan kurang memperhatikan ciri-ciri masyarakat yang ada di dalamnya. Untuk itu diperlukan pengetahuan mengenai ciri-ciri masyarakat tradisional sebagai objek yang diteliti sebagai pegangan awal untuk memahami karakter masyarakat.

1.5.2.2.Karakteristik Masyarakat Pengungsi Akibat Konflik

Dalam sub bab ini akan menjelaskan tentang karakteristik masyarakat pengungsi, keadaan fisik, sosial, maupun ekonomi. Sehingga dapat dijabarkan bahwa masyarakat pengungsi memiliki karakteristik yang berubah dari karakter masyarakat secara umum atau sebelum terjadinya konflik.

Hubungan yang baik dalam masyarakat akan mempengaruhi karakteristik masyarakat yang sesungguhnya, sehingga masyarakat yang terkena dampak dari konflik yang terjadi akan segera menumbuhkan kembali karakteristik yang terhapus akibat dampak dari bencana yang terjadi.

Dalam masyarakat multikultural, konflik tidak perlu dihindari atau disembunyikan melainkan diakui keberadaannya, lantas dikelola atau diubah menjadi energi positif bagi perubahan sosial yang dinamis dan maju. Yang terpenting adalah masyarakat multikultural memiliki dan menyepakati nilai-nilai multikulturalisme. Multikulturalisme adalah ide yang menekankan pentingnya kebudayaan yang berbeda. Penghormatan yang memungkinkan setiap kelompok,

termasuk kelompok minoritas untuk mengekspresikan kebudayaan mereka tanpa mengalami prasangka dan permusuhan (Dubois dan Milley, 1992).[12]

Karakteristik masyarakat pengungsi ditinjau berdasarkan kondisi sosial budaya, kondisi lingkungan, kondisi kemasyarakatan, dan perilaku antar kedua kelompok masyarakat yang bertikai yang nantinya akan digunakan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat terhadap ruang.

Kondisi sosial budaya berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat, sistem organisasi, bahasa, seni, dan sistem kepercayaan. Kondisi lingkungan berkaitan dengan kondisi rumah, kondisi fasilitas dan kondisi utilitas. Kondisi masyarakat terkait dengan kegiatan organisasi dan hubungan antar warga. Sedangkan perilaku masyarakat berhubungan dengan kegiatan bekerja, belajar, berbelanja, beribadah dan berkumpul.

Berdasarkan penjelasan diatas maka karakter masyarakat untuk kedua kelompok masyarakat (Islam dan Kristen) sebelum kerusuhan adalah:

1. Dominasi mata pencaharian kelompok islam adalah sebagai pedagang dan pola ruang untuk mata pencaharian ini terbentuk secara linier di pesisir pantai dan jaringan jalan.
2. Dominasi mata pencaharian untuk kelompok kristen adalah pegawai negeri dan pola ruang untuk mata pencaharian ini adalah menyebar di sekitar alun-alun.
3. Telah ada sistem organisasi di tiap kelompok yang melibatkan hampir setiap individu dan pola ruang untuk kegiatan organisasi ini menyebar di tiap cluster permukiman tiap kelompok. Untuk kegiatan seni dan olahraga pola ruang terbentuk di alun-alun kota.
4. Menggunakan bahasa indonesia di lembaga formal, sedangka bahasa sehari-hari adalah bahasa indonesia dengan dialek ambon.
5. Pola ruang permukiman terbentuk berdasarkan suku asal dan agama yang dianut oleh masing-masing masyarakat.

---

[12] Edi Suharto, Ph D." Membangun masyarakat memberdayakan masyarakat". PT.Refika Aditama. Bandung.2005, hal 222.

A. Karakteristik Masyarakat Pengungsi Kota Ambon Sebelum Kerusuhan

Masyarakat Maluku merupakan suatu persekutuan masyarakat yang sejak dahulu kala terikat dalam sistim budaya Pela dan Gandong yang sangat kuat. Budaya Pela dan Gandong ini mencerminkan adanya suatu keterikatan yang mempunyai nilai spiritual, nilai budaya, maupun nilai hukum cukup tinggi di antara Desa karena berisikan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Oleh karena itu budaya Pela dan Gandong telah melahirkan konsep hukum adat berupa larangan untuk kawin, larangan untuk saling menyakiti dan lain-lain antara warga sepela dan segandong.

Di lain pihak, toleransi antar umat beragama di Maluku yang dijiwai oleh semangat Pela dan Gandong telah memungkinkan orang Maluku semakin terlibat di dalam proses saling menghargai antar pemeluk Agama yang satu dengan pemeluk Agama yang lain dalam berbagai bentuk tindakan dan perbuatan. Akan tetapi dalam perkembangannya dijumpai beberapa faktor pengaruh sebagai indikator bagi terjadinya kerusuhan (atau pertikaian) yang bernuansa SARA.

B. Karakteristik Masyarakat Pengungsi Pasca Kerusuhan

Karakteristik masyarakat pengungsi pasca kerusuhan yang terjadi adalah timbulnya berbagai perasaan traumatik akibat konflik yang terjadi dan adanya perasaan tidak aman untuk tetap tinggal di rumah mereka sehingga mereka terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka sebagai akibat dari konflik bersenjata yang terjadi selama beberapa waktu, situasi kota yang rawan yang ditandai oleh maraknya tindak kekerasan secara umum, dan pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Dampak dari kerusuhan yang terjadi adalah meningkatnya kebutuhan pemukiman untuk pengungsi karena sebagian besar masyarakat pengungsi sudah tidak memiliki tempat tinggal, akibat konflik yang terjadi karena trauma dan tidak dapat kembali ke rumah miliknya, pemilik sah menjual rumah itu kepada pihak ketiga. Ketika pihak ketiga datang, rumah itu sudah dihuni pengungsi dari daerah lain yang baru mau meninggalkan rumah tersebut jika diberi ganti rugi oleh pihak ketiga.

A. Karakteristik Masyarakat Pengungsi Kota Ambon Sebelum Kerusuhan

Masyarakat Maluku merupakan suatu perekutuan masyarakat yang sejak dahulu kala terikat dalam sistim budaya Pela dan Gandong yang sangat kuat. Budaya Pela dan Gandong ini mencerminkan adanya suatu keterikatan yang mempunyai nilai spiritual, nilai budaya, maupun nilai hukum cukup tinggi di antara Desa karena berasikan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Oleh karena itu budaya Pela dan Gandong telah mclahirkan konsep hukum adat berupa larangan untuk kawin, larangan untuk saling menyakiti dan lain-lain antara warga sepela dan sogandong.

Di lain pihak, toleransi antar umat beragama di Maluku yang dijiwai oleh semangat Pela dan Gandong telah memungkinkan orang Maluku semakin terikat di dalam proses saling mengbargai antar pemeluk Agama yang satu dengan pemeluk Agama yang lain dalam berbagai bentuk tindakan dan perbuatan. Akan tetapi dalam perkembangannya dijumpai beberapa faktor pengaruh sebagai indikator bagi terjadinya kerusuhan (atau perikaian) yang bernuansa SARA.

B. Karakteristik Masyarakat Pengungsi Pasca Kerusuhan

Karakteristik masyarakat pengungsi pasca kerusuhan yang terjadi adalah timbulnya berbagai perasaan traumatik akibat konflik yang terjadi dan adanya perasaan tidak aman untuk tetap tinggal di rumah mereka sehingga mereka terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka sebagai akibat dari konflik bersenjata yang terjadi selama beberapa waktu. situasi kota yang rawan yang ditandai oleh meralnya rasa untuk kekerasan secara umum, dan pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Dampak dari kerusuhan yang terjadi adalah meningkatnya kebutuhan pemukiman untuk pengungsi karena sebagian besar masyarakat pengungsi sudah tidak memiliki tempat tinggal akibat konflik yang terjadi karena rusuna dan tidak dapat kembali ke rumah mitiknya. pemilik sah menjual rumah itu kepada pihak ketiga. Ketika pihak ketiga datang. rumah itu sudah dihuni pengungsi dari daerah lain yang baru mau meninggalkan rumah tersebut jika diberi ganti rugi oleh pihak ketiga.

Dampak lainnya dari kerusuhan yang terjadi adalah masyarakat yang ada hidup secara berkelompok berdasarkan Agama yang dianut karena merasa tidak aman untuk tetap tinggal di daerah yang lama sehingga tidak adanya interaksi antar umat beragama yang ada untuk itu diperlukan interaksi antar umat beragama sehingga masyarakat yang ada bisa saling bekerja sama untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi antara kedua pihak yang bertikai dan bisa hidup dengan aman seperti sebelumnya tanpa membedakan Suku, Ras dan Agama.

1.5.2.3.Ciri-Ciri Masyarakat Pengungsi

Ciri merupakan serangakaian identitas yang menunjukan suatu karakter terhadap komponen tertentu (manusia, barang, dll). Dimana karakter itu menjadikan atau merangkaikan suatu komponen tertentu untuk menjadi kesatuan yang utuh. Contohnya manusia memiliki suatu identitas diri yang menjadikan suatu karakter atau sesuatu yang khas yang dapat dikenal oleh masyarakat luas seperti memiliki wajah tampan/ cantik, memiliki mata indah, dll. Oleh karena itu identitas masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa aspek.

Ciri-ciri masyarakat dapat menunjukan segala sesuatu yang berkaitan erat dengan masyarakat dalam suatu wilayah tersebut, contohnya Kota Ambon memiliki adat-budaya Pela dan Gandong yang kental dimana ada beberapa larangan yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Ciri-ciri tersebut akan menunjukan identitas masyarakat yang akan menjadi keuatan bagi masyarakat itu sendiri. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Anderson Parker tentang ciri-ciri mayarakat, yaitu:

1. Adanya sejumlah orang
2. Tinggal dalam suatu daerah tertentu
3. Mengadakan atau mempunyai hubungan yang teratur satu sama lain
4. Sebagai aktivitas hubungan ini membentuk suati sitem hubungan antar manusia.
5. Adanya keterikatan karena memiliki kepentingan bersama
6. Mengadakan ikatan/ kesatuan berdasarkan unsur-unsur sebelumnya.
7. Adanya perasaan solidaritas.

Dampak lainnya dari kerusuhan yang terjadi adalah masyarakat yang ada hidup secara berkelompok berdasarkan Agama yang dianut karena merasa tidak aman untuk terap tinggal di daerah yang lama sehingga tidak adanya interaksi antar umat beragama yang ada untuk itu diperlukan interaksi antar umat beragama sehingga masyarakat yang ada bisa saling bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara kedua pihak yang bertikai dan bisa hidup dengan aman seperti sebelumnya tanpa membedakan Suku, Ras dan Agama.

1.5.2.3.Ciri-Ciri Masyarakat Pengungsi

Ciri merupakan serangkaian identitas yang menunjukan suatu karakter terhadap komponen tertentu (manusia, barang, dll). Dimana karakter ini menjadikan atau merangkaikan suatu komponen tertentu untuk menjadi kesatuan yang utuh. Contohnya manusia memiliki suatu identitas diri yang menjadikan suatu karakter atau sesuatu yang khas yang dapat dikenal oleh masyarakat luas seperti memiliki wajah tampan/ cantik, memiliki mata indah, dll. Oleh karena itu identitas masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa aspek.

Ciri-ciri masyarakat dapat menunjukan segala sesuatu yang berkaitan erat dengan masyarakat dalam suatu wilayah tersebut. contohnya Kota Ambon memiliki adat-budaya Pela dan Gandong yang kental dimana ada beberapa larangan yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Ciri-ciri tersebut akan menunjukan identitas masyarakat yang akan menjadi kenalan bagi masyarakat itu sendiri. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Anderson Parker tentang ciri-ciri masyarakat yaitu:

1. Adanya sejumlah orang
2. Tinggal dalam suatu daerah tertentu
3. Mengadakan atau mempunyai hubungan yang teratur satu sama lain
4. Sebagai aktivitas hubungan ini membentuk suatu sistem hubungan antar manusia.
5. Adanya kekerikatan karena memiliki kepentingan bersama
6. Mengadakan ikatan/ kesatuan berdasarkan unsur-unsur sebelumnya.
7. Adanya perasaan solidaritas.

8. Sadar akan interpendasi satu sama lain
9. Berdasarkan sistem yang terbentuk akan membentuk norma-norma.
10. Berdasarkan unsur-unsur diatas membentuk kebudayaan bersama melalui hubungan manusia.

Dari uraian diatas, maka dapat dijelaskan bahwa ciri-ciri masyarakat ini akan menggambarkan tentang jati diri dari masyarakat tersebut baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Dan ciri- ciri itu akan membentuk adanya komunitas baru dimana komunitas baru tersebut akan berinteraksi dalam suatu wadah dalam ruang tertentu.

1.5.2.4 Faktor Pembagian Sistem Lapisan Masyarakat Baru Akibat Kerusuhan Yang Terjadi

Dalam sub- bab ini akan menjelaskan beberapa cara-cara terbentuknya masyarakat sehingga dimungkinkan akan menjadi masyarakat yang baru, atau masyarakat yang terbentuk akibat adanya sesuatu yang menimpa dalam komunitas tersebut seperti bencana atau kerusuhan sosial yang terjadi. Memang sempat terpikir cara terbentuknya masyarakat ini berlangsung secara alami, namun juga tak jarang terbentuknya masyarakat ini terjadi memang sudah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka berikut ini akan dijelaskan tentang cara terbentuk masyarakat, yaitu:[13]

1. Masyarakat paksaan : negara dan masyarakat tawanan di tempat tawanan atau masyarakat pengungsi atau pelarian, dsb. Kedalam kelompoknya bersifat *Gemeinschaft* dan keuar bersifat *Gesellschaft.*
2. Masyarakat merdeka, terbagi dalam:
   a. Masyarakat alam yaiu yang terjadi dengan sendirinya: suku golongan atau sukua yang bertalian karena daerah atau turunan, umumnya yang masih sederhana sekali dalam keadaan terpencil atau tidak mudah berhubungan dengan dunia luar *(Gemeinschaft)*.

---

[13] Drs. M. Cholil Mansyur, SH. Sosiologi masyarakat desa dan kota, Penerbit Usaha Nasional,, Surabaya, 1990 hal 87-88

b. Masyarakat budidaya, terdiri karena kepentingan keduniaan atau kepercayaan (keagamaan), yaitu antara lain kerjasama perekonomian, koperasi, dsb*(Gesellschaf)*

Dari uraian tersebut diatas, maka dengan terbentuknya masyarakat tersebut akan menjai acuan berubahnya fungsi tata ruang juga sebagai tempat interaksi masyarakat baru dimana masyarakat tersebut memiliki persamaan nasib dan seperjuangan dan terjalin hubungan yang baik. Kondisi tersebut akan sangat menguntungkan bagi komunitas tertentu, karena dalam kehidupan komunitas tertentu akan muncul dari berbagai kesamaan yang tumbuh di dalamnya. Persamaan itu akan tumbuh dan berkembang seperti jalannya waktu, perasaan senasib dan seperjuangan itu akan menjadi pemersatu akan tumbuhnya komunitas masyarakat korban bencana sosial.

1.5.2.5. Aspirasi Dan Persepsi Masyarakat

Aspirasi adalah harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Aspirasi dalam bahasa indonesia merupakan suatu bentuk pemikiran yang diberikan seseorang dalam bentuk pendapat ataupun ide-ide terhadap suatu keadaan ataupun suatu kasus dan peristiwa tertentu. Aspirasi dalam hal ini berbeda jauh dengan apa yang disebut dengan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat adalah tanggapan atau pengertian yang berbentuk langsung dari suatu peristiwa atau pembicaraan, tetapi dapat juga pengertian yang terbentuk melalui proses yang diperoleh melalui pancaindera.

Persepsi adalah suatu proses pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera (Dreverdalam Sasanti, 2003). Kesan yang diterima individu sangat tergantung pada seluruh pengalaman yang telah diperoleh melalui proses berpikir dan belajar, serta dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri individu. Sabri (1993) mendefinisikan persepsi sebagai aktivitas yang memungkinkan manusia mengendalikan rangsangan-rangsangan yang sampai kepadanya melalui alat inderanya, menjadikannya kemampuan itulah dimungkinkan individu mengenali milleu (lingkungan pergaulan) hidupnya. Proses persepsi terdiri dari tiga tahap yaitu tahapan pertama terjadi pada

pengideraan diorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, tahapan ketiga yaitu stimulasi pada penginderaan diinterprestasikan dan dievaluasi.

Mar'at (1981) mengatakan bahwa persepsi adalah suatu proses pengamatan seseorang yang berasal dari suatu kognisi secara terus menerus dan dipengaruhi oleh informasi baru dari lingkungannya. Riggio (1990) juga mendefinisikan persepsi sebagai proses kognitif baik lewat penginderaan, pandangan, penciuman dan perasaan yang kemudian ditafsirkan. Mar'at (Aryanti, 1995) mengemukakan bahwa persepsi di pengaruhi oleh faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala, dan pengetahuan terhadap objek psikologis. Rahmat (dalam Aryanti, 1995) mengemukakan bahwa persepsi juga ditentukan juga oleh faktor fungsional dan struktural. Beberapa faktor fungsional atau faktor yang bersifat personal antara kebutuhan individu, pengalaman, usia, masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, dan lain-lain yang bersifat subyektif. Faktor struktural atau faktor dari luar individu antara lain: lingkungan keluarga, hukum-hukum yang berlaku, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terdiri dari faktor personal dan struktural. Faktor-faktor personal antara lain pengalaman, proses belajar, kebutuhan, motif dan pengetahuan terhadap obyek psikologis. Faktor-faktor struktural meliputi lingkungan keadaan sosial, hukum yang berlaku, nilai-nilai dalam masyarakat.

Persepsi tentang keadaan dan masalah serta kebutuhan masyarakat akan berpengaruh pada tujuan, proses perencanaan serta pengembangan relokasi permukiman. Dalam konteks ini salah satu point penting dari perencanaan adalah menciptakan kualitas terbaik dari suatu fasilitas umum dan tempat tinggal. Fungsi dari pengkajian aspirasi masyarakat adalah mendapatkan masukan tentang keadaan dan keinginan dari masyarakat untuk mendapatkan pemahaman dan kejelasan tentang relokasi permukiman untuk masyarakat pengungsi.

1.5.2.6 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat membutuhkan masyarakat yang berdaya dalam melihata masalah yang dihadapinya. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan suatu pendekatan dimana partisipasi merupakan bagian yang penting dari sebuah

permasalahan publik. Pemeberdayaan merupakan kata kunci dalam partisipasi masyarakat untuk mengontrol kebijakan publik. Dalam partsipasi masyarakat, menurut Sandercock sebuah proses lebih penting daripada hasil, karena keterlibatannya untuk mendapatkan sebuah informasi dan proses untuk terlibat dalam menolak dan menyampaikan berbagai gagasan. Mekanisme partisipasi ikut melibatkan dan mendorong pemerintah lebih transparan, humanis dan bertanggungjawab dalam berbagai kewajibannya.

I. Konsep Peranserta

Peranserta dapat juga diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan, dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu, baik langsung maupun tidak langsung. Peranserta diartikan sebagai peran aktif kontribusi dan mempengaruhi proses pembangunan tersebut. Arti mempengaruhi dalam hal ini mencakup penyusunan program perencanaan secara keseluruhan dan pelaksanaannya.

Ide dasar peran serta muncul dari pemikiran bahwa golongan miskin dan tertindas dapat termobilisir oleh agen-agen luar. Sehingga mereka memberanikan diri berperan serta dalam mengambil keputusan untuk pengembangan sosial dan ekonomi pada tingkat lokal. Walaupun demikian peranserta masyarakat mempunyai beranekaragam latarbelakang dan mewarnai tradisi pemikiran yang kompleks dan bervariasi. Usaha untuk meningkatkan peran serta masyarakat perlu terus dilakukan, sebab dengan keikutsertaan dalam proses pembangunan, maka usah memajukan program ekonomi dan sosial bisa dipercepat.

II. Keuntungan Peran Serta Masyarakat

Di Negara maju, kelembagaan peranserta masyarakat dalam pembangunan telah banyak membantu perencana, sehingga kendala yang sering terjadi dapat diselesaikan secara bersama dengan rasa puas bersama. Informasi langsung dari masyarakat sebagai masukan dalam perencanaan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, sehingga sasaran pembangunan memiliki ketepatan yang tinggi pula.

Peranserta masyarakat diperlukan dan keuntungan dari sisi pemerintah sebagai berikut:

- Penghematan tenaga kerja dan dana

permasalahan publik. Pemberdayaan merupakan kata kunci dalam partisipasi masyarakat untuk mengontrol kebijakan publik. Dalam partisipasi masyarakat, menurut Sandercock sebuah proses lebih penting daripada hasil. Karena keterlibatannya untuk mendapatkan sebuah informasi dan proses untuk terlibat dalam memolak dan menyampaikan berbagai gagasan. Mekanisme partisipasi lkut melibatkan dan mendorong pemerintah lebih transparan, humanis dan bertanggungjawab dalam berbagai kewajibannya.

I. Konsep Peranserta

Peranserta dapat juga diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan, dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu, baik langsung maupun tidak langsung. Peranserta diartikan sebagai peran aktif komunitasi dan memperngaruhi proses pembangunan tersebut. Arti memperngaruhi dalam hal ini mencakup penyusunan program pelaksanaannya.

Ide dasar peran serta muncul dari pemikiran bahwa golongan miskin dan terindas dapat termobilisir oleh agen-agen luar. Sehingga mereka memberanikan diri berperan serta dalam mengambil kepustusan untuk pengembangan sosial dan ekonomi pada tingkat lokal. Walaupun demikian peranserta masyarakat mempunyai berancakaragam lanerbelakang dan mewarnai tradisi pemikiran yang kompleks dan bervariasi. Usaha untuk meningkatkan peran serta masyarakat perlu terus dilakukan, sebab dengan keikutserraan dalam proses pembangunan, maka usah mengajukan program ekonomi dan sosial bisa diperccpat.

II. Kemungkinan Peran Serta Masyarakat

Di Negara maju, kolembagaan peranserta masyarakat dalam pembangunan telah banyak memberikan perkembangan, sehingga kondisi yang sering terjadi dapat diselesaikan secara bersama dengan rasa puas bersama. Informasi langsung dari masyarakat sebagai masukan dalam perencanaan memiliki tingkat keperceyaan yang tinggi, sehingga asasran pembangunan memiliki kelcpatan yang tinggi pula.

Peranserta masyarakat diperlukan dan kemungkan dari sisi pemerintah sebagai berikut:

- Penghematan tenaga kerja dan dana

- Mempromosikan pembangunan sosial ekonomi melalui peningkatan kepercayaan pada diri sendiri.
- Menjadi modal politis dengan cara menunjukkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat
- Meningkatkan pengawasan politis, sosial dengan cara memperkuat kepemimpinan masyarakat
- Organisasi masyarakat yang kuat dapt menjamin kelangsungannya.

Bagi masyarakat, keuntungan ini diperoleh apabila ikut berperanserta dalam pembangunan, misalnya:

- Mengurangi biaya pembangunan
- Hasil pembangunan dapat dipastikan sesuai dengan aspirasinya (apabila peranserta masuk dalam tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan).
- Dapat menyediakan dasar-dasar kekuatan lokal dalam organisasi masyarakat dan memelihar kerjasama dengan politisi kota.

III. Hambatan Peran Serta Masyarakat

Tindakan untuk mengajak masyarakat agar mau berperanserta adalah usaha yang tidak mudah. Keragu-raguan sering muncul karena mereka masih sangsi akan keberhasilan pembangunan. Disamping itu akan menyangsikan juga kepada siapa yang akan mendapat keuntungan bila proyek sudah jadi.

Mengajak masyarakat berperanserta dalam pembangunan lebih mudah kepada warga golongan rendah daripada golongan menengah keatas. Hal ini bisa dimengerti karena golongan rendah mempunyai kebersamaan senasib yang sangat kuat. Semakin besar wadah peranserta akan sulit untuk menampung seluruh keinginan warganya, yaitu guna mencapai target secara massal akan memerlukan persiapan yang rumit. Perbedaan pendidikan, mempengaruhi tujuan dan kesepakatan bersama, sehingga sukar menghimpun dalam satu wadah yang mapan dan langgeng.

Bentuk peran serta masyarakat sebenarnya sudah ada, hanya saja tradisi ini masih berlangsung di perkampungan, sedang kawasan diluar kampung terjadi secara esidentil. Hambatan dari luar adalah belum adanya hubungan kerjasama yang baik dan terbuka antara pemerintah dengan pihak partisipan. Konflik antar

- Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
- Meningkatkan pembangunan sosial ekonomi melalui peningkatan kepercayaan pada diri sendiri.
- Menjadi modal politis dengan cara menunjukkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat
- Menghidupkan pengawasan politis sosial dengan cara memperkuat kepemimpinan masyarakat
- Organisasi masyarakat yang kuat dapat menjamin kelangsungannya

Bagi masyarakat, kemunculan ini diperoleh apabila ikut berpartisipasi dalam pembangunan, misalnya:

- Mengurangi biaya pembangunan
- Hasil pembangunan dapat dipastikan sesuai dengan aspirasinya (apabila partisipasi masih dalam tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan).
- Dapat menyediakan dasar-dasar kekuatan lokal dalam organisasi masyarakat dan memelihara kerjasama dengan politisi kota.

III. Hambatan Peran Serta Masyarakat

Tindakan untuk mengajak masyarakat agar mau berpartisipasi adalah usaha yang tidak mudah. Keragu-raguan sering muncul karena mereka masih sangsi akan kebenaran pembangunan. Disamping itu akan menyangkan juga kepada siapa yang akan mendapat keuntungan bila proyek sudah jadi.

Mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan lebih mudah kepada warga golongan rendah daripada golongan menengah keatas. Hal ini bisa dimengerti karena golongan rendah membutuhi kebersamaan sesama yang sangat kuat. Sementara besar wadah perangsang akan sulit untuk menampung seluruh keinginan warganya. Yang guna mencapai target secara masal akan memerlukan persiapan yang rumit. Perbedaan pendidikan, mempengaruhi tujuan dan kesepakatan bersama, sehingga sukar mengimpun dalam satu wadah yang mapan dan langgeng.

Bentuk peran serta masyarakat sebenarnya sudah ada. hanya saja tradisi ini masih berlangsung di perkampungan, sedang kawasan diluar kampung terjadi secara sidomuli. Hambatan dari luar adalah belum adanya hubungan kerjasama yang baik dan terbuka antara pemerintah dengan pihak partisipan. Konflik antar

keduanya sering terjadi, pihak pemerintah sering memaksakan program pembangunan. Sikap pemerintah yang dirasa serba tahu hendak mengatur segala gerak kehidupan masyarakat lewat suatu cetak biru yang direncanakannya, hal ini justru dapat menimbulkan bumerang.

IV. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Perumahan

Mengajak masyarakat berperanserta dalam pembangunan lebih mudah kepada warga golongan rendah daripada golongan menengah keatas. Hal ini bisa dimengerti karena golongan rendah mempunyai kebersamaan senasib yang sangat kuat. Semakin besar wadah peranserta akan sulit untuk menampung seluruh keinginan warganya, yaitu guna mencapai target secara massal akan memerlukan persiapan yang rumit. Perbedaan pendidikan, mempengaruhi tujuan dan kesepakatan bersama, sehingga sukar menghimpun dalam satu wadah yang mapan dan langgeng.

Menurut *Turner*, pada saat ini pelaksanaan peran serta masyarakat berpenghasilan rendah masih diartikan secara harfiah bahwa pembangunan perumahan secara swadaya oleh masyarakat adalah pembangunan perumahan yang dilakukan oleh orang-orang yang kekurangan gizi atau kebanyakan bekerja, tanpa adanya bantuan kredit, tidak cukup peralatan dan bahan bangunan yang tidak baik. Menurutnya gambaran tersebut tidak sepenuhnya benar. Isu pokok dalam hal ini adalah kekuatan untuk mengontrol dan menentukan.

Kunci utama dari peran serta masyarakat adalah pembentukan kerja sama yang berdasarkan pada keprcayaan dan keterbukaan. Menurut Habitat, peran serta masyarakat bukanlah untuk:

- Menyuruh masyarakat untuk melakukan pekerjaan pada proyek-proyek pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat.
- Menanyakan pendapat masyarakat tentang program yang telah dipersiapkan, untuk selanjutnya membuat perubahan-perubahan kecil.
- Meminta masyarakat untuk membayar sebagian besar biaya proyek atau kegiatan yang dilakukan.

- Menyusun masyarakat untuk melakukan pekerjaan pada proyek-proyek pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat.
- Menanyakan pendapat masyarakat tentang program yang telah dipersiapkan untuk selanjutnya membuat perubahan-perubahan kecil.
- Memintа masyarakat untuk membayar sebagian besar biaya proyek atau kegiatan yang dilakukan.

Kunci utama dari peran serta masyarakat adalah pembentukan kerja sama yang berdasarkan pada kepercayaan dan keterbukaan. Menurut Habitat, peran serta masyarakat bukanlah untuk:

Menurut Wawer, pada saat ini pelaksanaan peran serta masyarakat berpenghasilan rendah masih dianikan secara hariah bahwa pembangunan perumahan secara swadaya oleh masyarakat adalah pembangunan perumahan yang dilakukan oleh orang-orang yang kekurangan gizi atau kebanyakan bekerja tanpa adanya bantuan kredit. tidak cukup peralatan dan bahan bangunan yang tidak baik. Menurutnya gambaran tersebut tidak sepenuhnya benar. Isu pokok dalam hal ini adalah kekuatan untuk mengontrol dan mencontoh.

Menjaga masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan lebih mudah kepada warga golongan rendah daripada golongan menengah kesas. Hal ini bisa dimengerti karena golongan rendah menpunyai keberanian sosial yang sangat kuat. Semakin besar wadah pertisipasi akan sulit untuk mempertahankan solusi kelangsungan hidupnya. yaitu guna mencapai target secara massal akan memerlukan persiapan yang rumit. Perhedaan pendidikan, mempengaruhi tujuan dan kesepakatan bersama. sehingga sukar mengharapkan dalam satu wadah yang mapan dan lunggeng.

IV. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Perumahan

Jusuf Kohindupan mengatakan bahwa suatu cerak biru yang direncanakannya. Hal ini gerak kehidupan masyarakat lewat suatu cerak biru yang direncanakannya. Hal ini pembangunan. Siklap pemerintah yang dinas serba tahu hendak mengatur segala kedunya sering terjadi pihak pemerintah sering memaksakan program

Peran serta masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan dan hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan selama proses pengadaan perumahan. Dalam pelaksanaannya perlu adanya saling percaya dan keterbukaan antara pihak pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan, mengingat ada berbagai macam peran serta masyarakat, maka perlu ada kejelasan tentang bagaimana peran serta tersebut dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah mutlak untuk dilakukan, mengingat begitu kompleks dan luasnya beban pemerintah utamanya pemerintah daerah terkait dengan kebijaksanaan otonomi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan[14]. Dalam era sebelumnya, pendekatan yang dilakukan guna membangun keterlibatan masyarakat lebih bernuansa politik. Namun saat ini, pendekatan tersebut harus lebih diarahkan pada teknis dan operasional guna memaksimalkan peran serta masyarakat.

Program pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pengendalian, sudah sewajarnya jika dititik beratkan pada keterlibatan masyarakat. Selain mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat, optimalisasi sumber daya pembangunan, juga nantinya akan menjadikan masyarakat sebagai prioritas dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Hingga saat ini, desentralistik masih merupakan tanda tanya besar bagi kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan di era otonomi ini. Hanya dengan melalui keterlibatan masyarakat dan koordinasi dengan berbagai pihak (stakeholders), stagnasi pembangunan akibat pelimpahan tanggung jawab pada pemerintah daerah sebagai perwujudan otonomi daerah dapat diminimalisir.

Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga.disamping itu pembangunan juga merupakan proses multi dimensional

---

[14] Wisnu Hidayat, Nyimas D Koryati, dn H.S.N. Nonggilan, *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Partisipatif*, YPAPI.Jakarta.1998 hal 4 – 5

yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan ekselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Pengertian tersebut mengisyaratakan bahwa pembagunan berarti proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksud untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat untuk mencakup kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan[15] guna mencapai kondisi ini, kemandirian masyarakat tidaklah cukup, melainkan dibutuhkan partisipasi aktif dari berbagai stakeholder. Stakeholder bersama-sama masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan moriil dan materi pada setiap tahapan pembangunan[16]. Partisipasi warga merupakan proses ketika warga sebagai individu atau kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka[17].

1.5.3. Kajian Pemukiman Untuk Masyarakat Pengungsi

Dalam sub bab ini akan membahas tentang permukiman untuk masyarakat pengungsi, dimana akibat terjadinya konflik atau kerusuhan sosial yang terjadi di tanah air telah menyebabkan terjadinya arus gelombang pengungsian ke beberapa wilayah yang aman di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para keluarga pengungsi tersebut telah kehilangan harta benda, tempat tinggal, pekerjaan dan tidak sedikit yang kehilangan korban jiwa

Sejalan dengan semakin kondusifnya situasi di beberapa wilayah konflik, maka dirasa tepat untuk segera dilakukan upaya optimal mengakhiri penanganan pengungsi yang berada di barak-barak penampungan atau fasilitas umum dan yang berada dipenampungan sanak familinya.

---

[15]Wisnu Hidayat, Nyimas D Koryati, dn H.S.N. Nonggilan, *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Partisipatif*, YPAPI Jakrta.1998 Hal 4 – 5

[16] Ibid. Hal 5

[17] Helfah Sj.S, *Inovasi Partispasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia . Jakarta. 2004. Hal 17

Pemukiman sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya sebagai tempat untuk bernaung dan rasa aman (*security)* sebagai kebutuhan yang paling dasar bagi setiap manusia baik yang miskin atau yang kaya. Manusia hidup membutuhkan tempat bernaung, tidur, istirahat dan berkumpul sekeluarga. Maka untuk mendukung uraian di atas, berikut ini akan dijelaskan kajian perumahan dan permukiman.

1.5.3.1.Kajian Perumahan dan Permukiman

Kajian Perumahan dimaksudkan untuk mengetahui lebih lanjut teori mengenai rumah, perumahan dan pemukiman, kebijaksanaan, ciri-ciri perumahan, fungsi rumah, permasalahan pembangunan perumahan dan pemukiman, faktor dan dampak atau manfaat pembangunan perumahan dan pemukiman, aspek penunjang pembangunan perumahan dan pemukiman, dan kriteria perumahan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini:

1. **Teori Mengenai Rumah, Perumahan dan Pemukiman.**
   Berikut ini merupakan pengertian yang digunakan oleh para ahli untuk menggambarkan pengertian mengenai rumah, perumahan dan pemukiman:
   a) Definisi rumah menurut Undang-undang RI No.4 Tahun 1992, adalah bangunan yang befungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah ialah untuk berlindung dari gangguan iklim dan makhluk hidup lainnya, tempat awal pengembangan penghidupan keluarga dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.
   b) Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan[18]
   c) Perumahan (Suparlan) adalah perumahan bukan hanya mengandung arti sebagai tempat tinggal melainkan merupakan suatu komplek yang melibatkan berbagai unsur kebudayaan yang mewujudkan bukan hanya

[18] Menteri Negara Perumahan Rakyat, Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman,hal 18

Pemukiman sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya sebagai tempat untuk bernaung dan rasa aman (security) sebagai kebutuhan yang paling dasar bagi setiap manusia baik yang miskin atau yang kaya. Manusia hidup membutuhkan tempat bernaung, tidur, istirahat dan berkumpul sekeluarga. Maka untuk mendukung uraian di atas, berikut ini akan dijelaskan kajian perumahan dan pemukiman.

1.5.3.1.Kajian Perumahan dan Pemukiman

Kajian Perumahan dimaksudkan untuk mengetahui lebih lanjut teori mengenai rumah, perumahan dan pemukiman, kebijaksanaan, ciri-ciri perumahan, fungsi rumah, permasalahan pembangunan perumahan dan pemukiman, faktor dan dampak atau manfaat pembangunan perumahan dan pemukiman, aspek penunjang pembangunan perumahan dan pemukiman, dan kriteria perumahan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini:

1. Teori **Mengenai Rumah, Perumahan dan Pemukiman.**

Berikut ini merupakan pengertian yang digunakan oleh para ahli untuk menggambarkan pengertian mengenai rumah, perumahan dan pemukiman:

a) Definisi rumah menurut Undang-undang RI No.4 Tahun 1992, adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah ialah untuk berlindung dari gangguan iklim dan mahluk hidup lainnya, tempat awal pengembangan pengidupan keluarga dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan[16]

c) Permukiman (Suparlan) adalah permukiman bukan hanya mengandung arti sebagai tempat tinggal melainkan merupakan suatu kompleks yang melibatkan berbagai unsur kebudayaan yang mewujudkan bukan hanya

[16] Menteri Negara Perumahan Rakyat, Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Pemukiman hal 18

kegiatan-kegiatan biologis saja tetapi juga berbagai kegiatan sosial, ekonomi, politik, agama, dan sebagainya[19]

d) Perumahan dalam arti luas mencakup juga rumah dan segala fasilitas pendukungnya yang bersama merupakan suatu lingkungan. Fasilitas perumahan mencakup aneka ragam, antara lain : penyediaan air minum, jaringan saluran pembuangan, jalan lingkungan dan sebagainya yang kesemuanya penting bagi pemeliharaan lingkungan.

e) Dalam Undang-undang RI No. 4 Tahun 1992, menyebutkan definisi perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Perumahan juga merupakan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan bermasyarakat dalam lingkup terbatas. Penataan ruang dan kelengkapan prasarana dan sarana lingkungan dan sebagainya, dimaksudkan agar lingkungan tersebut akan merupakan lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta dapat berfugsi sebagaimana diharapkan.

f) Pemukiman definisinya dapat dibedakan menurut:.

1. Menurut UU No.4 tahun 1992: Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung,baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yaitu:
   - Sarana lingkungan
   - Rumah/ hunian tempat tinggal
   - Prasarana lingkungan
   - Utilitas umum
   - Kawasan siap bangun
   - Lingkungan siap bangun
   - Kapling tanah

---

[19] Mulyanto Sumaidi dan Hans Pieter ever, Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok, CV Rajawali, Jakarta, 1987, hal 87

kegiatan-kegiatan biologis saja tetapi juga berbagai kegiatan sosial, ekonomi, politik, agama, dan sebagainya"[9]

d) Perumahan dalam arti luas mencakup juga rumah dan segala fasilitas pendukungnya yang bersama merupakan suatu lingkungan. Fasilitas perumahan mencakup antara lain : penyediaan air minum, jaringan saluran pembuangan, jalan lingkungan dan sebagainya yang kesemuanya penting bagi pemeliharaan lingkungan.

e) Dalam Undang-undang RI No. 4 Tahun 1992, menyebutkan definisi perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Perumahan juga merupakan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan bermasyarakat dalam lingkup terbatas. Pemiliran ruang dan kelengkapan prasarana dan sarana lingkungan dan sebagainya, dimaksudkan agar lingkungan tersebut akan merupakan lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta dapat berfungsi sebagaimana dibarapkan.

f) Pemukiman definisinya dapat dibedakan menurut:

1. Menurut UU No.4 tahun 1992: Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung,baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yaitu:
   - Sarana lingkungan
   - Rumah/ hunian tempat tinggal
   - Prasarana lingkungan
   - Utilitas umum
   - Kawasan siap bangun
   - Lingkungan siap bangun
   - Kapling tanah

---

[9] Mahyuno Sumaidi dan Hans Pieter Over. Konservasi dan Kebudayaan Pokok. CV Kajamali. Jakarta. 1982. hal 87

- Konsolidasi tanah (LC adalah upaya penataan kembali penguasaan penggunaan, pemilikan tanah oleh masyarakat pemilik tanah melalui musyawarah bersama untuk menyiapkan kapling siap bangun)

2. Poeji Soewarso
   - Rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
   - Perumahan merupakan suatu lingkungan tempat tinggal manusia terdiri dari sekelompok rumah dengan berbagai macam fasilitas umum, jaringan, pergerakan serta sarana dan prasarana pendukung.
   - Pemukiman merupakan pengertian lebih luas dari perumahan yaitu yang dilengkapi dengan berbagai sarana peri kehidupan dan penghidupan.
3. Bermukim adalah hidup bersama secara menetap disuatu lingkungan atau wilayah tertentu dimana terjadi pertemuan pribadi-pribadi dalam hubungan intersubyektif. Permukiman berasal dari kata " mukim" (tempat tinggal) permukiman sebagai kata benda (noun) berarti adalah daerah tempat bermukim, tindakan memukimkan.
4. Menurut Vebor C. Finch, pemukiman merupakan sekelompok manusia berdasarkan satuan tempat tinggal atau kediaman yang mencakup fasilitas-fasilitas seperti bangunan rumah, serta jalan yang melayani manusia tersebut.
5. Pemukiman untuk masyarakat pengungsi adalah: Bangunan berupa rumah atau tempat tinggal yang disediakan untuk menempatkan kembali pengungsi ketempat yang lebih baik dari penampungan sementara.

2. Ciri-Ciri Perumahan

Dengan singkat dapat disebutkan beberapa ciri hakiki yang secara ideal menandai perumahan manusia. Ciri-ciri hakiki itu adalah sebagai berikut:[20]

---

[20] Prof. Ir. Eko Budiharjo, MSc, Sejumlah Masalah Permukiman Kota, Penerbit Alumni, Bandung, 1984 hal 140

a. Rumah memberikan keamanan

Manusia adalah mahluk rohani dan jasmani. Sebagai keutuhan pribadi yang jasmani ia membutuhkan pengamanan bagi badannya. Tempat berteduh untuk menghindari teriknya panas matahari, dinginnya air hujan dan kepengapan udara polusi. Rumah harus menjaga kesehatan badan.

b. Rumah memberikan ketenangan hidup

Dunia dalam jaman dewasa ini dipenuhi oleh keramaian dan hiruk pikuk yang memekakkan telinga. Kesibukkan dan keramaian itu dapat menimbulkan ketegangan patologis. Bahkan jaman teknologi yang begitu maju justru merupakan ancaman yang meresahkan, karena manusia disitu merasa dirampas dari ketenangan dan kepribadiannya. Rumah seharusnya menunjukkan manfaatnya untuk tempat memperoleh ketenangan jasmani dan rohani. Rumah adalah tempat rekoleksi kekuataan.

c. Rumah memberikan kemesraan dan kehangatan hidup

Dalam jaman teknologi maju, dimana hubungan intersubyekif nyaris tergeser dan diganti dengan perhitungan yang kering dan non-personal, kemesraan dan kehangatan hidup dirasa sangat dibutuhkan. Manusia bukanlah angka ataupun robot yang deterministis, melainkan seorang pribadi yang menginginkan dialog serta pergaulan yang manusiawi. Bagaimanapun juga manusia adalah makhluk yang menuju kepada kemandirianya dan ingin menemukan dirinya. Disini rumah mampu memberikan wahana yang ideal dan suasana mampu mendorong penemuan dirinya (Selbst) itu.

d. Rumah memberikan kebebasan

Kegiatan-kegiatan budaya itu sendiri merupakan proses pembebasan manusia. Karya manusia pada hakekatnya adalah langkah-langkah menuju kepada penemuan diri yang otentik (memerangi kemunafikan). Rumah memberikan kondisi kepada pencapaian kebebasan psikologis dan sosial.

3. Fungsi Rumah

Rumah (Perumahan) mempunyai beberapa fungsi tertentu dalam kehidupan manusia antara lain:[21] Pertama, rumah menunjukkan tempat tinggal. Orang yang bermukim berarti tinggal di satu tempat. Secara fisis orang dikatakan bertempat tinggal, apabila ia telah menemukan lingkungan alamnya yang cocok baginya serta mempunyai peralatan yang ia butuhkan untuk bertempat tinggal. Bahwa hal ini tidaklah normal,. Bermukim pada hakekatnya adalah menetap. Oleh karena itulah maka rumah disebut *'maison'* atau *'maisio'*, suatu pengertian yang menunjukkan manusia tinggal secara menetap. Bermukim pada dasarnya adalah *'demeurer'* yang pada intinya mengacu kepada adanya ketenangan. Ketenangan ruang (spasial) dalam ruang membawa pula ketenangan rohani bagi manusia.

Dengan cara lain hal diatas dapat diuraikan sebagai berikut. Pemungkiman pada hakekatnya adalah menciptakan ruang hidup manusia. Kalu dianalisa lebih lanjut, hal itu memperlihatkan adanya pengambilan distansi, suatu disosialasi tersuatu yang yang dianggap asing, disegani atau bahkan membahayakan.

Dalam bentuk-bentuk materialnya suatu rumah dilengkapi dengan tembok dan atap yang kuat. Hal itu menunjukan bahwa dalam arti dan batas tertentu berfungsi pula sebagai hasil bagi manusia. Oleh karena itu rumah sebagai pemukiman pada dasarnya adalah pembudidayaan alam dan lebih lanjut dari itu merupakan inti dan ancang-ancang untuk memanusiakan dunia.

Fungsi kedua adalah bahwa merupakan mediasi antara manusia dan dunia. Dengan mediasi ini terjadilah sesuatu dialektik antara manuasia dengan dunianya. Dari keramaian dunia manusia menarik diri ke dalam rumahnya dan tinggal dalam suasana ketenangannya. Namun penarikan diri ini tetap bersifat intensional, artinya tearah ke dunia. Manusia kemudian keluar menuju kedunia dengan kerja dan karyanya. Dengan hasil kerjanya itu ia kembali lagi kerumahnya untuk menemukan ketenangan batin. Dengan demikian terjadilah mediasi yang berkesinambungan dan dialektik yang membawa kemajuan serta peningkatan

---

[21] Prof. Ir. Eko Budiharjo, MSc, Sejumlah Masalah Permukiman Kota, Penerbit Alumni, Bandung, 1984Hal 138

dalam mutu hidup manusia. Uraian diatas tidak bermaksud menunjukkan proses histories kehidupan manusia, tetapi mau menampilkan suatu momentum yang hakiki yang selalu dan berulang kali terlaksana dalam kehidupan rumah tangga manusia sehari-hari.

Sebagai fungsi ketiga rumah merupakan tempat menyimpan, dimana manusia mendapatkan kekuatannya kembali. Karya yang dilakukannya sebagai ungkapan hubungan dialektis antara manusia dan dunianya suatu ketika akan melelahkan dan menghabiskan energi. Penguatan kembali dilaksanakan baik dalam arti fisis, maupun dalam arti rohani. Dalam rumah manusia makan, minum dan tidur untuk memperoleh kembali kekuatan dan kesegaran. Dalam rumah pula manusia mendapatkan pendidikan dan pembentukan mental sebagai perkayaan kehidupan budayanya.

1.5.3.2.Pengertian Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Perumahan Dan Permukiman

Pembangunan perumahan dan permukiman meliputi pembangunan perumahan diatas kawasan permukiman yang ditata dengan perencanaan yang baik sesuai dengan tata ruang dan tata guna tanah, dilengkapi dengan prasarana dan fasilitas lingkungan sehingga merupakan suatu lingkungan permukiman yang fungsional bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam rangka berbangsa dan bernegara.

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berpengaruh basar terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia lainnya seperti sandang, pangan, dan kesehatan. Pentingnya rumah dapat dilihat dari fungsinya sebagai tempat tinggal, tempat bermukim, sebagai kata kerja atau proses yang berlanjut *(on going process)* disamping sebagai kata benda, shelter di samping housing, sebagai masin kehidupan, tempat bercengkrama, menjamu sahabat, mendidik anak, bekerja dan berprestasi, sebagai asset dan modal kehidupan (Abrams, 1964; Turner, 1976; Peatie, 1969, dan Darrundongo, 1992).

Adapun tujuan pembangunan perumahan dan permukiman adalah agar setiap orang dan dapat menempati perumahan yang sehat, untuk mendukung

dalam mutu hidup manusia. Uraian diatas tidak bermaksud menunjukkan proses historis kehidupan manusia, tetapi mau menampilkan suatu momentum yang hakiki yang selalu dan berulang kali terlaksana dalam kehidupan rumah tangga manusia sehari-hari.

Sebagai lingsi ketiga rumah merupakan tempat menyimpan, dimana manusia mendapatkan kekuatannya kembali. Karya yang dilakukannya sebagai ungkapan hubungan dialektis antara manusia dan dunianya suatu kotika akan melelahkan dan menghabiskan energi. Pengunaan kembali dilaksanakan baik dalam arti fisis maupun dalam arti rohani. Dalam rumah manusia makan, minum dan tidur untuk memperoleh kembali kekuatan dan keseganan. Dalam rumah pula manusia mendapatkan pendidikan dan pembentukan mental sebagai perkayaan kehidupan budayanya.

1.5.3.2.Pengertian Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Perumahan Dan Permukiman

Pembangunan perumahan dan permukiman meliputi pembangunan perumahan diatas kawasan permukiman yang ditata dengan perencanaan yang baik sesuai dengan tata ruang dan tata guna lanah, dilengkapi dengan prasarana dan fasilitas lingkungan sehingga merupakan suatu lingkungan permukiman yang fungsional bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam rangka berbangsa dan bernegara.

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berpengaruh basar terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia lainnya seperti sandang, pangan, dan kesehatan. Pentingnya rumah dapat dilihat dari fungsinya sebagai tempat tinggal, tempat bermukim, sebagai kata kerja atau proses yang berlanjut (on going process) disamping sebagai kata benda. shelter di samping housing, sebagai masin kehidupan, tempat bercengkrama, menjamu sahabat, mendidik anak, bekerja dan berpresiasi, sebagai asset dan modal kehidupan (Abrams, 1964; Turner, 1976; Pratie, 1969, dan Darrundono, 1992).

Adapun tujuan pembangunan perumahan dan permukiman adalah agar setiap orang dan dapat menempati perumahan yang sehat, untuk mendukung

kelangsungan dan peningkatan kesejahteraan sosialnya. Karena itu sasaran pembangunan perumahan dan permukiman adalah tertata dan tersedianya (mengatur, membangun, memugar, memperbaiki, menempati) perumahan dan permukiman terutama bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.[22]

Pembangunan perumahan dan permukiman mempunyai lingkup yang sangat luas, yang meliputi tiga aspek pokok, yaitu perencanaan fisik, teori perumahan dan permukiman, dan penentuan standard.[23]

1. Perencanaan fisik dimaksudkan untuk penataan kawasan perumahan dan permukiman sebagai satuan sosial, ekonomi, dan fisik tata ruang dalam fungsinya sebagai wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Teori perumahan dan permukiman dimaksudkan untuk mengatur investasi prasarana lingkungan, sarana umum, dan fasilitas sosial yang harus diinvestasikan untuk berfungsinya perumahan dan permukiman berdasarkan konsep pengelolaan sistem yang bersifat terbuka dan partisipatif.
3. Penentuan standard dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang mengutamakan asas kelayakan yang terjangkau.

1.5.3.3 Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Pembangunan di bidang yang berhubungan dengan tempat tinggal beserta sarana dan prasarananya memang perlu mendapatkan prioritas mengingat temapt tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar (*basic need*) manusia. Sudah selayaknya apabila untuk pembangunan perumahan dan permukiman itu pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang perumahan dan permukiman yang dimaksudkan untuk memberikan arahan (*guide line*) bagi pembangunan sektor perumahan dan permukiman.[24]

Perumahan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan hutan lindung, baik yang

---

[22] Blaang, C. Djemabut, Perumahan dan permukiman sebagai kebutuhan pokok. Penerbit Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 1986. Hal-7.
[23] Ibid, Hal-42
[24] Suparno Sasta M & Endi Marlina, Perencanaan dan pengembangan perumahan.Penerbit Andi.Yogyakarta.2005 Hal 3-4

kelangsungan dan peningkatan kesejahteraan sosialnya. Karena itu sasaran pembangunan perumahan dan permukiman adalah terrata dan terjadinya (mengatur, membangun, memugar, memperbaiki, menambah) perumahan dan permukiman tertutama bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.[22]

Pembangunan perumahan dan permukiman mempunyai lingkup yang sangat luas, yang meliputi tiga aspek pokok, yaitu perencanaan fisik, teori perumahan dan permukiman, dan penentuan standard.[23]

1. Perencanaan fisik dimaksudkan untuk penataan kawasan perumahan dan permukiman sebagai satuan sosial, ekonomi, dan fisik tata ruang dalam lingsinya sebagai wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Teori perumahan dan permukiman dimaksudkan untuk mengatur investasi prasarana lingkungan, sarana umum, dan fasilitas sosial yang harus diinvestasikan untuk berfungsinya perumahan dan permukiman berdasarkan konsep pengelolaan sistem yang bersifat terbuka dan partisipatif.
3. Penentuan standard dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang menguntungkan atas kelayakan yang terjangkau.

1.5.3.3 Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Pembangunan di bidang yang berhubungan dengan tempat tinggal beserta sarana dan prasarannya memang perlu mendapatkan prioritas mengingat tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar (basic need) manusia. Sudah selayaknya apabila untuk pembangunan perumahan dan permukiman itu pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang perumahan dan permukiman yang dimaksudkan untuk memberikan arahan (guide line) bagi pembangunan sektor perumahan dan permukiman.[24]

Perumahan bertingsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan hutan lindung, baik yang

---

[22] Blang, C. Djemabat. Perumahan dan permukiman sebagai kebutuhan pokok. Pancrbit Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1986. Hal-7.
[23] Ibid. Hal-42
[24] Suparno Sastra M & Hadi Mardina. Perencanaan dan pengembangan perumahan.Penerbit Andi.Yogyakarta.2005. Hal 3-4

berupa kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Apabila dilihat dari perkembangannya, proses pembangunan memang sangat dipengaruhi oleh adanya landasan pembangunan yang kuat, perilaku pembangunan, serta modal dasar pembangunan yang kuat, yaitu agama.

Dalam lingkup pembangunan, masyarakat merupakan pelaku utama pembangunan tersebut. Mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang pembangunan adalah kewajiban pemerintah. Untuk mewujudkan kondisi yang betul-betul kondusif diperlukan satu kesatuan langkah antara kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah sehingga dapat saling menunjang, saling mengisi, serta saling melengkapi satu dengan yang lain.

Prasarana yang harus dilengkapi di dalam kawasan hunian ini adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, seperti: (1) jaringan jalan untuk mobilitas manusia dan angkutan barang, mencegah perambatan kebakaran serta untuk menciptakan bangunan yang teratur; (2)jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan ; (3)jaringan saluran air hujan untuk pematusan (drainase) dan pencegahan banjir setempat. Ada pula ketentuan pada pasal ini bahwa apabila tidak terdapat air tanah sebagai sumber air bersih, jaringan air bersih merupakan sarana dasar.

Sarana lingkungan yang semestinya ada di dalam kawasan lingkungan ini adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Fasilitas penunjang ini dapat meliputi aspek ekonomi yang antara lain, tersedianya bangunan perniagaan atau perbelanjaan yang tidak mencemari lingkungan, sedangkan fasilitas penunjang yang meliputi aspek sosial budaya, antara lain berupa bangunan pelayanan umum dan pemerintah, pendidikan dan kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olahraga, pemakaman dan pertamanan.

1. Pembangunan Perumahan

Bagi sebuah lingkungan perkotaan, kehadiran lingkungan perumahan sangatlah penting dan berarti karena bagian terbesar pembentuk struktur ruang

perkotaan adalah lingkungan permukiman. Oleh karena itu munculnya permasalahan pada suatu permukiman akan menimbulkan dampak langsung terhadap permasalahan perkotaan secara menyeluruh. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa baik atau buruknya sistem perkotaan dipengaruhi oleh baik-buruknya lingkungan permukiman.

Oleh karena itu perencanaan sebuah perumahan memegang peranan yang sangat penting dalam pengendalian laju pembangunan agar berdampak positf dan berkesinambungan. Perencanaan itu harus dilakukan, dimulai dari perencanaan rumah-rumah hingga perencanaan lingkungan permukiman dan perlotaan, bahkan hingga skenario wilayahnya.

Untuk merencanakan lingkungan perumahan dengan baik, kita perlu memperhatikan beberapa kriteria berikut:[25]

1. Lokasi

   Lokasi perumahan sebaiknya dipilih didaerah yang memberikan akses yang mudah bagi para pemukim (selama-lamanya 30 menit dengan menggunakan alat transportasi umum) untuk menuju tempat kerja dan pusat-pusat kegiatan pelayanan yang lebih luas.

2. Kondisi geologi/ topografi

   Suatu daerah memerlukan kondisi dasar geologi maupun topografi yang baik untuk dapat berkembang dengan baik. Dari aspek geologi, struktur dan kekuatan tanah yang direncanakan untuk pengembangan daerah permukiman harus dalam kondisi yang baik dan stabil. Apabila tanah mempunyai kestabilan dan kemantapan yang baik, secara teknis dilahan tersebut akan dapat dikembangkan berbagai bangunan secara bebas dan leluasa.

3. Kepastian hukum

   Status hukum suatu lahan merupakan hal yang sangat penting sehubungan dengan legalitas lahan tersebut. Dengan kejelasan status hukum suatu lahan, pemilik akan mempunyai kebebasan untuk mengembangkan (selama masih

---

[25] Suparno Sasta M & Endi Marlina, Perencanaan dan pengembangan perumahan. Penerbit Andi.Yogyakarta.2005 Hal 131-135

dalam aturan yang berlaku di wilayah tersebut), bahkan juga memindahtangankan lahan kepada orang lain.

Suatu bangunan atau rumah dan tanah dikatakan mempunyai status hukum yang jelas apabila tanah, rumah dan penghuniannya diperoleh dengan tata cara atau prosedur hukum. Tanah.

2 Pembangunan Permukiman

Permukiman merupakan suatu kesatuan dimana suatu perumahan berada, sehingga lokasi dan lingkungan perumahan tersebut sebenarnya tidak akan pernah lepas dari permasalahan dan lingkup keberadaan suatu permukiman.

Apabila dikaji dari segi makna, permukiman berasal dari terjemahan kata *human settelments* yang mengandung pengertian suatu proses bermukim. Sifat dan karakter suatu permukiman biasanya jauh lebih kompleks. Karena permukiman mencakup suatu batasan yang lebih luas dibandingkan luas dan lingkup perumahan.

- Elemen permukiman

Permukiman terbentuk dari kesatuan isi dan wadahnya. Kesatuan antara manusia sebagai penghuni (isi) dengan lingkungan hunian (wadah) akan membentuk suatu konunitas yang secara bersamaan dapat membentuk suatu permukiman yang mempunyai dimensi yang sangat luas, dimana batsa dari permukiman biasanya berupa batasan geografis yang ada dipermukaan bumi, misalnya suatu wilayah atau benua yang terpisah karena lautan.[26]

Elemen-elemen permukiman, yaitu isi dan wadah, yang terdiri dari beberapa unsur yaitu:[27]

1. Alam
   - Geologi
   - Topografi
   - Tanah
   - Air

---

[26] Suparno Sasta M & Endi Marlina, Perencanaan dan pengembangan perumahan. Penerbit Andi.Yogyakarta.2005 Hal 37-38

[27] Ibid Hal 39-42

dalam aturan yang berlaku di wilayah tersebut, bahkan juga memindahkangunakan lahan kepada orang lain.

Suatu bangunan atau rumah dan tanah dikatakan menpunyai status hukum yang jelas apabila tanah, rumah dan penghuniannya dipeoleh dengan tata cara atau prosedur hukum. Tanah.

2 **Pembangunan Permukiman**

Permukiman merupakan suatu kesatuan dimana suatu permukiman berada, sehingga lokasi dan lingkungan permukiman tersebut sebenarnya tidak akan pernah lepas dari permasalahan dan lingkup keberadaan suatu permukiman.

Apabila dikaji dari segi makna, permukiman berasal dari terjemahan kata bahasa asing yang mengandung pengertian suatu proses bermukim. Sifat dan karakter suatu permukiman biasanya jauh lebih kompleks. Karena permukiman mencakup suatu batasan yang lebih luas dibandingkan luas dan lingkup perumahan.

Elemen permukiman

Permukiman terbentuk dari kesatuan isi dan wadahnya. Kesatuan antara manusia sebagai penghuni (isi) dengan lingkungan hunian (wadah) akan membentuk suatu komunitas yang secara bersamaan dapat membentuk suatu permukiman yang mempunyai dimensi yang sangat luas, dimana batas dari misalnya suatu wilayah atau benua yang terpisah karena lautan.[26]

permukiman biasanya berupa batasan geografis yang ada dipermukaan bumi.

Elemen-elemen permukiman, yaitu isi dan wadah, yang terdiri dari beberapa unsur yaitu:[27]

1. Alam
   - Geologi
   - Topografi
   - Tanah
   - Air

---

[26] Suparno Sastra M & Hadi Mardina. Perencanaan dan pengembangan permukiman. Penerbit Andi.Yogyakarta.2005 Hal 37-39

[27] Ibid Hal 39-42

- Tumbuh-tumbuhan
- Hewan
- iklim

2. Manusia

   Didalam suatu wilayah permukiman, manusia merupakan pelaku utama kehidupan, disamping makhluk hidup lain seperti hewan, tumbuhan, dan lainnya. Sebagai makhluk yang paling sempurna, dalam kehidupannya manusia membutuhkan berbagai hal yang dapat menunjang kelangsungan hidupnya, baik itu kebutuhan biologis (ruang, udara, temperatur, dll.).

3. Masyarakat

   Masyarakat merupakan kesatuan sekelompok orang (keluarga) dalam suatu permukiman yang membentuk suatu komunitas tertentu. Hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi didalam masyarakat yang mendiami suatu wilayah permukiman adalah sbb:

   1. Kepadatan dan komposisi penduduk
   2. Kelompok sosial
   3. Adat dan kebudayaan
   4. Pengembangan ekonomi
   5. Pendidikan
   6. Kesehatan
   7. Hukum dan administrasi

4. Bangunan/ rumah

   Bangunan/ rumah merupakan wadah bagi manusia (keluarga). Oleh karena itu dalam perencanaan dan pengembangannya perlu mendapatkan perhatian khusus agar sesuai dengan rencana kegiatan yang berlangsung di tempat tersebut. Pada prinsipnya bangunan yang dapat digunakan sepanjang operasional kehidupan manusia bisa dikategorikan sesuai dengan fungsi masing-masing, yaitu:

   a. Rumah pelayanan masyarakat (misalnya sekolah, rumah sakit, dll).
   b. Fasilitas rekreasi (fasilitas hiburan)
   c. Pusat perbelanjaan (perdagangan) dan pemerintahan

- *Tumbuh-tumbuhan*
- Hewan
- iklim

2. *Manusia*

Didalam suatu wilayah permukiman, manusia merupakan pelaku utama kehidupan, disamping makhluk hidup lain seperti hewan, tumbuhan, dan lainnya. Sebagai makhluk yang paling sempurna, dalam kehidupannya manusia membutuhkan berbagai hal yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya, baik itu kebutuhan biologis (ruang, udara, temperatur, dll).

3. *Masyarakat*

Masyarakat merupakan kesatuan sekelompok orang (kelurga) dalam suatu permukiman yang membentuk suatu komunitas tertentu. Hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi didalam masyarakat yang mendiami suatu wilayah permukiman adalah sbb:

1. Kepadatan dan komposisi penduduk
2. Kelompok sosial
3. Adat dan kebudayaan
4. Pengembangan ekonomi
5. Pendidikan
6. Kesehatan
7. Hukum dan administrasi

4. Bangunan/ rumah

Bangunan/ rumah merupakan wadah bagi manusia (kelurga). Oleh karena itu dalam perencanaan dan pengembangnya perlu mendapatkan perhatian khusus agar sesuai dengan rencana kegiatan yang berlangsung di tempat tersebut. Pada prinsipnya bangunan yang dapat digunakan sepanjang operasional kehidupan manusia bisa dikategorikan sesuai dengan fungsi masing-masing, yaitu:

a. Rumah pelayanan masyarakat (misalnya sekolah, rumah sakit, dll).
b. Fasilitas rekreasi (fasilitas hiburan)
c. Pusat perbelanjaan (perdagangan) dan pemerintahan

d. Industri

e. Pusat transportasi

5. Networks

Networks merupakan sistem buatan maupun alam yang menyediakan fasilitas untuk operasional suatu wilayah permukiman. Untuk sistem buatan, tingkat pemenuhannya bersifat relatif, dimana antara wilayah permukiman yang satu dengan yang lain tidak harus sama.

Sistem buatan yang keberadaan diperlukan didalam suatu wilayah, antara lain adalah:

a. Sistem jaringan air bersih

b. Sistem jaringan listrik

c. Sistem transportasi

d. Sistem komunikasi

e. Drainase dan air kotor

f. Tata letak fisik

1.5.3.4 Pemenuhan Kebutuhan Perumahan dan Pemukiman Akibat Dampak Dari Kerusuhan Yang Terjadi

Masalah permukiman kini menjadi potensi konflik baru di Ambon, pasca-rangkaian kerusuhan yang melanda Maluku sejak 19 Januari 1999. Kerap terjadi, pengungsi yang hendak kembali ke rumah miliknya mendapati rumah tersebut sudah ditempati pengungsi lain.

Dalam beberapa kasus lain, karena trauma dan tidak dapat kembali ke rumah miliknya, pemilik sah menjual rumah itu kepada pihak ketiga. Ketika pihak ketiga datang, rumah itu sudah dihuni pengungsi dari daerah lain yang baru mau meninggalkan rumah tersebut jika diberi ganti rugi oleh pihak ketiga. "Alasannya macam-macam, antara lain kalau tidak mereka huni rumah itu pasti sudah dibakar.

Konflik yang terjadi menimbulkan berbagai dampak bagi kedua pihak yang bertikai, baik dalam aspek budaya, kependudukan, tata ruang, hukum, pemerintahan dan pelayanan publik, dan salah satu dampak yang ditimbulkan oleh

d. Industri

e. Pusat transportasi

5. *Networks*

Networks merupakan sistem buatan manusun alam yang menyediakan fasilitas untuk operasional suatu wilayah permukiman. Untuk sistem buatan, tingkat pemenuhannya bersifat relatif dimana antara wilayah permukiman yang satu dengan yang lain tidak harus sama.

Sistem buatan yang kebetulan diperlukan didalam suatu wilayah, antara lain adalah:

a. Sistem jaringan air bersih

b. Sistem jaringan listrik

c. Sistem transportasi

d. Sistem komunikasi

e. Drainase dan air kotor

f. Tata letak fisik

1.5.3.4 Pemenuhan Kebutuhan Permukiman dan Pemukiman Akibat Dampak Dari Kerusuhan Yang Terjadi

Masalah permukiman kini menjadi potensi konflik baru di Ambon, pascaterjadinya kerusuhan yang melanda Maluku sejak 19 Januari 1999..Kerap terjadi pengungsi yang hendak kembali ke rumah miliknya mendapati rumah tersebut sudah ditempati pengungsi lain.

Dalam beberapa kasus lain, karena trauma dan tidak dapat kembali ke rumah miliknya, pemilik sah menjual rumah itu kepada pihak ketiga. Ketika pihak ketiga datang, rumah itu sudah dihuni pengungsi dari daerah lain yang baru mau meninggalkan rumah tersebut jika diberi ganti rugi oleh pihak ketiga. "Alasannya macam-macam, antara lain kalau tidak mereka beri rumah itu pasti sudah dibakar.

Konflik yang terjadi meninbulkan berbagai dampak bagi kedua pihak yang berikut, baik dalam aspek budaya, kependudukan, tata ruang, hukum, pemerintahan dan pelayanan publik, dan salah satu dampak yang ditimbulkan oleh

adanya konflik yang terjadi adalah ketersediaan tempat tinggal yang terbatas bagi para pengungsi yang ada.

Pemenuhan kebutuhan permukiman diwujudkan melalui pembangunan kawasan permukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan terpadu dengan pelaksanaan yang bertahap.[28]

Pembangunan kawasan permukiman ditujukan untuk:

1. Menciptakan kawasan permukiman yang tersusun atas satuan-satuan lingkungan permukiman.
2. Mengitegrasikan secara terpadu dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan yang telah ada atau disekitarnya.
3. Satuan-satuan lingkungan permukiman satu dengan yang lain saling dihubungkan oleh jaringan transportai sesuai dengan kebutuhan dengan kawasan lain yang memberikan berbagai pelayanan dan kesempatan kerja.

Ada 3 (tiga) hal yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan dan pemukiman sebagai dampak dari kerusuhan yang terjadi, yaitu:

1. Penanganan tanggap darurat
2. Rekonstruksi dan rehabilitasi bangunan, prasarana dan sarana dasar perumahan dan pemukiman.
3. Pemukiman kembali pengungsi

Penanganan tanggap darurat merupakan bagian upaya pertama yang harus dilakukan dalam rangka penanganan pengungsi, sebagai kegiatan penyelamatan korban dampak bencana alam atau kerusuhan social, sebelum proses lebih lanjut seperti pemulangana, pemebrdayaan, dan pengalihan (relokasi). Dalam rangka pemulangan kembali pengungsi ke tempat lingkungan perumahan dan pemukimannya semula, diperlukan upaya rekonsiliasi social untuk mendukung terciptanya suasana yang kondusif, sehingga kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan, prasarana dan sarana dasar pemukiman yang mengalami kerusakan dapat berjalan dengan baik, berhasil guna dan berdayaguna.

Apabila upaya tersebut tidak dapat sepenuhnya berjalan dengan optimal naka upaya pemberdayaan pengungsi ditempat penampungan perlu dilakukan agar

---

[28] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1992, Hal-10

kemudian dapat mampu menjalankan kehidupannya di tempat baru secara mandiri dan produktif. Namun demikiannya apabila upaya pemulangan dan pemberdayaan tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan, dapat dilakukan upaya pilihan terakhir yaitu kegiatan pengalihan (relokasi). Upaya pengalihan berupa kegiatan pemukiman kembali pengungsi ketempat yang baru baik secara sisipan maupun secara terkonsentrasi didaerah perkotaan maupun pedesaan.

1.5.3.5 Relokasi Permukiman Untuk Masyarakat Pengungsi

Relokasi atau permukiman kembali (*resettlement*) merupakan kegiatan memindahkan atau memukimkan kembali penduduk yang tanah dan bangunannya harus dibebaskan untuk keperluan pembangunan infrastruktur perkotaan ke lokasi permukiman baru, lebih khusus lagi yang menjadi sasaran utama adalah penduduk yang tidak memiliki legalitas tanah yang ditempati (Santoso, 1999). Dalam kondisi yang lain, relokasi permukiman juga dimungkinkan untuk memindahkan permukiman yang terkena bencana alam atau berada di kawasan rawan bencana alam.

Relokasi merupakan hal yang sulit menyangkut permukiman kembali, karena membangun kembali kondisi kehidupan dalam beberapa kasus, pemukiman dan pola hidup seluruh masyarakat dapat menjadi tugas paling menantang dalan kompleks.

Lokasi dan kualitas tempat baru adalah faktor penting dalam perencanaan relokasi, karena sangat menentukan hal-hal berikut ini, kemudahan menuju ke lahan usaha, jaringan sosial, pekerjaan, bidang usaha, kredit dan peluang pasar.. seriap lokasi mempunyai keterbatasan dan peluang masing-masing. Pemilihan lokasi harus memperhitungkan dampak terhadap masyarakat setempat. Permasalahan seperti kualitas lahan, daya tampung lokasi, kekayaan milik umum, sumber daya dan komposisi penduduk (stratifikasi sosial, suku-bangsa, jenis kelamin, etnik minoritas). Idealnya tempat relokasi baru sebaiknya secara geografis dekat dengan tempat lama atau asli untuk mempertahankan jaringan sosial dan ikatan masyarakat yang sudah baik. Berikut ini merupakan empat pilihan relokasi, yaitu:

kemudian dapat mampu menjalankan kehidupannya di tempat baru secara mandiri dan produktif. Namun demikiannya apabila upaya pemulangan dan pemberdayaan tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan, dapat dilakukan upaya pilihan terakhir yaitu kegiatan pengalihan (relokasi). Upaya pengalihan berupa kegiatan pemukiman kembali pengungsi ketempat yang baru baik secara sisipan maupun secara terkonsentrasi didaerah perkotaan maupun pedesaan.

1.5.3.5 Relokasi Permukiman Untuk Masyarakat Pengungsi

Relokasi atau permukiman kembali (resettlement) merupakan kegiatan memindahkan atau memukimkan kembali penduduk yang lamah dan bangunannya harus dibebaskan untuk keperluan pembangunan infrastruktur perkotaan ke lokasi permukiman baru. lebih khusus lagi yang menjadi sasaran utama adalah penduduk yang tidak memiliki legalitas tanah yang ditempati (Sanoso, 1999). Dalam kondisi yang lain, relokasi permukiman juga dimungkinkan untuk memindahkan permukiman yang terkena bencana alam atau berada di kawasan rawan bencana alam.

Relokasi merupakan hal yang sulit menyangkut permukiman kembali, karena membangun kembali kondisi kehidupan dalam beberapa kasus. pemukiman dan pola hidup seluruh masyarakat dapat menjadi tugas paling menantang dalam kompleks.

Lokasi dan kualitas tempat baru adalah faktor penting dalam perencanaan relokasi. karena sangat menentukan hal-hal berikut ini. kemudahan menuju ke lahan usaha. jaringan sosial. pekerjaan. bidang usaha. kredit dan peluang pasar. sarana lokasi mempunyai keterbatasan dan peluang masing-masing. Pemilihan lokasi harus mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat setempat. Permasalahan seperti kualitas lahan. daya tampung lokasi. kekayaan milik umum. sumber daya dan komposisi penduduk (stratifikasi sosial. suku-bangsa. jenis kelamin. etnik minoritas). Idealnya tempat relokasi baru sebaiknya secara geografis dekat dengan tempat lama atau asli untuk mempertahankan jaringan sosial dan ikatan masyarakat yang sudah baik. Berikut ini merupakan empat pilihan relokasi yaitu:

- Pemilihan lokasi dan alternatif; memilih lokasi yang baik adalah unsur paling penting. Mulai dengan pilihan-pilihan alternatif , yang melibatkan pemukim kembali yang potenisial dan penduduk setempat dengan proses tersebut.
- Studi kelayakan; melakukan studi kelayakan lokasi alternatif dan mempertimbangkan potensi kawasan dari segi persamaan ekologi, harga lahan, pekerjaan, kemungkinan untuk memperoleh kredit, pemasaran dan peluang ekonomi lainnya untuk mata pencaharian masyarakat setempat.
- Susunan dan rancangan; susunan dan rancangan kawasan relokasi harus sesuai dengan spesifikasi dan kebiasaan budaya mengidentifkasi lokasi sekarang terhadap berbagai prasaran fisik dan sosial di masyarakat yang terkena dampak, bagaimana anggota keluarga kerabat terkait satu sama lain di kawasan sekarang, serta seberapa sering dan siapa (jenis kelamin/ umur) yang menggunakan berbagai sarana dan prasarana sosial, penting memahami pola permukiman dan rancangan yang ada supaya dapat menaksir kebutuhan di kawasan permukiman yang baru. Masukan masyarakat harus menjadi bagian integral proses rancangan.
- Pembangunan lokasi permukiman kembali; luas lahan untuk pembangunan rumah harus berdasarkan tempat tinggal sebelumnya dan kebutuhan di kawasan baru. Pemukim kembali diijinkan membangun rumah mereka sendiri dari pada memberikan rumah yang sudah tersedia. Seluruh sarana dan prasarana fisik dan sosial harus sudah selesai sebelum pemukim kembali diminta pindah ke lokasi. Setiap organisasi dan perkumpulan masyarakat harus diajak bermusyawatah dalam pembangunan lokasi pemukiman kembali.

1.6. Landasan Penelitian

Landasan penelitian merupakan acuan pokok untuk perumusan variabel penelitian sebagai dasar pengerjaan analisis. Landasan penelitian memaparkan teori inti yang diambil dan disesuaikan dengan sasaran yang dimaksud serta tinjauan pustaka yang telah dijabarkan sebelumnya.

- Pemilihan lokasi dan alternatif: memilih lokasi yang baik adalah unsur paling penting. Mulai dengan pilihan-pilihan alternatif, yang melibatkan pemukim kembali yang potensial dan pendudul setempat dengan proses terseb ut.
- Studi kelayakan: melakukan studi kelayakan lokasi alternatif dan mempertimbangkan potensi kawasan dari segi perkiraan ekologi, harga lahan, pekerjaan, kemungkinan untuk memperoleh kredit, pemasaran dan peluang ekonomi lainnya untuk mata pencaharian masyarakat setempat.
- Susunan dan rancangan: susunan dan rancangan kawasan relokasi harus sesuai dengan spesifikasi dan kebiasaan budaya mengidentifikasi lokasi sekarang terhadap berbagai prasaran fisik dan sosial di masyarakat yang terkena dampak. bagaimana anggota kelurga kerabat terkait satu sama lain di kawasan sekarang. serta sebanyak sering dan siapa (jenis kelamin/ umur) yang menggunakan berbagai sarana dan prasarana sosial. penting memahami pola permukiman dan rancangan yang ada supaya dapat mendasir kebutuhan di kawasan permukiman yang baru. Masukan masyarakat harus menjadi bagian integral proses rancangan.
- Pembangunan lokasi permukiman kembali: luas lahan untuk pembangunan rumah harus berdasarkan tempat tinggal sebelumnya dan kebutuhan di kawasan baru. Pemukim kembali diijinkan membangun rumah mereka sendiri dari pada membeikan rumah yang sudah tersedia. Selurah sarana dan prasarana fisik dan sosial harus sudah selesai sebelum pemukim kembali dimintа pindah ke lokasi. Setiap organisasi dan perkumpulan masyarakat harus diajak bermusyawarah dalam pembangunan lokasi pemukiman kembali.

1.6. Landasan Penelitian

Landasan penelitian merupakan acuan pokok untuk perumusan variabel penelitian sebagai dasar pengerjaan analisis. Landasan penelitian memaparkan teori inti yang diambil dan disesuaikan dengan masalah yang dimaksud serta tinjauan pustaka yang telah dijabarkan sebelumnya.

1.6.1 Masyarakat Pengungsi

Masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh satu sama lain. Masyarakat pengungsi terbagi menjadi:

a. **Internally Displaced Person (Pengungsi Internal)**

Yang dimaksudkan dengan para pengungsi internal ialah orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka atau tempat mereka dahulu biasa tinggal, terutama sebagai akibat dari, atau dalam rangka menghindarkan diri dari, dampak-dampak konflik bersenjata, situasisituasi rawan yang ditandai oleh maraknya tindak kekerasan secara umum, pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia, bencana-bencana alam, atau bencana-bencana akibat ulah manusia, dan yang tidak melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional

b. **Refugee (Pengungsi Lintas Batas)**

Menurut Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi, pengungsi lintas batas adalah Seseorang yang "oleh karena rasa takut yang wajar akan kemungkinan dianiaya berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada suatu kelompok social tertentu, atau pandangan politik, berada di luar negeri kebangsaannya, dan tidak bisa atau, karena rasa takut itu, tidak berkehendak berada di dalam perlindungan negeri tersebut."

Aspirasi adalah harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Aspirasi dalam bahasa indonesia merupakan suatu bentuk pemikiran yang diberikan seseorang dalm bentuk pendapat ataupun ide-ide terhadap suatu keadaan ataupun suatu kasus dan peristiwa tertentu

1.6.2 Teori Relokasi

Relokasi atau permukiman kembali (*resettlement*) merupakan kegiatan memindahkan atau memukimkan kembali penduduk yang tanah dan bangunannya harus dibebaskan untuk keperluan pembangunan infrastruktur perkotaan ke lokasi permukiman baru, lebih khusus lagi yang menjadi sasaran utama adalah penduduk yang tidak memiliki legalitas tanah yang ditempati.

1.6.3. Teori Permukiman

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Prasarana yang harus dilengkapi di dalam kawasan hunian ini adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, seperti: (1) jaringan jalan untuk mobilitas manusia dan angkutan barang, mencegah perambatan kebakaran serta untuk menciptakan bangunan yang teratur; (2)jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan ; (3)jaringan saluran air hujan untuk pematusan (drainase) dan pencegahan banjir setempat. Ada pula ketentuan pada pasal ini bahwa apabila tidak terdapat air tanah sebagai sumber air bersih, jaringan air bersih merupakan sarana dasar.

Sarana lingkungan yang semestinya ada di dalam kawasan lingkungan ini adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Fasilitas penunjang ini dapat meliputi aspek ekonomi yang antara lain, tersedianya bangunan perniagaan atau perbelanjaan yang tidak mencemari lingkungan, sedangkan fasilitas penunjang yang meliputi aspek sosial budaya, antara lain berupa bangunan pelayanan umum dan pemerintah, pendidikan dan kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olahraga, pemakaman dan pertamanan.

Sistem buatan yang keberadaan diperlukan didalam suatu wilayah, antara lain adalah:

a. Sistem jaringan air bersih
b. Sistem jaringan listrik
c. Sistem transportasi
d. Sistem komunikasi
e. Sistim jaringan persampahan
f. Sistim jaringan jalan

Relokasi atau permukiman kembali (*resettlement*) merupakan kegiatan memindahkan atau memukimkan kembali penduduk yang tanah dan bangunannya harus dibebaskan untuk keperluan pembangunan infrastruktur perkotaan ke lokasi permukiman baru, lebih khusus lagi yang menjadi sasaran utama adalah penduduk yang tidak memiliki legalitas tanah yang ditempati (Santoso, 1999). Dalam kondisi yang lain, relokasi permukiman juga dimungkinkan untuk memindahkan permukiman yang terkena bencana alam atau berada di kawasan rawan bencana alam.

1.6.4 Teori Aspirasi

Aspirasi adalah harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Aspirasi dalam bahasa indonesia merupakan suatu bentuk pemikiran yang diberikan seseorang dalam bentuk pendapat ataupun ide-ide terhadap suatu keadaan ataupun suatu kasus dan peristiwa tertentu. Aspirasi dalam hal ini berbeda jauh dengan apa yang disebut dengan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat adalah tanggapan atau pengertian yang berbentuk langsung dari suatu peristiwa atau pembicaraan, tetapi dapat juga pengertian yang terbentuk melalui proses yang diperoleh melalui pancaindera.

1.6.5. Variabel Penelitian

Dalam kegiatan observasi dilapangan baik ketika survey primer maupun sekunder, serta untuk memfokuskan materi maka dipilih variabel-variabel untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1. dibawah ini.

Tabel 1.1
Variabel Penelitian

Sasaran	Variabel	Sub Variabel
Mengetahui karakter pengungsi serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat pengungsi di tempat penampungan	▪ Kelompok sosial	▪ Majelis Ta'lim ▪ Pengajian ▪ Perkumpulan Masyarakat ▪ Gotong royong, dll
	▪ Tingkat Pendidikan	▪ Lulus SD ▪ Lulus SMP ▪ Lulus SMA ▪ Sarjana
	▪ Kelompok Umur	▪ Anak-anak usia 0-14 tahun ▪ Remaja usia 15-19 tahun

Sasaran	Variabel	Sub Variabel
		▪ Dewasa >20tahun
	▪ Asal Penduduk	▪ Dari Kota Ambon ▪ Diluar Kota Ambon ▪ Sumatera ▪ Sulawesi ▪ Jawa, dll
Mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana penunjang ditempat relokasi permukiman yang baru	▪ Prasarana	▪ Prasarana Jaringan Jalan ▪ Prasarana Jaringan Listrik ▪ Prasarana Jaringan Air Bersih ▪ Prasarana Jaringan Telepon ▪ Prasarana Jaringan Pembuangan Sampah
	▪ Sarana perkantoran	▪ Kantor pemerintahan ▪ Kantor Desa ▪ Abri/Polri ▪ Kantor Pos ▪ Bank, dll.
	▪ Sarana Pendidikan	▪ TK ▪ SD ▪ SMP ▪ SMA ▪ Universitas
	▪ Sarana Peribadatan	▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Pura ▪ Wihara, dll.
	▪ Sarana Perdagangan dan Jasa	▪ Pasar ▪ Pusat perbelanjaan ▪ Warung ▪ Kios
	▪ Sarana Kesehatan	▪ Rumah sakit ▪ Puskesmas ▪ Klinik Bersalin ▪ Praktik Dokter ▪ Apotik ▪ Puskesmas Pembantu ▪ Posyandu, dll.
	▪ Aksesibilitas	▪ Mobil ▪ Motor ▪ Angkutan umum ▪ Becak, dll.
Mengetahui aspirasi masyarakat pengungsi tentang relokasi	▪ Lokasi Permukiman	▪ Dekat Tempat Kerja ▪ Di Pusat Kota ▪ Di pusat Kota dan Dekat dengan

Sasaran	Variabel	Sub Variabel
permukiman untuk masyarakat pengungsi		tempat kerja
	▪ Mata pencaharian utama dan sampingan	▪ PNS ▪ ABRI/Polri ▪ Swasta ▪ Guru ▪ Nelayan, dll
	▪ Tingkat pendapatan masyarakat	▪ Rp.100.000- Rp. 500.000 ▪ Rp. 500.000-Rp. 1.000.000 ▪ Rp.1.000.000-Rp.2.000.000 ▪ Rp.>2.000.000
	▪ Tingkat pengeluaran masyarakat	▪ Rp.100.000- Rp. 500.000 ▪ Rp. 500.000-Rp. 1.000.000 ▪ Rp.1.000.000-Rp.2.000.000 ▪ Rp.>2.000.000

Sumber: Hasil Perumusan

1.7. Metode penelitian

Metodologi studi disusun agar proses pembahasan studi dapat dilakukan lebih terstruktur dan terarah. Metodologi studi mencakup tahapan persiapan, tahapan pengumpulan data,dan tahapan analisa.

1.7.1. Tahapan persiapan

Tahapan persiapan, meliputi:

- Persiapan materi studi, yaitu menentukan rumusan masalah yang ada di wilayah studi, sehingga tujuan yang akan dicapai dapat lebih jelas.
- Persiapan survey, yaitu mempersiapkan hal-hal yang menyangkut tentang pelaksanaan survey, baik survey lapangan, kepustakaan maupun survey instansional seperti peta-peta lokasi, check list, quisioner dan literatur-literatur pendukung.

1.7.2 Tahapan pengumpulan data

Tahapan pengumpulan data, meliputi:

a. Data Primer

Merupakan data yang diambil dengan melakukan survey primer dengan cara terjun langsung ke lapangan.

Sumber: Hasil Perumusan

1.7. Metode penelitian

Metodologi studi disusun agar proses pembahasan studi dapat dilaksakan lebih terstruktur dan terarah. Metodology studi mencakup tahapan persiapan, tahapan pengumpulan data,dan tahapan analisa.

1.7.1. Tahapan persiapan

Tahapan persiapan meliputi:

- Persiapan materi studi, yaitu mencentukan rumusan masalah yang ada di wilayah studi. sehingga tujuan yang akan dicapai dapat lebih jelas.
- Persiapan survey, yaitu mempersiapkan hal-hal yang mendukung tentang pelaksanaan survey. baik survey lapangan. kepustakaan maupun survey instansional seperti pera-pera lokasi, check list, quisioner dan literatur-literatur pendukung.

1.7.2 Tahapan pengumpulan data

Tahapan pengumpulan data. meliputi:

a. Data Primer

Merupakan data yang diambil dengan melakukan survey primer dengan cara terjun langsung ke lapangan.

- Metode pengamatan

  Diperoleh melalui pengamatan, yang meliputi pengamatan langsung ke lokasi penelitian agar dapat memperkuat asumsi dan analisa yang dihasilkan.

- Metode Wawancara (interview)

  Merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab secara terstruktur atau sistematis dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang dapat menuangkan perasaan, pengalaman, emosi, motif yang melengkapi kata secara verbal. Oleh karena itu wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide akan tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan. Model wawancara tersebut ditujukan kepada responden yang memiliki kunci permasalahan atau mengetahui lokasi penelitian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

  - ✓ Bahwa responden adalah orang yang mengerti akan masalah yang terjadi di Ambon atau masyarakat pengungsi yang merasakan dampak akibat terjadinya konflik sosial di Ambon.
  - ✓ Responden memiliki data-data yang akurat dan dapat dipercaya sesuai dengan kenyataan di lapangan.
  - ✓ Interpretasi responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.

- Metode Penyebaran Quisioner

  Metode penyebaran quesioner merupakan metode yang bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dari masyarakat di wilayah studi. Dalam suatu penelitian lapangan apapun, tidak mungkin seorang peneliti dapat meneliti dan mengobservasi seluruh total dari obyek yang diteliti. Untuk itu peneliti harus menentukan sampel yang ditetapkan sebagai responden dalam penelitian ini adalah *Sample Random Sampling* (Pengambilan Sampel Secara Acak sederhana), untuk metode yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah

metode yang didasarkan pada pendugaan proporsi populasi, adapun rumus sederhana untuk ini adalah (Yamane, 1967:99):

$$n = \frac{N}{N(d^2) + 1}$$

Dimana :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

d = Jumlah Kepercayaan 10%

Untuk penyebaran kuisioner, disebarkan untuk masyarakat pengungsi di Kota Ambon, dengan menggunakan rumus dimana N adalah jumlah kepala keluarga (KK), karena jumlah pengungsi tidak semuanya terdata. Dimana jumlah pengungsi di tempat penampungan pengungsi di Kota Namlea pada tahun 2008 adalah sebesar 289 Kk.

Jumlah responden di wilayah studi adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{289}{289\,(0.1)^2 + 1}$$

n = 74 sampel

Maka dapat diketahui bahwa besarnya sampel yang disebar adalah sebesar 74 sampel yang dapat mewakili aspirasi masyarakat, dimana sampel-sampel tersebut disebar secara merata dan acak pada barak-barak pengungsian di Desa Jikumerasa dan Desa Namlea. Untuk pembagian jumlah sampel pada tiap-tiap lokasi studi dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Responden} = \frac{\sum \text{KK di lokasi studi (Barak pengungsian)}}{\sum \text{KK Keseluruhan}} \times 74$$

$$\text{Desa Jikumerasa} = \frac{289}{289} \times 74 = 74$$

$$= 74 \quad \text{Responden}$$

Metode kuisioner yang di gunakakan adalah dengan menggunakan skala likert dan skala guttman.

- Dalam skala likert, setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang di ungkapkan dengan kata-kata sebagai berikut:

  Sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju atau sangat baik, baik, sedang, buruk, buruk sekali.
- Penelitian menggunakan skala guttman, apabila ingin mendapatkan jawaban jelas (tegas) dan konsisten terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Seperti: ya, tidak, atau sudah, belum.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data dari data sekunder dapat diperoleh dari beberapa sumber, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Instansi pemerintah terkait langsung dengan masalah permukiman.
- Studi literature yang erat kaitannya dengan masalah perumahan dan permukiman serta penanganan perumahan dan permukiman serta studi literatur tentang masyarakat..
- Buku-buku laporan hasil penelitian dan makalah-makalah tentang perumahan dan masalah permukiman yang sudah berhasil dan yang kurang berhasil.
- Koran atau media cetak lainnya yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan masalah permukiman di Kota Ambon khusunya di Kecamatan Namlea Kabupaten Buru.

1.7.3 Tahapan Analisa

Metode Analisa merupakan suatu tahap dengan menggunakan metode-metode tertentu untuk untuk mengukur atau memperkuat teori-teori yang sudah ada. Maka analisa yang akan digunakan untuk mengetahui asprasi masyarakat adalah dilakukan melalui dua metode pendekatan yaitu metode kualitatif dan metode kuantitaif.:

Metode kuisioner yang di gunakan adalah dengan menggunakan skala likert dan skala guttman.

- Dalam skala likert. setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang di ungkapkan dengan kata-kata sebagai berikut:

  Sangat setuju. setuju. kurang setuju. tidak setuju atau sangat baik. baik. sedang. buruk. buruk sekali.

- Pendidikan menggunakan skala guttman. apabila ingin mendapatkan jawaban jelas (tegas) dan konsisten terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Seperti: ya. tidak. atau sudah. belum.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data dari data sekunder dapat diperoleh dari beberapa sumber. diantaranya adalah sebagai berikut:

- Instansi pemerintah terkait langsung dengan masalah permukiman.
- Studi literature yang erat kaitannya dengan masalah permasalan dan permukiman serta penanganan perumahan dan permukiman serta studi literatur tentang masyarakat..
- Buku-buku laporan hasil penelitian dan makalah-makalah tentang permasalan dan masalah permukiman yang sudah berhasil dan yang kurang berhasil.
- Koran atau media cetak lainnya yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan masalah permukiman di Kota Ambon khususnya di Kecamatan Namlea Kabupaten Buru.

1.7.3 Tahapan Analisa

Metode Analisa merupakan suatu cahp dengan menggunakan metode-metode tertentu untuk untuk mengukur atau memperkuat teori-teori yang sudah ada. Maka analisa yang akan digunakan untuk mengetahui aspirasi masyarakat adalah dilakukan melalui dua metode pendekatan yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif:

a. Analisa Karakter Masyarakat

Karakter masyarakat disini meliputi kegiatan dan kebutuhan masyarakat di lokasi studi yang dianalisa berdasarkan kriteria dan teori yang digunakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2

Metode Analisa Karakter Masyarakat

Jenis Analisa	Metode analisa yang di gunakan	Operasional	Variabel	Cara Menganalisa	Kesimpulan
Kualitatif	Analisis partisipatif: Analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi pelaku-pelaku yang berbeda beserta kepentingannya masing-masing yang dalam hal ini yaitu kepentingan yang berkaitan dengan keberadaan relokasi.	Dilakukan dengan: ▪ Menentukan parameter atau teori ▪ Mencocokan hasil survey lapangan dengan teori	Karakter masyarakat meliputi ▪ Kegiatan masyarakat ▪ Kebutuhan masyarakat	Mencocokan fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi studi dengan kriteria dan teori	Relevansi yang terjadi di lokasi studi berdasarkan kriteria teoritik

Sumber: Hasil kajian

b. Analisa Aspirasi Masyarakat

Merupakan bentuk analisa kulaitatif dengan menyimpulkan hasil presantase berdasarkan dari hasil data kuisioner dengan tabel frekuensi. Kemudian dari hasil penyimpulan data presentase tersebut ditentukan sebuah aspirasi-aspirasi masyarakat yang dianggap penting untuk dilaksanakan. Variabel asprasi masyarakat terhadap relokasi meliputi: a). Aspirasi Masyarakat Mengenai Relokasi Permukiman, dan b) Aspirasi Masyarakat Mengenai Lokasi Permukiman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.3. di bawah ini:

a. Analisa Karakter Masyarakat

Karakter masyarakat disini meliputi kegiatan dan kebutuhan masyarakat di lokasi studi yang dianalisa berdasarkan kriteria dan teori yang digunakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2

Metode Analisa Karakter Masyarakat

Jenis Analisa	Teknik analisa yang di gunakan	Operasional	Variabel	Tata Lingkungan	Kesimpulan
Kualitatif	Analisis pendapatan Analisis ini berkaitan untuk mengetahui dan mengidentifikasi pekerjaan yang berhubungan dengan masing-masing yang dalam hal ini yaitu kepemilikan yang berkaitan dengan kebiasaan relokasi	Dilakukan dengan • Menentukan parameter atau lain • Melakukan survey lapangan dengan tool	Karakter masyarakat meliputi • Kegiatan masyarakat • Kebutuhan masyarakat	Adanya kegiatan lingkungan yang berkaitan dengan relokasi studi tersebut di lokasi studi tertentu	Relevansi yang terjadi di lokasi studi berhubungan dengan tata lingkungan

Sumber: Hasil Kajian

b. Analisa Aspirasi Masyarakat

Merupakan bentuk analisa kuantitatif dengan menyimpulkan hasil presentase berdasarkan dari hasil data kuisioner dengan tabel frekuensi. Kemudian dari hasil penyimpulan data presentase tersebut ditentukan sebuah aspirasi-aspirasi masyarakat yang dianggap penting untuk dilaksanakan. Variabel aspirasi masyarakat terbadap relokasi meliputi: a). Aspirasi Masyarakat Mengenai Relokasi Permukiman, dan b) Aspirasi Masyarakat Mengenai Lokasi Permukiman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.3. di bawah ini:

Tabel 1.3

Proses Analisa Aspirasi Masyarakat

Jenis Analisa	Metode analisa yang di gunakan	Operasional	Variabel	Cara Menganalisa	Kesimpulan
Kualitatif	▪ Memakai Analisa Deskriftif Berupa Tabel Distribusi Frekuensi Dari Kuisioner $Df = \frac{n}{Tn} X\ 100\%$ Dimana: Df = Distribusi Frekuensi N = Responden Tn = Total Responden ▪ Memakai pembobotan (scoring)	Analisa dilakukan dengan membuat suatu presentase aspirasi masyarakat yang bersumber dari data kuisioner Melakukan pembobotan untuk lokasi terpilih.	Aspirasi masyarakat meliputi: ▪ Aspirasi masyarakat mengenai relokasi permukiman ▪ Aspirasi masyarakat mengenai lokasi permukiman untuk relokasi	Membuat kesimpulan berdasarkan hasil presentase aspirasi masyarakat sehingga diperoleh bentukan aspirasi masyarakat mengenai aspirasi masyarakat terhadap relokasi permukiman.	Mengetahui aspirasi masyarakat terhadap relokasi permukiman untuk masyarakat pengungsi

Sumber: Hasil kajian

c. Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana di Tempat Penampungan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Umum Pada Tempat Penampungan dan Tempat Relokasi

Merupakan analisa yang mengidentifikasi kebutuhan akan sarana prasarana di tempat penampungan serta kondisi sarana prasarana yang terdapat di tempat penampungan dan tempat relokasi yang harus tersedia dalam suatu lingkungak permukiman.

Dimana analisa yang digunakan adalah menggunakan metode analisa perbandingan (komparasi) untuk membandingkan kondisi sarana prasana di tempat penampungan dan kondisi sarana prasarana ditempat relokasi. Untuk lebih jelas mengenai analisa kondisi sarana prasarana di tempat penampungan dan di tempat relokasi dapat dilihat pada tabel 1.4. di bawah ini.

Tabel 1.3

Proses Analisa Aspirasi Masyarakat

Jenis Analisa	Metode analisa yang di gunakan	Objek	Cara Mengoperasikan	Pengerjakan
Kuantitatif	• Memakai Analisa Deskriptif Regresi Time-Dimensi Frekuensi Asosiasi Dimensi DI = Dimensi Frekuensi N = Responden Tn = Total Responden • Memakai pembobotan (scoring)	Mengetahui dengan pengaruh menyatakan mempengaruhi yang bersumber dari suara pendengar Mengetahui pendapat dan tolakan terlalu	Mengetahui aspirasi masyarakat pemerintahan pengaruh masyarakat sehingga dapat pemerintah pemerintah	Mengerjakan mempengaruhi pengaruhnya pengaruh pengaruh

Sumber: Hasil Analisa

c. Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana di Tempat Penampungan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Umum Pada Tempat Penampungan dan Tempat Relokasi

Merupakan analisa yang mengidentifikasi kebutuhan akan sarana prasarana di tempat penampungan serta kondisi sarana prasarana yang terdapat di tempat penampungan dan tempat relokasi yang harus tersedia dalam suatu lingkungan permukiman.

Dimana analisa yang digunakan adalah menggunakan metode analisa perbandingan (komparasi) untuk membandingkan kondisi sarana prasana di tempat penampungan dan kondisi sarana prasarana ditempat relokasi. Untuk lebih jelas mengenai analisa kondisi sarana prasarana di tempat penampungan dan di tempat relokasi dapat dilihat pada tabel 1.4. di bawah ini.

Tabel 1.4
Proses Analisa Kebutuhan Sarana Prasarasana di Tempat Penampungan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Umum Pada Tempat Penampungan dan Tempat Relokasi

Jenis Analisa	Metode analisa yang di gunakan	Operasional	Variabel	Cara Menganalisa	Kesimpulan
Kualitatif	Analisis perbandingan (komparasi)	Analisa di gunakan untuk memperoleh gambaran kondisi sarana prasarana di tempat penampungan dan di tempat relokasi guna mendapatkan skala pelayanan dan kepentingan yang maksimal.	Sarana prasarana di tempat penampungan dan di tempat relokasi	Mengidentifikasi kondisi sarana prasarana yang ada di tempat penampungan dan tempat relokasi.	Mengetahui sejauh mana ketersediaan sarana prasarana untuk menunjang aktifitas masyarakat berdasarkan skala pelayanan dan tingkat kepentingan
Kuantitatif	Menggunakan analisa proyeksi sarana	Analisa ini digunakan untuk mengetahui tingkat kebutuhan sarana prasarana di tempat penampungan dan skala pelayanan untuk sarana prasarana yang terdapat di tempat penampungan.	Sarana prasarana yang ada di tempat penampungan dan di luar tempat penampungan	Mengidentifikasi kebutuhan sarana prasarana yang terdapat di tempat penampungan pengungsi.	Mengetahui jenis kebutuhan yang paling utama di tempat penampungan pengungsi dilihat dari skala pelayanan sarana prasarana tersebut.

Sumber: Hasil kajian

1.8. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan pokok-pokok pikiran yang ada pada tiap-tiap bab dalam penelitian ini. Tujuan utamanya adalah untuk memudahkan dalam memahami proses penelitian dan hasil-hasilnya.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan sasaran, lingkup lokasi dan lingkup materi, tinjauan pustaka, variabel penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan kerangka pemikiran.

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Bab II menguraikan gambaran umum wilayah studi yang terdiri dari identifikasi kondisi fisik dasar, sosial budaya, kondisi ekonomi masyarakat pengungsi serta gambaran lokasi studi yaitu tempat gambaran tentang kondisi tempat penampungan dan kondisi tempat relokasi

BAB III ANALISA IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SARANA PRASARANA DI TEMPAT PENAMPUNGAN

Pada bab ini menjabarkan mengenai analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini. Analisa yang digunakan terdiri dari analisa karakteristik masyarakat, analisa tentang aspirasi masyarakat mengenai relokasi permukiman untuk masyarakat pengungsi serta analisa mengenai kebutuhan sarana prasarana di tempat penampungan dan ketersediaan sarana dan prasarana umum yang terdapat pada tempat penampungan dab pada tempat relokasi permukiman untuk pengungsi yang baru

BAB IV PENUTUP

Di dalam penutup akan tercantum mengenai kesimpulan akhir yang didapat pada studi yang telah dilaksanakan dan rekomendasi serta studi lanjutan yang harus di lakukan.

1.8. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan pokok-pokok pikiran yang ada pada tiap-tiap bab dalam penelitian ini. Tujuan utamanya adalah untuk memudahkan dalam memahami proses penelitian dan hasil-hasilnya.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan sasaran, lingkup lokasi dan lingkup materi, tinjauan pustaka, variabel penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan kerangka pemikiran.

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Bab II mengurailkan gambaran umum wilayah studi yang terdiri dari identifikasi kondisi fisik dasar, sosial budaya, kondisi ekonomi masyarakat pengungsi serta gambaran lokasi studi yaitu tempat gambaran tentang kondisi tempat penampungan dan kondisi tempat relokasi

BAB III ANALISA IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SARANA PRASARANA DI TEMPAT PENAMPUNGAN

Pada bab ini menjabarkan mengenai analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini. Analisa yang digunakan terdiri dari analisa karakteristik masyarakat, analisa tentang aspirasi masyarakat mengenai relokasi permukiman untuk masyarakat pengungsi serta analisa mengenai kebutuhan sarana prasarana di tempat penampungan dan ketersediaan sarana dan prasarana umum yang terdapat pada tempat penampungan dab pada tempat relokasi permukiman untuk pengungsi yang baru

BAB IV PENUTUP

Di dalam penutup akan ternyata mengenai kesimpulan akhir yang didapat pada studi yang telah dilaksanakan dan rekomendasi serta studi lanjutan yang harus di lakukan.

1.9 Kerangka Pemikiran

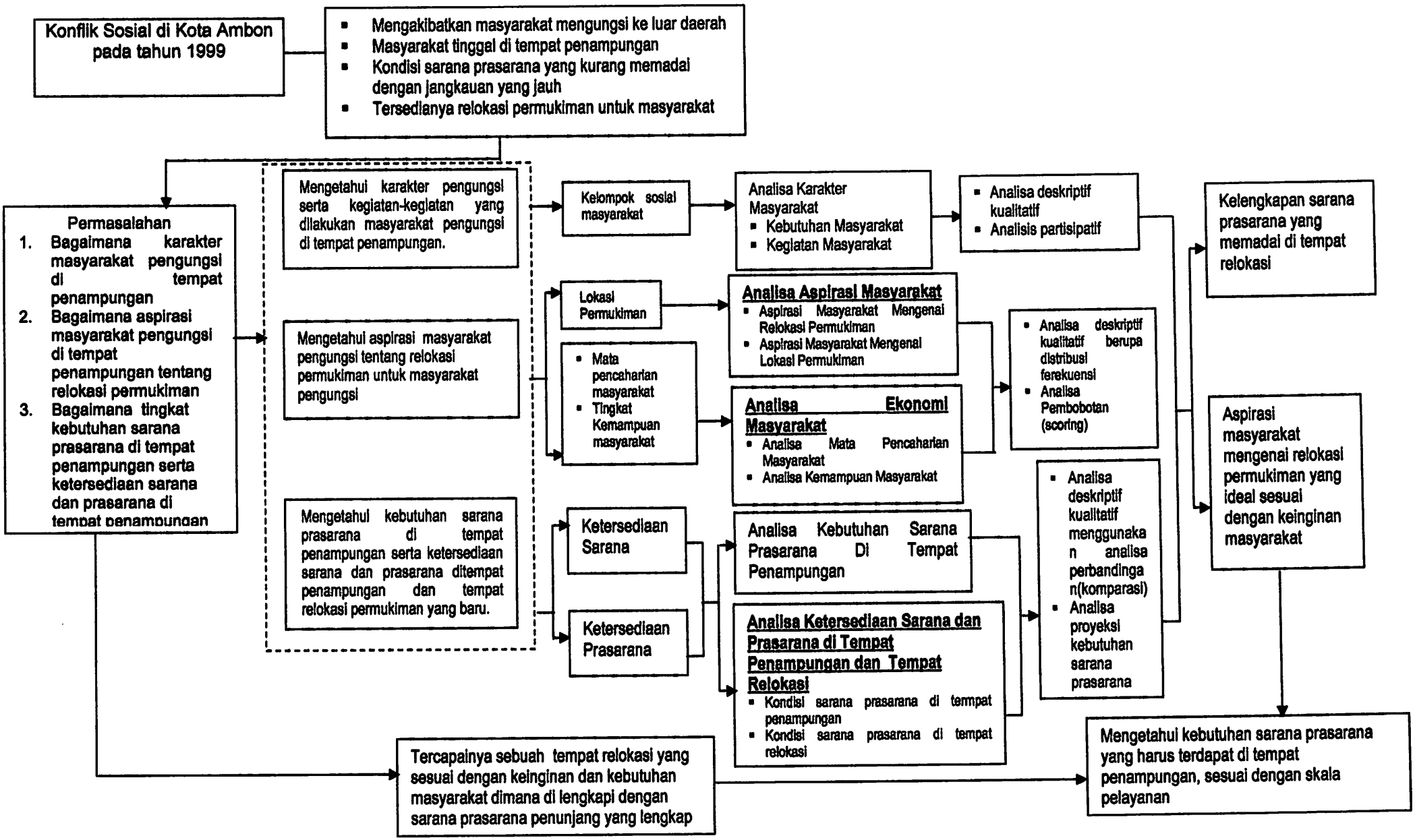

BAB II
GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

2.1. Gambaran Eksternal Propinsi Maluku dan Kabupaten Buru

2.1.1 Gambaran Umum Propinsi Maluku

Secara geografis Provinsi Maluku berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara di bagian Utara, bagian Timur dengan Provinsi-Provinsi Papua Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah di bagian Barat, serta dengan Negara Timor Leste dan Australia di bagian Selatan. Sedangkan secara astronomi Provinsi Maluku terletak antara 2°30' – 8°30' LS dan 124° – 135 °30' Bujur Timur dengan luas wilayah 712.479,65 Km^2 di mana 54.185 Km^2 (7,6%) ialah luas daratan dan 658.294,69 Km^2 (92,4%) ialah luas lautan.

Sebagai provinsi kepulauan, Maluku memiliki 32 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau di Maluku antara lain : Pulau Seram (18.625 Km^2), Pulau Buru (9.000 Km^2), Pulau Yamdena (5.085 Km^2) dan Pulau Wetar (3.624 Km^2). Dengan kondisi wilayah yang dominan perairan, Provinsi Maluku sangat terbuka untuk berinteraksi dengan provinsi maupun negara sekitar seperti : Provinsi-Provinsi Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, serta Negara Australia dan Timor Leste.

Provinsi Maluku secara administrative terbagi atas 7 kabupaten dan 1 kota, yaitu :

1. Kabupaten Maluku tengah dengan 11 kecamatan, 161 desa dan 6 kelurahan.
2. Kabupaten Maluku tenggara dengan 10 kecamatan, 112 desa dan 4 kelurahan
3. Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan 17 kecamatan, 187 desa dan 1 kelurahan
4. Kabupaten Buru dengan 10 kecamatan, 94 desa
5. Kota Ambon dengan 3 kecamatan, 30 desa dan 20 kelurahan.
6. Kabupaten Seram Bagian Barat dengan 4 kecamatan, 87 desa
7. Kabupaten Seram Bagian Timurdengan 4 kecamatan, 56 desa
8. Kabupaten Kepulauan Aru dengan 3 kecamatan, 30 desa dan 20 kelurahan

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

2.1. Gambaran Eksternal Propinsi Maluku dan Kabupaten Buru

2.1.1 Gambaran Umum Propinsi Maluku

Secara geografis Provinsi Maluku berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara di bagian Utara, bagian Timur dengan Provinsi-Provinsi Papua Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah di bagian Barat, serta dengan Negara Timor Leste dan Australia di bagian Selatan. Sedangkan secara astronomi Provinsi Maluku terletak antara 2°30' – 8°30' LS dan 124° – 135°30' Bujur Timur dengan luas wilayah 712.479,65 Km^2 di mana 54.185 Km^2 (7,6%) ialah luas daratan dan 658.294,69 Km^2 (92,4%) ialah luas lautan.

Sebagai provinsi kepulauan, Maluku memiliki 32 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau di Maluku antara lain : Pulau Seram (18.625 Km^2), Pulau Buru (9.000 Km^2), Pulau Yamdena (5.085 Km^2) dan Pulau Wetar (3.624 Km^2). Dengan kondisi wilayah yang dominan perairan, Provinsi Maluku sangat terbuka untuk berinteraksi dengan provinsi maupun negara sekitar seperti : Provinsi-Provinsi Maluka Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, serta Negara Australia dan Timor Leste.

Provinsi Maluku secara administratif terbagi atas 7 kabupaten dan 1 kota, yaitu :

1. Kabupaten Maluku tengah dengan 11 kecamatan, 161 desa dan 6 kelurahan.
2. Kabupaten Maluku tenggara dengan 10 kecamatan, 112 desa dan 4 kelurahan
3. Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan 17 kecamatan, 187 desa dan 1 kelurahan
4. Kabupaten Buru dengan 10 kecamatan, 94 desa
5. Kota Ambon dengan 3 kecamatan, 30 desa dan 20 kelurahan.
6. Kabupaten Seram Bagian Barat dengan 4 kecamatan, 87 desa
7. Kabupaten Seram Bagian Timurdengan 4 kecamatan, 56 desa
8. Kabupaten Kepulauan Aru dengan 3 kecamatan, 30 desa dan 20 kelurahan

2.1.2 Gambaran Umum Kabupaten Buru

Pulau Buru yang semula merupakan bagian dari Kabupaten Maluku Tengah, sejak tanggal 12 Oktober Tahun 1999 dimekarkan sebagai Kabupaten sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana diubah kedalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000.

Kabupaten Buru terletak antara 2°25' - 3°55' LS dan 125°30' - 127°21' BT dengan memiliki luas wilayah daratan 12.655,58 Km^2 dan luas wilayah lautan 26.771,17 Km^2 (berdasarkan survey potensi sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNPATTI 2005).

Wilayah Kabupaten Buru meliputi dataran seluas 9.329,13 Km^2 yang merupakan gugusan pulau – pulau yang berjumlah 6 buah, 3 diantaranya dihuni yaitu : Pulau Buru, Pulau Ambalau dan Pulau Tengah dan 3 lainnya belum dihuni yaitu Pulau Fogi, Pulau Oki dan Pulau Tomahu. Sedangkan luas masing – masing pulau yakni ; Pulau Buru (11.117 km^2), Pulau Ambalau (306 km^2) dan pulau – pulau kecil (1.408,58 km^2).

Secara Geografis Kabupaten Buru dibatasi oleh :

- Sebelah Utara : Laut Seram
- Sebelah Timur : Selat Manipa
- Sebelah Barat : Laut Buru
- Sebelah Selatan : Laut Banda

Kabupaten Buru terdiri dari 10 kecamatan dengan luas wilayah 12.655,58 km2 dengan jumlah penduduk sebesar 146.176 jiwa dan dengan jumlah Desa yang ada sebesar 103 Desa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

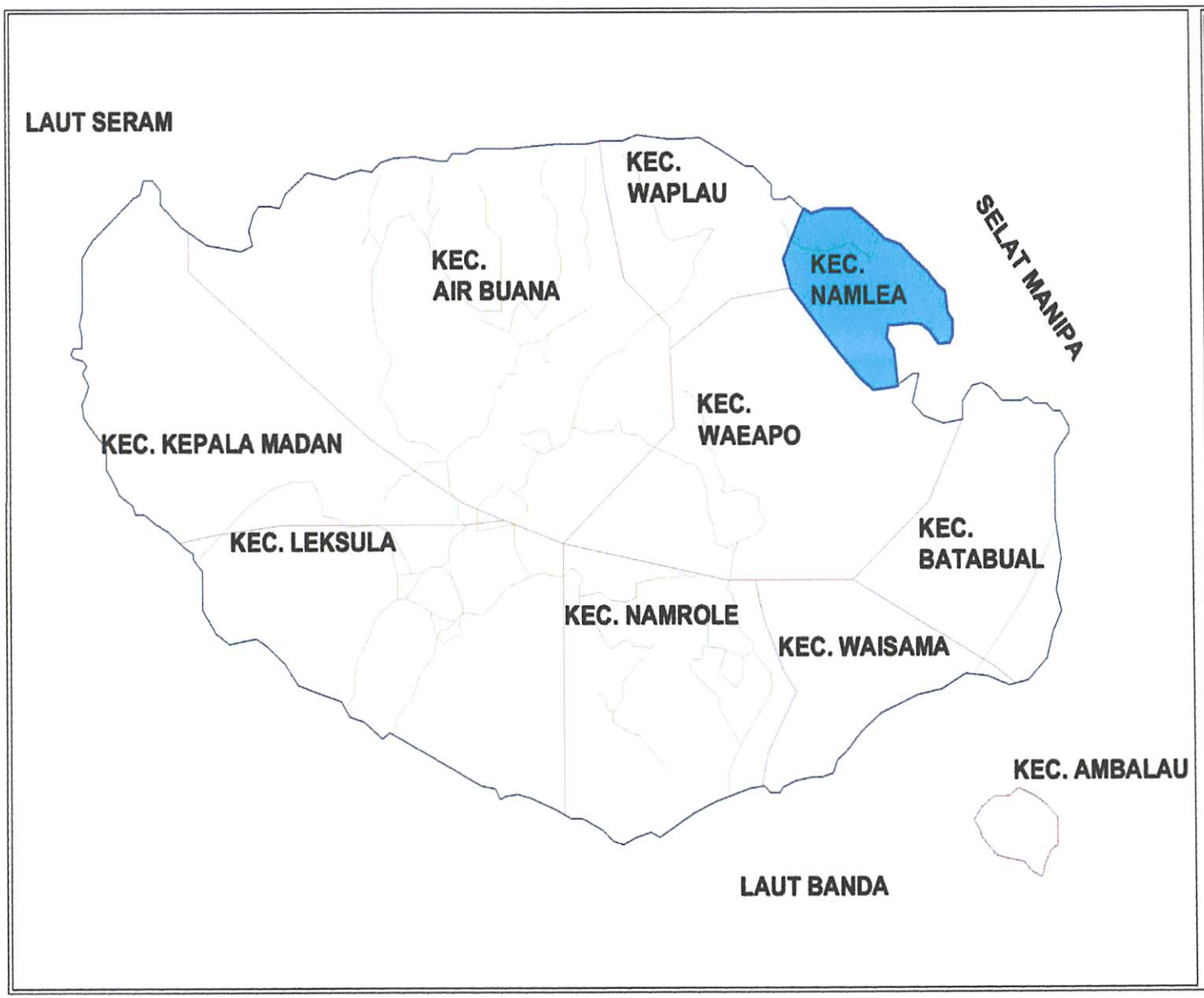

IDENTIFIKASI KONDISI SARANA PRASARANA DI TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI DI DESA JIKUMERASA DAN DI TEMPAT RELOKASI DI KOTA NAMLEA

JUDUL PETA

PETA KEBUPATEN BURU

NOMOR PETA : 2.1

LEGENDA :

- :BATAS KABUPATEN
- :BATAS KECAMATAN
- :JALAN
- :BATAS WILAYAH STUDI

JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG
2010

SKALA . 1: 100.000

SUMBER : PEMKAB BURU

LAUT BANDA

KEC. AMBALAU

KEC. MAISARA

KEC. NAMROLE

KEC. LEKSULA

BATABUAL
KEC.

KEC. KEPALA MADAN

WAEAPO
KEC.

AIR BUAYA
KEC.

NAMLEA
KEC.

SELAT MANIPA

WAPLAU
KEC.

LAUT SERAM

Tabel 2.1
Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Buru pada tahun 2008

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Renc. Peman Kec.
1	Namlea	951,15	28.589	14	9	1
2	Air Buaya	4.534,00	18.095	8	35	1
3	Leksula	2.428,00	14.893	20	11	1
4	Waeapo	1.232,60	31.637	18	41	2
5	Waesama	724,00	10.601	8	3	-
6	Waplau	585,23	9.633	9	6	-
7	Kepala Madan	1.276,00	9.071	10	4	1
8	Ambalau	306,00	8.958	7	-	-
9	Namrole	326,00	7.476	10	7	-
10	Batabual	292,60	7.223	5	4	-
Total		12.655,58	146.176	103	120	6

Sumber: BPS Kabupaten Buru

2.1.3 Kependudukan

Kabupaten Buru pada tahun 2008 diperkirakan berpenduduk 139.465 jiwa yang tersebar di 10 kecamatan. Sebaran jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Leksula dengan jumlah penduduk sebanyak 29.221 jiwa sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat pada Kecamatan Batabual dengan jumlah penduduk sebesar 7.211 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.1

Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Buru pada tahun 2008

No	Kecamatan	Luas (Km 2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Rasio Penduduk/Desa
1	Namlea	691,15	28.859	14	0	1
2	Air Buaya	[illegible]	18.056	8	26	1
3	Leksula	[illegible]	14.899	20	11	1
4	Waeapo	1.282,60	[illegible]	18	41	2
5	Waesama	724,00	10.901	8	0	-
6	Wagelau	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
7	Kepala Madan	1.276,00	[illegible]	[illegible]	4	1
8	Ambalau	200,00	8.958	7	-	-
9	Namrole	220,00	7.479	10	7	-
10	Botalebual	282,60	7.225	5	4	-
Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sumber: BPS Kabupaten Buru

2.1.3 Kependudukan

Kabupaten Buru pada tahun 2008 diperkirakan berpenduduk 139.465 jiwa yang tersebar di 10 kecamatan. Sebaran jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Leksula dengan jumlah penduduk sebanyak 29.221 jiwa sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat pada Kecamatan Batabual dengan jumlah penduduk sebesar 7.211 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Per Kecamatan
Di Kabupaten Buru Tahun 2008

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)
1	Namlea	28.589
2	Air Buaya	16.139
3	Leksula	29.221
4	Waeapo	9.023
5	Waesama	14.842
6	Waplau	8.938
7	Kepala Madan	8.714
8	Namrole	7.936
9	Ambalau	8.852
10	Barabual	7.211
Total		139.465

Sumber: BPS Kabupaten Buru

2.1.3.1 Distribusi Presentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Km^2 Menurut Kecamatan di Kabupaten Buru

Penyebaran penduduk Kabupaten Buru kurang merata, hal ini terlihat dari angka kepadatan penduduk yang sangat berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Daerah yang padat penduduknya adalah Kecamatan Namlea yaitu 30,06 jiwa/km^2 dan daerah yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Air Buaya yaitu 3,56 jiwa/km^2. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Per Kecamatan
Di Kabupaten Buru Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)
1	Namlea	38.885
2	Air Buaya	16.139
3	Lolong	20.324
4	Waeapo	30.023
5	Waesama	14.442
6	Waplau	9.233
7	Kepala Madan	8.274
8	Namrole	24.340
9	Ambalau	9.982
10	Fena Leisela	7.271
	Total	189.455

Sumber: BPS Kabupaten Buru

2.1.3.1 Distribusi Presentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Km^2 Menurut Kecamatan di Kabupaten Buru

Penyebaran penduduk Kabupaten Buru kurang merata. hal ini terlihat dari angka kepadatan penduduk yang sangat berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Daerah yang padat penduduknya adalah Kecamatan Namlea yaitu 30.06 jiwa/km^2 dan daerah yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Air Buaya yaitu 3,56 jiwa/km^2. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3
Distribusi Presentase Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Per Km^2 Menurut Kecamatan Tahun 2008

No	Kecamatan	Presentase penduduk	Kepadatan Penduduk per km2
1	Namlea	20,5	30,06
2	Air Buaya	11,57	3,56
3	Leksula	20,95	23,71
4	Waeapo	6,47	12,46
5	Waesama	10,64	6,11
6	Waplau	6,41	15,27
7	Kepala Madan	6,25	6,83
8	Namrole	5,69	23,34
9	Ambalau	6,35	28,93
10	Barabual	5,17	24,64
Total		100	174,91

Sumber: BPS Kabupaten Buru

2.1.3.2 Jumlah Masyarakat Pengungsi Di Kabupaten Buru

Pasca kerusuhan yang terjadi mengakibatkan terjadinya ledakan pengungsi di Kabupaten Buru, dimana jumlah masyarakat pengungsi di Kabupaten Buru dapat dilihat pada table 2.4. di bawah ini.

Tabel 2.4
Jumlah masyarakat pengungsi di Kabupaten Buru tahun 2008

No	Kecamatan	Jumlah Desa/dusun	Jumlah (KK)	Jumlah (jiwa)
1	Buru Utara Barat	15	2.012	9.547
2	Buru Utara Timur	16	2.390	11.552
3	Buru Utara Selatan	12	900	4.287
4	Buru Selatan	33	3.132	10.193
5	Buru Selatan Timur	7	681	3.042
Jumlah total		83	9.115	38.621

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Buru

2.2 Gambaran Kondisi Kecamatan Namlea

Kecamatan Namlea yang merupakan Ibukota Kabupaten Buru dengan jumlah desa 14 dan 9 dusun. Luas wilayah Kecamatan Namlea 951,15 Km^2 secara geografis berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Desa Sawa
- Sebelah Timur : Selat Manipa
- Sebelah Barat : Kecamatan Waplau dan Kecamatan Waepao
- Sebelah Selatan : Desa Sanleko

Jarak masing-masing desa di kecamatan Namlea dengan Ibu Kota kecamatan adalah sebagai berikut Lala 2 Km, Ubung 10 Km, Jikumerasa 17 Km, Waimiting 19 Km, Sawa 20 Km, Waeperang 25 Km, Sanleko 10 Km, Karang Jaya 3 Km.

Wilayah ini di dominasi dataran rendah yang berasosiasi dengan daerah pantai serta perbukitan yang menempati bagian barat laut dengan ketinggian mencapai sekitar 400 m. selain itu terdapat juga bukit di bagian Selatan dan Barat Namlea dengan ketinggian sekitar kurang dari 100 m. Kondisi perbukitan sebagian besar tidak tertutupi vegetasi dengan kondisi batuan agak lapuk sehingga di beberapa tempat bisa mengakibatkan longsoran.

2.2.1 Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Namlea pada tahun 2008 berjumlah 28.589 jiwa yang tersebar ke dalam 11 Desa. Sebaran jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Namlea yaitu Desa Namlea dengan jumlah penduduknya yaitu sebesar 7.727 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat pada Desa Karangjaya dengan jumlah penduduk sebanyak 1.452 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini.

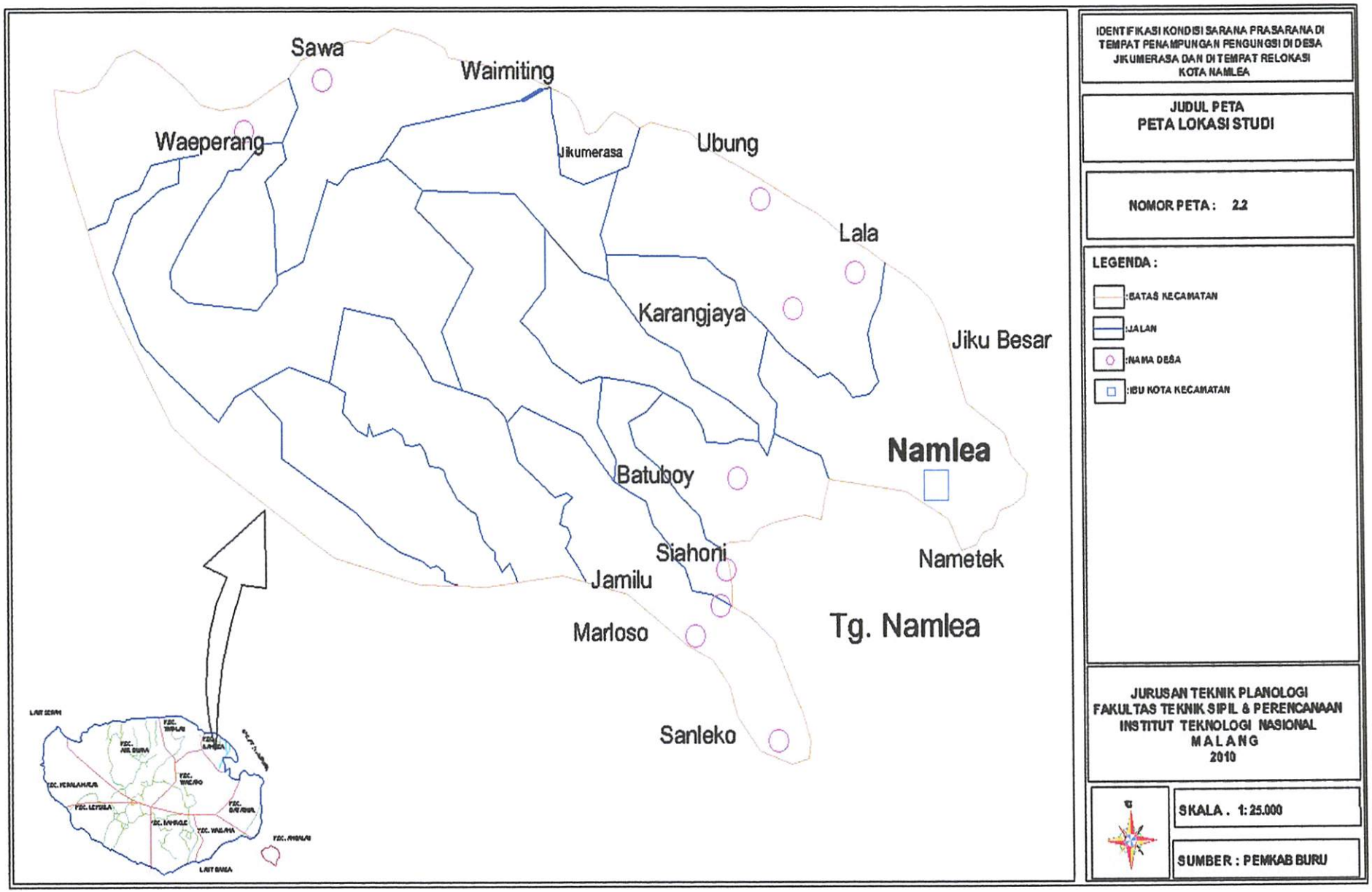
Sawa
Waimiting
Waeperang
Jikumerasa
Ubung
Lala
Karangjaya
Jiku Besar
Namlea
Batuboy
Siahoni
Nametek
Jamilu
Tg. Namlea
Marloso
Sanleko
IDENTIFIKASI KONDISI SARANA PRASARANA DI TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI DI DESA JIKUMERASA DAN DI TEMPAT RELOKASI KOTA NAMLEA
JUDUL PETA
PETA LOKASI STUDI
NOMOR PETA : 2.2
LEGENDA :
:BATAS KECAMATAN
:JALAN
:NAMA DESA
:IBU KOTA KECAMATAN
JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG
2010
SKALA . 1: 25.000
SUMBER : PEMKAB BURU

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk di Kecamatan Namlea Tahun 2008

No	Nama Desa	Jumlah penduduk (jiwa)
1	Namlea	7.727
2	Lala	1.816
3	Ubung	2.783
4	Karangjaya	1.452
5	Jikumerasa	3.198
6	Waimiting	1.711
7	Sawa	1.753
8	Waeperang	1.523
9	Siahoni	1.703
10	Jamilu	1.464
11	Sanleko	3.459
Total		28.589

Sumber: BPS Kabupaten Buru

2.2.1.1 Jumlah Masyarakat Pengungsi

Berdasarkan hasil pendataan ulang pengungsi tahun 2008, maka jumlah masyarakat pengungsi terbesar terdapat pada Desa Namlea dengan jumlah pengungsi sebesar 1.336 jiwa dan masyarakat pengungsi terkeci terdapat pada Desa Ubung dengan jumlah pengungsi sebesar 36 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.6 di bawah ini.

Tabel 2.6
Jumlah Masyarakat Pengungsi
Kecamatan Namlea Tahun 2008

No	Nama Desa	Jmlh (KK)	Jiwa
1	Ubung	8	36
2	Jikumerasa	297	1.418
3	Karangjaya	27	179
4	Lala	32	162
5	Batuboy	20	112
6	Waeperang	29	141
7	Waimiting	23	147
8	Sawa	14	63
9	Namlea	50	234
Total		500	2.503

Sumber:Dinas Sosial Kabupaten Buru

2.2.1.2 Jumlah Masyarakat Pengungsi Di Barak-Barak Penampungan

Berdasarkan hasil pendataan ulang pengungsi tahun 2008, maka jumlah masyarakat pengungsi yang masih berada di tempat pengungsian adalah dapat dilihat pada tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2.7
Jumlah Masyarakat Pengungsi di
Tempat Penampungan Tahun 2000-2007

Tahun	Jumlah (KK)	Jiwa
2000	2466	9.761
2001	3.015	12.069
2002	2.514	10.851
2003	1.986	9.447
2004	1.127	5.784
2005	978	4.352
2006	785	3.823
2007	500	2.503
2008	289	1.319

Sumber: Hasil Survey dan Dinas Sosial Kabupaten Buru

Tabel 2.6
Jumlah Masyarakat Pengungsi
Kecamatan Namlea Tahun 2008

No	Nama Desa	Jmlh (KK)	Jiwa
1	Ubung	8	36
2	Jikumerasa	207	1.418
3	Kayanga/Pe	27	172
4	Lala	34	182
5	Belubey	20	112
6	Waeperang	24	141
7	Wainibung	23	147
8	Sawa	14	68
9	Namlea	80	294
Total		500	2.803

Sumber:Dinas Sosial Kabupaten Buru

2.2.1.2 Jumlah Masyarakat Pengungsi Di Barak-Barak Penampungan

Berdasarkan hasil pendataan ulang pengungsi tahun 2008, maka jumlah masyarakat pengungsi yang masih berada di tempat pengungsian adalah dapat dilihat pada tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2.7
Jumlah Masyarakat Pengungsi di
Tempat Penampungan Tahun 2000-2007

Tahun	Jumlah (KK)	Jiwa
2000	2465	9.791
2001	2.915	12.059
2002	2.3[illegible]	10.851
2003	1.[illegible]86	9.447
2004	1.127	5.764
2005	978	4.35[illegible]
2006	756	3.823
2007	500	2.803
2008	286	1.319

Sumber: Hasil Survey dan Dinas Sosial Kabupaten Buru

2.2.2 Sosial Ekonomi

Kegiatan sosial ekonomi di Kecamatan Namlea didukung oleh sarana prsarana seperti pasar, bank, koperasi, UKM, penginapan dan hotel. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.8 di bawah ini.

Tabel 2.8
Jumlah Sarana Ekonomi Di Kecamatan Namlea Tahun 2008

NO	Desa	Jenis Sarana						Jumlah total
		Pasar	Bank	Koperasi	UKM	Penginapan	Hotel	
1	Sanleko	1	-	2	4	-	-	7
2	Namlea	2	2	21	168	9	2	2
3	Ubung	1	-	2	26	1	-	30
4	Jikumerasa	1	-	4	31	1	-	37
5	Sawa	1	-	3	8	-	-	12
6	Waeperang	1	-	1	11	-	-	13
7	Jamilu	1	-	1	4	-	-	6
8	Lala	1	-	2	8	-	-	11
9	Karang jaya	1	-	1	5	-	-	7
10	Siahoni	1	-	2	7	--	-	10
11	Waimiting	1	-	1	4	-	-	6
Total		4	2	25	276	10	2	39

Sumber: BPS Kabupaten Buru

2.2.3 Fasilitas Umum

Fasilitas umum yang terdapat di Kecamatan Namlea adalah sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perkantoran serta swasta.

2.2.3.1 Sarana Pendidikan

Di Kecamatan Namlea jumlah Sekolah Dasar sebanyak 21 unit, SMP 5 unit dan SMU sebanyak 5 unit. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.9 di bawah ini.

Tabel 2.9
Jumlah Sarana Pendidikan Di Kecamatan Namlea
Tahun 2008

No	Nama Desa	Jumlah sekolah			Jumlah total
		SD	SMP	SMU	
1	Namlea	8	2	2	12
2	Lala	1	-	-	1
3	Ubung	1	-	-	1
4	Karangjaya	1	-	1	2
5	Jikumerasa	2	1	-	3
6	Waimiting	1	-	-	1
7	Sawa	2	-	1	3
8	Waeperang	1	1	-	2
19	Siahoni	1	1	-	2
10	Jamilu	1	-	1	2
11	Sanleko	2	-	-	2
Total		21	5	5	31

Sumber: Buru dalam angka tahun 2008

Rasio Guru : Murid untuk SD (1 : 17), SMP (1 : 19), dan SMA (1 : 16)

Rasio Guru : Sekolah untuk SD (13 : 1), SMP (21 : 1), dan SMA (30 : 1)

Rasio Guru : Kelas untuk SD (2: 1), SMP (2: 1), dan SMA (3: 1)

2.2.3.2 Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan yang terdapat di Kecamatan Namlea dengan jumlah terbanyak adalah masjid sebanyak 23 buah sedangkan yang terendah adalah gereja dengan jumlah 2 buah. Untuk lebuh jelas dapat dilihat pada tabel 2.10 dibawah.

Tabel 2.10
Jumlah Sarana Peribadatan Di Kecamatan Namlea Pada Tahun 2008

NO	Desa	Masjid	Serau	Gereja Kristen	Gereja Katolik	Pura	Vihara/ Klenteng
1	Sanleko	2	0	0	0	0	0
2	Namlea	12	3	0	1	0	0
3	Ubung	1	1	0	0	0	0
4	Jikumerasa	1	2	1	0	0	0
5	Sawa	1	0	0	0	0	0
6	Waeperang	1	1	0	0	0	0
7	Jamilu	1	0	0	0	0	0
8	Lala	1	0	0	0	0	0
9	Karang Jaya	1	0	0	0	0	0
10	Siahoni	1	0	0	0	0	0
11	Waimiting	1	0	0	0	0	0
Total		23	7	1	1	0	0

Sumber:BPS Kabupaten Buru

2.2.3.3 Sarana Kesehatan

Di Kecamatan Namlea terdapat 2 Rumah Sakit Umum, 1 Puskesmas, 4 Puskesmas Pembantu, 9 dokter dan 80 tenaga paramedis. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.11 di bawah ini.

Tabel 2.11
Jumlah Sarana Kesehatan Yang Terdapat Di Kecamatan Namlea Pada tahun 2008

No	Nama Desa	Jumlah sarana kesahatan			Jumlah Total
		Rumah sakit	Puskesmas	Puskesmas pembantu	
1	Namlea	1	1	1	3
2	Lala	-	-	-	-
3	Ubung	-	-	1	1
4	Karangjaya	-	-	-	-
5	Jikumerasa	-	1	1	2
6	Waimiting	-	-	-	-
7	Sawa	-	-	-	-
8	Waeperang	1		1	2
9	Siahoni	-	-	-	-
10	Jamilu	-	-	-	-
11	Sanleko	-	-	-	-
Total		2	2	4	8

Sumber: Buru dalam angka tahun 2008

Rasio puskesmas dan pustu : paramedis adalah 1 : 16

Rasio puskesmas dan pustu : penduduk adalah 1 : 5.469

Rasio paramedis : penduduk adalah 1 : 342

2.2.3.4 Sarana Perkantoran, Listrik, Telepon, Air Bersih

Sarana perkantoran pemerintah di Kecamatan Namlea terdiri dari 17 dinas, 6 badan, serta Kantor Bupati. Sedangkan kantor swasta yakni kantor PT. Telkom, kantor BRI dan BPDM.

1. **PLN Ranting Namlea**

   Produksi KWH : 3.996.506

   KWH Terjual : 3.277.157

2. **PT. Telkom Cabang Namlea**

   Jumlah Satuan Sambungan sebanyak : 848 SST

3 **Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)**

   Sambungan Rumah : 1.439 SR

Banyak Air Yang Terpakai : 250.586. M^3.

2.2.4 Data Sarana dan Prasarana Penunjang

2.2.4.1 Angkutan Umum

Angkutan umum yang digunakan di kecamatan Namlea adalah transportasi Laut dan darat serta udara yakni :

ASDP	:1 buah
Kapal PELNI (KM. LAMBELU)	:1 buah
Kapal Cepat (Bahari Express)	:1 buah
Transportasi Udara	:Pesawat C 212 (PT. Merpati Nusantara Air Lines) 1 buah.

2.2.4.2 Prasarana dan Sarana Transportasi

Jalan-jalan utama dan jembatan yang menghubungkan Desa-desa dalam Kecamatan Namlea dengan jarak keseluruhan 105,31 km terdiri dari jalan yang telah dikerjakan (jalan aspal sepanjang 40,75), (jalan tanah 45,50 km), (Pemadatan 20,00 km). Sedangkan jumlah jembatan yang ada 16 buah.

2.2.4.3 Komunikasi

Komunikasi yang sering digunakan dalam percakapan adalah telepon melalui PT. Telkom Cabang Namlea serta telepon seluler oleh PT. Telkomsel dan Indosat akan tetapi belum menjangkau kesemua desa di Kecamatan Namlea.

Banyak Air Yang Terpakai : 250.580. M³.

2.2.4 Data Sarana dan Prasarana Penunjang

2.2.4.1 Angkutan Umum

Angkutan umum yang digunakan di kecamatan Namlea adalah transportasi

Laut dan darat serta udara yakni :

ASDP :1 buah

Kapal PELNI (KM. LAMBELU) :1 buah

Kapal Cepat (Bahari Express) :1 buah

Transportasi Udara :Pesawat (212 (PT. Merpati Nusantara Air Lines) 1 buah.

2.2.4.2 Prasarana dan Sarana Transportasi

Jalan-jalan utama dan jembatan yang menghubungkan Desa-desa dalam Kecamatan Namlea dengan jarak keseluruhan 105.31 km terdiri dari jalan yang telah diknoljakan (jalan aspal sepanjang 40.75). (jalan tanah 45.50 km). (Pemadatan 20.00 km). Sedangkan jumlah jembatan yang ada 16 buah.

2.2.4.3 Komunikasi

Komunikasi yang sering digunakan dalam percakapan adalah telepon melalui PT. Telkom Cabang Namlea serta telpon seluler oleh PT. Telkomsel dan Indosat akan tetapi belum menjangkau kesemua desa di Kecamatan Namlea.

2.3 Gambaran Lokasi Studi Pasca Konflik

2.3.1 Gambaran Kondisi Rumah Pasca Konflik

Pasca konflik yang terjadi mengakibatkan rusaknya ribuan rumah penduduk yang mengakibatkan masyarakat mengungsi ke berbagai daerah, dimana pada daerah yang dijadikan tempat mengungsi masyrakat tinggal pada barak-barak pengungsian yang tidak layak untuk ditempati. Untuk itu kita perlu mengetahui kondisi rumah masyarakat pasca kerusuhan yang terjadi dan kondisi tempat tinggal yang mereka tempati sekarang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2. 12 di bawah ini.

Tabel 2.12
Kondisi Rumah Pasca Konflik

Kondisi rumah pasca konflik	Frekuensi	%
Terbakar	29	38
Rusak	22	29
Hancur	18	24
Ditempati orang lain	5	9
Lainnya	0	0
Jumlah	74	100

Sumber: Hasil Kuisioner

Diagram 2.1
Kondisi Rumah Pasca Konflik

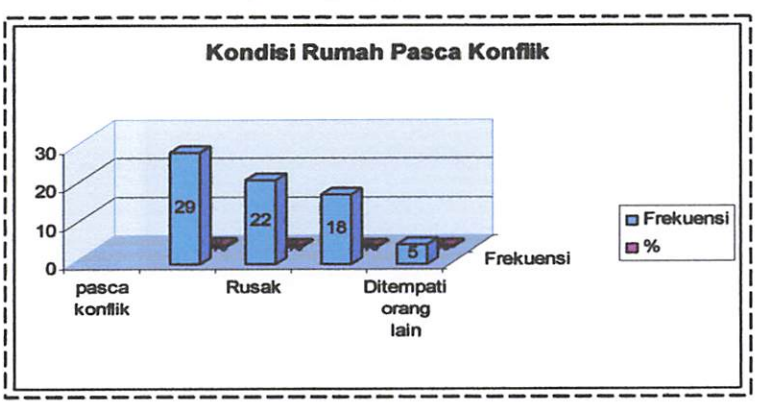

2.3 Gambaran Lokasi Studi Pasca Konflik

2.3.1 Gambaran Kondisi Rumah Pasca Konflik

Pasca konflik yang terjadi mengakibatkan rusaknya ribuan rumah penduduk yang mengakibatkan masyarakat mengungsi ke berbagai daerah. dimana pada daerah yang dijadikan tempat mengungsi masyrakat tinggal pada barak-barak pengungsian yang tidak layak untuk ditempati. Untuk itu kita perlu mengetahui Kondisi rumah masyarakat pasca kerusuhan yang terjadi dan Kondisi tempat tinggal yang mereka tempati sekarang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2. 12 di bawah ini.

Tabel 2.12
Kondisi Rumah Pasca Konflik

Kondisi rumah pasca konflik	Frekuensi	%
Terbakar	29	39
Rusak	22	29
Hancur	18	24
Fasilitas umum lain	5	6
Lainnya	0	0
Jumlah	74	100

Sumber: Hasil Analisa

Diagram 2.1
Kondisi Rumah Pasca Konflik

Gambar 2.1
Tempat tinggal warga yang dibakar pada saat kerusuhan terjadi

Gambar 2.2
Kondisi permukiman yang hancur pada saat kerusuhan terjadi

Gambar 2.3
Kondisi tempat tinggal penduduk yang rusak akibat kerusuhan yang terjadi

Gambar 2.4
Kondisi tempat tinggal penduduk yang rata dengan tanah dan tidak bisa ditinggali lagi.

Berdasarkan hasil kuisioner yang disebarkan untuk 74 responden sebanyak 22 orang atau 29 % rumahnya terbakar pada saat kerusuhan terjadi, sebanyak 18 orang atau 24 % rumahnya rusak pada kerusuhan terjadi, dan sebanyak 5 orang atau 9 % rumahnya ditempati orang lain dan sisanya rumahnya rata dengan tanah dan tidak dapat ditinggali lagi. Pada saat kerusuhan terjadi banyak warga yang mengungsi keluar daerah dan tinggal di barak-barak penampungan, berikut ini kita akan mengetahui kondisi tempat tinggal masyarakat di tempat pengungsian. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.13 di bawah ini.

Gambar 2.1
Tempat tinggal warga yang dibakar
pada saat kerusuhan terjadi

Gambar 2.2
Kondisi permukiman yang hancur
pada saat kerusuhan terjadi

Gambar 2.3
Kondisi tempat tinggal penduduk yang
rusak akibat kerusuhan yang terjadi

Gambar 2.4
Kondisi tempat tinggal penduduk yang rata
dengan tanah dan tidak bisa ditinggali lagi.

Berdasarkan hasil kuisioner yang disebarkan untuk 74 responden sebanyak 22 orang atau 29 % rumahnya terbakar pada saat kerusuhan terjadi, sebanyak 18 orang atau 24 % rumahnya rusak pada kerusuhan terjadi, dan sebanyak 5 orang atau 9 % rumahnya ditempati orang lain dan sisanya rumahnya rata dengan tanah dan tidak dapat ditinggali lagi. Pada saat kerusuhan terjadi banyak warga yang mengungsi keluar daerah dan tinggal di barak-barak pengungsian. berikut ini kita akan mengetahui kondisi tempat tinggal masyarakat di tempat pengungsian. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.13 di bawah ini.

Tabel 2.13
Kondisi Tempat Tinggal Di Tempat Pengungsian

Kondisi tempat tinggal di daerah pengungsian	Frekuensi	%
Kondisi sangat baik	3	4
Kondisi baik	5	7
Kondisi sedang	4	5
Kondisi buruk	29	39
Kondisi sangat buruk	33	45
Jumlah	74	100

Sumber: Hasil Kuisioner

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari 74 responden berpendapat bahwa sebanyak 29 orang atau sekitar 39% berpendapat bahwa kondisi di tempat penampungan buruk, sebayak 33 orang atau sebanyak 45% berpendapat bahwa kondisinya sangat buruk, sebanyak 3 orang atau sebesar 4% menyatakan bahwa kondisi di tempat penampungan sangat baik, sebanyak 5 orang atau sebesar 7% menyatakan kondisinya baik, dan sisanya atau sebanyak 4 orang atau sebesar 5% menyatakan bahwa kondisi di tempat panampungan adalah sedang.

Diagram 2.2
Kondisi Tempat Tinggal Di Tempat Pengungsian

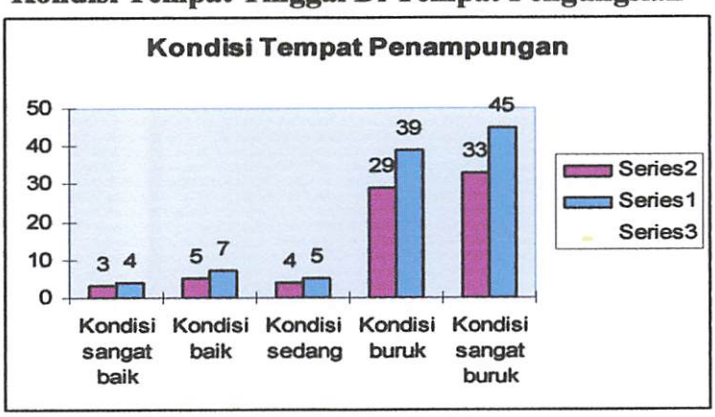

2.3.2 Gambaran Tempat Penampungan Pengungsi Di Desa Jikumerasa Kecamatan Namlea

Tempat penampungan di Kecamatan Namlea terdapat di Desa Jikumerasa dan di Kota Namlea. Para pengungsi yang mengungsi dari tempat tinggalnya semula menempati barak-barak pengungsi yang telah disediakan oleh pemerintah

Tabel 2.13
Kondisi Tempat Tinggal Di Tempat Penampungsian

Kondisi tempat tinggal di daerah penampungsian	Frekuensi	%
Kondisi sangat baik	3	4
Kondisi baik	5	7
Kondisi sedang	4	5
Kondisi buruk	29	29
Kondisi sangat buruk	33	45
Jumlah	74	100

Sumber: Hasil Analisa

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari 74 responden berpendapat bahwa sebanyak 29 orang atau sekitar 39% berpendapat bahwa kondisi di tempat penampungan buruk, sebanyak 33 orang atau sebanyak 45% berpendapat bahwa kondisinya sangat buruk, sebanyak 3 orang atau sebesar 4% menyatakan bahwa kondisi di tempat penampungan sangat baik, sebanyak 5 orang atau sebesar 7% menyatakan kondisinya baik, dan sisanya atau sebanyak 4 orang atau sebesar 5% menyatakan bahwa kondisi di tempat penampungan adalah sedang.

Diagram 2.2
Kondisi Tempat Tinggal Di Tempat Penampungan

2.3.2 Gambaran Tempat Penampungan Pengungsi Di Desa Jikumerasa Kecamatan Namlea

Tempat penampungan di Kecamatan Namlea terdapat di Desa Jikumerasa dan di Kota Namlea. Para pengungsi yang mengungsi dari tempat tinggalnya semula menempati barak-barak pengungsi yang telah disediakan oleh pemerintah

setempat. Ada pula yang menempati rumah saudara yang tinggal di Kota tersebut. Kondisi tempat pengungsian kebanyakan memilik kondisi yang buruk karena pada umumnya masyarakat menempati ruko dengan keterbatasan sarana prasarana yang tidak memadai di tempat penampungan pengungsi.

Gambar 2.5
(Kondisi masyarakat di tempat pengungsian)

Gambar 2.6
(Ruko yang dijadikan tempat pengungsian oleh masyarakat)

2.3.2.1 Jumlah Masyarakat Pengungsi di Tempat Penampungan

Masyarakat pengungsi di tempat penampungan yang terdapat di Desa Jikumerasa adalah sebanyak 289 KK atau sekitar 1.319 jiwa. Dimana jumlah masyarakat menurut kelompok umur dapat dikelompokkan sebagai berikut. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.14 dibawah ini.

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Tempat Penampungan Tahun 2008

No	Kelompok Umur	Jumlah (Jiwa)
1	0 - 4	35
2	5-9	127
3	9-14	139
4	15 - 19	145
5	20 - 24	112
6	25 - 29	106

sederhana. Ada pula yang menempati rumah saudara yang tinggal di Kota tersebut. Kondisi tempat pengungsian kebanyakan memiliki kondisi yang buruk karena pada umumnya masyarakat menempati ruko dengan keterbatasan sarana prasarana yang tidak memadai di tempat penampungan pengungsi.

(Lampiran 2.5
Kondisi masyarakat di tempat pengungsian)

(Lampiran 2.6
Ruko yang dijadikan tempat pengungsian
oleh masyarakat)

2.3.2.1 Jumlah Masyarakat Pengungsi di Tempat Penampungan

Masyarakat pengungsi di tempat penampungan yang terdapat di Desa Jikumerasa adalah sebanyak 289 KK atau sekitar 1.319 jiwa. Dimana jumlah masyarakat menurut kelompok umur dapat dikelompokkan sebagai berikut. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.14 dibawah ini.

Tabel 2.14
Jumlah Pengungsi Menurut Kelompok Umur
di Tempat Penampungan Tahun 2008

No	Kelompok Umur	Jumlah (Jiwa)
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	167
3	[illegible]	139
4	[illegible]	[illegible]
5	20 - 24	[illegible]
6	[illegible]	106

	Kelompok	
7	30 - 34	71
8	35 - 39	93
9	40 - 44	73
10	45 - 49	56
11	50 - 54	24
12	55 - 59	10
13	60 - 64	3
14	65 - 69	0
15	70 - 74	0
16	> 75	0
Jumlah		993

Sumber:Kantor Sosial Kota Namlea dan hasil amatan

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa masyarakat yang berada di tempat penampungan adalah masyarakat yang mendominasi usia sekolah 5-9 sebanyak 127 jiwa, 9-14 sebanyak 139 jiwa dan 15-19 sebanyak 145 jiwa dan masyarakat pada usia kerja.

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
di Desa Jikumerasa Tahun 2008

No	Kelompok Umur	Jumlah (Jiwa)
1	0 - 4	189
2	05-Sep	237
3	Sep-14	314
4	15 - 19	223
5	20 - 24	265
6	25 - 29	285
7	30 - 34	246
8	35 - 39	216
9	40 - 44	196
10	45 - 49	224
11	50 - 54	192
12	55 - 59	179
13	60 - 64	162
14	65 - 69	93
15	70 - 74	87
16	> 75	90
Jumlah		3198

Sumber:Kantor Sosial Kota Namlea

Dimana tingkat pendidikan masyarakat pengungsi sendiri adalah sebagian besar masyarakat pengungsi hanya mengenyam pendidikan sampai sma saja, sedangkan yang sisanya mengatakan hanya lulus sd dan smp. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut ini.

Tabel 2.16
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
di Tempat Penampungan Tahun 2008

Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)
SD	19
SMP	25
SMA	30
Jumlah	74

Sumber:hasil kuisioner dan hasil amatan

Masyarakat yang berada di tempat penampungan, umumnya memiliki tingkat pendidikan yang paling tertinggi yaitu sebagai lulusan sma yaitu sebanyak 30 jiwa dan tingkat pendidikan smp sebanyak 25 jiwa dan sisanya atau sekitar 19 jiwa mempunyai tingkat pendidikan hanya sebatas sd saja.

2.3.2.2 Kondisi Sarana Prasarana di Tempat Penampungan

Di tempat penampungan sendiri, masalah utama yang di hadapi adalah minimnya sarana pendukung, seperti sarana perdagangan dan jasa, dimana hanya terdapat pasar-pasar kecil dan tidak terdapatnya pusat perbelanjaan, sarana pendidikan yang terdapat SD saja dan hanya terdapat sarana kesehatan seperti puskesmas pembantu dan terdapat sarana perkantoran seperti kantor desa. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis sarana yang terdapat di tempat penampungan dapat dilihat pada tabel 2.17.

Dimana tingkat pendidikan masyarakat pengungsi sendiri adalah sebagian besar masyarakat pengungsi hanya mengenyam pendidikan sampai sma saja sedangkan yang sisanya mengatakan hanya lulus sd dan smp. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut ini.

Tabel 2.16
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
di Tempat Penampungan Tahun 2008

Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)
SD	15
SLTP	25
SMA	30
Jumlah	71

Sumber:Hasil Analisa dari Data Primer

Masyarakat yang berada di tempat penampungan, umumnya memiliki tingkat pendidikan yang paling tertinggi yaitu sebagai lulusan sma yaitu sebanyak 30 jiwa dan tingkat pendidikan smp sebanyak 25 jiwa dan sisanya atau sekitar 15 jiwa merupanyai tingkat pendidikan hanya sebatas sd saja.

2.3.2.2 Kondisi Sarana Prasarana di Tempat Penampungan

Di tempat penampungan sendiri, masalah utama yang di hadapi adalah minimnya sarana pendukung, seperti sarana perdagangan dan jasa, dimana hanya terdapat pasar-pasar kecil dan tidak terdapatnya pusat perbelanjaan, sarana pendidikan yang terdapat SD saja dan hanya terdapat sarana kesehatan seperti puskesmas pembantu dan terdapat sarana perkantoran seperti kantor desa. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis sarana yang terdapat di tempat penampungan dapat dilihat pada tabel 2.17.

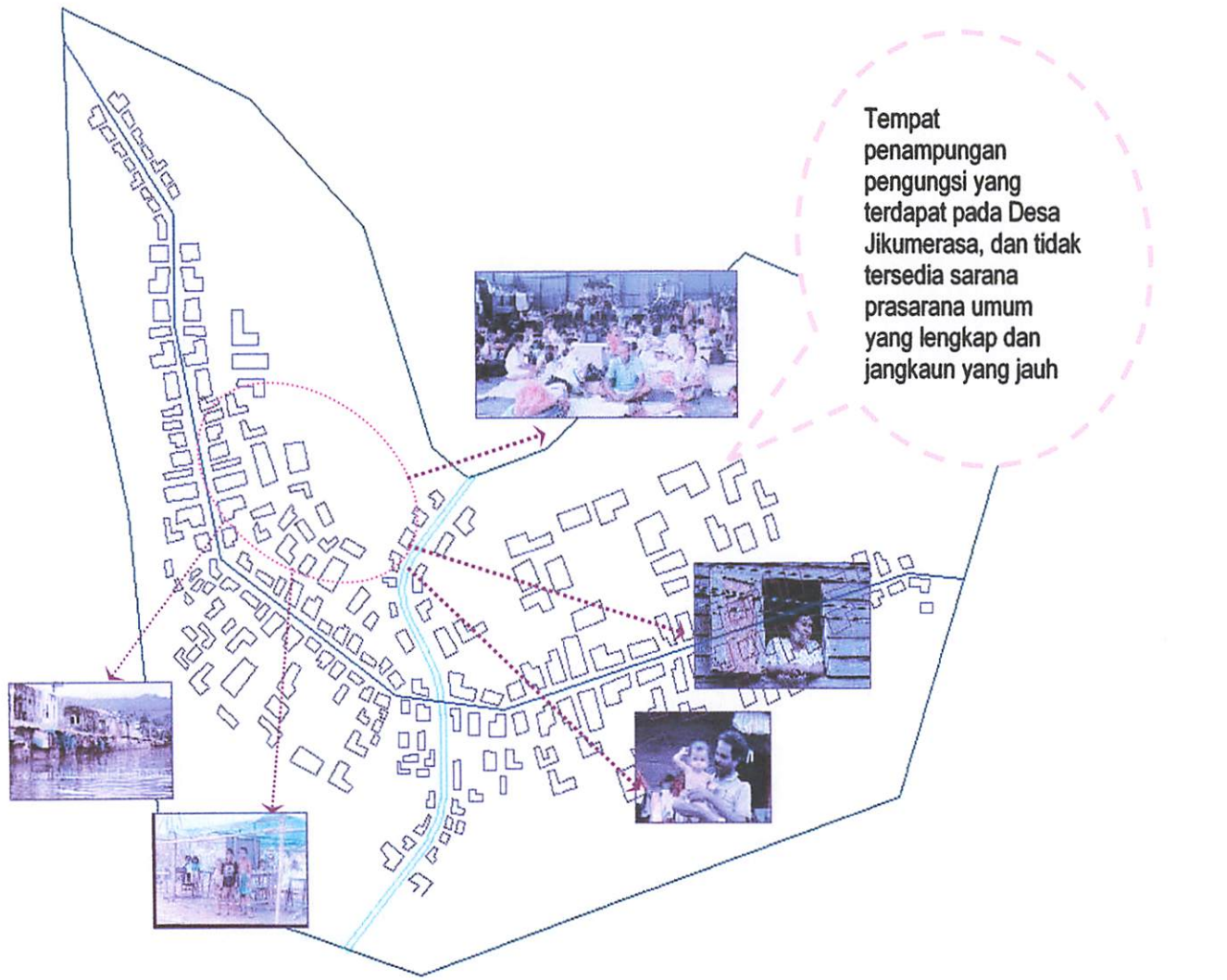

IDENTIFIKASI KONDISI SARANA PRASARANA DI TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI DI DESA JIKUMERASA DAN DI TEMPAT RELOKASI KOTA NAMLEA

JUDUL PETA
TEMPAT PENAMPUNGAN DI DESA JIKUMERASA

NOMOR PETA : 2.3

LEGENDA :

- :BATAS DESA
- :JALAN
- :PERMUKIMAN
- :TEMPAT PENAMPUNGAN
- :DANAU

JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG
2010

SKALA. 1:15.000

SUMBER : PEMKAB BURU

Tabel 2.17
Jenis Sarana Yang Terdapat di Tempat Penampungan Pengungsi di Desa Jikumerasa

No	Jenis Sarana	Jumlah (Unit)	Keterangan	Jarak
1	**Sarana Pendidikan**			
	▪ TK	1	▪ Terdapat di Desa Jikumerasa	▪ 500 meter-1 km
	▪ SD	1	▪ Terdapat di Desa Jikumerasa	▪ 500 meter-1 km
	▪ SMP	0	▪ Di luar Desa Jikumerasa tetapi masih dalam 1 kecamatan	▪ 6-10 Km
	▪ SMA	0	▪ Di luar Desa Jikumerasa tetapi masih dalam 1 kecamatan	▪ 15-20 Km
	▪ Universitas	0	▪ Di Kota Ambon dan di luar Kota Ambon	▪ Memakan waktu 1 hari perjalanan dengan menggunakan kapal laut
2	**Sarana Perkantoran**			
	▪ Kantor pemerintahan	0	▪ Di Kota Namlea Jikumerasa tetapi masih dalam 1 kecamatan	▪ 15-20 Km
	▪ Kantor Desa	1	▪ Di Desa Jikumerasa	▪ 500 M-2 Km
	▪ Kantor Polisi/ Abri	0	▪ Di Kota Namlea Jikumerasa tetapi masih dalam 1 kecamatan	▪ 15-20 Km
	▪ Kantor Pos	0	▪ Di Kota Namlea Jikumerasa tetapi masih dalam 1 kecamatan	▪ 15-20 Km
	▪ Bank	0	▪ Di Kota Namlea Jikumerasa tetapi masih dalam 1 kecamatan	▪ 15-20 Km
3	**Sarana Peribadatan**			
	▪ Masjid	1	▪ Terdapat di Desa Jikumerasa	▪ 500 M-1 Km
	▪ Musholla	1	▪ Di tempat penampungan	▪ 100 -500meter
	▪ Gereja	0	▪ Di luar Desa Jikumerasa	▪ 15-20 Km
	▪ Pura	0	▪ Di Kota Ambon	▪ Memakan waktu 1 hari perjalanan dengan menggunakan kapal laut
	▪ Wihara	0	▪ Di Kota Ambon	▪ Memakan waktu 1 hari perjalanan dengan menggunakan kapal laut
4	**Sarana Kesehatan**			
	▪ Rumah Sakit	0	▪ Di Kota Namlea Jikumerasa tetapi masih dalam 1 kecamatan	▪ 15-20 Km
	▪ Puskesmas	1	▪ Di Desa Jikumerasa	▪ 500 M-2 Km
	▪ Klinik Bersalin	0	▪ Di Kota Namlea Jikumerasa tetapi masih dalam 1 kecamatan	▪ 15-20 Km
	▪ Praktik Dokter	0	▪ Di Kota Namlea Jikumerasa tetapi masih dalam 1 kecamatan	▪ 15-20 Km
	▪ Apotik	0	▪ Di Kota Namlea Jikumerasa tetapi masih dalam 1 kecamatan	▪ 15-20 Km
	▪ Puskesmas Pembantu	1	▪ Di Tempat Penampungan	▪ 100 -500 meter
	▪ Posyandu	1	▪ Di Tempat Penampungan	▪ 100-500 meter
5	**Sarana Perdagangan Dan Jasa**			
	▪ Pasar	1	▪ Terdapat di Desa Jikumerasa	▪ 500 M-1 Km
	▪ Pusat Perbelanjaan	0	▪ Di Kota Namlea Jikumerasa tetapi	▪ 15-20 Km

Tabel 2.17

Jenis Sarana Yang Terdapat di Tempat Penampungan

Pengungsi di Desa Jikumerasa

No	Jenis Sarana	Jumlah (Unit)	Keterangan	Jarak
1	**Sarana Pendidikan**			
	▪ TK	1	▪ Terdapat di Desa Jikumerasa	▪ 500 meter-1 Km
	▪ SD	1	▪ Terdapat di Desa Jikumerasa	▪ 500 meter-1 Km
	▪ SMP	0	▪ Di luar Desa Jikumerasa tetapi masih dalam 1 kecamatan	▪ 8-10 Km
	▪ SMA	0	▪ Di luar Desa Jikumerasa tetapi masih dalam 1 kecamatan	▪ 15-20 Km
	▪ Universitas	0	▪ Di Kota Ambon dan di luar Kota Ambon	▪ Memakan waktu 1 hari perjalanan dengan menggunakan kapal laut
2	**Sarana Perkantoran**			
	▪ Kantor pemerintahan	0	▪ Di Kota Namlea Jikumerasa tetapi masih dalam 1 kecamatan	▪ 15-20 Km
	▪ Kantor Desa	1	▪ Di Desa Jikumerasa	▪ 500 M-2 Km
	▪ Kantor Polsi/ Abri	0	▪ Di Kota Namlea Jikumerasa tetapi masih dalam 1 kecamatan	▪ 15-20 Km
	▪ Kantor Pos	0	▪ Di Kota Namlea Jikumerasa tetapi masih dalam 1 kecamatan	▪ 15-20 Km
	▪ Bank	0	▪ Di Kota Namlea Jikumerasa tetapi masih dalam 1 kecamatan	▪ 15-20 Km
3	**Sarana Perindustrian**			
	▪ Industri	1	▪ Terdapat di Desa Jikumerasa	▪ 500 M-1 Km
	▪ Industri	1	▪ Di tempat penampungan	▪ 100 -500meter
	▪ Gerai	0	▪ Di luar Desa Jikumerasa	▪ 15-20 Km
	▪ Pura	0	▪ Di Kota Ambon	▪ Memakan waktu 1 hari perjalanan dengan menggunakan kapal laut
	▪ Wihara	0	▪ Di Kota Ambon	▪ Memakan waktu 1 hari perjalanan dengan menggunakan kapal laut
4	**Sarana Kesehatan**			
	▪ Rumah Sakit	0	▪ Di Kota Namlea Jikumerasa tetapi masih dalam 1 kecamatan	▪ 15-20 Km
	▪ Puskesmas	1	▪ Di Desa Jikumerasa	▪ 500 M-2 Km
	▪ Klinik Bersalin	0	▪ Di Kota Namlea Jikumerasa tetapi masih dalam 1 kecamatan	▪ 15-20 Km
	▪ Praktik Dokter	0	▪ Di Kota Namlea Jikumerasa tetapi masih dalam 1 kecamatan	▪ 15-20 Km
	▪ Apotik	0	▪ Di Kota Namlea Jikumerasa tetapi masih dalam 1 kecamatan	▪ 15-20 Km
	▪ Puskesmas Pembantu	1	▪ Di Tempat Penampungan	▪ 100 -500 meter
	▪ Posyandu	1	▪ Di Tempat Penampungan	▪ 100-500 meter
5	**Sarana Perdagangan Dan Jasa**			
	▪ Pasar	1	▪ Terdapat di Desa Jikumerasa	▪ 500 M-1 Km
	▪ Pusat Perbelanjaan	0	▪ Di Kota Namlea Jikumerasa tetapi	▪ 15-20 Km

No	Jenis Sarana	Jumlah (Unit)	Keterangan	Jarak
			masih dalam 1 kecamatan	
	▪ Warung	4	▪ Di tempat penampungan	▪ 100 meter-500 meter
	▪ Kiios	5	▪ Di tempat penampungan	▪ 100 meter-500 meter
Jumlah		24		

Sumber: Hasil Amatan

Untuk prasarana umum sendiri belum terlayani dengan baik, di tempat penampungan sendiri, sarana air bersih berupa air pdam sangat kurang, masyarakat biasanya menggunakan sumur-sumur terdekat sebagai sumber air bersih, sedangkan untuk prasarana jaringan listrik juga belum terlayani dengan baik, hal ini di karenakan aliran listrik yang tersedia di batasi di tempat penampungan pengungsi, hal lain yang sangat dirasakan oleh masyarakat adalah ketersediaan mck, karena masyarakat di tempat penampungan harus memakai sarana mck secara bersama. Untuk ketersediaan utilitas bisa dilihat pada tabel 2.18 di bawah ini.

Tabel 2.18
Jenis Prasarana Yang Terdapat di Tempat Penampungan Pengungsi di Desa Jikumerasa

No	Jenis Prasarana	Keterangan
1	**Prasarana Jaringan Air Bersih**	
	▪ Pdam	▪ Pendistribusian menggunakan pdam tidak lancar di tempat penampungan
	▪ Sumur	▪ Tersedia di tempat penampungan, sehingga masyarakat umumnya menggunakan air dari sumur sebagai sumber air bersih.
	▪ Sungai	▪ Terdapat di Desa Jikumerasa dengan jarak sekitar 1 km, masyarakat biasanya menggunakan sebagai sumber air.
2	**Prasarana Jaringan Listrik**	Tersedia di tempat penampungan namun terbatas
3	**Prasarana Jaringan Telekomunikasi**	Hanya tersedia di kantor desa dan juga tidak ada tower di desa ini sehingga tidak memungkinkan untuk memakai telepon pribadi
4	**Prasarana Jaringan Sampah**	Tidak adanya petugas sampah di Desa ini, pembuangan sampah di lakukan dengan cara di timbun atau dibakar
5	**Prasarana Jaringan Jalan**	Jalan di Tempat Penampungan adalah jalan tanah dan hanya tersedia 1 jalan besar yang melayani transportasi antar desa.
6	**Prasarana MCK**	Kondisi MCK ditempat penampungan sangat terbatas dan digunakan secara bersama oleh pria dan wanita, sehingga para wanita merasa kurang nyaman.

Sumber: Hasil Amatan

No	Jenis Sarana	Jumlah (Unit)	Keterangan	Jarak
			mesin dalam 1 kecamatan	
	▪ Warung	4	▪ Di tempat penampungan	▪ 100 meter-500 meter
	▪ Kios	5	▪ Di tempat penampungan	▪ 100 meter-500 meter
	Jumlah	24		

Sumber: Hasil Taruan

Untuk prasarana umum sendiri bolum terlayani dengan baik, di tempat penampungan sendiri. sarana air bersih berupa air pdam sangat kurang. masyarakat biasanya mengunakan sumur-sumur terdekat sebagai sumber air bersih. sedangkan untuk prasarana jaringan listrik juga belum terlayani dengan baik. hal ini di karenakan ulitan listrik yang tersedia di batasi di tempat penampungan pengumpsi. hal lain yang sangat dirasakan oleh masyarakat adalah ketersediaan mck. karena masyarakat di tempat penampungan harus mengkai sarana mck secara bersama. Untuk ketersediaan utilitas bisa dilihat pada tabel 2.18 di bawah ini

Tabel 2.18
Jenis Prasarana Yang Terdapat di Tempat Penampungan
Pengungsi di Desa Hitumuriaa

No	Jenis Prasarana	Keterangan
1	Prasarana Jaringan Air Bersih	
	▪ Pdam	▪ Pendistribusian menggunakan pdam tidak lancar di tempat penampungan
	▪ Sumur	▪ Tersedia di tempat penampungan sehingga masyarakat umumnya menggunakan air dari sumur sebagai sumber air bersih
	▪ Sungai	▪ Terdekat di Desa Hitumuriaa dengan jarak sekitar 1 km, masyarakat biasanya menggunakan sebagai sumber air
2	Prasarana Jaringan Listrik	Tersedia di tempat penampungan namun terbatas
3	Prasarana Jaringan Telekomunikasi	Hanya tersedia di lantor desa dan juga tidak ada lower di desa ini sehingga tidak memungkinkan untuk menelpon keluarga
4	Prasarana Jaringan Sampah	Tidak adanya petugas sampah di Desa ini sehingga sampah di lakukan dengan cara di timbun atau dibakar
5	Prasarana Jaringan Jalan	Jalan di Tempat Penampungan adalah jalan tanah dan hanya tersedia 1 jalan besar yang melayani lalu lintas antar desa
6	Prasarana MCK	Untuk MCK dilempat penampungan sangat terbatas tidak sebanding dengan jumlah pengungsi yang ada, sehingga para warga harus antri

Sumber: Hasil Taruan

2.3.3 Gambaran Tempat Relokasi di Kota Namlea

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu masalah yang di akibatkan oleh kerusuhan sosial yang terjadi di Kota Ambon pada tahun 1999. Relokasi masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial merupakan salah satu alternatif yang di pilih sebagai konsekuensi dari perkembangan situasi dan kondusi keamanan. Penanganan masalah ini di laksanakan secara sisipan dan terkonsentrasi di wilayah perdesaan dan perkotaan.

Gambar 2.7
(Tempat Relokasi di Kota Namlea)

Tempat relokasi yang terdapat di Kota Namlea dimana dilengkapai dengan sarana prasarana umum yang memadai dan jangkaun yang relatif dekat.

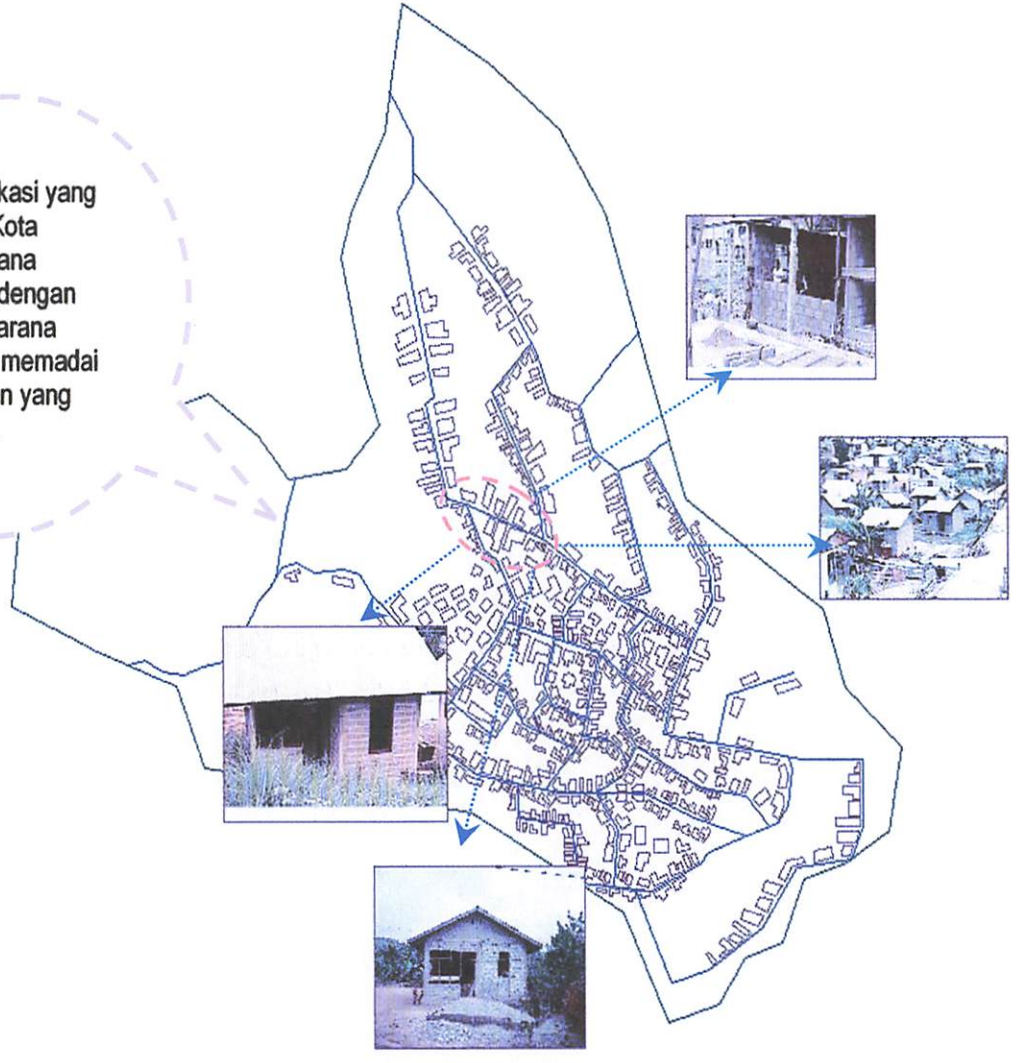

IDENTIFIKASI KONDISI SARANA PRASARANA DI TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI DI DESA JIKUMERASA DAN DI TEMPAT RELOKASI KOTA NAMLEA

JUDUL PETA
TEMPAT RELOKASI DI KOTA NAMLEA

NOMOR PETA : 2.4

LEGENDA :

- :BATAS KECAMATAN
- :JALAN
- :PERMUKIMAN
- :TEMPAT RELOKASI

JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG
2010

SKALA. 1:25.000

SUMBER : PEMKAB BURU

Kecamatan Namlea merupakan ibukota Kabupaten Buru merupakan daerah yang baru mengalami pemekaran pada tahun 2000 dengan pengembangan kawasan prioritas yaitu pusat pemerintahan, komersial serta perumahan, pengembangan pusat-pusat pelayanan kegiatan bagian wilayah kota yang mencerminkan tata jenjang pelayanan kegiatan kota sesuai dengan jenis kegiatan dan pelayanannya. Pengembangan pusat pelayanan ini diharapkan juga dapat mendistribusikan fasilitas yang ada dengan sumber pembiayaan dari pemerintah pusat dan pemerintah setempat.

Penanganan untuk para masyarakat pengungsi adalah menyediakan tempat relokasi. Pendekatan ini adalah alternatif yang diambil berdasarkan kondisi keamanan di Kota Ambon, kebutuhan perumahan dari masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial dan keinginan dari masyarakat yang mengalami kerusuhan yang dilengkapi dengan lokasi yang memadai.

Tempat relokasi sendiri di bangun di Kota Namlea dengan pertimbangan kondisi keamanan, dimana Kota Namlea merupakan daerah yang jarang terjadi konflik dan juga dilengkapi dengan sarana prasarana umum yang memadai serta kondisi kondisi jaringan jalan yang baik dan jarak ke sarana umum yang mudah di jangkau. Dimana jumlah rumah di tempat relokasi adalah sekitar 300 unit dengan luas lahan sekitar ± 4 Ha dan di lengkapi dengan sarana prasarana dasar.

2.3.3.1 Kondisi Sarana Yang Terdapat di Tempat Relokasi

- **Sarana Pendidikan**

  Untuk sarana pendidikan yang formal hanya ada TK (dua unit) dan SD (empat unit). SMP (dua unit), SMU (2 unit) yang tersedia di Kota Namlea dan tidak terdapat di tempat relokasi, perguruan Tinggi tidak tersedia di Kota Namlea

Kecamatan Namlea merupakan ibukota Kabupaten Buru merupakan daerah yang baru mengalami pemekaran pada tahun 2000 dengan pengembangan kawasan prioritas yaitu pusat pemerintahan. komersial serta perumahan. pengembangan pusat-pusat pelayanan kegiatan dapat wilayah lora yang meneerminkan tata jenjang pelayanan kegiatan kota sesuai dengan jenis kegiatan dan pelayanannya. Pengembangan pusat pelayanan ini dihrapkan juga dapat mendistribusikan fasilitas yang ada dengan sumber pembiayaan dari pemerintah pusat dan pemerintah setempat.

Pemanfaatan untuk pusat masyarakat pengunjung adalah menyediakan tempat relokasi. Pendekatan ini adalah alternatif yang dianggap berdasarkan kondisi kesamaan di Kota Ambon. Kebutuhan perumahan dari masyarakat yang mengalami kemsakan sosial dan kehilangan dari masyarakat yang mengalami kerusuhan yang dilengkapi dengan lokasi yang memadai.

Tempat relokasi sendiri di dangun di Kota Namlea dengan pertimbangan kondisi kesamaan. dimana Kota Namlea merupakan daerah yang jarang terjadi konflik dan juga dilengkapi dengan sarana prasarana umum yang memadai serta kondisi kondisi jaringan jalan yang baik dan jauh ke sarana umum yang mudah di jangkau. Dimana jumlah rumah di tempat relokasi adalah sekitar 300 unit dengan luas lahan sekitar ± 4 Ha dan di lengkapi dengan sarana prasarana dasar.

2.3.3.1 Kondisi Sarana Yang Terdapat di Tempat Relokasi

- **Sarana Pendidikan**

  Untuk sarana pendidikan yang formal hanya ada TK (dua unit) dan SD (empat unit). SMP (dua unit). SMU (2 unit) yang tersedia di Kota Namlea dan tidak terdapat di tempat relokasi. pergurnan Tinggi tidak tersedia di Kota Namlea

Gambar 2.8
(Sarana Pendidikan Yang Terdapat di Kota Namlea)

- **Sarana Perkantoran**

  Untuk sarana perkantoran yaitu terdapat 17 jenis instansi di sektor formal, untuk kantor polisi/ Abri terdapat 2 unit, kantor pos 1 unit serta bank 2 unit yang tersedia di Kota Namlea.

Gambar 2.9
(Sarana Perkantoran Yang Terdapat di Kota Namlea)

Gambar 2.8
(Sarana Pendidikan Yang Terdapat di Kota Namlea)

- **Sarana Perkantoran**

Untuk sarana perkantoran yaitu terdapat 17 jenis instansi di sektor formal, untuk kantor polisi Ada terdapat 2 unit. kantor pos 1 unit serta bank 2 unit yang tersedia di Kota Namlea.

Gambar 2.9
(Sarana Perkantoran Yang Terdapat di Kota Namlea)

- **Sarana Peribadatan**

  Di wilayah studi terdapat sarana peribadataan berupa mesjid yang dibangun sebanyak 3 unit, musholla 1 unti dan gereja 1 unit, sedangkan untuk sarana peribadatan berupa pura dan wihara tidak terdapat di lokasi studi.

Gambar 2.10
(Sarana Peribadatan Yang Terdapat di Kota Namlea)

- **Sarana Kesehatan**

  Sarana kesehatan yang berada di dalam wilayah studi yang tersedia berupa rumah sakit 1 unit, puskesmas unit , klinik bersalin 1 unit , praktik dokter 3 unit dan apotik unit..

Gambar 2.11
(Sarana Kesehatan Yang Terdapat di Kota Namlea)

- **Sarana Perdagangan dan Jasa**

  Di wilayah studi terdapat sarana perdagangan dan jasa berupa pasar sebanyak 1 unit, pusat perbelanjaan sebanyak 2 unit, warung sebanyak 6 unit dan kios sebanyak 8 unit.

Gambar 2.12
(Sarana Perdagangan dan Jasa Yang Terdapat di Tempat Relokasi dan di Kota Namlea)

Kelengkapan sarana prasarana di tempat relokasi dapat dilihat pada tabel 2.19 di bawah ini.

Tabel 2.19
Jenis Sarana Yang Terdapat di Tempat Relokasi di Kota Namlea

No	Jenis Sarara	Jumlah (unit)	Keterangan	Jarak
1	**Sarana Pendidikan**			
	▪ TK	2	▪ 1 unit terdapat di tempat relokasi dan 1 unit di Kota Namlea	▪ 100-500 meter
	▪ SD	4	▪ Terdapat di Kota Namlea dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi.	▪ 1 Km-2 Km
	▪ SMP	2	▪ Terdapat di Kota Namlea dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi.	▪ 1 Km-2 Km
	▪ SMA	2	▪ Terdapat di Kota Namlea dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi.	▪ 2 Km -3 Km
	▪ Universitas	0	▪ Di Kota Ambon dan di luar Kota Ambon	▪ Ditempuh selama 1 hari dengan menggunakan kapal laut.
2	**Sarana Perkantoran**			
	▪ Kantor pemerintahan	16	▪ Terdapat di Kota Namlea dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi	▪ 2 km-3 km
	▪ Kantor Desa	1	▪ Terdapat di Kota Namlea dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi	▪ 1 Km-2 Km
	▪ Kantor Polisi/ Abri	2	▪ Terdapat di Kota Namlea dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi	▪ 3km-4km
	▪ Kantor Pos	1	▪ Terdapat di Kota Namlea dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi	▪ 1 Km-2 Km
	▪ Bank	2	▪ Terdapat di Kota Namlea dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi	▪ 1 Km-2 Km

Gambar 2.12
(Sarana Perdagangan dan Jasa Yang Terdapat di Tempat Relokasi dan di Kota Nanjea)

Keterangan sarana prasarana di tempat relokasi dapat dilihat pada tabel 2.19 di bawah ini.

Tabel 2.19
Jenis Sarana Yang Terdapat di Tempat Relokasi di Kota Nanjea

No	Jenis Sarana	Jumlah (unit)	Keterangan	Jarak
1	**Sarana Pendidikan**			
	• TK	2	• 1 unit terdapat di tempat relokasi dan 1 unit di Kota Nanjea	• 100-800 meter
	• SD	4	• Terdapat di Kota Nanjea dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi	• 1 km-2 km
	• SMP	2	• Terdapat di Kota Nanjea dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi	• 1 km-2 km
	• SMA	2	• Terdapat di Kota Nanjea dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi	• 2 km -3 km
	• Universitas	0	• Di Kota Ampon dan di luar kota Ampon	• Dikarenakan sarana ini hanya dengan menggunakan kapal laut
2	**Sarana Perkantoran**			
	• Kantor pemerintahan	15	• Terdapat di Kota Lamasa dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi	• 2 km-3 km
	• Kantor Desa	1	• Terdapat di kota Nanjea dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi	• 1 Km-2 Km
	• Kantor Polisi Ahli	2	• Terdapat di Kota Lamasa dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi	• 3km-4km
	• Kantor Pos	1	• Terdapat di Kota Lamasa dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi	• 1 km-2 km
	• Bank	2	• Terdapat di Kota Nanjea dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi	• 1 km-2 km

No	Jenis Sarara	Jumlah (unit)	Keterangan	Jarak
3	**Sarana Peribadatan**			
	▪ Masjid	3	▪ Terdapat di Kota Namlea dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi	▪ 500 meter–1 Km
	▪ Musholla	1	▪ Terdapat di Tempat Relokasi	▪ 100 meter
	▪ Gereja	1	▪ Terdapat di Kota Namlea dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi	▪ 1 Km-2 Km
	▪ Pura	0	▪ Terdapat di Kota Ambon	▪ Ditempuh selama 1 hari dengan menggunakan kapal laut.
	▪ Wihara, dll	0	▪ Terdapat di Kota Ambon	▪ Ditempuh selama 1 hari dengan menggunakan kapal laut.
4	Sarana Kesehatan			
	▪ Rumah Sakit	1	▪ Terdapat di Kota Namlea dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi	▪ 2 Km- 3 Km
	▪ Puskesmas	1	▪ Terdapat di Kota Namlea dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi	▪ 500 meter–1Km
	▪ Klinik Bersalin	1	▪ Terdapat di Kota Namlea dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi	▪ 1 Km-2 Km
	▪ Praktik Dokter	3	▪ Terdapat di Kota Namlea dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi	▪ 1 Km-2 Km
	▪ Apotik	1	▪ Terdapat di Kota Namlea dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi	▪ 1 Km-2 Km
	▪ Posyandu	1	▪ Di tempat relokasi	▪ 100 -500meter
	▪ Puskesmas Pembantu	1	▪ Di tempat relokasi	▪ 500-1 km
5	Sarana perdagangan dan jasa			
	▪ Pasar	1	▪ Terdapat di Kota Namlea dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi	▪ 2 km-3km
	▪ Pusat Perbelanjaan	2	▪ Terdapat di Kota Namlea dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi	▪ 1km-2km
	▪ Warung	6	▪ Di tempat relokasi	▪ 100 meter-500 meter
	▪ Kios	8	▪ Di tempat relokasi	▪ 100 meter-500 meter

Sumber: Hasil Amatan

2.3.3.2 Prasarana Yang Terdapat di Tempat Relokasi

Jenis prasarana yang terdapat di tempat relokasi yaitu prasarana jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan sampah, jaringan sampah serta prasarana MCK. Untuk lebih lengkap mengenai prasarana di tempat relokasi dapat dilihat pada tabel 2.20.

No	Jenis Sarana	Jumlah (unit)	Keterangan	Jarak
3	**Sarana Peribadatan**			
	▫ Masjid	3	▫ Terdapat di Kota Namlea dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi	▫ 500 meter–1 Km
	▫ Musholla	1	▫ Terdapat di Tempat Relokasi	▫ 100 meter
	▫ Gereja	1	▫ Terdapat di Kota Namlea dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi	▫ 1 Km-2 Km
	▫ Pura	0	▫ Terdapat di Kota Ambon	▫ Ditempuh selama 1 jam dengan menggunakan kapal laut.
	▫ Wihara, dll	0	▫ Terdapat di Kota Ambon	▫ Ditempuh selama 1 jam dengan menggunakan kapal laut.
4	Sarana Kesehatan			
	▫ Rumah Sakit	1	▫ Terdapat di Kota Namlea dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi	▫ 2 Km- 3 Km
	▫ Puskesmas	1	▫ Terdapat di Kota Namlea dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi	▫ 500 meter–1Km
	▫ Klinik Bersalin	1	▫ Terdapat di Kota Namlea dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi	▫ 1 Km–2 Km
	▫ Praktik Dokter	3	▫ Terdapat di Kota Namlea dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi	▫ 1 Km-2 Km
	▫ Apotik	1	▫ Terdapat di Kota Namlea dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi	▫ 1 Km-2 Km
	▫ Posyandu	1	▫ Di tempat relokasi	▫ 100 - 500meter
	▫ Puskesmas Pembantu	1	▫ Di tempat relokasi	▫ 500-1 km
5	Sarana perdagangan dan jasa			
	▫ Pasar	1	▫ Terdapat di Kota Namlea dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi	▫ 2 km-3km
	▫ Pusat Perbelanjaan	2	▫ Terdapat di Kota Namlea dan masih berada dalam satu kota dengan tempat relokasi	▫ 1km-2km
	▫ Warung	6	▫ Di tempat relokasi	▫ 100 meter-500 meter
	▫ Kios	8	▫ Di tempat relokasi	▫ 100 meter-500 meter

Sumber: Hasil Analisa

2.3.3.2 Prasarana Yang Terdapat di Tempat Relokasi

Jenis prasarana yang terdapat di tempat relokasi yaitu prasarana peribadatan air bersih, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan sanpah, jaringan sanpah serta prasarana MCK. Untuk lebih lengkap mengenai prasarana di tempat relokasi dapat dilihat pada tabel 2.20.

Tabel 2.19
Jenis Prasarana Yang Terdapat di Tempat Relokasi Kota Namlea

No	Jenis Prasarana	Keterangan
1	Prasarana Jaringan Air Bersih ▪ Pdam ▪ Sumur ▪ Sungai	▪ Pendistribusian menggunakan pdam sangat lancar di tempat relokasi ▪ Tersedia di tempat relokasi, sehingga masyarakat umumnya juga menggunakan air dari sumur sebagai sumber air bersih. ▪ Masyarakat tidak menggunakan sumber air bersih dari sungai, karena tidak terdapt sungai di Kota Namlea.
2	Prasarana Jaringan Listrik	Tersedia di tempat relokasi dan pemakaiannya tidak dibatasi.
3	Prasarana Jaringan Telekomunikasi	Hanya tersedia di kantor pemerintahan karena masyarakat tidak lagi menggunakan telepon rumah, adanya tower di kota Namlea sehingga masyarakat lebih memilih untuk menggunakan telepon genggam.
4	Prasarana Jaringan Sampah	Masyarakat membuang sampah di tempat sampah didepan rumahnya masing-masing yang kemudian diambil oleh petugas sampah yang mereka bayar, lalu di buang ke TPS.
5	Prasarana Jaringan Jalan	Jalan di Tempat Relokasi sudah menggunakan aspal dengan jaringan jalan lokal.
7	Prasarana Mck	Prasarana MCK di tempat relokasi sudah tersedia di unit-unit rumah yang telah dibangun.

Sumber: Hasil Amatan

- **Jaringan Air Bersih**

  Di tempat relokasi sudah tersedia jaringan air bersih berupa pendistribusian dari pdam dan juga bisa menggunakan sumber-sumber air terdekat seperti sumur, dll.

- **Jaringan Listrik**

  PLN memberikan pelayanan kepada warga di tempat relokasi berupa jarigan listrik yang masuk dari gardu listrik di wilayah Kota Namlea dan dialirkan ke tempat relokasi.

- **Jaringan Pembuangan Sampah**

  Untuk bagian pembuangan sampah di tempat relokasi ini tidak mempunyai tempat pembuangan sampah yang berskala besar, akan tetapi penduduk membuang sampah di tempat sampah didepan rumahnya

masing-masing yang kemudian diambil oleh petugas sampah yang mereka bayar, lalu di buang ke TPS.

- **Jaringan Komunikasi**

  Untuk jaringan telekomunikasi, di tempat relokasi sendiri sudah tidak lagi menggunakan telepon rumah untuk berkomunikasi, sarana telekomunikasi berupa telepon hanya digunakan di perkantoran.

- **Jaringan Jalan**

  Tempat relokasi sendiri termasuk ke dalam jalan lokal, karena termasuk di dalam kota dan hanya melayani angkutan setempat dengan perjalan yang relatif dekat dan kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk ke tempat relokasi tidak di batasi dan menggunakan jalan aspal.

2.3.4 Karakteristik Sosial

Adapun pembahasan mengenai karaketeristik sosial meliputi jumlah penduduk, serta jenis kegiatan sosial. Untuk penjelasannya lebih lanjut dapat dilihat pada uraian berikut ini.

2.3.4.1 Asal Penduduk

Penduduk di lokasi studi beraneka ragam asalnya, baik penduduk asli yang telah turun-temurun menempati lokasi tersebut maupun penduduk pendatang yang pindah dari daerah asal untuk alasan tertentu. Untuk lebih jelasnya mengenai presentase jumlah penduduk asli dan jumlah penduduk pendatang dapat dilihat pada tabel 2.21 di bawah ini.

Tabel 2.21
Asal Penduduk

Asal Penduduk	Frekuensi	%
Penduduk Asli	9	12
Penduduk Pendatang	65	88
Jumlah	74	100

Sumber: Hasil Kuisioner

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 74 responden yang ada yang merupakan penduduk asli adalah 65 orang atau sebesar 88 % sedangkan jumlah masyarakat pendatang adalah sekitar 9 orang atau 12% yang merupakan masyarakat pendatang yang mengungsi ke Kecamatan Namlea akibat kerusuhan

sosial yang terjadi di Kota Ambon dengan alasan mencari tempat yang lebih aman, karena alasan pekerjaan, dan juga alasan lain masyarakat tinggal di lokasi studi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2. 22 di bawah ini.

Tabel 2.22
Alasan Masyarakat Tinggal Di Lokasi Studi

Alasan Tinggal	Frekuensi	%
Pekerjaan	23	31
Berkumpul dengan keluarga	11	15
Lokasi yang aman	40	54
Lain-lain	0	0
Jumlah	74	100

Sumber: Hasil Kuisioner

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 74 responden yang ada sebanyak 40 orang atau 54 % memilih tinggal di lokasi dengan alasan lokasi yang aman dari konflik, sebanyak 23 orang atau sebanyak 31 % memilih tinggal di lokasi studi dengan alasan pekerjaan, sebanyak 11 orang atau 15 % beralasan tinggal di lokasi studi karena berkumpul dengan keluarga, sedangkan yang menjawab selain itu tidak ada.

Diagram 2.3
Alasan Masyarakat Tinggal Di Lokasi Studi

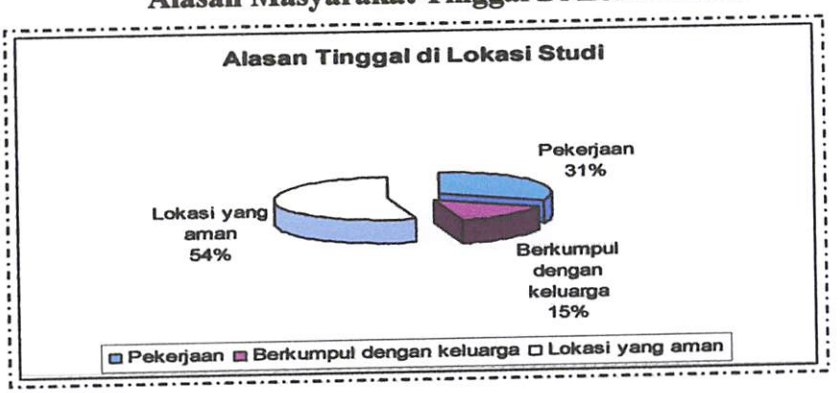

2.3.4.2 Jenis Kegiatan Sosial

Jenis kegiatan sosial masyarakat dapat berpengaruh terhadap pola kekerabatan dalam suatu lingkungan. Kegiatan sosial masyarakat ini dapat diwujudkan dalam lingkungan berupa kelompok arisan, gotong royong dan lain-lain. Untuk lebih jelas dapt dilihat pada tabel 2.23 di bawah ini.

Tabel 2.23
Hubungan Ketetanggaan Antara Warga

Hubungan antar warga	Frekuensi	%
Akrab	21	29
Baik	29	39
Cukup Baik	15	20
Kurang Baik	9	12
Jumlah	74	100

Sumber: Hasil Kuisioner

Diagram 2.4
Hubungan Ketetanggaan Antara Warga

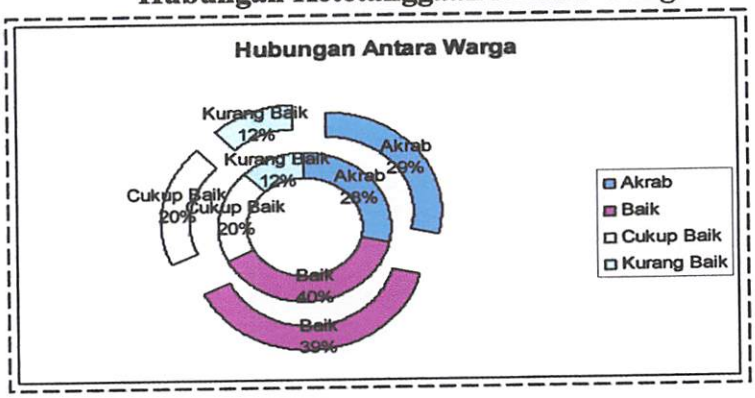

Berdasarkan data di atas maka dari 74 responden sebanyak 29 orang atau 39 % mempunyai hubungan ketetanggan yang baik antar warga, sebanyak 21 orang atau 29 % mempunyai hubungan yang akrab, sebanyak 15 orang atau 20 % mempunyai hubungan yang cukup baik, dan sebanyak 9 orang atau sebesar 12 % mempunyai hubungan yang kurang baik antar warga hal ini disebabkan oleh berbagai alasan. Untuk lebih jelas mengenai hubungan yang kurang baik antar warga dapat dilihat pada tabel 2.24 berikut ini.

Tabel 2.24
Faktor penghambat interaksi
Antar warga

Yang menghambat interaksi antar warga	Frekuensi	%
Trauma/ stress	27	37
Tempat tinggal jauh	23	31
Tingkat keamanan	24	32
Lainnya	0	0
Jumlah	74	100

Sumber: Hasil Kuisioner

Tabel 2.23
Hubungan Ketetanggaan Antara Warga

Hubungan antar warga	Frekuensi	%
Akrab	21	29
Baik	29	39
Cukup Baik	15	20
Kurang Baik	9	12
Jumlah	74	100

Sumber: Hasil Analisis

Diagram 2.4
Hubungan Ketetanggaan Antara Warga

Berdasarkan data di atas maka dari 74 responden sebanyak 29 orang atau 39 % mempunyai hubungan ketetanggaan yang baik antar warga, sebanyak 21 orang atau 29 % mempunyai hubungan yang akrab, sebanyak 15 orang atau 20 % mempunyai hubungan yang cukup baik, dan sebanyak 9 orang atau sebesar 12 % berbagai alasan. Untuk lebih jelas mengenai hubungan yang kurang baik antar warga dapat dilihat pada tabel 2.24 berikut ini.

Tabel 2.24
Faktor penghambat interaksi

Yang menghambat interaksi antar warga	Frekuensi	%
Trauma/ stres	27	37
Tempat tinggal jauh	25	37
Tingkat kesamaan	24	32
Lainnya	0	0
Jumlah	74	100

Sumber: Hasil Analisis

Diagram 2.5
Faktor penghambat interaksi Antar warga

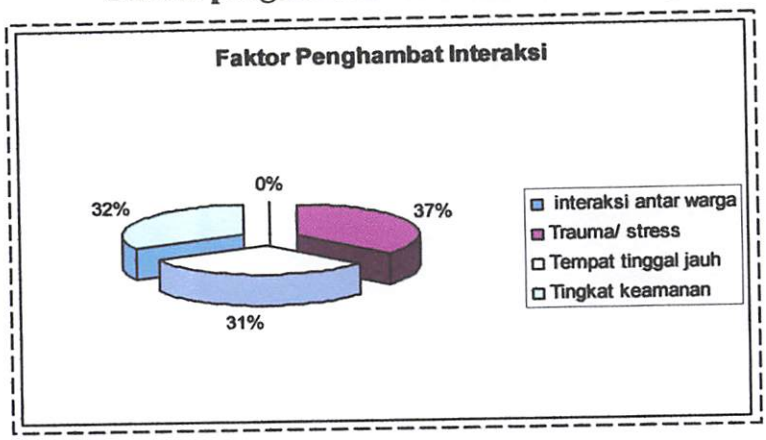

2.3.5 Karakteristik Ekonomi

Karakteristik ekonomi membahas tentang jenis mata pencaharian masyarakat dan kemampuan masyarakat sebagai dampak dari konflik sosial yang terjadi di Maluku.

2.3.5.1 Jenis mata Pencaharian Masyarakat

Karakteristik ekonomi yang dibahas disini adalah mata pencaharian masyarakat pasca kerusuhan serta pendapatan masyarakat perbulan , karena sebagai akibat dari kerusuhan yang terjadi menghancurkan aktifitas ekonomi masyarakat. Untuk lebih jelas kita dapat melihat mengenai jenis mata pencaharian masyarakat pasca kerusuhan serta pendapatan dan pengeluaran masyarakat tiap bulan berdasarkan kuisioner. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.25 di bawah ini.

Tabel 2.25
Jenis mata pencaharian masyarakat

Jenis mata pencaharian	Frekuensi	%
PNS	26	35
ABRI	19	26
Pedagang	7	9
Nelayan	13	18
Guru	9	12
Lain-lain	0	0
Jumlah	74	100

Sumber: Hasil Kuisioner

Diagram 2.5
Faktor pengiambat interaksi Antar warga

2.3.5 Karakteristik Ekonomi

Karakteristik ekonomi membahas tentang jenis mata pencaharian masyarakat dan kemampuan masyarakat sebagai dampak dari konflik sosial yang terjadi di Maluku.

2.3.5.1 Jenis mata Pencaharian Masyarakat

Karakteristik ekonomi yang dibahas disini adalah mata pencaharian masyarakat pasca kerusuhan serta pendapatan masyarakat perbulan . karena sebagai akibat dari kerusuhan yang terjadi mempengaruhi aktifitas ekonomi masyarakat. Untuk lebih jelas kita dapat melihat mengenai jenis mata pencaharian masyarakat pasca kerusuhan serta pendapatan dan pengeluaran masyarakat tiap bulan berdasarkan kuisioner. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.25 di bawah ini.

Tabel 2.25
Jenis mata pencaharian masyarakat

Jenis mata pencaharian	Frekuensi	%
PNS	26	35
ABRI	19	26
Pedagang	7	9
Nelayan	13	18
Guru	6	12
Lain-lain	0	0
Jumlah	74	100

Sumber: Hasil Kuisioner

Berdasarkan data diatas maka dari 74 responden sebanyak 26 orang atau 35 % bekerja sebagai PNS, sebanyak 19 orang atau 26 % bekerja sebagai ABRI, sebanyak 13 orang atau 18 % bekerja sebagai petani, sebanyak 9 orang atau sebesar 12 % bekerja sebagai buruh, dan sebanyak 7 orang atau sebesar 9% bekerja sebagai pedagang.

Diagram 2.6
Jenis mata pencaharian masyarakat

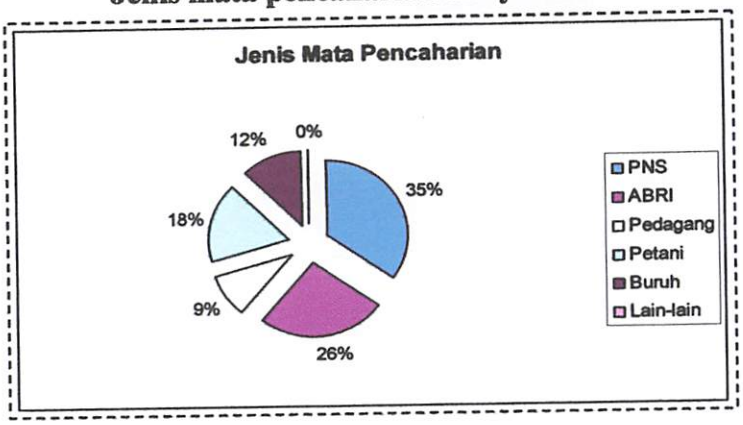

2.3.5.2 Kemampuan Masyarakat

Kemampuan masyarakat dapat dilihat pada tingkat pendapatan dan pengeluaran penduduk tiap bulannya, sehingga dapat diketahui perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran penduduk tiap bulannya. Mengenai pendapatan penduduk dapat dilihat pada tabel 2.26 di bawah ini.

Tabel 2.26
Pendapatan Perbulan KK

Pendapatan Perbulan KK	Frekuensi	%
100.000-500.000	12	16
500Rb-1.000.000	21	29
1.000.000- 1.500.000	26	35
>1.500.000	15	20
Jumlah	74	100

Sumber: Hasil Kuisioner

Dari total responden sebanyak 74 orang, didapatkan masyarakat di lokasi stud iyang mempunyai pendapatan sebesar Rp. 100.000-500.000 sebanyak 12 orang atau 16 %, sebanyak 21 orang atau 29 % yang mempunyai pendapatan

Berdasarkan data diatas maka dari 74 responden sebanyak 26 orang atau 35 % bekerja sebagai PNS. sebanyak 19 orang atau 26 % bekerja sebagai ABRI. sebanyak 13 orang atau 18 % bekerja sebagai petani. sebanyak 9 orang atau sebesar 12 % bekerja sebagai buruh. dan sebanyak 7 orang atau sebesar 09% bekerja sebagai pedagang.

Diagram 2.6
Jenis mata pencaharian masyarakat

2.3.5.2 Kemampuan Masyarakat

Kemampuan masyarakat dapat dilihat pada tingkat pendapatan dan pengeluaran penduduk tiap bulannya. sehingga dapat dikorahui perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran pendudnk tiap bulannya. Lengonai pendapatan pendudnk dapat dilihat pada tabel 2.26 di bawah ini.

Tabel 2.26
Pendapatan Perbulan KK

Pendapatan Perbulan KK	Frekuensi	%
100.000-500.000	12	16
500Rb-1.000.000	21	29
1.000.000- 1.500.000	26	35
>1.500.000	15	20
Jumlah	74	100

Sumber: Hasil Analisa

Dari total responden sebanyak 74 orang. didapatkan masyarakat di lokasi studi iyang mempunyai pendapatan sebesar Rp. 100.000-500.000 sebanyak 12 orang atau 16 %. sebanyak 21 orang atau 29 % yang mempunyai pendapatan

sebesar Rp.500.000-1.000.000, sebanyak 26 orang atau 35 % mempunyai pendapatan sebesar Rp.1.000.000 – 1.500.000, dan sebanyak 15 orang atau sebesar 20 % mempunyai pendapatan >Rp. 1.500.000 tiap bulannya.

Diagram 2.8
Pendapatan Perbulan KK

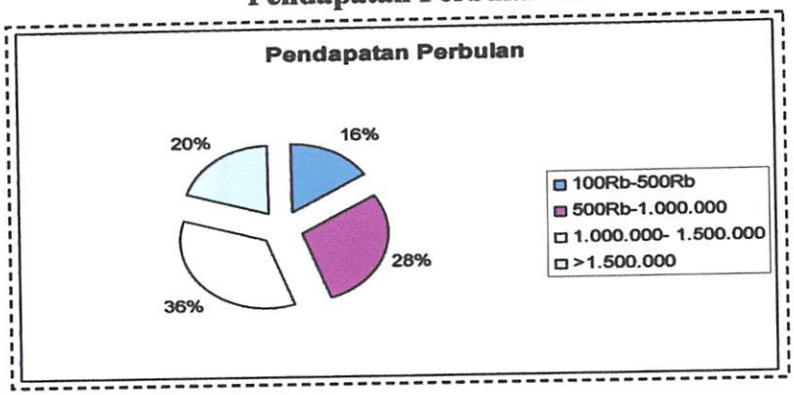

Selain pendapatan masyarakat perlu diketahui juga pengeluaran masyarakat tiap bulannya, sehingga dapat diketahui apakah setiap bulannya masyarakat dapat mempunyai kelebihan uang ataukah pendapatan perbulannya kurang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.27 di bawah ini.

Tabel 2.27
Pengeluaran Perbulan KK

Pengeluaran Perbulan KK	Frekuensi	%
100.000-500.000	11	15
500.000-1.000.0000	23	31
1.000.000-1.500.000	27	36
>1.500.000	13	18
Jumlah	74	100

Sumber: Hasil Kuisioner

Dari hasil kuisioner yang disebarkan didapatkan masyarakat di lokasi studi yang mempunyai pengeluaran perbulannya sebesar Rp. 100.000-500.000 sebanyak 11 orang atau 15 %, sebanyak 23 orang atau 31 % yang mempunyai pengeluaran sebesar Rp.500.000-1.000.000, sebanyak 27 orang atau 36 % mempunyai pengeluaran sebesar Rp.1.000.000 – 1.500.000, dan sebanyak 13 orang atau sebesar 18% mempunyai pengeluaran >Rp. 1.500.000 tiap bulannya.

sebesar Rp.500.000-1.000.000, sebanyak 26 orang atau 35 % mempunyai pendapatan sebesar Rp.1.000.000 - 1.500.000, dan sebanyak 15 orang atau sebesar 20 % mempunyai pendapatan >Rp. 1.500.000 tiap bulannya.

Diagram 2.8
Pendapatan Perbulan KK

Selain pendapatan masyarakat perlu dikeahui juga pengeluaran masyarakat tiap bulannya. sehingga dapat dikeahui apakah setiap bulannya masyarakat dapat mempunyai kelebihan uang ataukah pendapatan perbulannya kurang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.27 di bawah ini.

Tabel 2.27
Pengeluaran Perbulan KK

Pengeluaran Perbulan KK	Frekuensi	%
100.000-500.000	11	15
500.000-1.000.0000	25	31
1.000.000-1.500.000	27	36
>1.500.000	13	18
Jumlah	74	100

Sumber: Hasil Anisioner

Dari hasil kuisioner yang disebarkan didapatkan masyarakat di lokasi studi yang mempunyai pengeluaran perbulannya sebesar Rp. 100.000-500.000 sebanyak 11 orang atau 15 %, sebanyak 25 orang atau 31 % yang mempunyai pengeluaran sebesar Rp.500.000-1.000.000, sebanyak 27 orang atau 36 % mempunyai pengeluaran sebesar Rp.1.000.000 – 1.500.000, dan sebanyak 13 orang atau sebesar 18% mempunyai pengeluaran >Rp. 1.500.000 tiap bulannya.

Diagram 2.9
Pengeluaran Perbulan KK

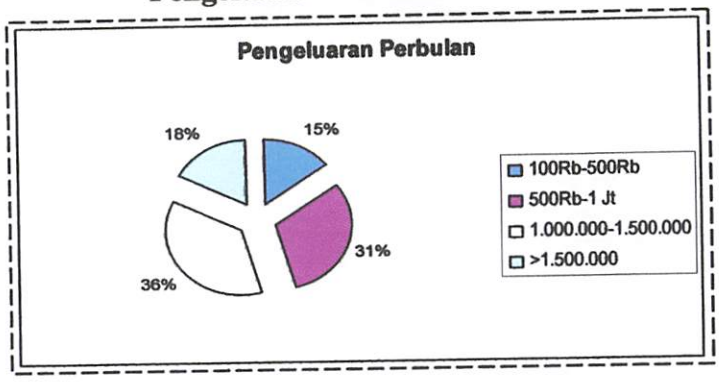

2.3.6 Aspirasi Masyarakat Mengenai Relokasi Permukiman Untuk Masyarakat Pengungsi

Dari hasil survey, maka didapatkan bahwa penanganan permukiman yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Buru dalam rangka menangani masalah permukiman adalah dalam bentuk relokasi permukiman yang disediakan oleh pemerintah setempat dan siap ditempati oleh masyarakat pengungsi.

Maka, agar relokasi berjalan sesuai dengan rencana, data kuisioner menjabarkan mengenai aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam usaha untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai relokasi permukiman untuk masyarakat pengungsi di tempat yang baru agar sesuai dengan kebutuhan para masyarakat yang ada. Berikut ini akan dilihat prosentase jumlah penduduk yang menginginkan relokasi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.28 berikut ini.

Tabel 2.28
Pendapat Masyarakat Mengenai Relokasi

Pendapat Mengenai Relokasi	Frekuensi	%
Sangat Setuju	50	67
Setuju	20	27
Kurang Setuju	4	6
Tidak Setuju	0	0
Jumlah	74	100

Sumber: Hasil Kuisioner

Diagram 2.10
Pendapat Masyarakat Mengenai Relokasi

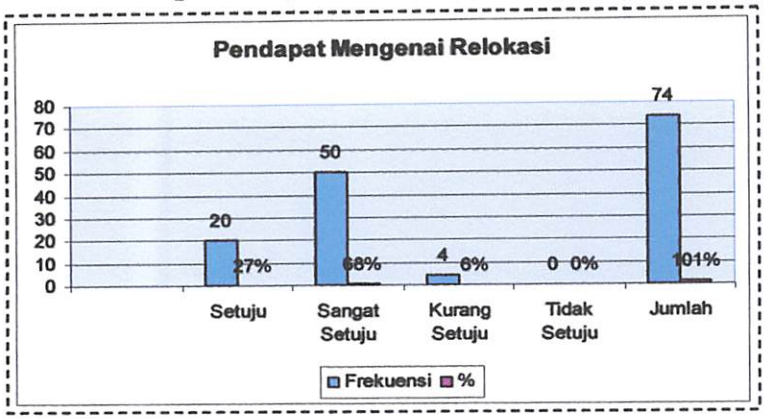

Dari hasil kuisioner yang disebarkan didapatkan masyarakat di lokasi studi didapatkan sebanyak 20 orang atau sebesar 27% menyatakan setuju dengan diadakannya relokasi permukiman untuk masyarakat pengungsi, sebanyak 50 orang atau 60% menyatakan sangat setuju terhadap relokasi, sebanyak 4 orang atau 6% menyatakan kurang setuju terhadap relokasi dan tidak ada masyarakat di tempat penampungan yang menyatakan tidak setuju tentang pemindahan ke tempat relokasi.

2.3.6.1 Aspirasi Masyarakat Mengenai Lokasi Permukiman

Pada dasarnya pembangunan permukiman harus memperhatikan beberapa aspek diantaranya adalah aspek lokasi permukiman dengan pusat kegiatan. Untuk lebih jelas mengenai aspirasi masyarakat tentang lokasi permukiman dapat dilihat pada tabel 2.29 berikut ini.

Tabel 2.29
Aspirasi Masyarakat Mengenai Lokasi Permukiman

Lokasi Permukiman	Frekuensi	%
Dekat Tempat Kerja	14	19
Di Pusat Kota	11	15
Dekat tempat kerja da di Pusat Kota	49	66
Total	74	100

Sumber: Hasil Kuisioner

Dari data diatas, sebanyak 14 orang atau sekitar 19 % berpendapat lokasi permukiman relokasi haruslah dekat dengan tempat kerja, sebanyak 11 orang atau sebesar 15 % berpendapat bahwa lokasi di pusat kota dan sebanyak 49 orang atau

Diagram 2.10
Pendapat Masyarakat Mengenai Relokasi

Dari hasil kuisioner yang dilakukan didapatkan masyarakat di lokasi studi didapatkan sebanyak 20 orang atau sebesar 27% menyatakan setuju dengan dilakukannya relokasi permukiman untuk masyarakat pengungsi, sebanyak 50 orang atau 60% menyatakan sangat setuju terhadap relokasi, sebanyak 4 orang atau 6% menyatakan kurang setuju terhadap relokasi dan tidak ada masyarakat di tempat penampungan yang menyatakan tidak setuju tentang pemindahan ke tempat relokasi.

2.3.6.1 Aspirasi Masyarakat Mengenai Lokasi Permukiman

Pada dasarnya pembangunan permukiman harus memperhatikan beberapa aspek diantaranya adalah aspek lokasi permukiman dengan pusat kegiatan. Untuk lebih jelas mengenai aspirasi masyarakat tentang lokasi permukiman dapat dilihat pada tabel 2.29 berikut ini.

Tabel 2.29
Aspirasi Masyarakat Mengenai Lokasi Permukiman

Lokasi Permukiman	Frekuensi	%
Dekat Tempat Kerja	14	19
Di Pusat Kota	11	15
Dekat temual kerja da di Pusat Kota	49	66
Total	74	100

Sumber: Hasil Kuisioner

Dari data diatas, sebanyak 14 orang atau sekitar 19 % berpendapat lokasi permukiman relokasi haruslah dekat dengan tempat kerja, sebanyak 11 orang atau sebesar 15 % berpendapat bahwa lokasi di pusat kota dan sebanyak 49 orang atau

66% berpendapat lokasi permukiman haruslah berada dekat dengan dengan tempat kerja dan di pusat kota.

Tabel 2.11
Aspirasi Masyarakat Mengenai Lokasi Permukiman

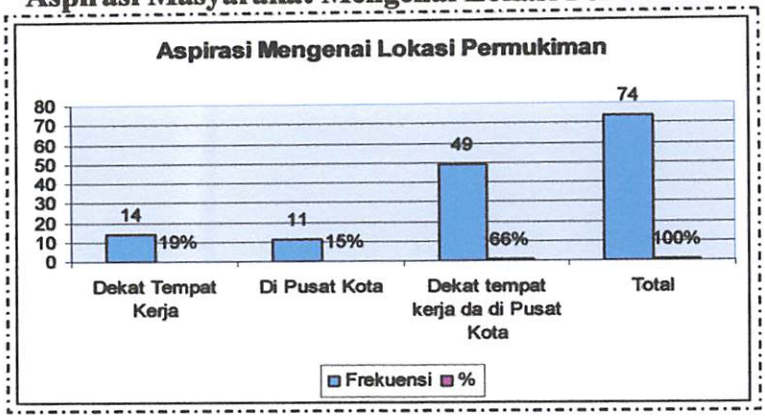

Pada lokasi studi yang terletak di kecamatan Namlea, didukung oleh sarana prasarana transportasi berupa kendaraan umum, tukang ojek dan tukang becak. Untuk mengetahui aspirasi mengenai jarak tempat relokasi menuju tempat kegiatan dapat dilihat pada penjelasan-penjelasan di bawah ini.

I. Aspirasi Mengenai Jarak Tempat Relokasi Dengan Tempat Kerja

Jarak merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam melakukan pergerakan atau transportasi. Semakin dekat jarak untuk menuju ke suatu tempat maka tidak terlalu banyak waktu dan ongkos yang terbuang, lain halnya bila jarak yang ditempuh terlalu jauh maka waktu dan ongkos untuk menuju ke suatu tempat semakin banyak terbuang. Untuk lebih jelas mengenai karakteristik jarak tempat tinggal dengan tempat kerja menurut responden adalah dapat dilihat pada tabel 2.30 berikut ini.

Tabel 2.30
Jarak Ke Tempat Kerja

Jarak rumah dengan tempat kerja	Frekuensi	%
Dekat (500 meter-1Km)	45	61
Sedang (1Km-2Km)	29	39
Jauh (≥ 2Km)	0	0
Jumlah	74	100

Sumber: Hasil Kuisioner

60% berpendapat lokasi permukiman haruslah berada dekat dengan dengan tempat kerja dan di pusat kota.

Tabel 2.1
Aspirasi Masyarakat Mengenai Lokasi Permukiman

Pada lokasi studi yang terletak di kecamatan Namlea didukung oleh sarana prasarana transportasi berupa kendaraan umum, tukang ojek dan tukang becak. Untuk mengetahui aspirasi mengenai jarak tempat kelokasi memilih tempat kegiatan dapat dilihat pada penjelasan-penjelasan di bawah ini.

1. Aspirasi Mengenai Jarak Tempat Kelokasi Dengan Tempat Kerja

Jarak merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam melakukan pergerakan atau transportasi. Semakin dekat jarak untuk menuju ke suatu tempat maka tidak terlalu banyak waktu dan ongkos yang terbuang, lain halnya bila jarak yang ditempuh terlalu jauh maka waktu dan ongkos untuk menuju ke suatu tempat semakin banyak terbuang. Untuk lebih jelas mengenai karakteristik jarak tempat tinggal dengan tempat kerja menurut responden adalah dapat dilihat pada tabel 2.30 berikut ini.

Tabel 2.30
Jarak Ke Tempat Kerja

Jarak rumah dengan tempat kerja	Frekuensi	%
Dekat (500 meter-1Km)	45	61
Sedang (1Km-2Km)	29	39
Jauh (≥ 2Km)	0	0
Jumlah	74	100

Sumber: Hasil Analisa

Dari hasil kuisioner yang disebarkan didapatkan masyarakat di lokasi studi yang menginginkan tempat relokasi dekat dengan tempat kerja adalah sebanyak 45 orang atau sekitar 61%, sebanyak 29 orang atau 39 % menyatakan jarak tempat relokasi dengan tempat kerja adalah sedang, dan tidak ada yang menginginkan jarak ke tempat jauh karena akan sulit dijangkau.

II. Aspirasi Mengenai Jarak Tempat Relokasi Dengan Daerah Pendidikan

Jarak tempat relokasi dengan daerah pendidikan juga haruslah dekat agar mudah dijangkau oleh anak-anak sekolah. Untuk lebih jelasnya mengenai pendapat masyarakat mengenai jarak ke daerah pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.31 di bawah ini.

Tabel 2.31
Aspirasi Mengenai Jarak Ke Daerah Pendidikan

Jarak rumah dengan daerah pendidikan	Frekuensi	%
Dekat (500 meter-1Km)	42	57
Sedang (1Km-2Km)	32	43
Jauh (≥ 2Km)	0	0
Jumlah	74	100

Sumber: Hasil Kuisioner

Dari hasil kuisioner yang disebarkan didapatkan masyarakat di lokasi studi menginginkan tempat relokasi yang dekat dengan daerah pendidikan adalah sebanyak 42 orang atau 57 %, sebanyak 32 orang atau 43 % menyatakan jarak tempat relokasi dengan daerah pendidikan adalah sedang, dan tidak ada yang menginginkan jarak tempat relokasi dengan daerah pendidikan jauh.

III. Aspirasi Mengenai Jarak Tempat Relokasi Ke Sarana Peribadatan

Jarak tempat relokasi dengan tempat peribadatan juga haruslah dekat agar mudah dijangkau masyarakat pengungsi. Untuk lebih jelasnya mengenai pendapat masyarakat mengenai jarak ke tempat peribadatan dapat dilihat pada tabel 2.32 di bawah ini.

Tabel 2.32
Aspirasi Mengenai Jarak Ke Sarana Peribadatan

Jarak rumah dengan tempat peribadatan	Frekuensi	%
Dekat (500 meter-1Km)	38	51
Sedang (1Km-2Km)	21	29
Jauh (≥ 2Km)	0	0
Tidak ada jarak	15	20
Jumlah	74	100

Sumber: Hasil Kuisioner

Dari hasil kuisioner yang disebarkan didapatkan masyarakat di lokasi studi menyatakan jarak tempat relokasi yang dekat dengan tempat peribadatan adalah sebanyak 38 orang atau 51%, sebanyak 21 orang atau 29 % menyatakan jarak tempat relokasi dengan tempat peribadatan adalah sedang, dan sebanyak 15 orang atau sebesar 20 % menyatakan tidak ada jarak dari tempat relokasi ke tempat peribadatan.

IV. Aspirasi Masyarakat mengenai Jarak Tempat Relokasi Dengan Sarana Kesehatan

Jarak tempat relokasi ke fasilitas kesehatan juga haruslah dekat agar mudah dijangkau masyarakat pengungsi. Untuk lebih jelasnya mengenai pendapat masyarakat mengenai jarak ke fasilitas kesehatan dapat dilihat pada tabel 2.33 di bawah ini.

Tabel 2.33
Aspirasi Mengenai Jarak Ke Sarana Kesehatan

Jarak rumah dengan tempat peribadatan	Frekuensi	%
Dekat (500 meter-1Km)	48	65
Sedang (1Km-2Km)	26	35
Jauh (≥ 2Km)	0	0
Jumlah	74	100

Sumber: Hasil Kuisioner

Dari hasil kuisioner yang disebarkan didapatkan masyarakat di lokasi studi sebanyak 48 orang atau 65 % menginginkan jarak tempat relokasi ke fasilitas kesehatan adalah dekat dan sebanyak 26 orang atau 35 % menginginkan bahwa

jarak ke fasilitas kesehatan adalah dekat, dan tidak ada yang menginginkan jarak fasilitas kesehatan jauh.

V. Aspirasi Mengenai Jarak Tempat Relokasi Dengan Sarana Perdagangan Dan Jasa

Jarak tempat relokasi dengan sarana perdagangan dan jasa haruslah dekat agar mudah dijangkau, karena setiap hai masyarakat melakukan pergerakan ke daerah perdagangan dan jasa untuk melakukan kegiatan berbelanja. Untuk lebih jelasnya mengenai pendapat masyarakat mengenai jarak ke daerah perdagangan dan jasa dapat dilihat pada tabel 2.34 di bawah ini.

Tabel 2.34
Aspirasi Mengenai Jarak Ke Sarana Perdagangan Dan Jasa

Jarak rumah dengan daerah perdagangan dan jasa	Frekuensi	%
Dekat (500 meter-1Km)	41	55
Sedang (1Km-2Km)	33	44
Jauh (≥ 2Km)	0	0
Jumlah	74	100

Sumber: Hasil Kuisioner

Dari hasil kuisioner yang disebarkan didapatkan masyarakat di lokasi studi sebanyak 41 orang atau 55 % menginginkan jarak tempat relokasi dengan daerah perdagangan dan jasa adalah sedang, dan sebanyak 26 orang atau 35 % menginginkan bahwa jarak ke daerah perdagangan dan jasa adalah sedang, dan tidak ada yang menginginkan jarak ke daerah perdagangan dan jasa yang jauh.

2.3.6.2 Aspirasi Masyarakat Mengenai Sarana Umum

Di dalam sebuah lingkungan permukiman sangat membutuhkan ketersediaan sarana prasarana penunjang kegiatan. Seperti halnya di tempat relokasi juga membutuhkan berbagai ketersediaan sarana. Untuk lebih jelasnya mengenai keinginan masyarakat akan kelengkapan sarana di tempat relokasi dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Sarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yaitu seperti sarana perkantoran, sarana pendidikan, sarana peribadatan dan sarana perdagangan dan

jarak ke fasilitas kesehatan adalah dekat, dan tidak ada yang mengingnkan jarak fasilitas kesehatan jauh.

V. Aspirasi Mengenai Jarak Tempat Rekreasi Dengan Sarana Perdagangan Dan Jasa

Jarak tempat rekreasi dengan sarana perdagangan dan jasa haruslah dekat agar mudah dijangkau. Karena setiap hari masyarakat melakukan pergerakan ke daerah perdagangan dan jasa untuk melakukan kegiatan berbelanja. Untuk lebih jelasnya mengenai pendapat masyarakat mengenai jarak ke daerah perdagangan dan jasa dapat dilihat pada tabel 2.3-4 di bawah ini.

Tabel 2.3-4
Aspirasi Mengenai Jarak Ke Sarana Perdagangan Dan Jasa

Jarak rumah dengan daerah perdagangan dan jasa	Frekuensi	%
Dekat (500 meter-1km)	41	35
Sedang (1Km-2Km)	33	44
Jauh (≥ 2Km)	0	0
Jumlah	74	100

Sumber: Hasil Kuisioner

Dari hasil kuisioner yang disebarkan didapatkan masyarakat di lokasi studi sebanyak 41 orang atau 55 % mengingnkan jarak tempat rekreasi dengan daerah perdagangan dan jasa adalah sedang, dan sebanyak 26 orang atau 35 % mengingnkan bahwa jarak ke daerah perdagangan dan jasa adalah sedang, dan tidak ada yang mengingnkan jarak ke daerah perdagangan dan jasa yang jauh.

2.3.6.2 Aspirasi Masyarakat Mengenai Sarana Umum

Di dalam sebuah lingkungan permukiman sangat membutuhkan ketersediaan sarana prasarana penunjang kegiatan. Seperti halnya di tempat rekreasi juga membutuhkan berbagai ketersediaan sarana. Untuk lebih jelasnya mengenai keinginan masyarakat akan kelengkapan sarana di tempat rekreasi dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Sarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yaitu seperti sarana perkantoran, sarana pendidikan, sarana peribadatan dan sarana perdagangan dan

jasa. Untuk sarana umum yang tersedia pada lokasi permukiman berdasarkan aspirasi masyarakat yaitu ketersediaan sarana pendidikan, sarana peribadatan, serta sarana perdagangan dan jasa, sarana perkantoran dan sarana kesehatan..Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.35 dibawah ini.

Tabel 2.35
Aspirasi Masyarakat Mengenai Ketersediaan Sarana Umum

Sarana Umum	Frekuensi	%
Perkantoran	70	91
Pendidikan	67	96
Peribadatan	65	88
Kesehatan	68	92
Perdagangan dan Jasa	71	95

Sumber: Hasil Kuisioner

Diagram 2.12
Aspirasi Masyarakat Mengenai Ketersediaan Sarana Umum

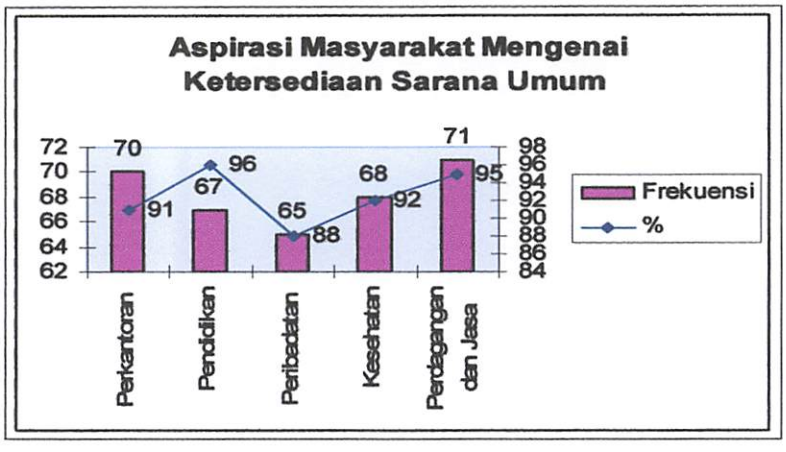

Ketersediaan sarana umum yang sangat memadai di tempat relokasi sangat dibutuhkan agar dapat menunjang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pengungsi di tempat relokasi yang baru.

Persyaratan sarana permukiman adalah:

1. Setiap permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas pendidikan sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani.
2. Setiap permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani.

jasa. Untuk sarana umum yang tersedia pada lokasi permukiman berdasarkan aspirasi masyarakat yaitu ketersediaan sarana pendidikan, sarana peribadatan, serta sarana perdagangan dan jasa, sarana perkantoran dan sarana kesehatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.35 dibawah ini.

Tabel 2.35
Aspirasi Masyarakat Mengenai Ketersediaan
Sarana Umum

Sarana Umum	Frekuensi	%
Perkantoran	70	91
Pendidikan	67	96
Peribadatan	65	88
Kesehatan	68	92
Perdagangan dan Jasa	71	95

Sumber: Hasil Analisa

Diagram 2.12
Aspirasi Masyarakat Mengenai Ketersediaan
Sarana Umum

Ketersediaan sarana umum yang sangat mereka di tempat relokasi sangat dibutuhkan agar dapat menunjang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pengungsi di tempat relokasi yang baru.

Persyaratan sarana permukiman adalah:

1. Setiap permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas pendidikan sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani.
2. Setiap permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani.

3. Setiap permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas perbelanjaan sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani.
4. Setiap permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas tempat peribadatan sesuai dengan agama yang dipeluk para penghuninya dan jumlah pemeluk dari masing-masing agama.

2.3.6.3 Aspirasi Masyarakat Mengenai Ketersediaan Prasarana

Untuk prasarana yang tersedia pada lokasi permukiman berdasarkan aspirasi masyarakat yaitu ketersediaan jaringan Listrik, jaringan Air Bersih, jaringan Telepon, jaringan jalan serta tempat Pembuangan Sampah.. Untuk lebih jelasnya mengenai aspirasi masyarakat tentang ketersediaan utilitas di tempat relokasi dapat dilihat pada tabel 2.36 dibawah ini.

Tabel 2.36
Aspirasi Masyarakat Mengenai Ketersediaan Prasarana di Tempat Relokasi

Prasarana	Frekuensi	%
Jaringan Listrik	74	100
Jaringan Air Bersih	74	100
Jaringan Telepon	35	47
Jaringan jalan	45	61
Tempat Pembuangan Sampah	65	88

Sumber: Hasil Kuisioner

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa presentase pendapat masyarakat mengenai ketersediaan sarana utilitas di tempat relokasi sangatlah tinggi, karena sarana utilitas merupakan fasilitas pelengkap pada sebuah permukiman agar masyarakat dapat melakukan aktifitas dengan baik.

Persyaratan utilitas umum permukiman adalah:

1. Setiap permukiman harus dilayani dengan air minum yang cukup memenuhi kebutuhan air minum, yang dapat diambil dari sumber yang memenuhi syarat, seperti sistem perpipaan dari PDAM, mata air dan air tanah.

3. Setiap permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas perbelanjaan sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani.
4. Setiap permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas tempat peribadatan sesuai dengan agama yang dipeluk para penghuninya dan jumlah pemeluk dari masing-masing agama.

2.3.6.3 Aspirasi Masyarakat Mengenai Ketersediaan Prasarana

Untuk prasarana yang tersedia pada lokasi permukiman berdasarkan aspirasi masyarakat yaitu ketersediaan jaringan Listrik, jaringan Air Bersih, jaringan Telepon, jaringan jalan serta tempat Pembuangan Sampah.. Untuk lebih jelasnya mengenai aspirasi masyarakat tentang ketersediaan utilitas di tempat relokasi dapat dilihat pada tabel 2.36 dibawah ini.

Tabel 2.36
Aspirasi Masyarakat Mengenai Ketersediaan Prasarana di Tempat Relokasi

Prasarana	Frekuensi	%
Jaringan Listrik	74	100
Jaringan Air Bersih	74	100
Jaringan Telepon	35	47
Jaringan jalan	45	61
Tempat Pembuangan Sampah	65	89

Sumber: Hasil Analisa

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa prasarana pendapat masyarakat mengenai ketersediaan sarana utilitas di tempat relokasi sangatlah tinggi, karena sarana utilitas merupakan fasilitas pelengkap pada sebuah permukiman agar masyarakat dapat melakukan aktifitas dengan baik.

Persyaratan utilitas umum permukiman adalah:

1. Setiap permukiman harus dilayani dengan air minum yang cukup memenuhi kebutuhan air minum, yang dapat diambil dari sumber yang memenuhi syarat, seperti sistem perpipaan dari PDAM, mata air dan air tanah.

2. Setiap permukiman harus dilayani listrik dengan kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penerangan jalan, rumah tangga dan kebutuhan listrik lainnya.
3. Setiap permukiman harus dilayani sambungan telepon.
4. Setiap permukiman harus dilengkapi dengan sistem pembuangan sampah yang
5. Terintegrasi dengan sistem pembuangan sampah wilayah di kawasan sekitarnya.

BAB III
ANALISA IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SARANA PRASARANA DI TEMPAT PENAMPUNGAN

Proses analisa dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis analisa yaitu analisa karakteristik masyarakat, analisa mengenai kebutuhan sarana prasarana di tempat penampungan dan ketersediaan sarana dan prasarana umum yang terdapat pada tempat penampungan dan pada tempat relokasi permukiman untuk pengungsi yang baru serta analisa tentang aspirasi masyarakat mengenai relokasi permukiman untuk masyarakat pengungsi.

3.1 Analisa Karakter Masyarakat

Analisa karakter masyarakat membahas tentang analisa karakter masyarakat pengungsi dan analisa kegiatan masyarakat pengungsi.

3.1.1 Analisa Karakter Masyarakat Pengungsi

Analisa karakter masyarakat melipuiti jumlah pengungsi, asal penduduk, mata pencaharian masyarakat, tingkat pendidikan serta kelompok umur masyarakat. Dimana untuk asal masyarakat pengungsi adalah sebagian besar berasal dari luar Kabupaten Buru yang mengungsi ke Kabupaten Buru akibat konflik sosial yang terjadi. Sebagian besar masyarakat berasal dari Kota Ambon, Jawa dan Sulawesi, umumnya masyarakat yang berasal dari luar Kota Ambon sudah menetap lama di Kota Ambon dan memulai kegiatan perekonomian mereka di Kota Ambon, dimana mata pencaharian masyarakat adalah sebagai pedagang, nelayan dan juga sebagai buruh, sedangkan untuk penduduk Kota Ambon umumnya bermata pencaharian sebagai pns. Tingkat pendidikan masyarakat rata-rata adalah sma, yang sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang ada, sehingga sampai saat ini masyarakat masih bertahan di tempat penampungan karena kondisi ekonomi yang terbatas.

BAB III
ANALISA IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SARANA PRASARANA DI TEMPAT PENAMPUNGAN

Proses analisa dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis analisa yaitu analisa karakteristik masyarakat, analisa mengenai kebutuhan sarana prasarana di tempat penampungan dan kolerasedaan sarana dan prasarana untuk yang terdapat pada tempat penampungan dan pada tempat relokasi permukiman untuk pengungsi yang baru serta analisa tentang aspirasi masyarakat mengenai relokasi permukiman untuk masyarakat pengungsi.

3.1 Analisa Karakter Masyarakat

Analisa karakter masyarakat membahas tentang analisa karakter masyarakat pengungsi dan analisa kegiatan masyarakat pengungsi.

3.1.1 Analisa Karakter Masyarakat Pengungsi

Analisa karakter masyarakat meliputi jumlah pengungsi, asal penduduk, mata pencaharian masyarakat, tingkat pendidikan serta kelompok umur masyarakat. Dimana untuk asal masyarakat pengungsi adalah sebagian besar berasal dari luar Kabupaten Buru yang mengungsi ke Kabupaten Buru akibat konflik sosial yang terjadi. Sebagian besar masyarakat berasal dari Kota Ambon, Jawa dan Sulawesi. umumnya masyarakat yang berasal dari luar Kota Ambon sudah menetap lama di Kota Ambon dan memulai kegiatan perekonomian mereka di Kota Ambon, dimana mata pencaharian masyarakat adalah sebagai pedagang, nelayan dan juga sebagai buruh, sedangkan untuk pendudul Kota Ambon umumnya bermata pencaharian sebagai pns. Tingkat pendidikan masyarakat rata-rata adalah sma, yang sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang ada, sehingga sampai saat ini masyarakat masih berdiam di tempat penampungan karena kondisi ekonomi yang terbatas.

Masyarakat juga mengalami masalah psikologis (trauma) berupa marah dan dendam di samping ketakutan dialami oleh seluruh masyarakat. Itulah realitas dampak konflik tersebut, berbagai upaya telah dilakukan baik oleh masyarakat dengan caranya masing-masing, maupun oleh pemerintah daerah dan pusat. Namun hingga kini upaya-upaya tersebut belum berjalan secara maksimal. Jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah tampaknya belum dapat memperbaiki situasi karena masalahnya tidak sesederhana itu, bahkan justeru sangat berdampak negatif karena masyarakat akhirnya melakukan ketergantungan yang besar terhadap pemerintah dan melahirkan masyarakat yang pasif dan pemalas.

Dalam pembangunan masyarakat ke depan pasca kerusuhan, tentu yang diharapkan adalah terbentuknya masyarakat yang mandiri, dalam pengertian dapat memenuhi kebutuhan dasar rumah tangganya dan tidak bergantung pada belas kasihan orang lain. Secara ideal masyarakat nantinya yang mempunyai partisipasi yang tinggi terhadap pengembangan dirinya, sehingga mampu menciptakan strategi untuk memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder untuk seluruh anggota keluarganya. Sedangkan untuk analisa jumlah masyarakat pengungsi dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1

Jumlah Masyarakat Pengungsi

Tahun	Jumlah (KK)	Jiwa
2000	2.466	9.761
2001	3.015	12.069
2002	2.514	10.851
2003	1.986	9.447
2004	1.127	5.784
2005	978	4.352
2006	785	3.823
2007	500	2.503
2008	289	1.319

Sumber: Hasil Survey dan Dinas Sosial Kabupaten Buru

Masyarakat juga mengalami masalah psikologis (trauma) berupa marah dan dendam di samping kerakuan dialami oleh seluruh masyarakat. Itulah realitas dampak konflik tersebut, berbagai upaya telah dilakukan baik oleh masyarakat dengan caranya masing-masing, maupun oleh pemerintah daerah dan pusat. Namun hingga kini upaya-upaya tersebut belum berjalan secara maksimal. Jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah tampaknya belum dapat memperbaiki situasi karena masalahnya tidak sesederhana itu. bahkan justeru sangat berdampak negatif karena masyarakat akhirnya melakukan ketergantungan yang besar terhadap pemerintah dan melahirkan masyarakat yang pasif dan pemalas.

Dalam pembangunan masyarakat ke depan pasca kerusuhan. ienis yang dibutuhkan adalah terbentuknya masyarakat yang mandiri. dalam pengertian dapat memenuhi kebutuhan dasar rumah tangganya dan tidak bergantung pada belas kasihan orang lain. Secara ideal masyarakat mandiriya yang mempunyai partisipasi yang tinggi terhadap pengembangan dirinya. sehingga mampu menciptakan strategi untuk memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder untuk seluruh anggota keluarganya. Sedangkan untuk analisa jumlah masyarakat pengungsi dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1

Jumlah Masyarakat Pengungsi

Tahun	Jumlah (KK)	Jiwa
2000	2.466	9.761
2001	3.015	12.069
2002	2.514	10.831
2003	1.986	9.447
2004	1.127	5.784
2005	978	4.252
2006	785	3.825
2007	500	2.507
2008	250	1.319

Sumber: Hasil Survey dan Dinas Sosial Kabupaten Buru

Grafik 3.1

Jumlah Masyarakat Pengungsi Di Kecamatan Namlea

Pada Tahun 2000-2007

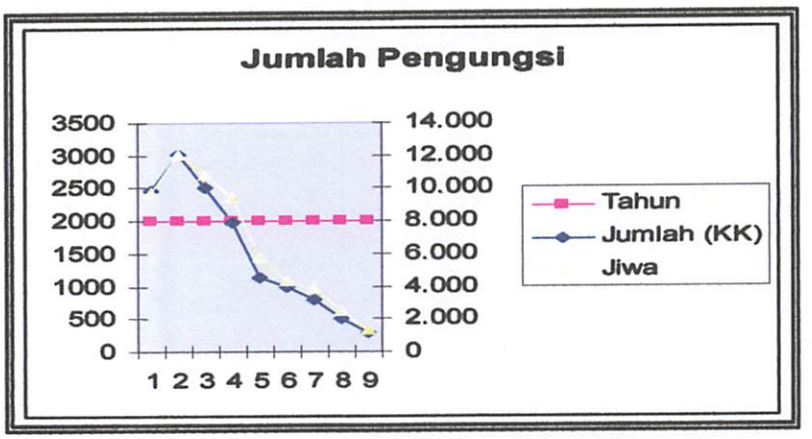

Sumber:Hasil Analisa

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah pengungsi pada tahun 2000 adalah sebannyak 2.466 kk atau sekitar 9.761 jiwa, tetapi pada tahun 2001 terjadi kerusuhan lokal yang mengakibatkan pembengkakan jumlah pengungsi dari jumlah pengungsi sekitar 9.761 jiwa bertambah sekitar 3000 jiwa yang mengungsi menjadi 12.069 jiwa, dari tahun 2000 sampai tahun 2002 merupakan puncak arus pengungsian yang terjadi di Kecamatan Namlea. Seiring dengan berjalannya waktu jumlah pengungsi dari tahun ke tahun semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh kondisi keamanan yang sudah lumayan kondusif, sehingga masyarakat mulai membangun kehidupannya semula.

Dari tahun ke tahun terjadi penurunan pengungsi yang berada di tempat-tempat penampungan yang tersebar di Kecamatan Namlea, hal ini disebabkan karena pasca kondisi keamanan yang kondusif, masyarakat memilih balik ke tempat semula, tinggal bersama keluarga, atau ke kota lain dengan kondisi yang kondusif karena alasan pekerjaan.

Pada tahun 2008, jumlah masyarakat pengungsi yang terdapat di Kecamatan Namlea yaitu hanya tersisa sekitar 289 kk atau 1.319 orang, terjadi penurunan jumlah pengungsi yang sangat signifikan. Pengungsi yang tersisa umumnya sudah tidak mempunyai tempat tinggal atau keluarga sehingga mereka masih tetap tinggal di tempat penampungan dengan kondisi sarana

Grafik 3.1

Jumlah Masyarakat Pengungsi Di Kecamatan Namlea

Pada Tahun 2000-2007

Sumber: Hasil Analisa

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah pengungsi pada tahun 2000 adalah sebanyak 2.466 kk atau sekitar 9.761 jiwa. tetapi pada tahun 2001 terjadi konsultan lokal yang mengakibatkan pembengkakan jumlah pengungsi dari jumlah pengungsi sekitar 9.761 jiwa bertambah sekitar 3000 jiwa yang mengungsi menjadi 12.069 jiwa. dari tahun 2000 sampai tahun 2002 merupakan puncak arus pengungsian yang terjadi di Kecamatan Namlea. Sering dengan berjalannya waktu jumlah pengungsi dari tahun ke tahun semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh kondisi keamanan yang sudah lumayan kondusif. sehingga masyarakat mulai membangun kehidupannya semula.

Dari tahun ke tahun terjadi penurunan pengungsi yang berada di tempat-tempat penampungan yang tersebar di Kecamatan Namlea. hal ini disebabkan karena pasca kondisi keamanan yang kondusif. masyarakat memilih balik ke tempat semula, tinggal bersama keluarga, atau ke [illegible] kondusif karena alasan pekerjaan.

Pada tahun 2006, jumlah [illegible] pengungsi [illegible] pengungsi jumlah pengungsi yang [illegible] mereka masih tetap tinggal di tempat pengungsian [illegible]

prasarana yang kurang memadai dan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat selama di pengungsian.

Dari hasil analisa yang dilakukan maka didapatkan, karakter masyarakat pengungsi masyarakat yang ada masih mengalami trauma akibat konflik yang terjadi sehingga membutuhkan waktu untuk bisa kembali ke kehidupan mereka semula seperti saat sebelum kerusuhan terjadi. Pasca kerusuhan yang terjadi beberapa tahun lalu, kehidupan masyarakat berangsur-angsur mulai pulih sehingga jumlah pengungsi pada awal kerusuhan terjadi mengalami pembengkakan jumlah, sekarang sudah mengalami penurunan. Masyarakat yang masih bertahan di tempat penampungan sampai sekarang adalah masyarakat yang sudah tidak memilki rumah, harta benda dan juga sanak saudara, sehingga mereka tetap memilih untuk tinggal di tempat penampungan walaupun dengan kondisi sarana prasarana yang terbatas dan tidak mencukupi kebutuhan mereka.

3.1.2 Analisa Kegiatan Masyarakat

Analisa kegiatan masyarakat membahas kegiatan yang dilakukan di tempat penampungan dan. Analisa karakteristik masyarakat ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode tabel frekuensi dari kuisioner. Analisa ini dilakukan dengan menggunakan analisis partisipatif.

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi pelaku-pelaku yang berbeda beserta kepentingannya masing-masing yang dalam hal ini yaitu kepentingan yang berkaitan dengan keberadaan tempat relokasi.

Karakter masyarakat untuk kelompok masyarakat di Kecamatan Namlea adalah sebagai berikut:

- Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pengungsi adalah meliputi kegiatan pendidikan, kegiatan bekerja serta kegiatan berdagang. Dimana, pada umumnya kegiatan ini dilakukan pada daerah pusat Kota. Kebutuhan masyarakat disini meliputi Kebutuhan akan sandang, pangan dan papan, kebutuhan bernaung, kebutuhan psikologis serta kebutuhan berinteraksi.

prasarana yang kurang memadai dan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat selama di pengungsian.

Dari hasil analisa yang dilakukan maka didapatkan, karakter masyarakat pengungsi masyarakat yang ada masih mengalami trauma akibat konflik yang terjadi sehingga membutuhkan waktu untuk bisa kembali ke kehidupan mereka semula seperti saat sebelum kerusuhan terjadi. Pasca kerusuhan yang terjadi beberapa tahun lalu, kehidupan masyarakat berangsur-angsur mulai pulih sehingga jumlah pengungsi pada awal kerusuhan terjadi mengalami pemberngkakan jumlah, sekarang sudah mengalami penurunan. Masyarakat yang masih bertahan di tempat penampungan sampai sekarang adalah masyarakat yang sudah tidak memiliki rumah, harta benda dan juga sanak saudara, sehingga mereka tetap memilih untuk tinggal di tempat penampungan walaupun dengan kondisi sarana prasarana yang terbatas dan tidak memenuhi kebutuhan mereka.

3.1.2 Analisa Kegiatan Masyarakat

Analisa kegiatan masyarakat membahas kegiatan yang dilakukan di tempat penampungan dan. Analisa karakteristik masyarakat ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode tabel frekuensi dari kuisioner. Analisa ini dilakukan dengan menggunakan analisis partisipatif.

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi pelaku-pelaku yang berbeda beserta kepentingannya masing-masing yang dalam hal ini yaitu kepentingan yang berkaitan dengan kebradaan tempat relokasi.

Karakter masyarakat untuk kelompok masyarakat di Kecamatan Namlea adalah sebagai berikut:

- Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pengungsi adalah meliputi kegiatan pendidikan, kegiatan bekerja serta kegiatan berdagang. Dimana, pada umumnya kegiatan ini dilakukan pada daerah pusat Kota. Kebutuhan masyarakat disini meliputi Kebutuhan akan sandang, pangan dan papan, kebutuhan bermaung, kebutuhan psikologis serta kebutuhan berinteraksi.

- Dominasi mata pencaharian di Kota Ambon adalah sebagai Pegawai Negeri (26 %), ABRI sebesar (19%), dan sisanya bermata pencaharian sebagai pedagang (9%), sebagai nelayan (18%), dan guru sebanyak (12%)

Kegiatan – kegiatan masyarakat tersebut selalu mengandung 4 hal pokok yang menjadi acuan untuk memberikan beberapa ciri-ciri sebagai pendukung adanya pengertian tentang kegiatan tersebut[29]. Hal-hal tersebut adalah:

1. Pelaku, adalah hal mutlak yang harus ada dalam suatu sistem yang ada didalam kegiatan, karena pelaku adalah tokoh utama sebagai penggerak suatu kegiatan.
2. Macam kegiatan, adalah apa yang harus dikerjakan dimana akan melakukan kegiatan itu.Sehingga dapat diketahui bahwa kegiatan itu memang dikerjakan oleh pelaku kegiatan.
3. Tempat, Adalah tempat dimana kegiatan itu berlangsung dan melibatkan pelaku kegiatan apa yang dilakukannya.
4. Berlangsungnya kegiatan,dari tiga komponen tadi diatas maka hal terakhir yang terjadi adalah tentang kelangsungan pelaksanaan tersebut. Sehingga akan menjadi komponen-komponen kegiatan yang telah berlangsung.

Untuk lebih jelas mengenai penjelasan diatas, maka dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah.

Dari tabel 3.2 dapat diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak adalah sekolah, belajar dan bermain. Dimana rata-rata usia anak sekolah adalah mulai dari 6-12 tahun untuk anak yang duduk di bangku sekolah dasar (SD), 12-15 tahun untuk anak-anak yang duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP), dan usia 15-18 tahun untuk anak-anak yang duduk di bangku sekolah menengah umum (SMU). Dimana tempat untuk melakukan kegiatan bersekolah dan belajar adalah di sekolah dan tempat tinggal mereka, sedangkan kegiatan bermain bisa dilakukan di sekolah pada saat mereka bersekolah dan di lingkungan tempat tinggal mereka.

---

[29] Sapari imam Asyari, Sosiologi kota dan desa,Usaha Nasional-Surabaya,1993,hal 109

- Dominasi mata pencaharian di Kota Ambon adalah sebagai Pegawai Negeri (26 %). ABRI sebesar (19%), dan sisanya bermata pencaharian sebagai pedagang (9%), sebagai nelayan (18%), dan guru sebanyak (12%)

Kegiatan – kegiatan masyarakat tersebut selalu mengandung 4 hal pokok yang menjadi acuan untuk memberikan beberapa ciri-ciri sebagai pendukung adanya pengertian tentang kegiatan tersebut[29]. Hal-hal tersebut adalah:

1. Pelaku, adalah hal mutlak yang harus ada dalam suatu sistem yang ada didalam kegiatan. Karena pelaku adalah tokoh utama sebagai penggerak suatu kegiatan.
2. Macam kegiatan, adalah apa yang harus dikerjakan dimana akan melakukan kegiatan itu.Sehingga dapat diketahui bahwa kegiatan itu memang dikerjakan oleh pelaku kegiatan.
3. Tempat, Adalah tempat dimana kegiatan itu berlangsung dan melibatkan pelaku kegiatan apa yang dilakukannya.
4. Berlangsungnya kegiatan.dari tiga komponen tadi diatas maka hal terakhir yang terjadi adalah tentang kelangsungan pelaksanaan tersebut. Sehingga akan menjadi komponen-komponen kegiatan yang telah berlangsung.

Untuk lebih jelas mengenai penjelasan diatas, maka dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah.

Dari tabel 3.2 dapat diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak adalah sekolah, belajar dan bermain. Dimana rata-rata usia anak sekolah adalah mulai dari 6-12 tahun untuk anak yang duduk di bangku sekolah dasar (SD), 12-15 tahun untuk anak-anak yang duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP), dan usia 15-18 tahun untuk anak-anak yang duduk di bangku sekolah menengah umum (SMU). Dimana tempat untuk melakukan kegiatan bersekolah dan belajar adalah di sekolah dan tempat tinggal mereka. sedangkan kegiatan bermain bisa dilakukan di sekolah pada saat mereka bersekolah dan di lingkungan tempat tinggal mereka.

---

[29] Sapari Imam Asy'ari, Sosiologi Kota dan desa,(Salin Nasional-Surabaya,1997),hal 109

Sedangkan kegiatan yang dilakukan para remaja yaitu bersekolah, bermain dan bekerja. Dimana remaja disini pada umumnya bersekolah pada sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum yang kegiatannya dilakukan di sekolah, kegiatan lainnya yang dilakukan oleh anak-anak remaja yaitu bermain dan berkumpul dengan teman-teman mereka yang biasanya dilakukan di lingkungan tempat tinggal mereka atau diluar tempat tinggal mereka, dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh para remaja ini adalah bekerja membantu orang tuanya di rumah masing-masing.

Kegiatan yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua adalah bekerja, dimana masyarakat disini mayoritas memiliki pekerjaan di sektor formal yang bergerak di bidang PNS, ABRI (TNI/Polri), nelayan, guru, serta yang mempunyai pekerjaan sebagai pedagang, dimana kegiatan ini dilakukan di instansi pemerintahan dan juga di daerah perdagangan dan jasa setempat. Kegiatan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat adalah mengikuti perkumpulan-perkumpulan sosial yang dilakukan di lingkungan tempat tinggal mereka.

Untuk kegiatan bersekolah dilakukan antara pkl.7.00-13.00, selanjutnya dilakukann pada pkl 13.00-18.00 untuk para siswa yang masuk sekolah siang, dan untuk kegiatan bermain dilakukan setelah mereka pulang sekolah. Untuk kegiatan bekerja, masyarakat biasanya bekerja mulai pukul 08.00- 16.00, dan akan beristirahat makan siang pada pukul 13.00, selanjutnya akan balik ke kantor lagi. Sedangkan untuk kegiatan perkumpulan, biasanya dilakukan pada saat masyarakat yang ada memiliki waktu luang atau pada saat tertentu.

Berdasarkan analisis partisipatif diharapkan akan memperoleh manfaat, memperoleh gambaran mengenai semua kelompok yang berperan di daerah tersebut, menyelidiki kepentingan atau prioritas dari pihak-pihak tersebut.

Sedangkan kegiatan yang dilakukan para remaja yaitu bersekolah, bermain dan bekerja. Dimana remaja disini pada umumnya bersekolah pada sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum yang kegiatannya dilakukan di sekolah. kegiatan lainnya yang dilakukan oleh anak-anak remaja yaitu bermain dan berkumpul dengan teman-teman mereka yang biasanya dilakukan di lingkungan tempat tinggal mereka atau diluar tempat tinggal mereka, dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh para remaja ini adalah bekerja membantu orang tuanya di rumah masing-masing.

Kegiatan yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua adalah bekerja. dimana masyarakat disini mayoritas memiliki pekerjaan di sektor formal yang bergerak di bidang PNS, ABRI (TNI/Polri), pelayan, guru. serta yang mempunyai pekerjaan sebagai pedagang. dimana kegiatan ini dilakukan di instansi pemerintahan dan juga di daerah perdagangan dan jasa setempat. Kegiatan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat adalah mengikuti perkumpulan-perkumpulan sosial yang dilakukan di lingkungan tempat tinggal mereka.

Untuk kegiatan bersekolah dilakukan antara pkl.7.00-13.00. selanjutnya dilakukan pada pkl 13.00-18.00 untuk para siswa yang masuk sekolah siang. dan untuk kegiatan bermain dilakukan setelah mereka pulang sekolah. Untuk kegiatan bekerja. masyarakat biasanya bekerja mulai pukul 08.00- 16.00. dan akan beristirahat makan siang pada pukul 13.00. selanjutnya akan balik ke kantor lagi. Sedangkan untuk kegiatan perkumpulan. biasanya dilakukan pada saat masyarakat yang ada memiliki waktu luang atau pada saat tertentu.

Berdasarkan analisis partisipatif dibarapkan akan memperoleh manfaat. memperoleh gambaran mengenai semua kelompok yang berperan di daerah tersebut. memyelidiki kepentingan atau prioritas dari pihak-pihak tersebut.

Tabel 3.2

Kegiatan Masyarakat Di Tempat Pengungsian

No	Pelaku	Macam Kegiatan	Tempat	Waktu	Jarak	Proses	Prosentase
1	Anak-anak	Sekolah	Sekolah (Sd,Smp Sma)	▪ Pkl 07.00-13.00 ▪ Pkl 13.00-18.00	2km-3km	Kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak adalah bersekolah, belajar dan bermain. Dimana kegiatan yang dilakukan berlangsung di sekolah dan tempat tinggal mereka.	Dari hasil kuisioner menyatakan bahwa sebanyak 56% menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak adalah sekolah, yang menyatakan belajar sebanyak 25% dan bermain sebanyak 24%.
		Belajar	Sekolah Tempat Tinggal	▪ Pkl 07.00-13.00 ▪ Pkl 13.00-18.00 Waktu pulang sekolah	2km-3km		
		Bermain	Tempat Tinggal	Saat ada waktu senggang			
2	Remaja	Sekolah	Sekolah	▪ Pkl 07.00-13.00 ▪ Pkl 13.00-18.00	2km-3km	Kegiatan yang dilakukan oleh remaja disini adalah bersekolah, bermain dan	Sebanyak 41% menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh remaja disini adalah sekolah, sebanyak 35 %

Tabel 3.2

Kegiatan Masyarakat Di Tempat Pengungsian

No	Pelaku	Macam Kegiatan	Tempat	Waktu	Jarak	Proses	Prosentase
1	Anak-anak	Sekolah	Sekolah (Sd,Smp Sma)	▫ Pkl 07.00-13.00 ▫ Pkl 13.00-18.00	2km-3km	Kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak adalah bersekolah, belajar dan bermain.	Dari hasil kuisioner menyatakan bahwa sebanyak 55% menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak adalah sekolah, yang menyatakan belajar sebanyak 25% dan bermain sebanyak 24%.
		Belajar	Sekolah Tempat Tinggal	▫ Pkl 07.00-13.00 ▫ Pkl 13.00-18.00 Waktu pulang sekolah	2km-3km	Dimana kegiatan yang dilakukan berhangsung di sekolah dan tempat tinggal mereka.	
		Bermain	Tempat Tinggal	Saat ada waktu senggang			
2	Remaja	Sekolah	Sekolah	▫ Pkl 07.00-13.00 ▫ Pkl 13.00-18.00	2km-3km	Kegiatan yang dilakukan oleh remaja disini adalah bersekolah, bermain dan	Sebanyak 47% menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh remaja disini adalah sekolah, sebanyak 35 %

No	Pelaku	Macam Kegiatan	Tempat	Waktu	Jarak	Proses	Prosentase
		Belajar	Sekolah	▪ Pkl 07.00-13.00 ▪ Pkl 13.00-18.00	2km-3km	berkumpul bersama teman-teman, dan sisanya menganggur Dimana kegiatan yang dilakukan berlangsung di sekolah dan tempat tinggal mereka.	menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan adalah bermain dan berkumpul dengan teman-teman dan sebanyak 24% bekerja.
			Tempat Tinggal	Waktu pulang sekolah			
		Bermain	Tempat Tinggal	Waktu pulang sekolah			
		Berkumpul	Tempat Tinggal	Waktu pulang sekolah			
3	Dewasa /Orang tua	Bekerja	Instansi Pemerintah	▪ Pkl 08.00-12.00 ▪ Pkl 13.00-15.00	>3km	Kegiatan yang dilakukan oleh para orang dewasa atau orang tua adalah bekerja, serta mengikuti perkumpulan masyarakat dan juga ada masyarakat dan juga ada luar	Sebanyak 46% menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan adalah mengikuti perkumpulan-perkumpulan warga, sebanyak 28% menyatakan kegiatan yang dilakukan adalah hiburan/bermain, sebanyak 12% menganggur, dan
			ABRI	▪ Pkl 07.00-13.00 ▪ Pkl 13.00-18.00	>3km		

No	Pelaku	Macam Kegiatan	Tempat	Waktu	Jarak	Proses	Presentase
		Belajar	Sekolah	▪ Pkl 07.00-13.00 ▪ Pkl 13.00-18.00	2km-3km	berkumpul bersama teman-teman, dan sisanya mengangguur	menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan adalah bermain dan berkumpul dengan teman-teman dan sebanyak 24% bekerja.
			Tempat Tinggal	Waktu pulang sekolah		Dimana kegiatan yang dilakukan berhangsung di sekolah dan tempat tinggal mereka	
		Bermain	Tempat Tinggal	Waktu pulang sekolah			
		Berkumpul	Tempat Tinggal	Waktu pulang sekolah			
3	Dewasa /Orang tua	Bekerja	Instansi Pemerintah	▪ Pkl 08.00-12.00 ▪ Pkl 13.00-15.00	>3km	Kegiatan yang dilakukan oleh para orang dewasa atau orang tua adalah bekerja, serta mengikuti perkumpulan masyarakat dan juga ada masyarakat dan juga ada luar	Sebanyak 46% menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan adalah mengikuti perkumpulan-perkumpulan warga, sebanyak 28% menyatakan kegiatan yang dilakukan adalah hiburan/bermain, sebanyak 12% mengangguur, dan
			ABRI	▪ Pkl 07.00-13.00 ▪ Pkl 13.00-18.00	>3km		

No	Pelaku	Macam Kegiatan	Tempat	Waktu	Jarak	Proses	Prosentase
			Daerah perdagangan dan jasa	▪ Pkl 06.00-18.00	1km-2km	permukiman	sebanyak 14% mengikuti kegiatan di luar permukiman.
		Perkumpulan masyarakat	Tempat tinggal	Waktu akhir pekan			

Sumber:Hasil Analisa

Lampiran: Hasil Analisis

No	Pelaku	Waktu Kegiatan	Tempat	Waktu	Tugas	Proses	Prosedur/cara kegiatan di lust sepanjang tugas mengikuti pertumbuhan.
			Dapat dipergunakan oleh lasa	• Pkl 08.00-18.00 WIB	Jam-Jam	pertumbuhan	
		Pertumbuhan masyarakat	Tempat tinggal	WIB bekas			

3.2 Analisa Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat adalah pendapat masyarakat, dimana aspirasi disini membahas mengenai aspirasi masyarakat yang ada di tempat penampungan pengungsi terhadap relokasi permukiman yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Dimana, aspirasi masyarakat disini meliputi pendapat masyarakat mengenai relokasi sendiri, apakah mereka setuju atau tidak dipindahkan ke tempat relokasi, lokasi relokasi permukiman, kemampuan masyarakat meliputi mata pencaharian, tingkat pendapatan dan pengeluaran yang terjalin di antara masyarakat pengungsi. Dimana dalam analisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

3.2.1 Aspirasi Masyarakat Mengenai Relokasi Permukiman

Umumnya masyarakat ingin pindah ke tempat relokasi yang baru didasarkan oleh beberapa faktor yaitu di antaranya adalah kurangnya sarana prasarana seperti fasilitas-fasilitas yang tersedia serta kelengkapan sarana utilitas yang tidak memadai di tempat penampungan yang tidak dapat menunjang kegiatan masyarakat, lokasi tempat penampungan yang terlalu jauh dengan pusat kegiatan serta tingkat kemampuan masyarakat yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di tempat penampungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini.

3.2 Analisa Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat adalah pendapat masyarakat, dimana aspirasi disini membahas mengenai aspirasi masyarakat yang ada di tempat penambangan pengungsi terhadap relokasi permukiman yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Dimana aspirasi masyarakat disini meliputi pendapat masyarakat mengenai relokasi sendiri, apakah mereka setuju atau tidak dipindahkan ke tempat relokasi, lokasi relokasi permukiman, kemampuan masyarakat meliputi mata pencaharian, tingkat pendapatan dan pengeluaran yang terjalin di antara masyarakat pengungsi. Dimana dalam analisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

3.2.1 Aspirasi Masyarakat Mengenai Relokasi Permukiman

Umumnya masyarakat ingin pindah ke tempat relokasi yang baru didasarkan oleh beberapa faktor yaitu di antaranya adalah kurangnya sarana prasarana seperti fasilitas-fasilitas yang tersedia serta kelengkapan sarana utilitas yang tidak memadai di tempat penampungan yang tidak dapat menunjang kegiatan masyarakat, lokasi tempat penampungan yang terlalu jauh dengan pusat kegiatan serta tingkat kemampuan masyarakat yang sangat mempengaruhi kebidupan masyarakat di tempat penampungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3
Aspirasi Masyarakat Mengenai Relokasi Permukiman

No	Pendapat	Jumlah	Prosentase (%)	Kesimpulan
1	Sangat Setuju	50	67	Yang setuju untuk pindah ke tempat reloksi yang baru adalah masyarakat yang berada pada kelompok kerja dan juga kelompok pendidikan, alasan mereka sangat setuju karena memperhatikan kondisi fasilitas yang minim di tempat pengungsian seperti fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan, serta sarana dan prasarana seperti prasarana air bersih yang sangat minim. Dan kelompok masyarakat yang kurang setuju dengan dilakukannya relokasi adalah kelompok masyarakat yang pada saat konflik terjadi, harta bendanya semua hilang sehingga dia tidak punya apa-apa dan sudah malas pindah ke tempat yang baru dan juga karena sudah betah tinggal di tempat penampungan dan juga karena sudah terbiasa dengan kondisi yang ada.
2	Setuju	20	28	
3	Kurang Setuju	4	5	
4	Tidak Setuju	0	0	
	Jumlah		100	

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Berdasarkan tabel 3.5 diatas, dapat diketahui bahwa pendapat masyarakat yang setuju dan ingin pindah ke tempat relokasi yang baru adalah tinggi yaitu yang sangat setuju sebanyak 50 orang atau 67%, yang setuju prosentasenya adalah sebesar 28% atau sekitar 20 orang dan yang kurang setuju dengan diadakannya relokasi adalah sebanyak 4 orang atau 5%, dan tidak ada yang tidak setuju dengan diadakannya relokasi permukiman untuk masyarakat.

Grafik 3.2
Aspirasi Masyarakat Mengenai Relokasi Permukiman

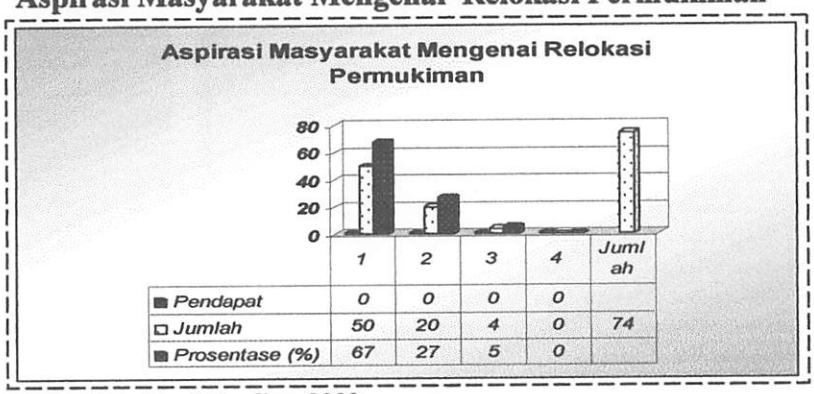

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Tabel 3.3
Aspirasi Masyarakat Mengenai Relokasi Permukiman

No	Pendapat	Jumlah	Prosentase (%)	Kesimpulan
1	Sangat Setuju	50	67	Yang setuju untuk pindah ke tempat relokasi yang baru adalah masyarakat yang berada pada kelompok kaya dan juga kelompok pendidikan, alasan mereka sangat setuju karena mempermudah mobilitas yang mana di tempat pengungsian sepert fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan, sedangkan bagi yang prasarana sepert prasarana air bersih yang sangat minim. Dan kelompok masyarakat yang kurang setuju dengan adalah ahnya relokasi adalah kelompok masyarakat yang tidak mau berpindah tempat, bedanya semua orang selangga dia tidak mau apabila tidak sudah mates pindah ke tempat yang baru dan juga karena sudah betah tinggal di tempat pemukiman dan juga karena su tah terbiasa dengan kondisi yang ada.
2	Setuju	20	28	
3	Kurang Setuju	4	5	
4	Tidak Setuju	0	0	
Jumlah			100	

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Berdasarkan tabel 3.5 diatas, dapat dikatakan bahwa pendapat masyarakat yang setuju dan ingin pindah ke tempat relokasi yang baru adalah tinggi yaitu yang sangat setuju sebanyak 50 orang atau 67%. yang setuju prosentasenya adalah sebesar 28% atau sekitar 20 orang dan yang kurang setuju dengan ditadakannya relokasi adalah sebanyak 4 orang atau 5%, dan tidak ada yang tidak setuju dengan ditadakannya relokasi permukiman untuk masyarakat.

Grafik 3.2
Aspirasi Masyarakat Mengenai Relokasi Permukiman

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Pendapat masyarakat mengenai relokasi permukiman yang baru adalah sangat setuju, hal ini dikarenakan pada tempat penampungan pengungsi yang lama kondisinya buruk dan tidak dilengkapi dengan ketersediaan sarana prasarana penunjang kegiatan yang lengkap sehingga tidak dapat menunjang kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pengungsi.

Umumnya masyarakat ingin pindah ke tempat relokasi yang baru disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah lokasi yang mudah dijangkau, serta ketersediaan sarana prasarana yang memadai yang merupakan faktor utama bagi masyarakat untuk mau pindah ke tempat yang baru. Dimana bangunan yang di sediakan di tempat relokasi adalah bangunan semi permanen yang selanjutnya dapat di gunakan dan di perbaiki oleh masyarakat sesuai dengan keinginan mereka.

3.2.2 Analisa Aspirasi Masyarakat Mengenai Lokasi Permukiman

Lokasi permukiman sebaiknya dipilih didaerah yang memberikan akses yang mudah bagi para pemukim (selama-lamanya 30 menit dengan menggunakan alat transportasi umum) untuk menuju tempat kerja dan pusat-pusat kegiatan pelayanan yang lebih luas sehingga dapat menghemat waktu serta biaya yang dikeluarkan untuk ongkos. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi yang di dapatkan dari hasil kuisioner kemudian menggunakan metode pembobotan untuk menilai jenis-jenis faktor yang ada untuk melakukan perbandingan masing-masing data. Dimana pada pembobotan, semakin dekat jaraknya nilai bobotnya akan semakin besar, begitu pula sebaliknya semakin jauh jaraknya maka nilai bobotnya akan semakin rendah. Untuk lebih jelasnya tentang pendapat masyarakat mengenai lokasi permukiman dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini.

Pendapat masyarakat mengenai relokasi permukiman yang baru adalah sangat setuju, hal ini dikarenakan pada tempat penampungan pengungsi yang lama kondisinya buruk dan tidak dilengkapi dengan kelorsediaan sarana prasarana penunjang kegiatan yang lengkap sehingga tidak dapat menunjang kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pengungsi.

Umumnya masyarakat ingin pindah ke tempat relokasi yang baru disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah lokasi yang mudah dijangkau, serta ketersediaan sarana prasarana yang memadai yang merupakan faktor utama bagi masyarakat untuk mau pindah ke tempat yang baru. Dimana bangunan yang di sediakan di tempat relokasi adalah bangunan semi permanen yang selanjutnya dapat di gunakan dan di perbaiki oleh masyarakat sesuai dengan keinginan mereka.

3.2.2 Analisa Aspirasi Masyarakat Mengenai Lokasi Permukiman

Lokasi permukiman sebaiknya dipilih didaerah yang memberikan akses yang mudah bagi para pemukim (sekitar-jamanya 30 menit dengan menggunakan alat transportasi umum) untuk mencapi tempat kerja dan pusat-pusat kegiatan pelayanan yang lebih luas sehingga dapat mengfemat waktu serta biaya yang dikeluarkan untuk ongkos. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi yang di dapatkan dari hasil kuisioner kemudian menggunakan metode pembobotan untuk menilai jenis-jenis faktor yang ada untuk melakukan perbandingan masing-masing data. Dimana pada pembobotan, semakin dekat jaraknya nilai bobotnya akan semakin besar, begitu pula sebaliknya semakin jauh jaraknya maka nilai bobotnya akan semakin rendah. Untuk lebih jelasnya tentang pendapat masyarakat mengenai lokasi permukiman dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4
Aspirasi Masyarakat Mengenai Lokasi Permukiman

Lokasi Permukiman	Frekuensi	Prosentase (%)	Kesimpulan
Dekat Tempat Kerja	14	19	Yang sangat setuju untuk melakukan relokasi adalah kelompok masyarakat yang berada pada kelompok kerja yaitu masyarakat yang bekerja pada bidang pemerintahan seperti pns, abri, pegawai bank, juga pegawai swasta, pegawai rumah sakit,dll. Serta masyarakat pada kelompok pendidikan yaitu guru, murid-murid sekolah sd, smp dan sma. Dan juga kelompok masyartakat yang bermata pencaharian sebagai pedaganga agar memudahkan kegiatan perekonomian yang di jalaninya.
Di Pusat Kota	11	15	Yang memilih lokasi di pusat adalah kelompok masyarakat yang masih remaja atau yang duduk di bangku pendidikan seperti murid smp atau murid sma sehingga bisa memudahkan mereka jika mereka ingin berkumpul bersama teman-temannya
Dekat tempat kerja dan di Pusat Kota	49	66	Sedangkan yang memilih dekat dengan tempat keja dan di pusat kota adalah masyarakat pekerja yang bekerja di bidang pemerintahan, guru maupun pegawai swasta yang memiliki waktu yang yang sibuk, sehingga membutuhkan waktu yang cepat untuk mencapai daerah tersebut.
Jumlah	74	100	

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Grafik 3.3
Aspirasi Mengenai Lokasi Permukiman
Menurut Aspirasi Masyarakat

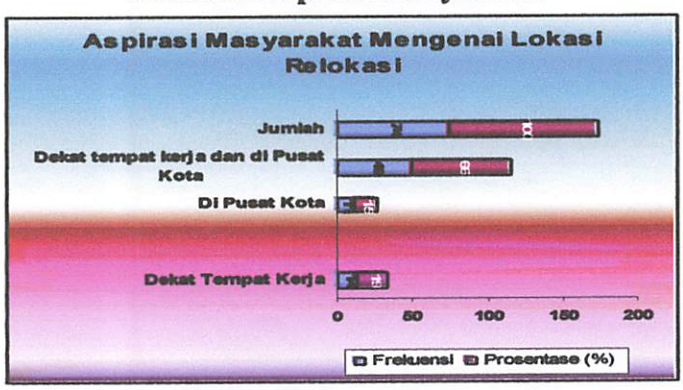

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Dari grafik di atas menunjukan frekwensi tertinggi pemilihan untuk lokasi permukiman adalah dekat tempat kerja dan di pusat kota yaitu sebesar (66%). Hal ini dikarenakan agar jarak yang ditempuh ke tempat kerja dan ke pusat kota tidak terlalu jauh agar bisa mempermudah akses yang dilakui dan mudah dijangkau

Tabel 3.4
Aspirasi Masyarakat Mengenai Lokasi Permukiman

Lokasi Permukiman	Frekuensi	Prosentase (%)	Kesimpulan
Dekat Tempat Kerja	14	19	Yang sangat setuju untuk melakukan relokasi adalah kelompok masyarakat yang berada pada kelompok kerja yaitu masyarakat yang bekerja pada bidang pemerintahan seperti pns, abri, pegawai bank, juga pegawai swasta, pegawai rumah sakit dll. Serta masyarakat pada kelompok pendidikan yaitu guru, murid-murid sekolah sd, smp dan sma. Dan juga kelompok masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang agar memudahkan kegiatan perekonomian yang di jalannya.
Di Pusat Kota	11	15	Yang memilih lokasi di pusat adalah kelompok masyarakat yang masih remaja atau yang duduk di bangku pendidikan seperti murid smp atau murid sma sehingga bisa memudahkan mereka jika merelokasi ingin berkumpul bersama teman-temannya
Dekat tempat kerja dan di Pusat Kota	49	66	Sedangkan yang memilih dekat dengan tempat kerja dan di pusat kota adalah masyarakat pekerja yang bekerja di bidang pemerintahan, guru maupun pegawai swasta yang memiliki waktu yang yang sibuk, sehingga membutuhkan waktu yang cepat untuk mencapai daerah tersebut.
Jumlah	74	100	

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Grafik 3.3
Aspirasi Mengenai Lokasi Permukiman
Menurut Aspirasi Masyarakat

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Dari grafik di atas menunjukan frekwensi tertinggi permilihan untuk lokasi permukiman adalah dekat tempat kerja dan di pusat kota yaitu sebesar (66%). Hal ini dikarenakan agar jarak yang ditempuh ke tempat kerja dan ke pusat kota tidak terlalu jauh agar bisa mempermudah akses yang dilalui dan mudah dijangkau

sehingga dapat menghemat waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat setempat, sebanyak (19%) memilih dekat dengan tempat kerja karena kebanyakan masyarakat bekerja di bidang formal dan sisanya atau sebesar (15%) memilih lokasinya berada di pusat kota.

3.2.2.1 Analisa Lokasi Dengan Pusat Kegiatan

Kriteria lain yang juga menjadi penentu faktor keterikatan dalam hal ini adalah yang menyangkut lokasi tempat tinggal dengan pusat kegiatan. Dimana semakin dekat lokasi pusat kegiatan dengan tempat tinggal mereka, maka semakin besar pengaruh keterikatan mereka terhadap kawasan tersebut. Karena pada umumnya penduduk menginginkan tempat tinggal yang tidak jauh dari pusat kegiatan untuk mempermudah akses yang dilalui dan menghemat biaya yang harus dikeluarkan.

Semakin dekat jarak dengan pusat kegiatan, maka semakin besar pula tingkat kepuasan masyarakat pengungsi akan lokasi relokasi permukiman baru yang disediakan.

3.2.2.2 Analisa Aspirasi Masyarakat mengenai Jarak Tempat Relokasi ke Tempat Kerja

Berkaitan dengan kriteria lokasi ke pusat kegiatan diatas, kriteria jarak ini juga bersifat sama dengan kriteria lokasi dengan pusat kegiatan. Semakin pendek atau semakin dekat jarak yang ditempuh dalam mencapai pusat kegiatan dan lokasi pekerjaan, maka semakin besar pengaruh keterikatannya. Demikian pula sebaliknya, apabila jarak yang ditempuh semakin panjang atau semakin jauh jarak yang mereka tempuh, maka faktor keterikatan terhadap kawasan tersebut akan berkurang. Berikut akan di jelaskan mengenai jarak tempat relokasi ke tempat kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.5.

Dari tabel 3.5 dapat diketahui bahwa yang menginginkan jarak tempat relokasi ke tempat kerja adalah dekat yaitu sebesar 61% (21 orang) sedangkan sebanyak 39% (29 orang) menyatakan jarak tempat relokasi ke tempat kerja

sehingga dapat menghemat waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat setempat, sebanyak (19%) memilih dekat dengan tempat kerja karena kebanyakan masyarakat bekerja di bidang formal dan sisanya atau sebesar (15%) memilih lokasinya berada di pusat kota.

3.2.2.1 Analisa Lokasi Dengan Pusat Kegiatan

Kriteria lain yang juga menjadi pertimbangan faktor keterikatan dalam hal ini adalah yang menyangkut lokasi tempat tinggal dengan pusat kegiatan. Dimana semakin dekat lokasi pusat kegiatan dengan tempat tinggal mereka, maka semakin besar pengaruh keterikatan mereka terhadap kawasan tersebut. Karena pada umumnya pendudukmenginginkan tempat tinggal yang tidak jauh dari pusat kegiatan untuk mempermudah akses yang dilalui dan menghemat biaya yang harus dikeluarkan.

Semakin dekat jarak dengan pusat kegiatan, maka semakin besar pula tingkat kepuasan masyarakat pengguna akan lokasi relokasi permukiman baru yang disediakan.

3.2.2.2 Analisa Aspirasi Masyarakat mengenai Jarak Tempat Relokasi ke Tempat Kerja

Berkaitan dengan kriteria lokasi ke pusat kegiatan diatas, kriteria jarak ini juga berisiat sama dengan kriteria lokasi dengan pusat kegiatan. Semakin pendek atau semakin dekat jarak yang ditempuh dalam mencapai pusat kegiatan dan lokasi pekerjaan, maka semakin besar pengaruh keterikatannya. Demikian pula sebaliknya, apabila jarak yang ditempuh semakin panjang atau semakin jauh jarak yang mereka tempuh, maka faktor keterikatan terhadap kawasan tersebut akan berkurang. Berikut akan di jelaskan mengenai jarak tempat relokasi ke tempat kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.5.

Dari tabel 3.5 dapat diketahui bahwa yang menginginkan jarak tempat relokasi ke tempat kerja adalah dekat yaitu sebesar 61% (21 orang) sedangkan sebanyak 39% (29 orang) menyatakan jarak tempat relokasi ke tempat kerja

adalah sedang dan tidak ada yang menginginkan jarak yang jauh karena sulit dijangkau.

Tabel 3.5

Jarak Tempat Relokasi Dengan Tempat Kerja

No	Jarak tempat relokasi dengan tempat kerja	Jumlah	Prosentase (%)	Keterangan
1	Dekat (500 m- 1 km)	45	61	Masyarakat yang berpendapat bahwa jarak tempat relokasi ke tempat kerja adalah dekat dengan jarak (500 m-1 km), umumnya adalah masyarakat yang bekerja di bidang pemerintahan seperti pns, guru, pegawai dan juga yang bekerja di bank, karena waktu masuk kantornya yang relatif lebih pagi daripada pegawai kantor lainnya, sehingga mereka memilih jarak yang dekat dan waktu tempuh yang relatif singkat.
2	Sedang (1km-2km)	29	39	Masyarakat yang berpendapat bahwa jarak tempat relokasi ke tempat kerja adalah sedang dengan jarak sedang (1km-2 km) masyarakat yang bekerja di bidang pemerintahan seperti pns yang kantornya berjarak sekitar 1km-2km, dan juga kelompok masyarakat yang bekerja sebagai abri.
3	Jauh (≥ 2 Km)	0	0	Karena umumnya lokasi tempat kerja berada di tengah kota, sehingga mudah di akses dari tempat relokasi, dengan jarak yang cukup dekat dan tidak ada yang berjarak (≥ 2 Km).
Jumlah		74	100%	

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Masyarakat yang berpendapat bahwa jarak tempat relokasi ke tempat kerja adalah dekat dengan jarak (500 m-1 km), umumnya adalah masyarakat yang bekerja di bidang pemerintahan yang jaraknya sangat dekat dengan tempat relokasi adalah yang bekerja di bank, karena waktu masuk kantornya yang relatif. lebih pagi daripada pegawai kantor lainnya, sehingga mudah di akses oleh masyarakat. Masyarakat yang berpendapat bahwa jarak tempat relokasi ke tempat kerja adalah sedang dengan jarak Sedang (5-10 km) adalah umumnya masyarakat yang bekerja di bidang pemerintahan, dimana kantornya berada agak jauh dari tengah kota, dan juga masyarakat yang bekerja sebagai ABRI yang lokasinya memang agak jauh dari tempat relokasi.

adalah sedang dan tidak ada yang menginginkan jarak yang jauh karena sulit dijangkau.

Tabel 3.5

Jarak Tempat Rekreasi Dengan Tempat Kerja

No	Jarak tempat rekreasi dengan tempat kerja	Jumlah	Prosentase (%)	Keterangan
1	Dekat (500 m- 1 km)	45	90	Masyarakat yang berpendapat bahwa jarak tempat rekreasi ke tempat kerja adalah dekat dengan jarak (500 m-1 km), umumnya adalah masyarakat yang bekerja di bidang pemerintahan sehari pns, guru, pegawai dan juga yang bekerja di bank. karena waktu kantornya lebih pagi dan pulang kantornya lebih cepat dan juga mudah mencari jarak yang dekat dan waktu tempuh yang relatif singkat.
2	Sedang (1km-2km)	20	39	Masyarakat yang berpendapat bahwa jarak tempat rekreasi ke tempat kerja adalah sedang dengan jarak sedang (1km- 2 km) masyarakat yang bekerja di bidang pemerintahan sehari pns yang kantornya berjarak sedang dan juga lebih masyarakat yang bekerja sebagai obgi
3	Jauh (≥ 2 Km)	0	0	Masyarakat yang berpendapat bahwa tempat kerja berada di tempat yang jauh sehingga mudah di akses dan tidak ada kendaraan jarak yang cukup sehat dan tidak ada yang berjarak (≥ 2 Km)
Jumlah		74	100%	

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Masyarakat yang berpendapat bahwa jarak tempat rekreasi ke tempat kerja adalah dekat dengan jarak (500 m-1 km), umumnya adalah masyarakat yang bekerja di bidang pemerintahan yang jarakmya sangat dekat dengan tempat rekreasi adalah yang bekerja di bank, karena waktu masuk kantornya yang relatif lebih pagi dan juga pegawai kantor lainnya, sehingga mudah di akses oleh masyarakat. Masyarakat yang berpendapat bahwa jarak tempat rekreasi ke tempat kerja adalah sedang dengan jarak Sedang (5-10 km) adalah umumnya masyarakat yang bekerja di bidang pemerintahan, dimana kantornya berada agak jauh dari tempat kota, dan juga masyarakat yang bekerja sebagai ABRI yang lokasinya memang agak jauh dari tempat rekreasi.

Grafik 3.4
Aspirasi Jarak Tempat Relokasi Ke Tempat Kerja

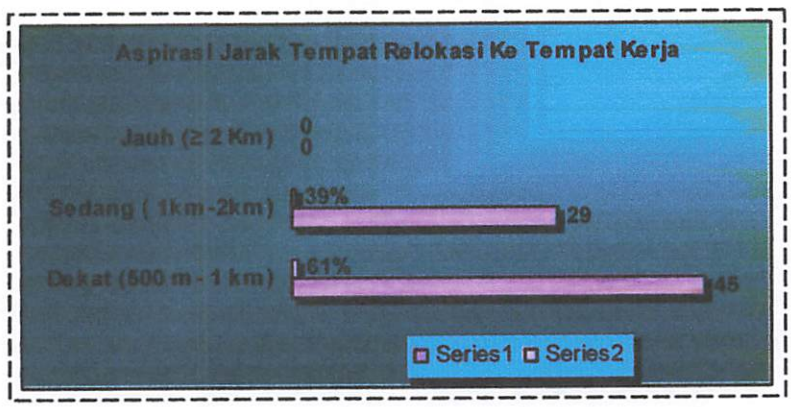

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Tabel 3 - 6
Skor Jarak Relokasi ke Tempat Kerja

No	Lokasi	%	Bobot	Skor
1	Jauh	0	1	0
2	Sedang	32	2	64
3	Dekat	61	3	183

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Untuk jarak antara tempat relokasi ke tempat kerja menggunakan jarak yang terkecil untuk skor tertinggi (3), untuk analisa aspirasi masyarakat mengenai jarak tempat reloksi ke tempat kerja di dapatkan lokasi dekat dengan skor tertinggi karena lokasi tempat relokasi haruslah relatif dekat dengan tempat kerja sehingga mudah di jangkau dan menghemat biaya.

3.2.2.3 Analisa Aspirasi Masyarakat mengenai Jarak Tempat Relokasi ke Daerah Pendidikan

Untuk kriteria lokasi jarak tempat penampungan ke daerah pendidikan haruslah diperhatikan, mengingat banyaknya anak dalam usia sekolah yang melakukan kegiatan belajar, untuk itu jarak ke daerah pendidikan haruslah dekat lokasi permukiman agar mudah dijangkau oleh anak-anak sekolah. Untuk jelasnya mengenai pendapat masyarakat tentang jarak ke daerah pendidikan dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini.

Grafik 3.4
Aspirasi Jarak Tempat Relokasi Ke Tempat Kerja

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Tabel 3. 6
Skor Jarak Relokasi Ke Tempat Kerja

No	Lokasi	%	Bobot	Skor
1	Jauh	0	1	0
2	Sedang	32	2	64
3	Dekat	61	3	183

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Untuk jarak antara tempat relokasi ke tempat kerja menggunakan jarak yang terkecil untuk skor tertinggi (3), untuk analisa aspirasi masyarakat mengenai jarak tempat relokasi ke tempat kerja di dapatkan lokasi dekat dengan skor tertinggi karena lokasi tempat relokasi haruslah relatif dekat dengan tempat kerja sehingga mudah di jangkau dan menghemat biaya.

3.2.2.3 Analisa Aspirasi Masyarakat mengenai Jarak Tempat Relokasi ke Daerah Pendidikan

Untuk kriteria lokasi jarak tempat penampungan ke daerah pendidikan haruslah diperhatikan, mengingat banyaknya anak dalam usia sekolah yang melakukan kegiatan belajar, untuk itu jarak ke daerah pendidikan haruslah dekat lokasi permukiman agar mudah dijangkau oleh anak-anak sekolah. Untuk jelasnya mengenai pendapat masyarakat tentang jarak ke daerah pendidikan dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel 3.7
Aspirasi Jarak Tempat Relokasi Dengan Daerah Pendidikan

No	Aspirasi Jarak tempat relokasi dengan daerah pendidikan	Jumlah	Prosentase (%)	Keterangan
1	Dekat (500 m- 1 km)	42	57	Masyarakat yang berpendapat bahwa arak tempat relokasi ke daerah pendidikan adalah dekat dengan jarak (500m-1km) umumnya adalah kelompok masyarakat pada usia sekolah yaitu anak-anak yang duduk di bangku SD, SMP dan SMA yang menginginkan jarak tempat relokasi ke daerah pendidikan dekat.
2	Sedang (1km-2km)	32	43	Masyarakat yang berpendapat bahwa jarak tempat relokasi ke daerah pendidikan adalah sedang dengan jarak sedang(1km-2 km) adalah umumnya anak-anak yang bersekolah agak jauh dari tengah kota, sehingga memerlukan waktu tempuh yang agak jauh atau sedang.
3	Jauh (≥ 2 Km)	0	0	Anak-anak tidak akan bersekolah dengan jarak yang agak jauh karena dipengaruhi oleh waktu tempuh
Jumlah		74	100	

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapat masyarakat pengungsi mengenai jarak tempat relokasi ke daerah pendidikan adalah dekat dengan jumlah prosentase sebesar 57% (42 orang) dan yang menyatakan jaraknya sedang adalah sebesar 43% orang (32%), dan sisanya tidak ada yang mengingiknka jarak tempat tempat relokasi daerah pendidikan adalah jaraknya jauh karena akses yang lama.Masyarakat yang berpendapat bahwa jarak tempat relokasi ke daerah pendidikan adalah dekat dengan jarak (500m-1km km), umumnya adalah sehingga dekat dengan tempat relokasi anak-anak yang bersekolah pada SD SMP, atau SMA yang berada di tengah kota.

Tabel 3.7

Aspirasi Jarak Tempat Relokasi Dengan Daerah Pendidikan

No	Aspirasi jarak tempat relokasi dengan daerah pendidikan	Jumlah	Prosentase (%)	Keterangan
1	Dekat (500 m- 1 km)	42	57	Masyarakat yang berpendapat bahwa jarak tempat relokasi ke daerah pendidikan dekat dengan jarak (500m-1km) umumnya adalah masyarakat pada usia sekolah yaitu anak-anak yang duduk di bangku SD, SMP dan SMA yang menginginkan jarak tempat relokasi ke daerah pendidikan dekat.
2	Sedang (1km-2km)	32	43	Masyarakat yang berpendapat bahwa jarak tempat relokasi ke daerah pendidikan adalah sedang dengan jarak sedang(1km-2 km) adalah umumnya anak-anak yang bersekolah agak jauh dari tempat kota, sehingga memerlukan waktu tempuh yang agak jauh atau sedang.
3	Jauh (≥ 2 km)	0	0	Anak-anak tidak akan ke sekolah dengan jarak yang agak jauh karena dipengaruhi oleh waktu tempuh
	Jumlah	74	100	

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa pendapat masyarakat pengungsi mengenai jarak tempat relokasi ke daerah pendidikan adalah dekat dengan jumlah prosentase sebesar 57% (42 orang) dan yang menyatakan jaraknya sedang adalah sebesar 43% orang (32%). dan sisanya tidak ada yang menginginkka jarak tempat tempat relokasi daerah pendidikan adalah jaraknya jauh karena akses yang lama.Masyarakat yang berpendapat bahwa jarak tempat relokasi ke daerah pendidikan adalah dekat dengan jarak (500m-1km km). umumnya adalah sehingga dekat dengan tempat relokasi anak-anak yang bersekolah pada SD SMP. atau SMA yang berada di tengah kota.

Grafik 3.5
Aspirasi Jarak Tempat Relokasi
Ke Daerah Pendidikan

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Tabel 3.8
Skor Jarak Relokasi ke Daerah Pendidikan

No	Lokasi	%	Bobot	Skor
1	Jauh	0	1	0
2	Sedang	43	2	86
3	Dekat	57	3	171

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Masyarakat yang berpendapat bahwa jarak tempat relokasi ke tempat kerja adalah sedang dengan jarak Sedang (1km- 2km) adalah umumnya anak-anak yang bersekolah agak jauh dari tengah kota, sehingga memerlukan waktu tempuh yang agak jauh atau sedang. Anak-anak tidak akan bersekolah dengan jarak yang agak jauh karena dipengaruhi oleh waktu tempuh.

Untuk analisa aspirasi masyarakat mengenai jarak tempat relokasi ke daerah pendidikan juga sama seperti analisa sebelumnya yang menggunakan daerah terdekat sebagai bobot yang tertinggi, dimana masyarakat pengungsi yang ada memang menginginkan jarak ke daerah pendidikan yang relatif dekat, hal ini untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan mengajar dan belajar.

3.2.2.4 Analisa Aspirasi Masyarakat mengenai Jarak Tempat Relokasi ke Tempat Peribadatan

Untuk jarak tempat relokasi ke daerah peribadatan dapat diketahui adalah dekat karena beribadah merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi masyarakat, jadi di tempat relokasi haruslah disediakan tempat peribadatan. Untuk lebih jelas

Grafik 3.5
Aspirasi Jarak Tempat Relokasi
Ke Daerah Pendidikan

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Tabel 3.8
Skor Jarak Relokasi ke Daerah Pendidikan

No	Lokasi	%	Bobot	Skor
1	Jauh	0	1	0
2	Sedang	43	2	86
3	Dekat	57	3	171

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Masyarakat yang berpendapat bahwa jarak tempat relokasi ke tempat kerja adalah sedang dengan jarak Sedang (1km- 2km) adalah umumnya anak-anak yang bersekolah agak jauh dari tengah kota. sehingga memerlukan waktu tempuh yang agak jauh atau sedang. Anak-anak tidak akan bersekolah dengan jarak yang agak jauh karena dipengaruhi oleh waktu tempuh.

Untuk analisa aspirasi masyarakat mengenai jarak tempat relokasi ke daerah pendidikan juga sama seperti analisa sebelumnya yang menggunakan daerah terdekat sebagai bobot yang tertinggi. dimana masyarakat pengungsi yang ada memang menginginkan jarak ke daerah pendidikan yang relatif dekat. hal ini untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan mengajar dan belajar.

3.2.2.4 Analisa Aspirasi Masyarakat mengenai Jarak Tempat Relokasi ke Tempat Peribadatan

Untuk jarak tempat relokasi ke daerah peribadatan dapat dikerahui adalah dekat karena beribadah merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi masyarakat. jadi di tempat relokasi haruslah disediakan tempat peribadatan. Untuk lebih jelas

mengenai pendapat masyarakat tentang jarak ke tempat peribdatan dapat dilihat pada tabel 3.9 di bawah ini.

Tabel 3.9
Aspirasi Jarak Tempat Relokasi Dengan Tempat Peribadatan

No	Aspirasi Jarak tempat relokasi dengan daerah peribadatan	Jumlah	Prosentase (%)	Keterangan
1	Dekat (500 m- 1 km)	38	52	Masyarakat yang berpendapat bahwa jarak tempat relokasi ke daerah peribadatan adalah dekat dengan jarak (500m-1km), karena umumnya masyarakat ingin melaksanakan ibadah, dengan jarak yang cepat di jangkau sehingga waktunya untuk beribadah tidak habis di perjalanan
2	Sedang (1km-2km)	21	29	Masyarakat yang berpendapat bahwa jarak tempat relokasi ke tempat kerja adalah sedang dengan jarak Sedang (1km-2km) adalah masyarakat yang terbiasa melakukan ibadah di masjid atau di gereja yang sudah biasa di datanginya.
3	Tidak ada jarak	15	20	Biasanya masyarakat yang melakukan ibadah tanpa ada jarak atau waktu tempuh yang raltif jauh adalah masyarakat yang sudah agak tua, dan tidak mampu berjalan jauh lagi
Jumlah		74	100	

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat yang menginginkan jarak tempat relokasi dekat dengan daerah peribadatan adalah sekitar 51% (38 orang), prosentase yang menyatakan jaraknya sedang adalah sekitar 29% (21 orang), yang menyatakan tidak ada jarak adalah sebesar 20% (15 orang) dan tidak ada yang menyatakan jaraknya jauh.

Grafik 3.6
Aspirasi Jarak Tempat Relokasi
Ke Daerah Peribadatan

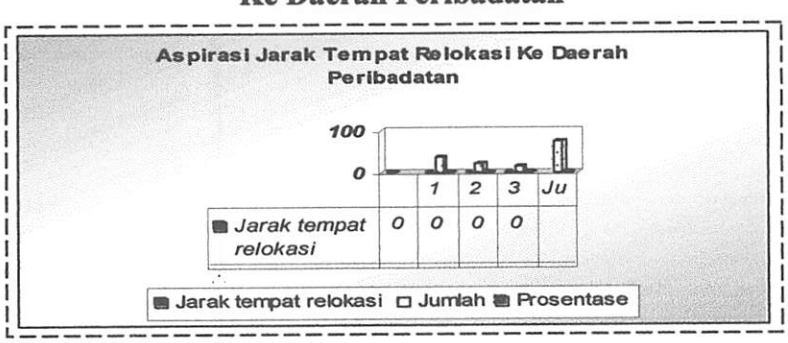

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Sumber: Hasil analisa, 2005

Ke Darat Terinduksi
Aspirasi tarak Tembat Kolaksi
Gambar 3.6

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa masyarakat yang mengingingkan tarak tembat kolaksi dekat dengan daerah berpasirnya adalah sekitar 21% (38 orang), prosentase yang mengatakan tarikulit sedang adalah sekitar 50% (51 orang), yang mengatakan tidak ada tarak adalah sebesar 30% (12 orang) dan tidak ada yang mengatakan lainnya lagi.

Tabel 3.6
Aspirasi tarak Tembat Kolaksi terhadap Tembat Terinduksi

No	Aspirasi tarak tembat kolaksi dengan daerah berpasirnya	Jumlah	Prosentase (%)	Keterangan
1	Dekat (200 m- 1 km)	38	21	Masyarakat yang berpendapat bahwa tarak tembat kolaksi ke tembat berpasirnya dekat dengan tembat tarikulit, karena tarak yang cepat di inseksi, dengan kualitas sepadan walaupun tarak yang berada di tempat berpasir tidak, hanya di beri sedikit
2	Tidak ada tarak	12	30	Masyarakat yang tidak mengingikan tembat terinduksi karena tidak ada tarak dan tembat tarikulit lebih cepat, dan masyarakat yang sudah lama tinggal di tempat tersebut
3	Sedang (1km-5km)	51	50	Masyarakat yang berpendapat bahwa tarak tembat kolaksi ke tembat kedua sedang berada tarak Sedang (1km-5km) selain masyarakat yang berpendapat bahwa tarak tembat kolaksi ke tembat kedua sedang berada tarak Sedang (1km-5km) selain masyarakat yang berpendapat bahwa
Jumlah		101	100	

Sumber: Hasil analisa, 2005

Tabel 3.10
Skor Jarak Relokasi ke Daerah Peribadatan

No	Lokasi	%	Bobot	Skor
1	Jauh	0	1	0
2	Sedang	29	2	58
3	Dekat	52	3	156
4	Tidak ada jarak	20	4	80

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Untuk analisa aspirasi masyarakat mengenai jarak relokasi ke tempat peribadatan, masyarakat yang berpendapat bahwa jarak tempat relokasi ke daerah peribadatan adalah dekat dengan jarak (500m-1km), karena umumnya masyarakat ingin melaksanakan ibadah, dengan jarak yang cepat di jangkau sehingga waktunya untuk beribadah tidak habis di perjalanan. Masyarakat yang berpendapat bahwa jarak tempat relokasi ke tempat kerja adalah sedang dengan jarak Sedang (1km-2km) adalah masyarakat yang terbiasa melakukan ibadah di masjid atau di gereja itu. Biasanya masyarakat yang melakukan ibadah tanpa ada jarak atau waktu tempuh yang relatif jauh adalah masyarakat yang sudah agak tua, dan tidak mampu berjalan jauh lagi. Karena waktu untuk beribadah relatif singkat sehingga membutuhkan jarak yang agak dekat.

3.2.2.5 Analisa Aspirasi Masyarakat mengenai Jarak Tempat Relokasi Dengan Fasilitas Kesehatan

Salah satu tujuan pembangunan kesehatan adalah menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau. Untuk itu dalam sebuah pembangunan perumahan jarak yang di tempuh untuk ke daerah kesehatan juga relatif harus memperhatikan jarak, untuk mempermudah masyarakat yang ingin berobat ke dokter atau puskesmas terdekat. Untuk lebih jelasnya mengenai aspirasi masyarakat tentang jarak relokasi ke daerah kesehatan dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut ini.

Tabel 3.10
Skor Tanah Kolonasi ke Dasar Pertapadan
Sumber: Hasil Analisa 2006

No	Lokasi	df	Bobot	Skor
1	Utara	0	1	0
2	Selatan	95	5	95
3	Barat	45	3	135
4	Tidak ada lereng	50	1	50

Untuk analisa sebaran sedimen tanah kolonasi ke tambat pertapadan. sedimen yang terbawa pelimpah tanah tambat kolonasi ke dasar pertapadan adalah dalam (200m-1km). karena minimum sedimen ingin mengalami pengendapan. dengan tanah yang cepat di lengkapi sehingga waktunya untuk pertapadan tidak lama di pertahankan. Analisa pelimpah tanah Sedang (1km-5km) adalah sedimen yang terpisah mengalami pengendapan. transit atau di pergi ini. Disamping sedimen yang mengalami pengendapan tanah atau waktu tambat yang tetapi lama adalah sedimen yang sudah sangat lama dan tidak mampu pertapadan lama lagi. Karena waktu untuk pertapadan tetapi singkat sehingga mempunyai tanah yang agak dekat.

3.5.5.2 Analisa Sebaran Sedimen mengenai tanah Tambat Kolonasi

Dengan Fasilitas Kesepatan

Salah satu upaya pengendapan kesepatan adalah menyediakan pelepasan kesepatan yang pertama. mereka dan terlengkap. Untuk ini dalam sepadan pengendapan pertapadan tanah yang di tambah untuk ke dasar kesepatan lagi tetapi pasir mempengaruhi tanah. untuk mempertahankan sedimen yang ingin perapat ke dalam alat Lapisannya terdekat. Untuk lapis lapisnya mengenai sebaiknya terdekat dasar dilihat bapa tabel 3.11 perikut ini.

Tabel 3.11
Aspirasi Jarak Tempat Relokasi Dengan Fasilitas Kesehatan

No	Aspirasi Jarak tempat relokasi dengan daerah Fasilitas Kesehatan	Jumlah	Prosentase (%)	Keterangan
1	Dekat (500 m- 1 km)	45	61	Masyarakat menginginkan jarak relokasi ke fasilitas kesehatan adalah dekat dengan jarak (500m-1km), umumnya adalah masyarakat yang mau melakukan pengobatan di rumah sakit atau puskesmas sehingga menginginkan jarak tempuh yang relatif dekat.
2	Sedang (1km-2km)	29	39	Adapun tingkat pemilihan jarak yang jauh, karena berdasarkan letak tempat kerja masyarakat, yang memang sebagian bekerja pada puskesmas yang letaknya memang agak jauh dari tempat relokasi.
3	Jauh (≥ 2 Km)	0	0	Sedangkan untuk jarak tempuh yang jauh, masyarakat pada dasarnya tidak menginginkan jarak yang jauh, karena faktor biaya yang harus dikeluarkan untuk ongkos
		74	100	

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat yang menginginkan jarak tempat relokasi dekat dengan fasilitas kesehatan adalah sekitar 61% (45 orang), yang menyatakan jaraknya sedang adalah sekitar 39% (29 orang), dan tidak ada yang memilih jaraknya jauh.

Grafik 3.7
Aspirasi Jarak Tempat Relokasi
Dengan Fasilitas Kesehatan

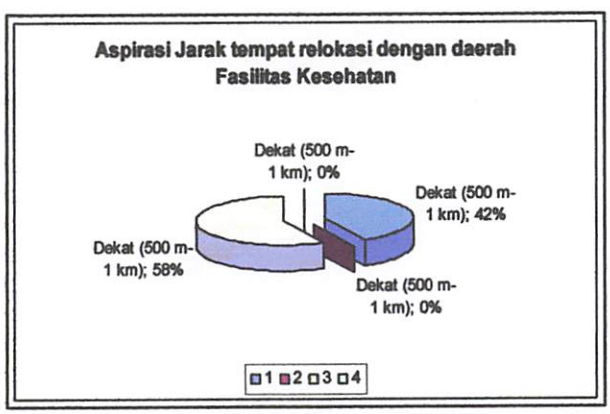

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Tabel 3.11
Aspirasi Jarak Tempat Relokasi Dengan Fasilitas Kesehatan

No	Aspirasi jarak tempat relokasi dengan dekat Fasilitas Kesehatan	Jumlah	Prosentase (%)	Keterangan
1	Dekat (500 m- 1 km)	45	61	Masyarakat menginginkan jarak relokasi ke fasilitas kesehatan adalah dekat dengan jarak (500m-1km). umumnya adalah masyarakat yang mau melakukan pengobatan di rumah sakit atau puskesmas sehingga menginginkan jarak tempuh yang relatif dekat
2	Sedang (1km-2km)	29	39	Adapun ingkat pemilihan jarak yang jauh, karena berdasarkan letak tempat kerja masyarakat, yang memang sebagian bekerja pada pusat-pusat yang letaknya memang agak jauh dan tempat relokasi.
3	Jauh (≥ 2 km)	0	0	Sedangkan untuk jarak tempuh yang jauh, masyarakat pada dasarnya tidak menginginkan jarak yang jauh. karena faktor biaya yang harus dikeluarkan untuk ongkos
		74	100	

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat yang menginginkan jarak tempat relokasi dekat dengan fasilitas kesehatan adalah sekitar 61% (45 orang). yang menyatakan jaraknya sedang adalah sekitar 39% (29 orang). dan tidak ada yang memilih jaraknya jauh.

Grafik 3.7
Aspirasi Jarak Tempat Relokasi
Dengan Fasilitas Kesehatan

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Tabel 3.12
Skor Jarak Relokasi Dengan Fasilitas Kesehatan

No	Lokasi	%	Bobot	Skor
1	Jauh	0	1	0
2	Sedang	39	2	116
3	Dekat	61	3	183

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Berdasarkan hasil pembobotan di atas, masyarakat menginginkan jarak relokasi ke fasilitas kesehatan adalah dekat dengan skor tertinggi, masyarakat yang memilih jaraknya relatif dekat umumnya adalah masyarakat yang mau melakukan pengobatan di rumah sakit atau puskesmas sehingga menginginkan jarak tempuh yang relatif dekat. Adapun tingkat pemilihan jarak yang jauh, karena berdasarkan letak tempat kerja masyarakat, yang memang sebagian bekerja pada puskesmas yang letaknya memang agak jauh dari tempat relokasi. Sedangkan untuk jarak tempuh yang jauh, masyarakat pada dasarnya tidak menginginkan jarak yang jauh, karena faktor biaya yang harus dikeluarkan untuk ongkos.

3.2.2.6 Analisa Aspirasi Masyarakat mengenai Jarak Tempat Relokasi ke Daerah Perdagangan Dan Jasa

Jarak ke daerah perdagangan dan jasa haruslah dekat, karena masyarakat setiap harinya akan melakukan perjalanan ke daerah perdagangan dan jasa untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari sehingga membutuhkan akses yang mudah dijangkau. Untuk lebih jelasnya mengenai jarak tempat relokasi ke daerah perdagangan dan jasa dapat dilihat pada tabel 3.13 di bawah ini.

Tabel 3.12
Skor Jarak Kelokasi Dengan Fasilitas Kesehatan

No	Lokasi	%	Bobot	Skor
1	Jauh	0	1	0
2	Sedang	0	2	116
3	Dekat	67	3	183

Sumber: Hasil Analisa, 2019

Berdasarkan hasil pembobotan di atas, masyarakat mengingikan jarak relokasi ke fasilitas kesehatan adalah dekat dengan skor tertinggi. masyarakat yang memilih jaraknya relatif dekat umumnya adalah masyarakat yang mau melakukan pengobatan di rumah sakit atau puskesmas sehingga mengingikan jarak tempuh yang relatif dekat. Adapun tingkat pemilihan jarak yang jauh, karena berdasarkan letak tempat kerja masyarakat, yang memang sebagian bekerja pada puskesmas yang letaknya memang agak jauh dari tempat relokasi. Sedangkan untuk jarak tempuh yang jauh, masyarakat pada dasarnya tidak mengingikan jarak yang jauh, karena faktor biaya yang harus dikeluarkan untuk ongkos.

3.2.2.6 Analisa Aspirasi Masyarakat mengenai Jarak Tempat Relokasi ke Daerah Perdagangan Dan Jasa

Jarak ke daerah perdagangan dan jasa harusah dekat. karena masyarakat setiap harinya akan melakukan perjalanan ke daerah perdagangan dan jasa untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari sehingga membutuhkan akses yang mudah dijangkau. Untuk lebih jelasnya mengenai jarak tempat relokasi ke daerah perdagangan dan jasa dapat dilihat pada tabel 3.13 di bawah ini.

Tabel 3.13
Aspirasi Jarak Tempat Relokasi Ke Daerah Perdagangan dan Jasa

No	Jarak tempat relokasi dengan daerah perdagangan dan jasa	Jumlah	Prosentase (%)	Keterangan
1	Dekat (500 m- 1 km)	41	55	Masyarakat yang berpendapat bahwa jarak tempat relokasi ke daerah perdagangan dan jasa adalah dekat dengan jarak(500m-1km), umumnya adalah masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang yang berjualan di pasar, dimana lokasi pasarnya berada di tengah kota
2	Sedang (1km-2km)	33	45	Masyarakat yang berpendapat bahwa jarak adalah sedang dengan jarak (1km-2km), adalah umumnya masyarakat yang bekerja sebagai pedagang keliling, yang menjajakan barang dagangannya kepada langganan-langganan tetap
3	Jauh (≥ 2 Km)	0	0	Sedangkan untuk jarak tempuh yang jauh, masyarakat pada dasarnya tidak menginginkan jarak yang jauh, karena faktor biaya yang harus dikeluarkan untuk ongkos.
Jumlah		74	100	

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat menginginkan jarak tempat relokasi ke daerah perdagangan dan jasa adalah dekat dengan jumlah prosentase sebesar 55% (41 orang), dan yang menyatakan jaraknya sedang adalah sebesar 45% (33 orang) dan tidak ada yang menginginkan jarak ke daerah perdagangan dan jasa adalah jauh.

Grafik 3.8
Aspirasi Jarak Tempat Relokasi ke Daerah Perdagangan dan Jasa

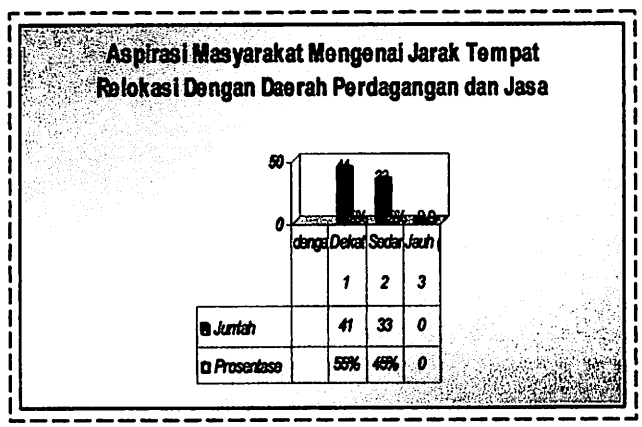

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Tabel 3.13
Aspirasi Jarak Tempat Relokasi Ke Daerah Perdagangan dan Jasa

No	Jarak tempat relokasi dengan daerah perdagangan dan jasa	Jumlah	Prosentase (%)	Keterangan
1	Dekat (500 m- 1 km)	41	55	Responden yang berpendapat bahwa jarak tempat relokasi ke daerah perdagangan dan jasa adalah dekat dengan jarak(500m-1km), umumnya adalah masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang yang berjualan di pasar, dimana lokasi tersebut berada di tengah kota
2	Sedang (1km-2km)	33	45	Masyarakat yang berpendapat bahwa jarak adalah sedang dengan jarak (1km-2km) antara umumnya masyarakat yang berada sebagai pedagang kelilling yang mengakses barang dagangannya kepada pedagang-pedagang lainnya/toko
3	Jauh (≥ 2 km)	0	0	Sedangkan untuk jarak tempat yang jauh, responden pada dasarnya tidak mempunyai jarak yang jauh karena faktor utama yang harus dikedepankan untuk pedagang
Jumlah		74	100	

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa masyarakat mengingnkan jarak tempat relokasi ke daerah perdagangan dan jasa adalah dekat dengan jumlah prosentase sebesar 55% (41 orang), dan yang menyatakan jaraknya sedang adalah sebesar 45% (33 orang) dan tidak ada yang mengingnkan jarak ke daerah perdagangan dan jasa adalah jauh.

Grafik 3.8
Aspirasi Jarak Tempat Relokasi ke
Daerah Perdagangan dan Jasa

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Tabel 3.14
Skor Jarak Relokasi Dengan
Daerah Perdagangan dan Jasa

No	Lokasi	%	Bobot	Skor
1	Jauh	0	1	0
2	Sedang	45	2	90
3	Dekat	55	3	165

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Untuk analisa aspirasi mengenai jarak relokasi ke daerah perdagangan dan jasa jarak yang dibutuhkan adalah relatif dekat dengan skor tertinggi karena dalam bidang perdagangan dan jasa sangat diperlukan modal untuk barang dagangannya, sehingga jika masyarakat mengeluarkan biaya yang relatif mahal untuk ongkos, maka barang dagangannya akan semakin mahal dan akan sulit untuk mendapatkan pembeli, karena rata-rata konsumen menginginkan harga yang relatif murah di pasaran.

Berdasarkan hasil analisa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat menginginkan lokasi relokasi permukiman yang baru mempunyai akses yang dekat ke pusat-pusat sarana sehingga kebutuhan masyarakat akan sarana lingkungan dapat terpenuhi terutama pada awal-awal menempat relokasi permukiman tersebut.

3.2.3 Analisa Ekonomi Masyarakat

Analisa ekonomi masyarakat terdiri dari analisa mata pencaharian masyarakat serta analisa kemampuan masyarakat dengan menggunakan statistik deskriptif dari hasil kuisioner.

3.2.3.1 Analisa Mata Pencaharian Masyarakat

Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh konflik sosial yang terjadi adalah pengangguran atau kehilangan pekerjaan pada masa persaingan sekarang ini. Oleh karena itu analisa ini di pakai untuk mengetahui mata pencaharian serta tingkat pendapatan masyarakat pasca kerusuhan yang terjadi.

Tabel 3.1.4
Skor Jarak Relokasi Dengan
Dimensi Perdagangan dan Jasa

No	Lokasi	%	Faktor	Skor
1	Jauh	0	1	0
2	Sedang	45	2	90
3	Dekat	55	3	165

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Untuk analisa aspirasi mengenai jarak relokasi ke daerah perdagangan dan jasa jarak yang dikatakan adalah relatif dekat dengan skor tertinggi karena dalam bidang perdagangan dan jasa sangat diperlukan modal untuk barang dagangannya, sehingga jika masyarakat mengeluarkan biaya yang relatif mahal untuk ongkos, maka barang dagangannya akan semakin mahal dan akan sulit untuk mendapatkan pembeli. karena rata-rata konsumen menginginkan barga yang relatif murah di pasaran.

Berdasarkan hasil analisa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat mengingnkan lokasi relokasi permukiman yang baru mempunyai akses yang dekat ke pusat-pusat sarana sehingga kebutuhan masyarakat akan sarana lingkungan dapat terpenuhi terutama pada awal-awal mengenai relokasi permukiman tersebut.

3.2.3 Analisa Ekonomi Masyarakat

Analisa ekonomi masyarakat terdiri dari analisa mata pencaharian masyarakat serta analisa kemampuan masyarakat dengan menggunakan statistik deskriptif dari hasil kuisioner.

3.2.3.1 Analisa Mata Pencaharian Masyarakat

Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh konflik sosial yang terjadi adalah pengangguran atau kehilangan pekerjaan pada masa persaingan sekarang ini. Oleh karena itu analisa ini di pakai untuk mengetahui mata pencaharian serta tingkat pendapatan masyarakat pasca kerusuhan yang terjadi.

Masyarakat pengungsi yang ada umumnya bekerja pada sektor formal. Dimana, mata pencaharian yang paling dominan oleh masyarakat disini adalah yang bekerja sebagai PNS, sedangkan sisanya adalah yang masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebagai ABRI/(Polri), Pedagang, Nelayan, Guru, dll. Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian masyarakat dapat dilihat pada tabel 3.15 di bawah ini.

Tabel 3.15

Analisa Mata Pencaharian Masyarakat

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase (%)	Kesimpulan
1	PNS	26	35	Mata pencaharian masyarakat terbanyak bergerak di bidang pemerintahan seperti pns dan abri, dan sisanya adalah pedagang, nelayan dan guru. Pada saat kerusuhan dampak ekonomi yang sangat dirasakan adalah masyarakat harus kehilangan pekerjaannya, bagi yang bekerja di luar sektor formal, karena faktor faktor keamanan yang ditimbulkan sehingga masyarakat harus mencari tempat yang lebih aman untuk memulai usaha perekonomian dari awal lagi.
2	ABRI	19	26	
3	Pedagang	7	9	
4	Nelayan	13	18	
5	Guru	9	12	
6	Lain-lain	0	0	
Jumlah		74	100	

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat pengungsi mempunyai pekerjaan di sektor formal (61%) dengan penghasilan tetap tiap bulannya. Dimana masyarakat pengungsi pada umumnya bekerja sebagai PNS dan ABRI karena merupakan pekerjaan tetap, sehingga kerusuhan yang terjadi tidak berdampak pada masyarakat yang memiliki pekerjaan tetap. Tetapi, kerusuhan yang terjadi sangat berdampak pada masyarakat yang bekerja pada sektor informal dikarenakan mata pencahariannya hilang akibat kerusuhan yang terjadi dan juga karena mereka pindah ke tempat yang baru sehingga harus mencari pekerjaan yang lain.

Masyarakat pengungsi yang ada umumnya bekerja pada sektor formal. Dimana, mata pencaharian yang paling dominan oleh masyarakat disini adalah yang bekerja sebagai PNS, sedangkan sisanya adalah yang masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebagai ABRI/Polri), Pedagang, Nelayan, Guru, dll. Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian masyarakat dapat dilihat pada tabel 3.15 di bawah ini.

Tabel 3.15

Analisa Mata Pencaharian Masyarakat

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase (%)	Keterangan
1	PNS	25	25	Mata pencaharian masyarakat terbanyak
2	ABRI	10	25	Pengerti di dalam pemerintahan seperti pns
3	Pedagang	6		dan di dalam sisanya adalah pedagang
4	Nelayan	10		pekerjaan lain guru
5	Guru	6	12	Pada saat pendudukan jumlah ekonomi yang
6	Lain-lain	6	0	sangat diasakan adalah masyarakat harus
				kehilangan pekerjaannya, hal yang terjadi
				di luar faktor formal. Faktor faktor
				kemiskinan yang ada
				masyarakat harus mencari tempat yang lebih
				aman untuk mencukupi kebutuhan
				dan lain lain
	Jumlah	64	100	

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Dari tabel diatas, dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat pengungsi mempunyai pekerjaan di sektor formal (61%) dengan pengkasilan tetap tiap bulannya. Dimana masyarakat pengungsi pada umumnya bekerja sebagai PNS dan ABRI karena mempunyai pekerjaan tetap, sehingga kemudahan yang terjadi tidak berdampak pada masyarakat yang memiliki pekerjaan tetap. Tetapi, kemudahan yang terjadi sangat berdampak pada masyarakat yang bekerja pada sektor informal dikarenakan mata pencaharianya hilang akibat kemudahan yang terjadi dan juga karena mereka pindah ke tempat yang lain sehingga harus mencari pekerjaan yang lain.

Grafik 3.9
Analisa Mata Pencaharian Masyarakat

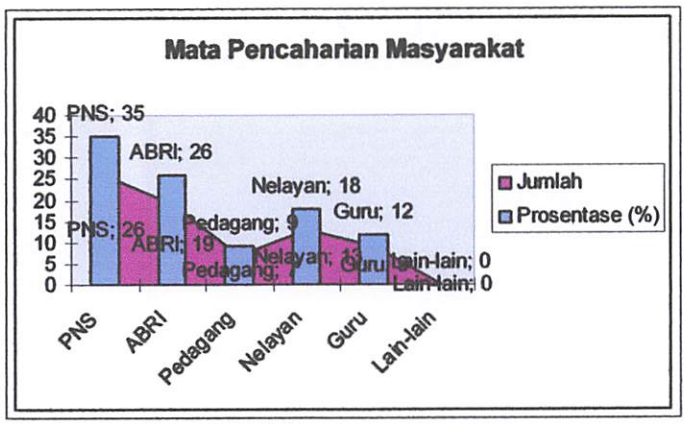

Sumber: Hasil Analisa, 2009

3.2.3.2 Analisa Kemampuan Masyarakat

1. Analisa Tingkat Pendapatan

Kriteria tingkat pendapatan yang dimaksudkan disini yaitu menyangkut penghasilan rata-rata yang diterima penduduk dalam sebulan khususnya penduduk yang telah bekerja di tempat penampungan. Kriteria tersebut dianggap sebagai penentu faktor keterikatan, terlebih lagi apabila tingkat pendapatan yang mereka terima menjadi meningkat karena mereka tinggal di kawasan tersebut. Keadaan ini yang menyebabkan penduduk merasa terikat untuk tinggal di lingkungan yang memberikan sumber kehidupan bagi mereka. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.16 di bawah ini.

Tabel 3.16
Analisa Tingkat Pendapatan Masyarakat

No	Pendapatan(Rupiah)	Jumlah	Prosentase (%)	Kesimpulan
1	100.000-500.000	12	16	Pendapatan terbesar adalah masyarakat yang umumnya bekerja sebagai pedagang, dan disusul oleh masyarakat yang bekerja di sektor formal seperti PNS dan ABRI/TNI(Polri) yang memiliki penghasilan tetap setiap bulan, sedangkan masyarakat lainnya masih di bawah standar pendapatan, hal ini di karenakan karena beberapa faktor seperti petani yang tergantung dari hasil panen dan buruh yang pekerjaannya tergantung kapal yang masuk ke daerah namlea.
2	500.000-1.000.000	21	28	
3	1.000.000 – 1.500.000	26	35	
4	>1.500.000	15	20	
Jumlah		74	100	

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Grafik 3.9
Analisa Mata Pencaharian Masyarakat

Sumber: Hasil Analisa, 2009

3.2.3.2 Analisa Kemampuan Masyarakat

1. Analisa Tingkat Pendapatan

Kriteria tingkat pendapatan yang dimaksudkan disini yaitu menyangkut penghasilan rata-rata yang diterima penduduk dalam sebulan khususnya penduduk yang telah bekerja di tempat penambangan. Kriteria tersebut dianggap sebagai penentu faktor keterikatan, terlebih lagi apabila tingkat pendapatan yang mereka terima menjadi menimbulkan kurang mereka tinggal di kawasan tersebut. Keadaan ini yang menyebabkan penduduk merasa terikat untuk tinggal di lingkungan yang membentuk sumber kehidupan bagi mereka. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.16 di bawah ini.

Tabel 3.16
Analisa Tingkat Pendapatan Masyarakat

No	Pendapatan(Rupiah)	Jumlah	Prosentase (%)	Kesimpulan
1	100.000-500.000	12	16	Pendapatan terbesar adalah masyarakat yang umumnya
2	500.000-1.000.000	21	28	bekerja sebagai pedagang, dan disusul oleh masyarakat
3	1.000.000 – 1.500.000	26	35	yang bekerja di sektor formal seperti PNS dan ABRI/TNI(Polri) yang memiliki penghasilan
4	>1.500.000	15	20	tetap setiap bulan. sedangkan masyarakat lainnya masih di bawah standar pendapatan. Hal ini di karenakan karena beberapa faktor seperti petani yang tergantung dari hasil panen dan buruh yang pekerjaannya tergantung kepada yang masuk ke daerah tambang
	Jumlah	74	100	

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Grafik 3.10
Analisa Tingkat Pendapatan Masyarakat Pengungsi

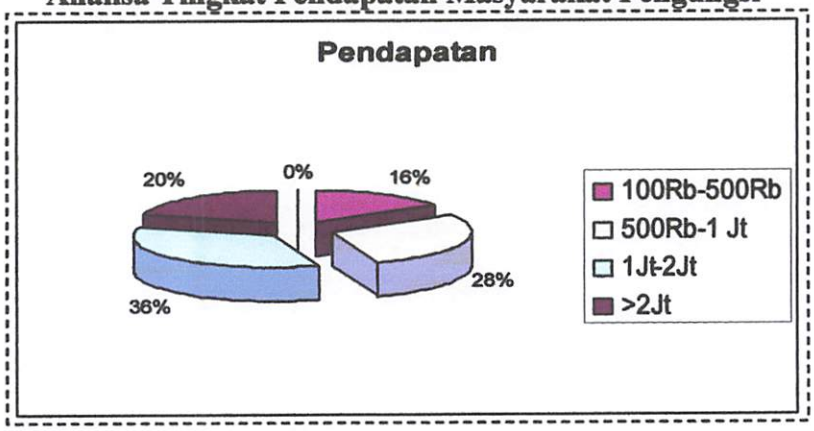

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Dari data diatas, diketahui bahwa sebanyak 47 orang (63%) berpenghasilan sedang, sebanyak 15 orang (20%) berpenghasilan tinngi, dan sebanyak 12 orang (16%) berpenghasilan rendah. Dimana masyarakat yang berpenghasilan sedang umumnya bermata pencaharian sebagai PNS atau sebagian besar bekerja di sektor formal.

Mayoritas mata pencaharian masyarakat pengungsi adalah PNS dan mempunyai tingkat pendapatan sebesar Rp.1.000.000- Rp.1.500.000 dan mempunyai tingkat pendapatan yang terbesar. Sedangkan sisanya mempunyai tingkat pendapatan antara Rp.500.000 – Rp.1.000.000,. dan tingkat pendapatan antara > Rp.1.500.000,.

Penilaian terhadap tingkat pendapatan di permukiman baru, dimana jika jumlah pendapatan masyarakat per bulan besar maka tingkat pertumbuhan atau perkembangan daerah relokasi akan semakin cepat, begitu pula sebaliknya jika pendapatan masyarakat perbulan relatif kecil maka tingkat pertumbuhan atau perkembangan daerah relokasi akan semakin lambat. Dan hal ini berpengaruh terhadap perkembangan kota itu sendiri.

2. Kriteria Tingkat Pengeluaran

Selain tingkat pendapatan, kriteria pengaluaran juga dijadikan sebagai salah satu penentu terhadap faktor keterikatan tersebut. Karena dengan diketahinya jumlah pengeluaran penduduk di tempat penampungan dalam

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Dari data diatas, diketahui bahwa sebanyak 47 orang (63%) berpenghasilan sedang, sebanyak 15 orang (20%) berpenghasilan tinggi, dan sebanyak 12 orang (16%) berpenghasilan rendah. Dimana masyarakat yang berpenghasilan sedang umumnya bermata pencaharian sebagai PNS atau sebagian besar bekerja di sektor formal.

Mayoritas mata pencaharian masyarakat pengungsi adalah PNS dan mempunyai tingkat pendapatan sebesar Rp.1.000.000- Rp.1.500.000 dan mempunyai tingkat pendapatan yang terbesar. Sedangkan sisanya mempunyai tingkat pendapatan antara Rp.500.000 – Rp.1.000.000.. dan tingkat pendapatan antara > Rp.1.500.000..

Penilaian terhadap tingkat pendapatan di permukiman baru, dimana jika jumlah pendapatan masyarakat per bulan besar maka tingkat perumbuhan atau perkembangan daerah relokasi akan semakin cepat. begitu pula sebaliknya jika pendapatan masyarakat perbulan relatif kecil maka tingkat perumbuhan atau perkembangan daerah relokasi akan semakin lambat. Dan hal ini berpengaruh terhadap perkembangan kota itu sendiri.

2. Kriteria Tingkat Pengelauaran

Salain tingkat pendapatan, kriteria pengaluaran juga dijadikan sebagai salah satu penentu terhadap faktor keterikatan tersebut. Karena dengan diketahuinya jumlah pengeluaran penduduk di tempat permukiman dalam

sebulan, paling tidak dapat memberikan petunjuk bahwa untuk tinggal di tempat pengungsian pada dasarnya memerlukan pertimbangan-pertimbangan. Semakin besar jumlah pengeluaran dalam sebulan, semakin menunjukkan tingkan keterikatan dengan tempat pengungsian sangat rendah sehingga mereka mau dipindahkan ke lokasi yang baru.

Untuk lebih jelasnya mengenai penjelasan tentang tingkat pendapatan masyarakat dapat dilihat pada tabel 3.17 di bawah ini.

Tabel 3.17
Tingkat Pengeluaran Masyarakat

No	Pengeluaran(Rupiah)	Jumlah	Prosentase (%)	Kesimpulan
1	100.000-500.000	11	15	Pengeluaran terbesar adalah masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang karena mencukupi kebutuhan dagangannya dan selanjutnya di susul oleh masyarakat yang bekerja di bidang formal untuk kebutuhan sehari-hari, pengeluaran masyarakat akan semakin besar jika harga barang pokok di pasaran melonjak naik sedangkan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, mereka menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
2	500.000-1.000.000	23	31	
3	1.000.000-1.500.000	27	36	
4	>1.500.000	13	17	
Jumlah		74	100	

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Grafik 3.11
Analisa Tingkat Pengeluaran Masyarakat Pengungsi

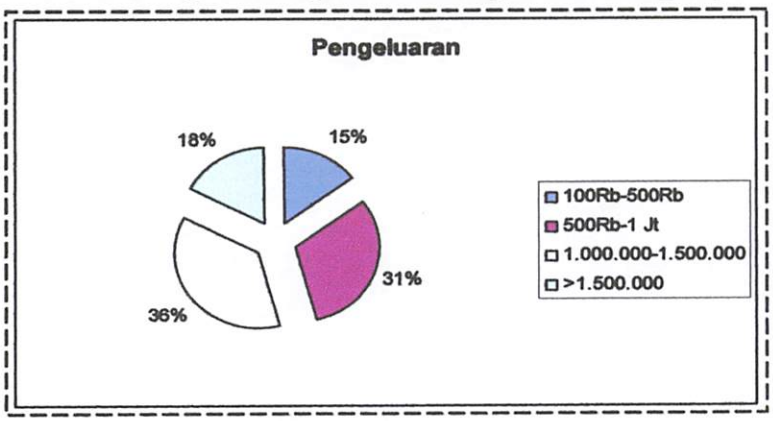

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Dari data diatas, diketahui bahwa sebanyak 50 orang (67%) mempunyai pengeluaran yang paling banyak tiap bulannya yaitu sekitar Rp.500.000 –

sebulan, paling tidak dapat memberikan petunjuk bahwa untuk tinggal di tempat pengungsian pada dasarnya memerlukan perlindungan-perlindungan. Semakin besar jumlah pengeluaran dalam sebulan, semakin menunjukkan tingkan keterikatan dengan tempat pengungsian sangat rendah sehingga mereka mau dipindahkan ke lokasi yang baru.

Untuk lebih jelasnya mengenai penjelasan tentang tingkat pendapatan masyarakat dapat dilihat pada tabel 3.17 di bawah ini.

Tabel 3.17

Tingkat Pengeluaran Masyarakat

No	Pengeluaran(Rupiah)	Jumlah	Prosentase (%)	Kesimpulan
1	100.000-500.000	11	15	Pengeluaran terbesar adalah masyarakat yang
2	500.000-1.000.000	23	31	berada pencalharan sebagai
3	1.000.000-1.500.000	27	36	pedagang karena menciukupi kebutuhan
4	>1.500.000	13	17	dagangannya dan selanjutnya di susul oleh
				masyarakat yang bekerja di bidang formal untul kebutuhan sehari-hari. pengeluaran masyarakat akan semakin besar jika harga barang pokok di pasaran melonjak naik sedangkan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, mereka menyesuaikan dengan kondisi yang ada
Jumlah		74	100	

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Grafik 3.11

Analisa Tingkat Pengeluaran Masyarakat Pengungsi

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Dari data diatas, diketahui bahwa sebanyak 50 orang (67%) menpunyai pengeluaran yang paling banyak tiap bulannya yaitu sekitar Rp.500.000 –

Dari data diatas, diketahui bahwa sebanyak 50 orang (67%) mempunyai pengeluaran yang paling banyak tiap bulannya yaitu sekitar Rp.500.000 – Rp.1.000.000, dan sekitan Rp.1,000.000-1.500.000, dan sebanyak 14 orang (32%) mempunyai pengeluaran yang sedikit tiap bulannya.

Mayoritas pengeluaran masyarakat tiap bulannya berkisar antara Rp. 500.000 – Rp.1.000.000, dimana masyarakat yang mempunyai pengeluaran sebesar ini adalah yang bermata pencaharian sebagai PNS, dan antara Rp.1.000.000 – Rp.2.000.000 yang didominasi oleh masyarakat yang bermata pencaharian sebagai ABRI/TNI (polri)dan PNS. Sedangkan sisanya mempunyai pengeluaran berkisar antara Rp. >2.000.000, dan Rp.100.000-500.000 setiap bulannya, yang didominasi oleh masyarakat yang bermata pencaharian sebagai PNS.

Penilaian terhadap tingkat pengeluaran di permukiman baru, dimana jika jumlah pangeluaran masyarakat per bulan besar maka tingkat pertumbuhan atau perkembangan daerah relokasi akan semakin lambat, begitu pula sebaliknya jika jumlah pengeluaran masyarakat perbulan relatif kecil maka tingkat pertumbuhan atau perkembangan daerah relokasi akan semakin cepat. Dan hal ini berpengaruh terhadap perkembangan kota itu sendiri.

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa, pasca kerusuhan yang terjadi, masyarakat mulai membangun kehidupan ekonominya secara perlahan-lahan dimana dari tabel di atas dapat dilihat rata-rata masyarakat berpenghasilan di atas 1juta begitupun pengeluarannya juga, karena di lokasi studi harga barang pokok sangat mahal sehingga pengeluaran masyarakat pun ikut meningkat.

3.2.4 Aspirasi Masyarakat Mengenai Ketersediaan Sarana Umum

Sarana umum merupakan kebutuhan yang penting dalam sebuah permukiman, karena aspek fasilitas merupakan sarana untuk masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebutuhan mereka. Adapun jenis sarana yang harus tersedia dalam sebuah pembangunan permukiman antara lain adalah:

- Sarana Perkantoran

Dari data diatas, diketahui bahwa sebanyak 50 orang (67%) mempunyai pengeluaran yang paling banyak tiap bulannya yaitu sekitar Rp.500.000 – Rp.1.000.000, dan sekitan Rp.1.000.000-1.500.000, dan sebanyak 14 orang (32%) mempunyai pengeluaran yang sedikit tiap bulannya.

Mayoritas pengeluaran masyarakat tiap bulannya berkisar antara Rp. 500.000 – Rp.1.000.000, dimana masyarakat yang mempunyai pengeluaran sebesar ini adalah yang bermata pencaharian sebagai PNS, dan antara Rp.1.000.000 – Rp.2.000.000 yang didominasi oleh masyarakat yang bermata pencaharian sebagai ABRI/TNI (polri)dan PNS. Sedangkan sisanya mempunyai pengeluaran berkisar antara Rp. >2.000.000, dan Rp.100.000-500.000 setiap bulannya. yang didominasi oleh masyarakat yang bermata pencaharian sebagai PNS.

Penilaian terhadap tingkat pengeluaran di permukiman baru, dimana jika jumlah pengeluaran masyarakat per bulan besar maka tingkat pertumbuhan atau perkembangan daerah relokasi akan semakin lambat, begitu pula sebaliknya jika jumlah pengeluaran masyarakat perbulan relatif kecil maka tingkat pertumbuhan atau perkembangan daerah relokasi akan semakin cepat. Dan hal ini berpengaruh terhadap perkembangan kota itu sendiri.

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa pasca kerusuhan yang terjadi, masyarakat mulai membangun kehidupan ekonominya secara perlahan-lahan dimana dari tabel di atas dapat dilihat rata-rata masyarakat berpenghasilan di atas 1juta begitupun pengeluarannya juga. karena di lokasi studi harga barang pokok sangat mahal sehingga pengeluaran masyarakat pun ikut meningkat.

3.2.4 Aspirasi Masyarakat Mengenai Ketersediaan Sarana Umum

Sarana umum merupakan kebutuhan yang penting dalam sebuah permukiman. karena aspek fasilitas merupakan sarana untuk masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebutuhan mereka. Adapun jenis sarana yang harus tersedia dalam sebuah pembangunan permukiman antara lain adalah:

- Sarana Perkantoran

- Sarana Pendidikan
- Sarana Peribadatan
- Sarana Kesehatan
- Sarana Perdagangan dan Jasa

Persyaratan Sarana lingkungan untuk permukiman adalah:

1. Setiap permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas pendidikan sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani.
2. Setiap permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani.
3. Setiap permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas perbelanjaan sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani.
4. Setiap permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas tempat peribadatan sesuai dengan agama yang dipeluk para penghuninya dan jumlah pemeluk dari masing-masing agama.

Kriteria tersebut diatas dipilih berdasarkan asumsi bahwa kriteria tersebut merupakan yang paling penting dalam pembangunan permukiman. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkt pemilihan aspirasi untuk ketersediaan sarana dan prasarana umum dapat dilihat pada tabel 3.18.

Tabel 3.18
Tingkat Pemilihan Aspirasi Masyarakat Mengenai Fasilitas Umum Yang Harus Tersedia di Tempat Relokasi

No	Sarana Umum	Jumlah	Prosentase (%)	Keterangan
1	Pendidikan	67	90	Sangat Tinggi
2	Perdagangan dan Jasa	71	95	Sangat Tinggi
3	Peribadatan	65	87	Tinggi
4	Kesehatan	68	91	Sangat Tinggi
4	Perkantoran	70	94	Sangat Tinggi

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Berdasarkan hasil analisa di atas, maka dapat diketahui bahwa masyarakat sangat menginginkan ketersediaan Sarana umum berupa ketersediaan sarana pendidikan, sarana peribadatan, serta sarana perdagangan dan jasa serta sarana perkantoran di tempat relokasi yang baru karena sesuai dangan kebutuhan dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pengungsi yang ada.

- Sarana Pendidikan
- Sarana Peribadatan
- Sarana Kesehatan
- Sarana Perdagangan dan Jasa

Persyaratan Sarana lingkungan untuk permukiman adalah:

1. Setiap permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas pendidikan sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani.
2. Setiap permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani.
3. Setiap permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas perbelanjaan sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani.
4. Setiap permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas tempat peribadatan sesuai dengan agama yang dipeluk para penghuninya dan jumlah penduduk dari masing-masing agama.

Kriteria tersebut diatas dipilih berdasarkan asumsi bahwa kriteria tersebut merupakan yang paling penting dalam pembangunan permukiman. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkt pemilihan aspirasi untuk kelengkapan sarana dan prasarana umum dapat dilihat pada tabel 3.18.

Tabel 3.18
Tingkat Pemilihan Aspirasi Masyarakat Mengenai
Fasilitas Umum Yang Harus Tersedia di Tempat Relokasi

No	Sarana Umum	Jumlah	Persentase (%)	Keterangan
1	Pendidikan	87	90	Sangat Tinggi
2	Perdagangan dan Jasa	71	99	Sangat Tinggi
3	Peribadatan	85	87	Tinggi
4	Kesehatan	88	91	Sangat Tinggi
4	Perkantoran	70	94	Sangat Tinggi

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Berdasarkan hasil analisa di atas, maka dapat diketahui bahwa masyarakat sangat menginginkan kelengkapan Sarana umum berupa kelengkapan sarana pendidikan, sarana peribadatan, serta sarana perdagangan dan jasa serta sarana perkantoran di tempat relokasi yang baru karena sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pengungsi yang ada.

Grafik 3.12
Analisa Aspirasi Masyarakat Mengenai Ketersediaan Sarana Umum

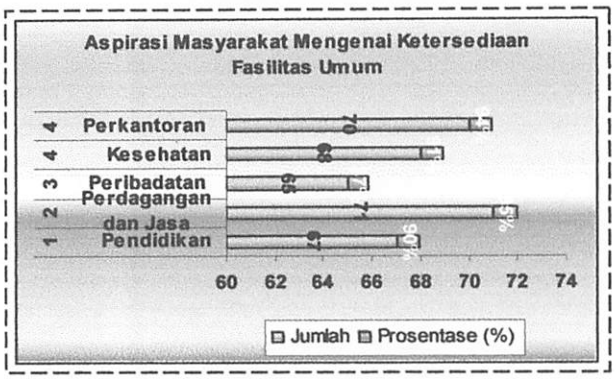

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk tingkat prosentase untuk ketersediaan fasilitas adalah tinggi dengan prosentase untuk ketersediaan sarana perdagangan dan jasa adalah sebesar 95% atau 71 orang karena pada umumnya masyarakat melakukan berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari, untuk sarana perkantoran sebesarr 94% atau 70 orang, dimana sebagian besar masyarakat memiliki pekerjaan tetap yang bekerja di bidang formal, untuk sarana pendidikan prosentasenya adalah sebesar 90% atau sebesar 67 orang, dimana fasilitas ini merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk masyarakat yang masih duduk di bangku sekolah untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, dan untuk sarana peribadatan prosentasenya adalah sebesar 87% atau sekitar 65 orang karena beribadah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi seorang manusia, untuk itu ketersediaan sarana peribadatan sangat penting di dalam sebuah permukiman. Dan juga yang paling penting adalah ketersediaan sarana kesehatan di tempat relokasi, dimana tingkat sapirasi masyarakat adalah sebesar 91% atau sekitar 61 orang karena sarana kesehatan sangatlah penting untuk melayani kesehatan masyarakat.

Aspirasi masyarakat mengenai ketersediaan sarana umum seperti sarana perdagangan dan jasa, sarana pendidikan, sarana perkantoran serta sarana peribadatan dan juga sarana kesehatan di tempat relokasi adalah sangat tinggi karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat menunjang kegiatan yang dilakukan masyarakat pengungsi sehari-harinya.

Grafik 3.12
Analisa Aspirasi Masyarakat Mengenai
Ketersediaan Sarana Umum

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk tingkat prosentase untuk ketersediaan fasilitas adalah tinggi dengan prosentase untuk ketersediaan sarana perdagangan dan jasa adalah sebesar 95% atau 71 orang karena pada umumnya masyarakat melakukan berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. untuk sarana perkantoran sebesar 94% atau 70 orang. dimana sebagian besar masyarakat memiliki pekerjaan tetap yang bekerja di bidang formal. untuk sarana pendidikan prosentasenya adalah sebesar 90% atau sebesar 67 orang. dimana fasilitas ini merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk masyarakat yang masih duduk di bangku sekolah untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. dan untuk sarana peribadatan prosentasenya adalah sebesar 87% atau sekitar 65 orang karena berhadah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi seorang manusia. untuk itu ketersediaan sarana peribadatan sangat penting di dalam sebuah permukiman. Dan juga yang paling penting adalah ketersediaan sarana kesehatan di tempat tekolasi. dimana tingkat aspirasi masyarakat adalah sebesar 91% atau sekitar 61 orang karena sarana kesehatan sangatlah penting untuk melayani kesehatan masyarakat.

Aspirasi masyarakat mengenai ketersediaan sarana umum seperti sarana perdagangan dan jasa, sarana pendidikan, sarana perkantoran serta sarana peribadatan dan juga sarana kesehatan di tempat tekolasi adalah sangat tinggi karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat menunjang kegiatan yang dilakukan masyarakat pengungsi sehari-harinya.

Berdasarkan hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sarana umum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pengungsi di tempat relokasi yang baru adalah ketersediaan sarana prasarana seperti ketersediaan sarana pendidikan untuk anak-anak yang masih dalam usia sekolah, sarana perdagangan dan jasa untuk melakukan kegiatan ekonomi masyarakat, sarana peribadatan untuk melakukan kegiatan kerohanian dan juga sarana perkantoran untuk melakukan kegiatan bekerja.

3.2.5 Analisa Aspirasi Masyarakat Mengenai Ketersediaan Prasarana Pada Tempat Relokasi

Prasarana merupakan sarana yang harus disediakan dalam sebuah wilayah permukiman, karena tanpa kelengkapan sarana utilitas sebuah permukiman tidak dapat berkembang dengan baik. Kelengkapan sarana utilitas dalam sebuah wilayah permukiman sangat penting agar dapat menunjang kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Jenis prasarana yang harus tersedia dalam sebuah wilayah permukiman antara lain adalah:

- Jaringan Listrik
- Jaringan Air Bersih
- Jaringan Telepon
- Jaringan Jalan
- Pembuangan Sampah

Prasarana umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan kawasan, yang membutuhkanpengelolaan berkelanjutan dan professional agar dapat memberikan pelayanan memadai kepada masyarakat.

Persyaratan utilitas umum lingkungan permukiman adalah :

1. Setiap permukiman harus dilayani listrik dengan kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penerangan jalan, rumah tangga dan kebutuhan listrik lainnya. Setiap permukiman harus dilayani dengan air minum yang cukup memenuhi kebutuhan air minum, yang dapat diambil dari sumber yang memenuhi syarat, seperti sistem perpipaan dari PDAM, mata air dan air tanah.

Berdasarkan hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sarana umum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pengungsi di lompat rolokasi yang baru adalah keterseddiaan sarana prasarana seperti keterseddiaan sarana pendidikan untuk anak-anak yang masih dalam usia sekolah. sarana perdagangan dan jasa untuk melakukan kegiatan ekonomi masyarakat. sarana peribadatan untuk melakukan kegiatan kerohanian dan juga sarana perkantoran untuk melakukan kegiatan bekerja.

3.2.5 Analisa Aspirasi Masyarakat Mengenai Keterseddiaan Prasarana Pada Tempat Relokasi

Prasarana merupakan sarana yang harus disediakan dalam sebuah wilayah permukiman, karena tanpa kelengkapan sarana utilitas sebuah permukiman tidak dapat berkembang dengan baik. Kelengkapan sarana utilitas dalam sebuah wilayah permukiman sangat penting agar dapat menunjang kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Jenis prasarana yang harus tersedia dalam sebuah wilayah permukiman antara lain adalah:

- Jaringan Listrik
- Jaringan Air Bersih
- Jaringan Telepon
- Jaringan Jalan
- Pembuangan Sampah

Prasarana umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan kawasan, yang membutuhkanpengelolaan berkelanjutan dan professional agar dapat memberikan pelayanan memadai kepada masyarakat.

Persyaratan utilitas umum lingkungan permukiman adalah :

1. Setiap permukiman harus dilayani listrik dengan kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penerangan jalan, rumah tangga dan kebutuhan listrik lainnya. Setiap permukiman harus dilayani dengan air minum yang cukup memenuhi kebutuhan air minum. yang dapat diambil dari sumber yang memenuhi syarat, seperti sistem perpipaan dari PDAM. mata air dan air tanah.

2. Setiap permukiman harus dilayani sambungan telepon.
3. Setiap permukiman harus dilengkapi dengan sistem pembuangan sampah yang terintegrasi dengan sistem pembuangan sampah wilayah di kawasan sekitarnya.

Tabel 3.19
Tingkat Pemilihan Aspirasi Masyarakat Mengenai Prasarana Yang Harus Tersedia Di Tempat Relokasi

No	Utilitas	Frekuensi	Keterangan
1	Jaringan Listrik	74	Agak t tinggi
2	Jaringan Air Bersih	74	Agak tinggi
3	Jaringan Telepon	47	Sedang
4	Jaringan jalan	61	Agak Tinggi
5	Tempat Pembuangan Sampah	88	Tinggi

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Menurut masyarakat, sarana utilitas merupakan fasilitas pelengkap pada sebuah permukiman agar masyarakat dapat melakukan aktifitas dengan baik. Dari tabel 3.18 diketahui bahwa tingkat pemilihan untuk sarana utilitas yang meliputi jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan jalan serta tempat pembuangan sampah adalah tinggi mengingat sarana utilitas ini merupakan kebutuhan utama dalam suatu permukiman. Adapun aspirasi masyarakat mengenai fasilitas ini sebaiknya direncanakan sedemikian rupa untuk menjamin kelancaran distribusi seperti suplai air minum, listrik, telepon, dsb.

Aspirasi masyarakat untuk jaringan listrik, PDAM dan telepon adalah agar kebutuhan listrik, kebutuhan air bersih serta kebutuhan komunikasi minimal dapat terpenuhi dan dapat disesuaikan dengan permintaan tiap-tiap penghuni nantinya. Penyediaan kebutuhan diharapkan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan penghuni berdasarkan standart masing-masing penyedia kebutuhan utilitas tersebut.

3.2.6 Analisa Aspirasi Masyarakat Mengenai Sarana Transportasi Pada Tempat Relokasi

Aksesibilitas adalah aspek yang meninjau kemudahan masyarakat dalam mengakses sarana dan prasarana perkotaan. Aksesibilitas di dukung oleh sarana

2. Setiap permukiman harus dilayani sambungan telepon.
3. Setiap permukiman harus dilengkapi dengan sistem pembuangan sampah yang terintegrasi dengan sistem pembuangan sampah wilayah di kawasan sekitarnya.

Tabel 3.19
Tingkat Pemilikan Aspirasi Masyarakat Mengenai Prasarana Yang Harus Tersedia Di Tempat Relokasi

No	Utilitas	Frekuensi	Persentase
1	Jaringan Listrik	74	Ada/ Ingin
2	Jaringan Air Bersih	67	Ada/ Ingin
3	Jaringan Telepon	47	Sedang
4	Jaringan Jalan	87	Ada/ Ingin
5	Tempat Pembuangan Sampah	98	Ingin

Sumber: Hasil Analisa, 2009

Menurut masyarakat, sarana utilitas merupakan fasilitas pelengkap pada sebuah permukiman agar masyarakat dapat melakukan aktifitas dengan baik. Dari tabel 3.18 dikatahui bahwa tingkat pemilikan untuk sarana utilitas yang meliputi jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan jalan serta tempat pembuangan sampah adalah tinggi mengingat sarana utilitas ini merupakan kebutuhan utama dalam suatu permukiman. Adapun aspirasi masyarakat mengenai fasilitas ini sebaiknya dironcanakan sedemikian rupa untuk menjamin kelancaran distribusi seperti suplai air minum, listrik, telepon, dsb.

Aspirasi masyarakat untuk jaringan listrik, PDAM dan telepon adalah agar kebutuhan listrik, kebutuhan air bersih serta kebutuhan komunikasi minimal dapat terpenuhi dan dapat disesuaikan dengan perminatan tiap-tiap penghuni nantinya. Penyediaan kebutuhan dibarapkan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan penghuni berdasarkan standart masing-masing penyedia kebutuhan utilitas tersebut.

3.2.6 Analisa Aspirasi Masyarakat Mengenai Sarana Transportasi Pada Tempat Relokasi

Aksesibilitas adalah aspek yang menjajan kemudahan masyarakat dalam mengakses sarana dan prasarana perkotaan. Aksesibilitas di dukung oleh sarana

transportasi yang baik sehingga bisa dengan mudah menjangkau tempat-tempat atau keberadaan fasilitas lainnya.

Di tempat relokasi, sarana transportasi sendiri hanya tersedia ojek motor dan kendaraan pribadi seperti kendaraan bermotor dan mobil. Untuk sarana transportasi seperti angkutan umum yang melayani jasa angkutan dalam kota tidak tersedia karena kebijakan pemerintah daerah setempat yang melarang adanya angkutan umum dalam kota karena banyaknya ojek motor di kota namlea.

Bagi yang tidak memiliki kendaraan pribadi, semua kegiatan di lakukan dengan menumpang ojek, mulai dari kegiatan perkantoran, persekolahan dan juga kegiatan pereekonomian misalnya ke pasar, dan sebagainya.

3.3 Analisa Kondisi Sarana Dan Prasarana di Tempat Penampungan Dan Tempat Relokasi.

Sarana prasarana merupakan sebuah kebutuhan dasar yang harus tersedia di sebuah lingkungan perumahan agar dapat mendukung kegiatan yang di lakukan oleh masyarakat. Sarana prasarana yang tersedia harus lengkap dan dengan kondisi yang baik sehingga dapat menjangkau seluruh kegiatan masyarakat, sebelum membahas tentang sarana prasarana yang harus tersedia kita harus mengetahui kondisi sarana di tempat penampungan kemudian mengetahui kondisi sarana prasarana di tempat relokasi dengan menggunakan analisa komparasi untuk mengetahui perbandingan antara kondisi di tempat penampungan sehingga nantinya akan digunakan sebagai dasar acuan masyarakat untuk sebuah tempat tinggal yang layak di tempati.

3.3.1 Analisa Kondisi Sarana Prasarana Di Tempat Penampungan

Analisa kondisi sarana prasarana di tempat penampungan terdiri dari analisa kondisi sarana di tempat penampungan dan analisa kondisi prasarana di tempat penampungan.

transportasi yang baik sehingga bisa dengan mudah menjangkau tempat-tempat atau keberadaan fasilitas lainnya.

Di tempat rekreasi, sarana transportasi sendiri banyak tersedia *ojek* motor dan kendaraan pribadi seperti kendaraan bermotor dan mobil. Untuk sarana transportasi seperti angkutan umum yang melayani jasa angkutan dalam kota tidak tersedia karena kebijakan pemerintah daerah setempat yang melarang adanya angkutan umum dalam kota karena banyaknya *ojek* motor di kota mereka.

Bagi yang tidak memiliki kendaraan pribadi, semua kegiatan di lakukan dengan menumpang *ojek*, mulai dari kegiatan perkantoran, perekolahan dan juga kegiatan perekonomian misalnya ke pasar, dan sebagainya.

3.3 Analisa Kondisi Sarana Dan Prasarana di Tempat Penampungan Dan Tempat Rekreasi.

Sarana prasarana merupakan sebuah kebutuhan dasar yang harus tersedia di sebuah lingkungan permukiman agar dapat mendukung kegiatan yang di lakukan oleh masyarakat. Sarana prasarana yang tersedia harus lengkap dan dengan kondisi yang baik sehingga dapat menjangkau seluruh kegiatan masyarakat. sebelum membahas tentang sarana prasarana yang harus tersedia kita harus mengetahui kondisi sarana di tempat penampungan kemudian mengetahui kondisi sarana prasarana di tempat rekreasi dengan menggunakan analisa komparasi untuk mengetahui perbandingan antara kondisi di tempat penampungan sehingga nantinya akan digunakan sebagai dasar acuan masyarakat untuk sebuah tempat tinggal yang layak di tempati.

3.3.1 Analisa Kondisi Sarana Prasarana Di Tempat Penampungan

Analisa kondisi sarana prasarana di tempat penampungan terdiri dari analisa kondisi sarana di tempat penampungan dan analisa kondisi prasarana di tempat penampungan.

3.3.1.1 Analisa Kondisi Sarana Di Tempat Penampungan

Analisa kondisi sarana di tempat penampungan membahas tentang kondisi sarana pendidikan, sarana perkantoran, sarana peribadatan, sarana kesehatan serta sarana perdagangan dan jasa.

a. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang terdapat di tempat penampungan di desa jikumerasa hanya berupa sarana SD, dimana jarak dari tempat penampungan ke sarana pendidikan adalah 1 km-2km ditempuh dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan bermotor, sedangkan untuk sarana pendidikan berupa smp atau sma tidak tersedia di daerah ini, masyarakat umumnya bersekolah di luar tempat penampungan seperti bersekolah di Kota Namlea.

Untuk sarana pendidikan di tempat penampungan sendiri kurang memadai karena tidak bisa melayani kebutuhan para masyarakat dengan baik sehingga masyarakat harus menempuh jarak yang agak jauh dari tempat penampungan untuk bersekolah.

b. Sarana Perkantoran

Untuk sarana perkantoran hanya terdapat kantor desa saja di tempat penampungan dengan jarak antara 500 m-2km dan ditempuh dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan bermotor, untuk sarana perkantoran sendiri sangat kurang di tempat penampungan seperti tidak adanya kantor pelayanan jasa seperti kantor pos dan bank, karena sarana ini hanya tersedia di Kota Namlea sehingga masyarakat harus menempuh waktu yang sangat jauh untuk ke sarana tersebut, waktu tempuh yaitu sekitar1-2 jam dengan menggunakan kendaraan bermotor, karena tidak tersedianya kendaraan lain.

Sarana perkantoran di tempat penampungan kurang memadai dan tidak bisa mendukung aktifitas masyarakat setempat, sehingga masyarakat melakukan kegiatan diluar tempat penampungan yang berada di Desa Jikumerasa dengan melalukan perjalanan yang agak jauh dan memakan waktu yang lama.

c. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan yang terdapat di tempat penampungan merupakan bangunan dengan kondisi setengah permanen 1 (unit) yang di rasakan cukup

3.3.1.1 Analisa Kondisi Sarana Di Tempat Penampungan

Analisa kondisi sarana di tempat penampungan membahas tentang kondisi sarana pendidikan, sarana perkantoran, sarana peribadatan, sarana kesehatan serta sarana perdagangan dan jasa.

a. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang terdapat di tempat penampungan di desa Jikumerasa hanya berupa sarana SD, dimana jarak dari tempat penampungan ke sarana pendidikan adalah 1 km-2km ditempuh dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan bermotor, sedangkan untuk sarana pendidikan berupa smp atau sma tidak tersedia di daerah ini, masyarakat umumnya bersekolah di luar tempat penampungan seperti bersekolah di Kota Namlea.

Untuk sarana pendidikan di tempat penampungan sendiri kurang memadai karena tidak bisa melayani kebutuhan para masyarakat dengan baik sehingga masyarakat harus menempuh jarak yang agak jauh dari tempat penampungan untuk bersekolah.

b. Sarana Perkantoran

Untuk sarana perkantoran hanya terdapat kantor desa saja di tempat penampungan dengan jarak antara 500 m-2km dan ditempuh dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan bermotor, untuk sarana perkantoran sendiri sangat kurang di tempat penampungan seperti tidak adanya kantor pelayanan jasa seperti kantor pos dan bank. karena sarana ini hanya tersedia di Kota Namlea sehingga masyarakat harus menempuh waktu yang sangat jauh untuk ke sarana tersebut. waktu tempuh yaitu sekitar1-2 jam dengan menggunakan kendaraan bermotor. karena tidak tersedianya kendaraan lain.

Sarana perkantoran di tempat penampungan kurang memadai dan tidak bisa mendukung aktifitas masyarakat setempat. sehingga masyarakat melakukan kegiatan diluar tempat penampungan yang berada di Desa Jikumerasa dengan melalukan perjalanan yang agak jauh dan memakan waktu yang lama.

c. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan yang terdapat di tempat penampungan merupakan bangunan dengan kondisi sederhah permanen 1 (unit) yang di rasakan cukup

untuk memenuhi kebutuhan kegiatan peribadatan selama ini. Jarak dari tempat penampungan ke sarana peribadatan adalah 500 m-1km, ditempuh dengan berjalan kaki dan juga menggunakan kendaraan bermotor.

Untuk sarana peribadatan sudah mencukupi kebutuhan masyarakat, karena kebutuhan beribadah sangat penting dan bukan merupakan kebutuhan sekunder, karena beribadah juga bisa dilakukan dirumah sehingga tidak setiap hari masyarakat ke daerah peribadatan.

d. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang terdapat di tempat penampungan di Desa Jikumerasa hanya berupa puskesmas pembantu sebanyak 1 unit, sedangkan untuk rumah sakit, apotik dan praktek dokter tidak terdapat di tempat penampungan, masyarakat umumnya berobat di kota namlea dengan jarak > 20 km dengan waktu tempuh antara 1-2 jam dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Sarana kesehatan di tempat penampungan yang terletak di Desa Jikumerasa sangat minim dan tidak bisa melayani kebutuhan masyarakat, masyarakat hanya berobat di puskesmas-puskesmas setempat yang juga tidak mempunyai tenaga medis yang cukup sehingga masyarakat biasanya melakukan pengobatan ke Kota Namlea dengan memakan waktu tempuh yang agak lama.

e. Sarana Perdagangan dan Jasa

Sarana perdagangan dan jasa di tempat penampungan hanya terdapat 1 unit pasar kecil yang melayani seluruh kebutuhan masyarakat, dimana sarana ini dirasakan kurang karena tidak mampu melayani seluruh kebutuhan masyarakat, sedangkan untuk pusat perbelanjaan masyarakat biasanya melakukan perjalanan ke Kota Namlea dengan memakan waktu yang agak lama sehingga dirasakan kurang efektif melakukan kegiatannya, karena faktor jarak dan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan tersebut, dimana semakin jauh jarak dari sebuah tempat maka biaya yang akan dikeluarkan juga akan semakin mahal sehingga mempengaruhi harga jual yang semakin tinggi di pasaran.

untuk memenuhi kebutuhan kegiatan peribadatan selama ini. Jarak dari tempat penampungan ke sarana peribadatan adalah 500 m-1km. ditempuh dengan berjalan kaki dan juga menggunakan kendaraan bermotor.

Untuk sarana peribadatan sudah memenuhi kebutuhan masyarakat. karena kebutuhan beribadah sangat penting dan bukan merupakan kebutuhan sekunder. karena beribadah juga bisa dilakukan dirumah sehingga tidak setiap hari masyarakat ke dearah peribadatan.

d. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang terdapat di tempat penampungan di Desa Jikumerasa hanya berupa puskesmas pembantu sebanyak 1 unit. sedangkan untuk rumah sakit, apotik dan praktek dokter tidak terdapat di tempat penampungan, masyarakat umumnya berobat di kota namlea dengan jarak > 20 km dengan waktu tempuh antara 1-2 jam dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Sarana kesehatan di tempat penampungan yang terletak di Desa Jikumerasa sangat minim dan tidak bisa melayani kebutuhan masyarakat. masyarakat hanya berobat di puskesmas-puskesmas setempat yang juga tidak mempunyai tenaga medis yang cukup sehingga masyarakat biasanya melakukan pengobatan ke Kota Namlea dengan membakan waktu tempuh yang agak lama.

e. Sarana Perdagangan dan Jasa

Sarana perdagangan dan jasa di tempat penampungan hanya terdapat 1 unit pasar kecil yang melayani seluruh kebutuhan masyarakat. dimana sarana ini dirasakan kurang karena tidak mampu melayani seluruh kebutuhan masyarakat. sedangkan untuk pusat perbelanjaan masyarakan biasanya melakukan perjalanan ke Kota Namlea dengan menmakan waktu yang agak lama sehingga dirasakan kurang efektif melakukan kegiatannya. karena faktor jarak dan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan tersebut. dimana semakin jauh jarak dari sebuah tempat maka biaya yang akan dikeluarkan juga akan semakin mahal sehingga membengaruhi harga jual yang semakin tinggi di pasaran.

3.3.1.2 Analisa Kondisi Prasarana Di Tempat Penampungan

Kondisi prasarana membahas tentang kondisi prasarana jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan sampah dan juga jaringan jalan.

a. Jaringan Air Bersih

Kebutuhan akan air bersih merupakan syarat mutlak bagi suatu permukiman. Tanpa air bersih, maka penduduk akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan aktivitasnya. Di tempat penampungan masyarakat memperoleh fasilitas air bersih dari PDAM namun pendistribusiannya kurang lancar sehingga masyarakat menggunakan sumber-sumber air berupa sumur-sumur terdekat dan sungai yang terdapat di Desa Jikumera untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

b. Jaringan Listrik

Untuk pelayanan jaringan listrik di tempat penampungan sangat terbatas, karena dipakai oleh seluruh masyarkat pengungsi, sehingga sering terjadi pemadaman listrik yang cukup lama dari jam 12 siang sampai jam 12 malam bahkan bisa sampai sehari dan bahkan hanya menyala sekitar 3 jam dalam 1 hari, sehingga aktifitas masyarakat menjadi terganggu, jika terjadi pemadaman di malam hari, masyarakat biasanya memakai lilin atau pelita untuk kebutuhan penerangan di tempat penampungan.

c. Jaringan Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi tidak tersedia di tempat penampungan, dan juga untuk pelayanan menggunakan telepon pribadi, di tempat penampungan belum terdapat tower untuk menangkap signal handphone sehingga masyarakat berjalan cukup jauh sekitar 4 km untuk mencari signal handphone untuk melakukan kegiatan bertelekomunikasi.

d. Jaringan Sampah

Untuk jaringan sampah di tempat penampungan, tidak terdapat TPS atau TPA sehingga masyarakat biasanya melakukan pembuangan dengan cara di timbun atau di bakar dan juga biasanya di buang ke laut.

e. Jaringan Jalan

3.3.1.2 Analisa Kondisi Prasarana Di Tempat Penampungan

Kondisi prasarana memerlukan tentang kondisi prasarana jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan sampah dan juga jaringan jalan.

a. **Jaringan Air Bersih**

Kebutuhan akan air bersih merupakan syarat mutlak bagi suatu permukiman. Tanpa air bersih, maka penduduk akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan aktivitasnya. Di tempat penampungan masyarakat memperoleh fasilitas air bersih dari PDAM namun pendistribusiannya kurang lancar sehingga masyarakat menggunakan sumber-sumber air berupa sumur-sumur terdekat dan sungai yang terdapat di Desa Jikumera untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

b. **Jaringan Listrik**

Untuk pelayanan jaringan listrik di tempat penampungan sangat terbatas, karena dipakai oleh seluruh masyarkat pengungsi, sehingga sering terjadi pemadaman listrik yang cukup lama dari jam 12 siang sampai jam 12 malam bahkan bisa sampai sehari dan bahkan hanya menyala sekitar 3 jam dalam 1 hari, sehingga aktifitas masyarakat menjadi terganggu, jika terjadi pemadaman di malam hari, masyarakat biasanya memakai lilin atau pelita untuk kebutuhan penerangan di tempat penampungan.

c. **Jaringan Telekomunikasi**

Jaringan telekomunikasi tidak tersedia di tempat penampungan, dan juga untuk pelayanan menggunakan telepon pribadi, di tempat penampungan belum terdapat *tower* untuk menangkap signal handphone sehingga masyarakat berjalan cukup jauh sekitar 4 km untuk mencari signal handphone untuk melakukan kegiatan bertelekomunikasi.

d. **Jaringan Sampah**

Untuk jaringan sampah di tempat penampungan, tidak terdapat TPS atau TPA sehingga masyarakat biasanya melakukan pembuangan dengan cara di timbun atau di bakar dan juga biasanya di buang ke laut.

e. **Jaringan Jalan**

Jaringan jalan di tempat penampungan sudah menggunakan jalan aspal, dimana di tempat penampungan merupakan jalan lokal yang merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

f. MCK

Ditempat penampungan prasarana mck sangat kurang karena tidak mampu melayani kebutuhan para masyarakat pengungsi di tempat penampungan, karena digunakan oleh seluruh masyarakat dan digabung antara perempuan dan laki-laki dengan jumlah yang terbatas dan kondisi yang tidak bagus dan tidak nyaman bagi kaum wanita.

Sarana prasarana umum di tempat penampungan kurang memadai dan menimbulkan masalah tersendiri bagi masyarakat pengungsi, mulai dari masalah ketersediaan sarana umum yang minim di tempat penampungan. pendistribusian air bersih dari pdam yang tidak menjangkau lokasi tempat penampungan, masalah listrik yang dibatasi penggunaannya, serta masalah mck di tempat penampungan, karena umumnya masyarakat sangat tidak nyaman dengan kondisi yang ada khususnya wanita karena mck ditempat penampungan tidak dipisah antara laki-laki dan perempuan.

3.3.2 Analisa Kondisi Sarana Prasarana Di Tempat Relokasi

Analisa kondisi sarana prasarana di tempat relokasi terdiri dari analisa kondisi sarana di tempat penampungan dan analisa kondisi prasarana di tempat penampungan.

3.3.2.1 Analisa Kondisi Sarana Di Tempat Relokasi

Analisa kondisi sarana di tempat relokasi membahas tentang kondisi sarana pendidikan, sarana perkantoran, sarana peribadatan, sarana kesehatan serta sarana perdagangan dan jasa.

a. Sarana Pendidikan

Untuk sarana pendidikan yang formal tersedia di pusat Kota Namlea dengan jarak yang cukup dekat dengan tempat relokasi yaitu sekitar 500m-3km,

taringan jalan di tempat penampungan sudah menggunakan jalan aspal. dimana di tempat penampungan merupakan jalan lokal yang merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

f. MCK

Ditempat penampungan prasarana mck sangat kurang karena tidak mampu melayani kebutuhan para masyarakat pengungsi di tempat penampungan, karena digunakan oleh seluruh masyarakat dan digabung antara perempuan dan laki-laki dengan jumlah yang terbatas dan kondisi yang tidak bagus dan tidak nyaman bagi kaum wanita.

Sarana prasarana umum di tempat penampungan kurang memadai dan meninbulkan masalah teresendiri bagi masyarakat pengungsi. mulai dari masalah ketersediaan sarana umum yang minim di tempat penampungan. pendistribusian air bersih dari pdam yang tidak menjangkau lokasi tempat penampungan. masalah listrik yang dibatasi penggunaannya, serta masalah mck di tempat penampungan, karena umumnya masyarakat sangat tidak nyaman dengan kondisi yang ada khususnya wanita karena mck ditempat penampungan tidak dipisah antara laki-laki dan perempuan.

3.3.2 Analisa Kondisi Sarana Prasarana Di Tempat Relokasi

Analisa kondisi sarana prasarana di tempat relokasi terdiri dari analisa kondisi sarana di tempat penampungan dan analisa kondisi prasarana di tempat penampungan.

3.3.2.1 Analisa Kondisi Sarana Di Tempat Relokasi

Analisa kondisi sarana di tempat relokasi membahas tentang kondisi sarana pendidikan, sarana perkantoran, sarana peribadatan, sarana kesehatan serta sarana perdagangan dan jasa.

a. Sarana Pendidikan

Untuk sarana pendidikan yang formal tersedia di pusat Kota Namlea dengan jarak yang cukup dekat dengan tempat relokasi yaitu sekitar 500m-3km.

masyarakat biasanya melakukan kegiatan ini dengan berjalan kaki, menggunakan kendaraan bermotor dan juga menggunakan kendaraan ojek.

Di Kota Namlea terdapat sarana pendidikan berupa TK (dua unit) dengan jarak antara 500m-1km dan SD (empat unit) dengan jarak antara 1km-2km SMP (dua unit) dengan jarak antara 2km-3km, SMU (2 unit) dengan jarak antara 2km-km.

Sarana pendidikan dinilai sudah cukup melayani kebutuhan masyarakat dan terjangkau dari tempat relokasi yang sudah disediakan sehingga tidak memakan waktu yang lama dan cukup jauh untuk menjangkau sarana pendidikan.

Untuk perguruan tinggi, tidak terdapat di tempat relokasi karena pada umumnya masyarakat yang ada lebih memilih untuk kuliah di luar daerah sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.

b. Sarana Perkantoran

Sarana perkantoran juga terletak di pusat Kota Namlea dan kebanyakan terdiri dari sektor formal yang berupa instansi-instansi pemerintahan yang melayani kebutuhan daerah tersebut dengan jarak dari tempat relokasi antara 1 km -4 km.

Sarana perkantoran yang terdapat di Kota Namlea yaitu terdapat 17 jenis instansi di sektor formal yang tersebar secara merata di pusat Kota Namlea dengan jarak antara 2km-3km yang bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi berupa motor, mobil dan menumpang ojek, untuk kantor polisi/ Abri terdapat 2 unit dengan jarak 3km-4km, kantor pos 1 unit dengan jarak dari tempat relokasi sekitar 1km-2km serta bank 2 unit dengan jarak sekitar 1km-2km dari tempat relokasi.

Sarana perkantoran sudah mencukupi kebutuhan masyarakat, sesuai dengan pekerjaan mereka masing-masing, untuk masyarakat yang bekerja sebagai PNS bisa dengan terjangkau mencapai tempat kerjanya masing-masing.

Untuk sarana pengiriman barang berupa tiki tidak tersedia di Kota Namlea, masyarakat biasanya melakukan pengiriman barang biasanya dikirim ke

mesyerakat pissuya mufakukan kepintan tiri qengan pedigan kaki mengguneken kendaraan pemotor dan juga mengguneken kendaraan oleh.

DI Kota Kemuja terdapat sarana pendidikan perupa TK (dua unit) qengan jenak antara 200m-1km dan SD (empat unit) qengan jenak antara 1km-5km antara 5km-km. SMU (5 unit) qengan jenak SMK (dua unit) qengan jenak antara 5km-5km. Sarana pendidikan qimiliki sudah cukup mencukupi kepintan masyerakat dan terjangkau dari tempat tepokasi yang sudah disediakan sepintga tidak mengenakan waktu yang lama dan cukup lama untuk mengjangkau sarana pendidikan.

Untuk pertumbuhan ruang tidak terdapat di tempat tepokasi karena pada umumnya masyerakat yang ada lepih mengilih untuk kuliah di luar daerah

p. Sarana Kesehatan

Sarana pertumbuhan juga terdapat di pusat Kota Kemuja dan kepemyakan terdiri dari sepuh tonsel yang perupa puskesmas pembantu dan juga mepyiapkan 4- rm 1 rmn kepintan daerah rasepat dengan jenak dari tempat tepokasi antara 1 km km.

Sarana pertumbuhan yang terdapat di Kota Kemuja yaitu terdapat 17 jenis pusesani di sepuh tonsel yang rasepat sesuai mereka di pusat Kota Kemuja dengan mengguneken kendaraan pribadi perupa motor atau mobil dan mengunakan oleh. untuk kantor kesehatan pribadi perupa motor atau mobil dan mengunakan oleh. untuk kantor bolisi Arti terdapat 3 unit dengan jenak 3km-4km. kantor pos 1 unit dengan jenak dari tempat tepokasi sepitar 1km-3km serta pasar 5 unit dengan jenak sepitar 1km-3km dari tempat tepokasi.

Sarana pertumbuhan sudah mencukupi kepintan masyerakat. sesuai dengan pekerjaan mereka masing-masing. untuk masyerakat yang pekerja sepagai PNS pisa dengan terjangkau mengenakan tempat kendaraan masing-masing.

Untuk sarana pengintungan pasang perupa tiri tidak terseqia di Kota Kemuja. masyerakat pissuya mufakukan pengintungan pasang pissuya dikirim ke

ambon dan akan dikirim ke namlea melalui kapal yang akan menuju ke Kota Namlea.

c. Sarana Peribadatan

Di wilayah studi terdapat sarana peribadataan berupa mesjid yang dibangun sebanyak 3 unit dan gereja 1 unit, sedangkan untuk sarana peribadatan berupa pura dan wihara tidak terdapat di lokasi studi.

Ditempat relokasi, mayoritas penduduknya adalah beragama Islam dan sudah mencukupi kebutuhan masyarakat yang ingin melakukan kegiatan keagamaan, masjid berjarak 500m-1km dari tempat relokasi ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor dan berjalan kaki, sedangkan Gereja sebanyak 1 unit karena masyarakat yang beragama Kristen sangat jarang di Kota Namlea dan juga tempat relokasi dan jarak yang harus ditempuh masyarakat adalah sekitar 1km-2km, sedangkan fasilitas peribadatan yang tersedia ditempat relokasi hanya berupa 1 unit musholla yang diharapkan bisa menampung masyarakat yang akan pindah ke tempat relokasi nantinya.

d. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan terdapat di Kota Namlea sebagai pusat kegiatan dengan jarak dari tempat relokasi antara 500 meter-3 km.

Rumah sakit di Kota Namlea berjumlah 1 unit dengan jarak 2km-3km yang melayani seluruh masyarakat di Kecamatan Namlea, ditempuh dengan menggunakan kendaran pribadi. Puskesmas di Kota Namlea juga tersedia 1 unit dengan jarak dari tempat relokasi sekitar 500m-1km ditempuh dengan berjalan kaki dan juga menggunakan kendaraan ojek, praktik dokter di Kota Namlea terdapt 3 unit dengan jarak antara 1km-2km dan apotik 1 unit di pusat Kota Namlea dengan jarak antar1km-2km.

Di Kota Namlea, tenaga medis berupa dokter sangat kurang, sehingga masyarakat yang memiliki sakit yang agak parah biasnya langsung ke Kota Ambon untuk berobat, untuk sarana kesehatan berupa apotik juga, obat-obatan yang tersedia juga kurang lengkap sehingga masyarakat biasanya membeli obat di Kota Ambon juga.

ambon dan akan diterima ke namlea melalui kapal yang akan menuju ke Kota Namlea.

c. Sarana Peribadatan

Di wilayah studi terdapat sarana peribadatan berupa mesjid yang dibangun sebanyak 3 unit dan gereja 1 unit. sedangkan untuk sarana peribadatan berupa pura dan wihara tidak terdapat di lokasi studi.

Ditempat relokasi. mayoritas penduduknya adalah beragama Islam dan sudah mencukupi kebutuhan masyarakat yang ingin melakukan kegiatan keagamaan. masjid berjarak 500m-1km dari tempat relokasi ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor dan berjalan kaki. sedangkan Gereja sebanyak 1 unit karena masyarakat yang beragama Kristen sangat jarang di Kota Namlea dan juga tempat relokasi dan jarak yang harus ditempuh masyarakat adalah sekitar 1km-2km. sedangkan fasilitas peribadatan yang tersedia ditempat relokasi hanya berupa 1 unit musholla yang dimanfaatkan bisa mencampung masyarakat yang akan pindah ke tempat relokasi mantnya.

d. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan terdapat di Kota Namlea sebagai pusat kegiatan dengan jarak dari tempat relokasi antara 500 meter-3 km.

Rumah sakit di Kota Namlea berjumlah 1 unit dengan jarak 2km-3km yang melayani seluruh masyarakat di Kecamatan Namlea. ditempuh dengan menggunakan kendaran pribadi. Puskesmas di Kota Namlea juga tersedia 1 unit dengan jarak dari tempat relokasi sekitar 500m-1km ditempuh dengan berjalan kaki dan juga menggunakan kendaraan ojek. praktik dokter di Kota Namlea terdapt 3 unit dengan jarak antara 1km-2km dan apotik 1 unit di pusat Kota Namlea dengan jarak antar1km-2km.

Di Kota Namlea. tenaga medis berupa dokter sangat kurang. sehingga masyarakat yang memiliki sakit yang agak parah biasnya langsung ke Kota Ambon untuk berobat. untuk sarana kesehatan berupa apotik juga. obat-obatan yang tersedia juga kurang lengkap sehingga masyarakat biasanya membeli obat di Kota Ambon juga.

e. Sarana Perdagangan dan Jasa

Di Kota Namlea terdapat sarana perdagangan dan jasa berupa pasar sebanyak 1 unit dengan jarak 2km-3km yang melayani kebutuhan seluruh masyarakat Kota Namlea.den ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor, pusat perbelanjaan sebanyak 2 unit dengan jarak 3km-4km, warung sebanyak 6 unit dengan jarak tempuh antara 500m-1km ditempuh dengan berjalan kaki dan kios sebanyak 8 unit yang berjak 500m-1km.

Ditempat relokasi sendiri akan disediakan sarana perdagangan dan jasa berupa warung dan kios yang akan dikelola oleh masyarakat yang mempunyai kondisi ekonomi yang cukup baik. Untuk sarana perdagangan dan jasa berupa mall tidak tersedia di Kota Namlea.

3.3.2.2 Analisa Kondisi Prasarana di Tempat Relokasi

Kondisi prasarana membahas tentang kondisi prasarana jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan sampah dan juga jaringan jalan.

a. Jaringan Air Bersih

Di tempat relokasi sudah tersedia jaringan air bersih berupa pendistribusian dari pdam dan juga bisa menggunakan sumber-sumber air terdekat seperti sumur, dll.

Berdasarkan kondisi yang ada, kebutuhan. penyediaan air bersih/minum di kecamatan dan pemukiman secara ideal didekati dengan penggunaan angka standar yang telah ditetapkan yaitu minimal 60 l/hari/kapita dan maksimal 120 l/hari/kapita. Ditempat relokasi sendiri sudah disediakan prasarana jaringan air bersih sehingga memudahkan masyarakat yang akan pindah ke tempat relokasi yang baru.

b. Jaringan Listrik

PLN memberikan pelayanan kepada warga di tempat relokasi berupa jaringan listrik yang masuk dari gardu listrik yang terdapat di wilayah Kota Namlea.

Ditempat relokasi juga sudah disediakan prasarana jaringan listrik yang nantinya akan melayani kebutuhan para masyarakat yang akan pindah ke tempat relokasi. Untuk pendistribusian jaringan listrik sudah maksimal, akan

c. **Sarana Perdagangan dan Jasa**

Di Kota Namlea terdapat sarana perdagangan dan jasa berupa pasar sebanyak 1 unit dengan jarak 2km-3km yang melayani kebutuhan seluruh masyarakat Kota Namlea.dan ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor. pusat perbelanjaan sebanyak 2 unit dengan jarak 3km-4km, warung sebanyak 6 unit dengan jarak tempuh antara 500m-1km ditempuh dengan berjalan kaki dan kios sebanyak 8 unit yang berjak 500m-1km.

Ditempat terlokasi sendiri akan disediakan sarana perdagangan dan jasa berupa warung dan kios yang akan dikelola oleh masyarakat yang mempunyai kondisi ekonomi yang cukup baik. Untuk sarana perdagangan dan jasa berupa mall tidak tersedia di Kota Namlea.

3.3.2.2 Analisa Kondisi Prasarana di Tempat Relokasi

Kondisi prasarana membahas tentang kondisi prasarana jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan saanpah dan juga jaringan jalan.

a. **Jaringan Air Bersih**

Di tempat relokasi sudah tersedia jaringan air bersih berupa pendistribusian dari pdam dan juga bisa menggunakan sumber-sumber air terdekat seperti sumur, dll.

Berdasarkan kondisi yang ada. kebutuhan. penyediaan air bersih/minum di kecamatan dan pemukiman secara ideal didekati dengan penggunaan angka standar yang telah ditetapkan yaitu minimal 60 l/hari/kapita dan maksimal 120 l/hari/kapita. Ditempat relokasi sendiri sudah disediakan prasarana jaringan air bersih sehingga memudahkan masyarakat yang akan pindah ke tempat relokasi yang baru.

b. **Jaringan Listrik**

PLN memberikan pelayanan kepada warga di tempat relokasi berupa jaringan listrik yang masuk dari gardu listrik yang terdapat di wilayah Kota Namlea. Ditempat relokasi juga sudah disediakan prasarana jaringan listrik yang mantinya akan melayani kebutuhan para masyarakat yang akan pindah ke tempat relokasi. Untuk pendistribusian jaringan listrik sudah maksimal. akan

tetapi di Kota Namlea juga biasanya dilakukan pemadaman listrik yang memakan waktu yang agak lama.

c. **Jaringan Pembuangan Sampah**

Untuk bagian pembuangan sampah di tempat relokasi ini tidak mempunyai tempat pembuangan sampah yang berskala besar, akan tetapi penduduk membuang sampah di tempat sampah didepan rumahnya masing-masing yang kemudian diambil oleh petugas sampah yang mereka bayar, lalu di buang ke TPS.

d. **Jaringan Komunikasi**

Untuk jaringan telekomunikasi, di tempat relokasi sendiri sudah tidak lagi menggunakan telepon rumah untuk berkomunikasi, sarana telekomunikasi berupa telepon hanya digunakan di perkantoran. Sedangkan untuk yang menggunakan telepon pribadi atau handphone, di Kota Namlea sudah tersedia tower yang bisa menjangkau seluruh Kota Namlea sehingga permasalahan komunikasi tidak sulit untuk di lakukan.

e. **Jaringan Jalan**

Tempat relokasi sendiri termasuk ke dalam jalan lokal, karena termasuk di dalam kota dan hanya melayani angkutan setempat dengan perjalan yang relatif dekat dan kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk ke tempat relokasi tidak di batasi. Untuk kondisi jaringan jalan sudah bagus karena dilengkapi dengan aspal di sepanjang jalannya.

Berdasarkan kondisi di atas maka disimpulkan bahwa letak tempat relokasi yang jaraknya relatif dekat dengan pusat kegiatan di Kota Namlea memudahkan masyarakat untuk beraktifitas dan memenuhi kebutuhan mereka masing-masing tanpa memikirkan jarak tempuh yang agak jauh. Untuk kondisi prasarana di tempat relokasi, perlunya perbaikan jaringan pdam agar distribusi air ke tempat relokasi lancar dan juga perbaikan sarana jaringan listrik sehingga tidak terjadi pemadaman listrik yang memakan waktu lama.

tetapi di Kota Namlea juga biasanya dilakukan pemadaman listrik yang memakan waktu yang agak lama.

c. Jaringan Pembangan Sampah

Untuk bagian pembuangan sampah di tempat relokasi ini tidak mempunyai tempat pembuangan sampah yang berskala besar, akan tetapi pendudukk membuang sampah di tempat sampah didepan rumahnya masing-masing yang kemudian diambil oleh petugas sampah yang mereka bayar, lalu di buang ke TPS.

d. Jaringan Komunikasi

Untuk jaringan telekomunikasi, di tempat relokasi sendiri sudah tidak lagi menggunakan telepon rumah untuk berkomunikasi, semua telekomunikasi berupa telepon hanya digunakan di perkantoran. Sedangkan untuk yang menggunakan telepon pribadi atau handphone, di Kota Namlea sudah tersedia tower yang bisa menjangkau seluruh Kota Namlea sehingga permasalahan komunikasi tidak sulit untuk di lakukan.

e. Jaringan Jalan

Tempat relokasi sendiri termasuk ke dalam jalan lokal. karena termasuk di dalam kota dan hanya melayani angkutan setempat dengan perjalan yang relatif dekat dan kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk ke tempat relokasi tidak di batasi. Untuk kondisi jaringan jalan sudah bagus karena dilengkapi dengan aspal di sepanjang jalannya.

Berdasarkan kondisi di atas maka disimpulkan bahwa letak tempat relokasi yang jaraknya relatif dekat dengan pusat kegiatan di Kota Namlea memudahkan masyarakat untuk beraktifitas dan menemukh kebutuhan mereka masing-masing tanpa memikirkan jarak tempuh yang agak jauh. Untuk kondisi prasarana di tempat relokasi, perlunya perbaikan jaringan dalam agar distribusi air ke tempat relokasi lancar dan juga perbaikan semua jaringan listrik sehingga tidak terjadi pemadaman listrik yang memakan waktu lama.

Tempat Relokasi		
Jenis Sarana	Jumlah (unit)	Jarak
Sarana Perkantoran		
▪ Kantor pemerintahan	16	▪ 2 km-3 km
▪ Kantor Desa	1	▪ 1 Km-2 Km
▪ Kantor Polisi/ Abri	2	▪ 3km-4km
▪ Kantor Pos	1	▪ 1 Km-2 Km
▪ Bank	2	▪ 1 Km-2 Km

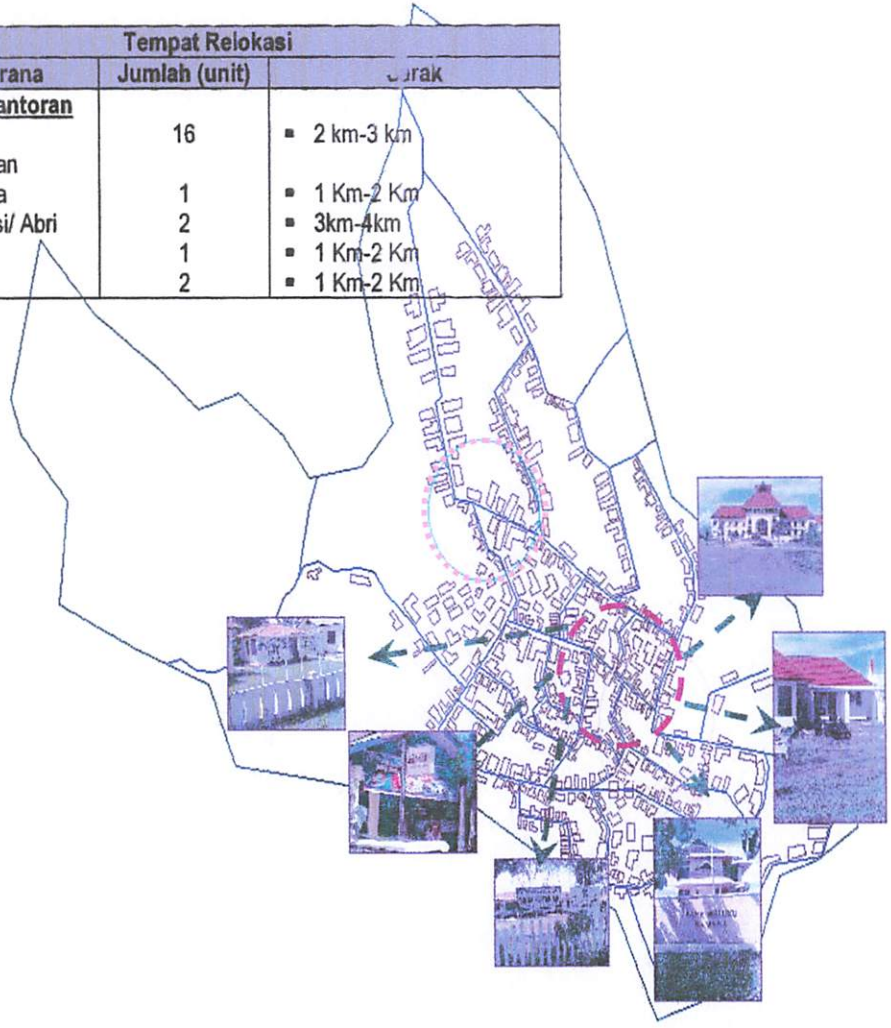

IDENTIFIKASI KONDISI SARANA PRASARANA DI TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI DI DESA JIKUMERASA DAN DI TEMPAT RELOKASI KOTA NAMLEA

JUDUL PETA
SARANA PERKANTORAN TEMPAT RELOKASI DI KOTA NAMLEA

NOMOR PETA : 3.2

LEGENDA :

- BATAS KECAMATAN
- JALAN
- PERMUKIMAN
- PUSAT KOTA NAMLEA
- TEMPAT RELOKASI

JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG
2010

SKALA . 1:25.000

SUMBER : PEMKAB BURU

Tempat Relokasi		
Jenis Sarana	**Jumlah (unit)**	**Jarak**
Sarana Pendidikan		
▪ TK	2	▪ 100-500 meter
▪ SD	4	▪ 500-1km Km
▪ SMP	2	▪ 1 Km-2 Km
▪ SMA	2	▪ 2 Km -3 Km
▪ Universitas	0	▪ Ditempuh selama 1 hari dengan menggunakan kapal laut.

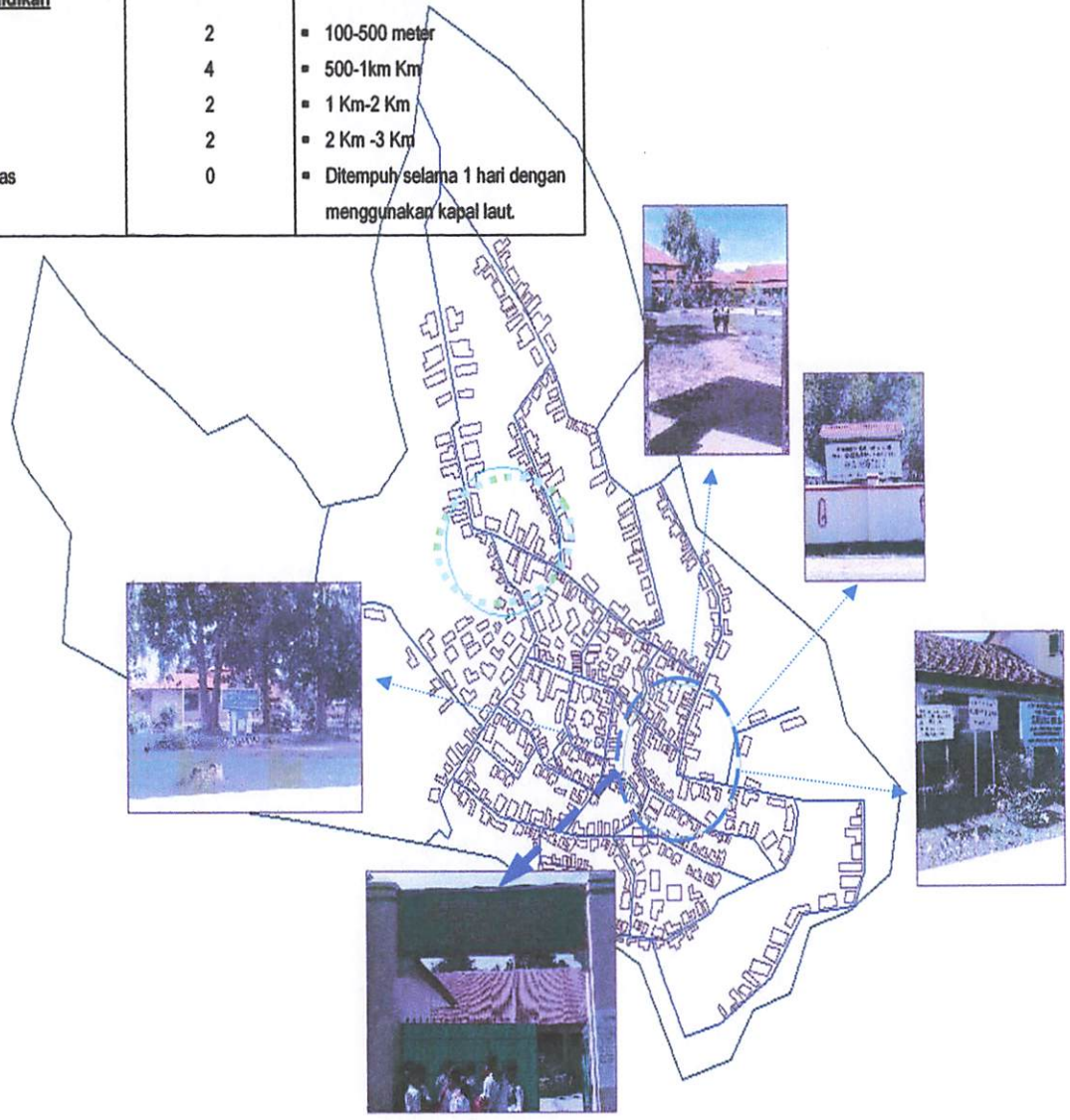

IDENTIFIKASI KONDISI SARANA PRASARANA DI TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI DI DESA JIKUMERASA DAN DI TEMPAT RELOKASI KOTA NAMLEA

JUDUL PETA
SARANA PENDIDIKANTEMPAT RELOKASI DI KOTA NAMLEA

NOMOR PETA : 3.1

LEGENDA :

- : BATAS KECAMATAN
- : JALAN
- : PERMUKIMAN
- : PUSAT KOTA NAMLEA
- : TEMPAT RELOKASI

JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG
2010

SKALA . 1: 25.000

SUMBER : PEMKAB BURU

Tempat Relokasi		
Jenis Sarana	Jumlah (unit)	Jarak
Sarana Pendidikan		
• TK	2	• 100-300 meter
• SD	4	• 300-1km Km
• SMP	2	• 1 Km-2 Km
• SMA	2	• 2 Km -3 Km
• Universitas	0	• Disesuaikan dengan kebutuhan

Tempat Relokasi		
Jenis Sarana	Jumlah (unit)	Jarak
Sarana Peribadatan		
▪ Masjid	3	▪ 500 meter–1 Km
▪ Musholla	1	▪ 100 meter-500meter
▪ Gereja	1	▪ 1 Km-2 Km
▪ Pura	0	▪ Ditempuh selama 1 hari dengan menggunakan kapal laut.
▪ Wihara, dll	0	▪ Ditempuh selama 1 hari dengan menggunakan kapal laut.

IDENTIFIKASI KONDISI SARANA PRASARANA DI TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI DI DESA JIKUMERASA DAN DI TEMPAT RELOKASI KOTA NAMLEA

JUDUL PETA
SARANA PERIBADATAN TEMPAT RELOKASI DI KOTA NAMLEA

NOMOR PETA : 3.3

LEGENDA :

- :BATAS KECAMATAN
- :JALAN
- :PERMUKIMAN
- :PUSAT KOTA NAMLEA
- :TEMPAT RELOKASI

JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG
2010

SKALA . 1: 25.000

SUMBER : PEMKAB BURU

Tempat Relokasi		
Jenis Sarana	**Jumlah (unit)**	**Jarak**
Sarana Kesehatan		
▪ Rumah Sakit	1	▪ 2 Km- 3 Km
▪ Puskesmas	1	▪ 500 meter–1Km
▪ Klinik Bersalin	1	▪ 1 Km-2 Km
▪ Praktik Dokter	3	▪ 1 Km-2 Km
▪ Apotik	1	▪ 1 Km-2 Km
▪ Posyandu	1	▪ 100 meter-500meter
▪ Puskesmas Pembantu	1	▪ 100 meter-500meter

IDENTIFIKASI KONDISI SARANA PRASARANA DI TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI DI DESA JIKUMERASA DAN DI TEMPAT RELOKASI KOTA NAMLEA

JUDUL PETA
SARANA KESEHATAN DI TEMPAT RELOKASI DI KOTA NAMLEA

NOMOR PETA : 3.4

LEGENDA :

- : BATAS KECAMATAN
- : JALAN
- : PERMUKIMAN
- : PUSAT KOTA NAMLEA
- : TEMPAT RELOKASI

JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
M A L A N G
2010

SKALA . 1: 25.000

SUMBER : PEMKAB BURU

Tanah Merah
Jarak Sarana
Sarana Kesehatan
Rumah Sakit Umum
Puskesmas
Klinik Kesehatan
Apotik
Pos Polisi
Pos Pemadam
Pendidikan
Taman Kanak-kanak
Sekolah Dasar
Sekolah Menengah Pertama
Sekolah Menengah Atas
Perguruan Tinggi
Sarana Peribadatan
Masjid
Gereja
Pura
Vihara
Sarana Perdagangan
Pasar
Pertokoan
Sarana Pemerintahan
Kantor Pemerintah
Kantor Kelurahan
Kantor Kecamatan
Sarana Olahraga
Lapangan Olahraga
Gedung Olahraga
Sarana Transportasi
Terminal
Stasiun
Halte
Sarana Pelayanan Umum
Kantor Pos
Kantor Telepon
Kantor Polisi
Pemadam Kebakaran
Sarana Rekreasi
Taman
Taman Bermain
Taman Hiburan
Taman Rekreasi
Jumlah (unit)
2 Km - 3 Km
1 Km - 2 Km
500 m - 1 Km
250 meter - 500 meter
100 meter - 250 meter
Jarak
Tanah Merah

Tempat Relokasi		
Jenis Sarana	**Jumlah (unit)**	**Jarak**
Sarana perdagangan dan jasa		
▪ Pasar	1	▪ 2 km-3km
▪ Pusat Perbelanjaan	2	▪ 1km-2km
▪ Warung	6	▪ 100 meter -500 meter
▪ Kios	8	▪ 100 meter-500 meter

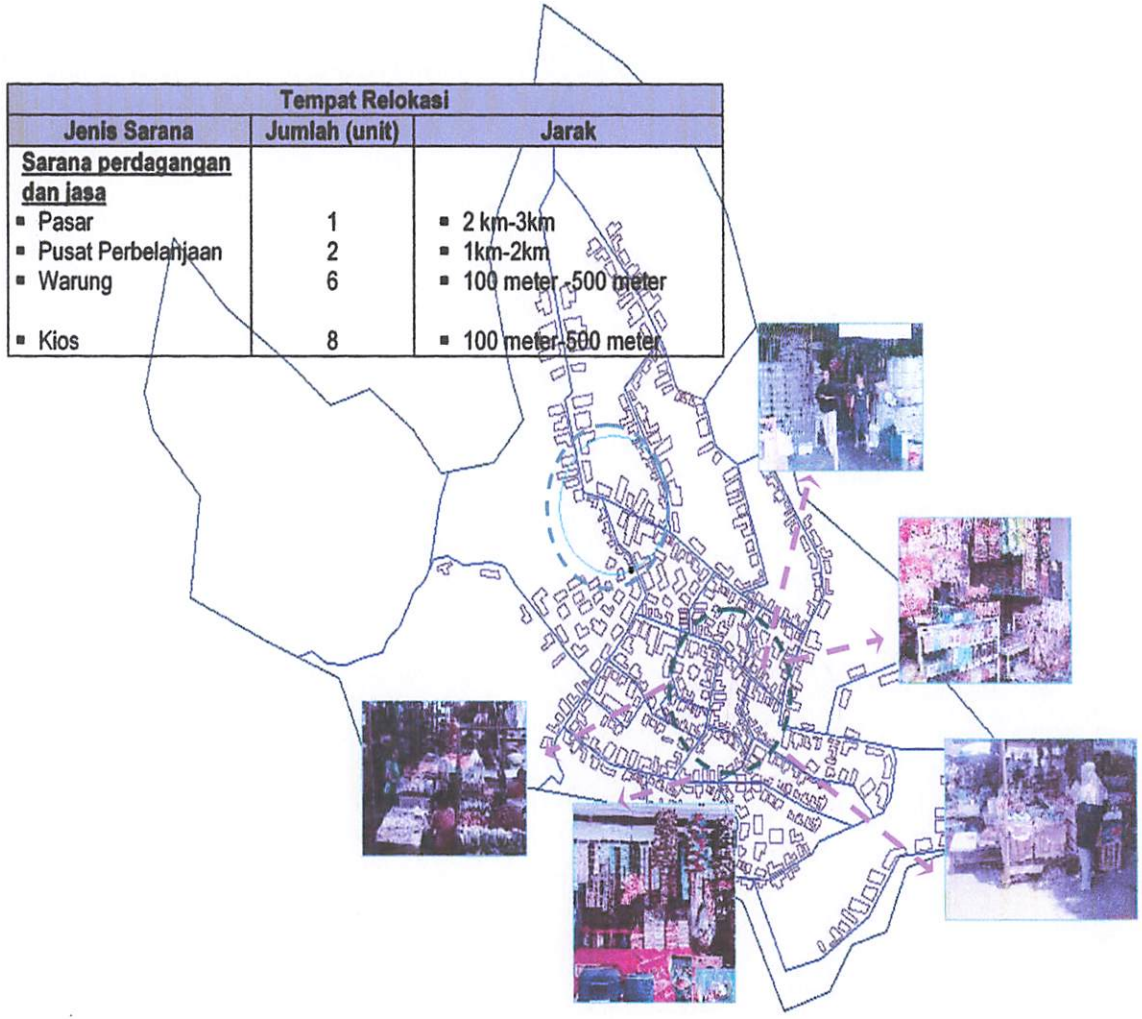

IDENTIFIKASI KONDISI SARANA PRASARANA DI TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI DI DESA JIKUMERASA DAN DI TEMPAT RELOKASI KOTA NAMLEA

JUDUL PETA
SARANA PERDAGANGAN DAN JASA DI TEMPAT RELOKASI DI KOTA NAMLEA

NOMOR PETA : 3.5

LEGENDA :

- : BATAS KECAMATAN
- : JALAN
- : PERMUKIMAN
- : PUSAT KOTA NAMLEA
- : TEMPAT RELOKASI

JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
M A L A N G
2010

SKALA . 1: 25.000

SUMBER : PEMKAB BURU

Tempat Rekreasi		
Jenis Sarana	Jumlah (unit)	Jarak
Sarana pendapatan dan jasa		
▪ Pasar	1	▪ 2 km-3km
▪ Pusat Perbelanjaan	2	▪ 1km-2km
▪ Warung	6	▪ 100 meter -500 meter
▪ Kios	8	▪ 100 meter-500 meter

3.3.3 Analisa Perbandingan Sarana Prasarana Di Tempat Penampungan Dan Tempat Relokasi

Analisa perbandingan digunakan untuk membuat perbandingan antara kondisi sarana prasarana di tempat penampungan dan kondisi sarana prasarana di tempat relokasi sehingga nantinya akan mendapatkan sebuah kondisi tempat tinggal yang layak untuk di tempati dilihat dari faktor kelengkapan sarana, kondisi prasarana serta jarak yang dipakai untuk menjangkau sebuah tempat kegiatan. Lebih jelas mengenai komparasi kondisi sarana prasarana di tempat penampungan dan tempat relokasi dapa dilihat pada tabel 3.19 .

Dari hasil analisa perbandingan dapat dilihat bahwa kondisi sarana di tempat penampungan tidak memadai dan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat melakukan perjalanan yang agak jauh ke Kota Namlea dengan waktu tempuh sekitar 2 jam dan dengan jarak >20 km untuk melakukan aktifitas dan mencukupi kebutuhan mereka.

Untuk sarana pendidikan di tempat penampungan hanya memiliki 1 TK dan 1 SD, sehingga masyarakat yang berusia sekolah antara SMP dan SMA harus melakukan perjalanan ke luar tempat penampungan yang berada pada Desa Jikumerasa tetapi masih berada dalam 1 kecamatan dengan jarak 6-20km untuk belajar, begitu pula sebaliknya masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai pns juga harus melakukan perjalanan yang agak jauh untuk mencapai tempat kerja mereka. Masyarakat juga melakukan perjalanan jauh untuk menjangkau sarana kesehatan dengan jarak 15-20 di tempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor karena di tempat penampungan sarana kesehatan tidak lengkap. Sarana perdagangan dan jasa hanya terdapat 1 unit pasar yang melayani kebutuhan masyarakat di tempat penampungan, untuk kebutuhan mereka, masyarakat biasanya melakukan perjalanan ke Kota Namlea dengan jarak tempuh antara 15-20km untuk mencapai pusat perbelanjaan, dan juga di tempat penampungan kondisi sarana mck sangat minim sekali dan digunakan secara bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan.

Sarana di tempat relokasi yang terletak di Kota Namlea sudah mencukupi kebutuhan masyarakat setempat dimana jumlah sarana pendidikan yaitu jarak dari

3.3.3 Analisa Perbandingan Sarana Prasarana Di Tempat Penampungan Dan Tempat Relokasi

Analisa perbandingan digunakan untuk membuat perbandingan antara kondisi sarana prasarana di tempat penampungan dan kondisi sarana prasarana di tempat relokasi sehingga nantinya akan mendapatkan sebuah kondisi tempat tinggal yang layak untuk di tempati dilihat dari faktor kelengkapan sarana. kondisi prasarana serta jarak yang dipakai untuk menjangkau sebuah tempat kegiatan. Lebih jelas mengenai komparasi kondisi sarana prasarana di tempat penampungan dan tempat relokasi dapa dilihat pada tabel 3.19 .

Dari hasil analisa perbandingan dapat dilihat bahwa kondisi sarana di tempat penampungan tidak memadai dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. sehingga masyarakat melakukan perjalanan yang agak jauh ke Kota Namlea dengan waktu tempuh sekitar 2 jam dan dengan jarak >20 km untuk melakukan aktifitas dan memenuhi kebutuhan mereka.

Untuk sarana pendidikan di tempat penampungan hanya memiliki 1 TK dan 1 SD, sehingga masyarakat yang berusia sekolah antara SMP dan SMA harus melakukan perjalanan ke luar tempat penampungan yang berada pada Desa Jikumerasa tetapi masih berada dalam 1 kecamatan dengan jarak 6-20km untuk belajar. begitu pula sebaliknya masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai pns juga harus melakukan perjalanan yang agak jauh untuk mencapai tempat kerja mereka. Masyarakat juga melakukan perjalanan jauh untuk menjangkau sarana kesehatan dengan jarak 15-20 di tempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor karena di tempat penampungan sarana kesehatan tidak lengkap. Sarana perdagangan dan jasa hanya terdapat 1 unit pasar yang melayani kebutuhan masyarakat di tempat penampungan. untuk kebutuhan mereka. masyarakat biasanya melakukan perjalanan ke Kota Namlea dengan jarak tempuh antara 15-20km untuk mencapai pusat perbelanjaan. dan juga di tempat penampungan kondisi sarana mck sangat minim sekali dan digunakan secara bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan.

Sarana di tempat relokasi yang terletak di Kota Namlea sudah memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dimana jumlah sarana pendidikan yaitu jarak dari

tempat relokasi ke sarana pendidikan berupa TK sebanyak 2 unit, SD sebanyak 4 unit, SMP sebanyak 2 unit dan SMA sebanyak 2 unit dengan jarak tempuh dari tempat relokasi ke sarana pendidikan antara 100 meter-3 km, untuk perguruan tinggi tidak terdapat di Kota Namlea.

Untuk sarana kesehatan yang terdapat di Kota Namlea yaitu rumah sakit 1 unit puskesmas 1 unit, klinik bersalin 1 unit, praktik dokter 3 unit, apotik 1 unit, posyandu 1 unit serta puskesmas pembantu sebanyak 1 unit dengan jarak dari temapt relokasi antara 1 km-4 km.

Sarana perdagangan di tempat relokasi yang terdapat di Kota Namlea dinilai sudah mencukupi kebutuhan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari kondisi sarana yang ada, dimana pasar 1unit, pusat perbelanjaan 2 unit, warung sebanyak 6 unit dan kios sebanyak 8 unit, jarak tempuh antara tempat relokasi dengan sarana perdagangan dan jasa adalah 100 m-3 km.

tempat relokasi ke sarana pendidikan berupa TK sebanyak 2 unit. SD sebanyak 4 unit. SMP sebanyak 2 unit dan SMA sebanyak 2 unit dengan jarak tempuh dari tempat relokasi ke sarana pendidikan antara 100 meter-3 km, untuk perguruan tinggi tidak terdapat di Kota Namlea.

Untuk sarana kesehatan yang terdapat di Kota Namlea yaitu rumah sakit 1 unit puskesmas 1 unit. klinik bersalin 1 unit. praktik dokter 3 unit. apotik 1 unit. posyandu 1 unit serta puskesmas pembantu sebanyak 1 unit dengan jarak dari tempat relokasi antara 1 km-4 km.

Sarana perdagangan di tempat relokasi yang terdapat di Kota Namlea dimiliki sudah mencukupi kebutuhan masyarakat. hal ini dapat dilihat dari kondisi sarana yang ada, dimana pasar 1unit. pusat perbelanjaan 2 unit. warung sebanyak 6 unit dan kios sebanyak 8 unit. jarak tempuh antara tempat relokasi dengan sarana perdagangan dan jasa adalah 100 m-3 km.

Tabel 3.20
Hasil Perbandingan Sarana di Tempat Penampungan dan Tempat Relokasi

Tempat Penampungan			Tempat Relokasi			Keterangan
Jenis Sarana	Jumlah (unit)	Jarak	Jenis Sarana	Jumlah (unit)	Jarak	
Sarana Pendidikan			**Sarana Pendidikan**			Untuk sarana pendidikan di tempat penampungan dan tempat relokasi dapat dilihat bahwa di tempat relokasi jumlahnya sangat banyak yang dapat melengkapi kebutuhan masyarakat dan juga memiliki jarak yang relatif terjangkau dari tempat relokasi, sehingga masyarakat yang ada bisa menempuh dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda, dan juga masyarakat tidak perlu bersekolah di luar tempat tinggal mereka seperti di tempat penampungan dan menempuh jarak yang jauh.
▪ TK	1	▪ 500 meter-1 km	▪ TK	2	▪ 100-500 meter	
▪ SD	1	▪ 500 meter-1 km	▪ SD	4	▪ 500-1km Km	
▪ SMP	0	▪ 6-10 Km	▪ SMP	2	▪ 1 Km-2 Km	
▪ SMA	0	▪ 15-20 Km	▪ SMA	2	▪ 2 Km -3 Km	
▪ Universitas	0	▪ Memakan waktu 1 hari perjalanan dengan menggunakan kapal laut	▪ Universitas	0	▪ Ditempuh selama 1 hari dengan menggunakan kapal laut.	
Sarana Perkantoran			**Sarana Perkantoran**			Sarana perkantoran di tempat penampungan hanya terdapat kantor desa, untuk masyarakat yang bekerja sebagai PNS atau yang bekerja di sektor formal biasanya akan tinggal di Kota Namlea dan hari libur baru bisa balik ke tempat penampungan dikarenakan jaraknya yang jauh ke pusat kota, sedangkan di tempat relokasi masyarakat hanya akan menempuh jarak sekitar 500meter -4km dengan menggunakan kendaraan bermotor atau ojek.
▪ Kantor pemerintahan	0	▪ 15-20 Km	▪ Kantor pemerintahan	16	▪ 2 km-3 km	
▪ Kantor Desa	1	▪ 500 M-2 Km	▪ Kantor Desa	1	▪ 1 Km-2 Km	
▪ Kantor Polisi/ Abri	0	▪ 15-20 Km	▪ Kantor Polisi/ Abri	2	▪ 3km-4km	
▪ Kantor Pos	0	▪ 15-20 Km	▪ Kantor Pos	1	▪ 1 Km-2 Km	
▪ Bank	0	▪ 15-20 Km	▪ Bank	2	▪ 1 Km-2 Km	

Tabel 3.20

Hasil Perbandingan Sarana di Tempat Penampungan dan Tempat Relokasi

Tempat Penampungan			Tempat Relokasi			Keterangan
Jenis Sarana	Jumlah (unit)	Jarak	Jenis Sarana	Jumlah (unit)	Jarak	
Sarana Pendidikan			**Sarana Pendidikan**			Untuk sarana pendidikan di tempat penampungan dan tempat relokasi dapat dilihat bahwa di tempat relokasi jumlahnya sangat banyak yang dapat melengkapi kebutuhan masyarakat dan juga memiliki jarak yang relatif terjangkau dan tempat relokasi, sehingga masyarakat yang ada bisa menempuh dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda, dan juga masyarakat tidak perlu bersekolah di luar tempat tinggal mereka seperti di tempat penampungan dan menempuh jarak yang jauh
▪ TK	1	▪ 500 meter-1 km	▪ TK	2	▪ 100-500 meter	
▪ SD	1	▪ 500 meter-1 km	▪ SD	4	▪ 500-1km Km	
▪ SMP	0	▪ 6-10 Km	▪ SMP	2	▪ 1 Km-2 Km	
▪ SMA	0	▪ 15-20 Km	▪ SMA	2	▪ 2 Km -5 Km	
▪ Universitas	0	▪ Memakan waktu 1 hari perjalanan dengan menggunakan kapal laut	▪ Universitas	0	▪ Ditempuh selama 1 hari dengan menggunakan kapal laut.	
Sarana Perkantoran			**Sarana Perkantoran**			Sarana perkantoran di tempat penampungan hanya terdapat kantor desa, untuk masyarakat yang bekerja sebagai PNS atau yang bekerja di sektor formal biasanya akan tinggal di Kota Hamlea dan hari libur baru bisa balik ke tempat penampungan dikarenakan jaraknya yang jauh ke pusat kota, sedangkan di tempat relokasi masyarakat hanya akan menempuh jarak sekitar 500meter -1km dengan menggunakan kendaraan bermotor atau ojek.
▪ Kantor pemerintahan	0	▪ 15-20 Km	▪ Kantor pemerintahan	15	▪ 2 Km-3 km	
▪ Kantor Desa	1	▪ 500 M-2 Km	▪ Kantor Desa	1	▪ 1 Km-2 Km	
▪ Kantor Polisi/ Abri	0	▪ 15-20 Km	▪ Kantor Polisi/ Abri	2	▪ 3km-4km	
▪ Kantor Pos	0	▪ 15-20 Km	▪ Kantor Pos	1	▪ 1 Km-2 Km	
▪ Bank	0	▪ 15-20 Km	▪ Bank	2	▪ 1 Km-2 Km	

Tempat Penampungan			Tempat Relokasi			Keterangan
Sarana Peribadatan			**Sarana Peribadatan**			Untuk sarana peribadatan, di tempat penampungan atau tempat relokasi masing-masing tersedia sarana peribadatan yang mudah dijangkau, tetapi di tempat penampungan tidak terdapat gereja karena mayoritas penduduk beragama muslim. Ditempat relokasi sarana peribadatan berupa gereja terletak di pusat Kota Namlea dengan jarak antara 1km-2km dengan menggunakan kendaraan bermotor atau menggunakan ojek.
▪ Masjid	1	▪ 500 M-1 Km	▪ Masjid	3	▪ 500 meter–1 Km	
▪ Musholla	1	▪ 100 -500meter	▪ Musholla	1	▪ 100 meter-500meter	
▪ Gereja	0	▪ 15-20 Km	▪ Gereja	1	▪ 1 Km-2 Km	
▪ Pura	0	▪ Memakan waktu 1 hari perjalanan dengan menggunakan kapal laut	▪ Pura	0	▪ Ditempuh selama 1 hari dengan menggunakan kapal laut.	
▪ Wihara	0	▪ Memakan waktu 1 hari perjalanan dengan menggunakan kapal laut	▪ Wihara, dll	0	▪ Ditempuh selama 1 hari dengan menggunakan kapal laut.	
Sarana Kesehatan			**Sarana Kesehatan**			Untuk sarana kesehatan di tempat penampungan tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, hal ini dikarenakan kondisi sarana kesehatan yang kurang lengkap dan jarak yang jauh ke sarana kesehatan, sedangkan di tempat relokasi, sarana kesehatan yang terdapat hanya berupa posyandu dan puskesmas pembantu yang tersedia di tempat relokasi sedangkan untuk menjangkau sarana kesehatan lainnya sangatlah dekat dengan jarak sekitar 100 meter-2km dengan menggunakan kendaraan bermotor atau menggunakan ojek.
▪ Rumah Sakit	0	▪ 15-20 Km	▪ Rumah Sakit	1	▪ 2 Km- 3 Km	
▪ Puskesmas	1	▪ 500 M-2 Km	▪ Puskesmas	1	▪ 500 meter–1Km	
▪ Klinik Bersalin	0	▪ 15-20 Km	▪ Klinik Bersalin	1	▪ 1 Km-2 Km	
▪ Praktik Dokter	0	▪ 15-20 Km	▪ Praktik Dokter	3	▪ 1 Km-2 Km	
▪ Apotik	0	▪ 15-20 Km	▪ Apotik	1	▪ 1 Km-2 Km	
▪ Puskesmas Pembantu	1	▪ 100 -500 meter	▪ Posyandu	1	▪ 100 meter-500meter	
▪ Posyandu	1	▪ 100-500 meter	▪ Puskesmas Pembantu	1	▪ 100 meter-500meter	

Sarana Peribadatan		Tempat Pemanpungan	Sarana Peribadatan	Tempat Relokasi		Keterangan
▪ Masjid						Untuk sarana peribadatan, di tempat pemanpungan atau tempat relokasi masing-masing tersedia sarana peribadatan yang mudah dijangkau, tetapi di tempat pemanpungan tidak terdapat gereja karena mayoritas penduduk beragama muslim Ditempat relokasi sarana peribadatan berupa gereja terletak di pusat Kota Namlea dengan jarak antara 1km-2km dengan menggunakan kendaraan bermotor atau menggunakan ojek.
▪ Musholla	1	▪ 500 M-1 Km	▫ Masjid	3	▫ 500 meter–1 Km	
▪ Gereja	1	▪ 100 -500meter	▫ Musholla	1	▫ 100 meter-500meter	
▪ Pura	0	▪ 15-20 Km	▫ Gereja	1	▫ 1 Km-2 Km	
	0	▪ Memakan waktu 1 hari perjalanan dengan menggunakan kapal laut	▫ Pura	0	▫ Ditempuh selama 1 hari dengan menggunakan kapal laut	
▪ Wihara	0	▪ Memakan waktu 1 hari perjalanan dengan menggunakan kapal laut	▫ Wihara, dll	0	▫ Ditempuh selama 1 hari dengan menggunakan kapal laut.	
Sarana Kesehatan			Sarana Kesehatan			Untuk sarana kesehatan di tempat pemanpungan tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, hal ini dikarenakan kondisi sarana kesehatan yang kurang lengkap dan jarak yang jauh ke sarana kesehatan, sedangkan di tempat relokasi, sarana kesehatan yang terdapat hanya berupa posyandu dan puskesmas pembantu yang tersedia di tempat relokasi sedangkan untuk meniangkau sarana kesehatan lainnya sangatlah dekat dengan jarak sekitar 100 meter-2km dengan menggunakan kendaraan bermotor atau menggunakan ojek.
▪ Rumah Sakit	0	▪ 15-20 Km	▫ Rumah Sakit	1	▫ 2 Km- 3 Km	
▪ Puskesmas	1	▪ 500 M-2 Km	▫ Puskesmas	1	▫ 500 meter–1Km	
▪ Klinik Bersalin	0	▪ 15-20 Km	▫ Klinik Bersalin	1	▫ 1 Km-2 Km	
▪ Praktik Dokter	0	▪ 15-20 Km	▫ Praktik Dokter	3	▫ 1 Km-2 Km	
▪ Apotik	0	▪ 15-20 Km	▫ Apotik	1	▫ 1 Km-2 Km	
▪ Puskesmas Pembantu	1	▪ 100 -500 meter	▫ Posyandu	1	▫ 100 meter-500meter	
▪ Posyandu	1	▪ 100-500 meter	▫ Puskesmas Pembantu	1	▫ 100 meter-500meter	

Tempat Penampungan			Tempat Relokasi			Keterangan
Sarana Perdagangan Dan Jasa			**Sarana perdagangan dan jasa**			Sarana perdagangan dan jasa di tempat penampungan hanya tersedia pasar yang melayani kebutuhan seluruh desa dan juga tersedia warung dan kios di tempat penampungan sedangkan untuk pusat perbelanjaan, masyarakat biasanya akan melakukan perjalanan ke Kota Namlea untuk membeli kebutuhannya masing-masing dengan jarak mencapai 30km dengan waktu 2 jam menggunakan kendaraan bermotor. Sedangkan sarana perdagangan dan jasa di tempat relokasi terdapat warung dan kios, untuk sarana perdagangan dan jasa berupa pasar dan pusat perbelanjaan terdapat di pusat Kota Namlea dengan jarak antara 1km-3km dengan menggunakan ojek, jalan kaki dan juga bisa menggunakan kendaraan bermotor.
▪ Pasar			▪ Pasar			
▪ Pusat Perbelanjaan	1	▪ 500 M-1 Km	▪ Pusat Perbelanjaan	1	▪ 2 km-3km	
▪ Warung	0	▪ 15-20 Km	▪ Warung	2	▪ 1km-2km	
▪ Kiios	4	▪ 100 meter-500 meter	▪ Kios	6	▪ 100 meter -500 meter	
	5	▪ 100 meter-500 meter		8	▪ 100 meter-500 meter	

Sarana Perdagangan dan Jasa		Tempat Perhentian		Tempat Relokasi		Keterangan
			Sarana perdagangan dan jasa			
▪ Pasar			▪ Pasar			
▪ Pusat Perbelanjaan	1	▪ 500 M-1 Km	▪ Pusat Perbelanjaan	1	▪ 2 km-3km	selurih desa dan juga tersedia warung
▪ Warung	0	▪ 15-20 Km	▪ Warung	2	▪ 1km-2km	dan kios di tempat penampungan
						sedangkan untuk pusat perbelanjaan,
▪ Kios	4	▪ 100 meter-500 meter	▪ Kios	6	▪ 100 meter -500 meter	masyarakat biasanya akan melakukan
		▪ 100 meter-500 meter			▪ 100 meter-500 meter	perjalanan ke Kota Namlea untuk
	5			8		membeli kebutuhannya missing-missing
						dengan jarak menempuh 30km dengan
						waktu 2 jam menggunakan kendaraan
						bermotor.
						Sedangkan sarana perdagangan dan
						jasa di tempat relokasi terdapat warung
						dan kios, untuk sarana perdagangan
						dan jasa berupa pasar dan pusat
						perbelanjaan terdapat di pusat Kota
						Namlea dengan jarak antara 1Km-3Km
						dengan menggunakan ojek, jalan kaki
						dan juga bisa menggunakan kendaraan
						bermotor.

Berdasarkan hasil analisa diatas dapat dilihat bahwa kondisi sarana di tempat relokasi sangat baik dan lengkap dan lebih terjangkau dibandingkan dengan kondisi sarana di tempat penampungan di Desa Jikumerasa. Dimana, aktifitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat yaitu bersekolah karena terdapat masyarakat yang berada pada usia sekolah, masyarakat yang bekerja sebagai pns dan melakukan kegiatan bekerja setiap hari dan juga melakukan kegiatan berbelanja untuk mencukupi kebutuhan mereka seriap hari, sehingga ketiga sarana diatas merupakan sarana yang paling penting untuk masyarakat bisa melakukan kegiatan sehari-hari.

Selanjutnya akan dibahas kondisi prasarana di tempat penampungan dan tempat relokasi, dimana dilakukan perbandingan antara kondisi jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan sampah dan jaringan jalan yang terdapat di tempat penampungan di Desa Namlea dan tempat relokasi yang terdapat di Kota Namlea. Untuk lebih jelasnya mengenai analisa komparasi kondisi sarana di tempat penampungan dan tempat relokasi dapat dilihat pada tabel 3.20

Berdasarakan analisa perbandingan untuk kondisi sarana diatas dapat diketahui bahwa pendistribusian jaringan air bersih di tempat relokasi menggunakan pdam dimana pendistribusiannya sangat lancar, sedangkan di tempat penampungan juga menggunakan pdam namun pendistribusiannya tidak lancar dan dibatasi pemakaiannya, sehingga masyarakat di tempat penampungan cenderung menggpunakan sumber air terdekat seperti sumur dan sungai sebagai sumber air bersih. Sedangkan di tempat relokasi masyarakat biasanya menggunakan sumur sebagai sumber air jika air pdam tidak berjalan lancar.

Jaringan listrik sudah tersedia di tempat penampungan namun pemakaiannya terbatas, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat pengungsi yang terdapat di tempat penampungan, sehingga PLN tidak bisa melayani dengan maksimal. Untuk jaringan listrik di tempat relokasi pelayanannya sudah maksimal karena tersedia di tiap-tiap rumah relokasi yang di bangun dan pemakaiannya tidak dibatasi.

Berdasarkan hasil analisa diatas dapat dilihat bahwa kondisi sarana di tempat rekreasi sungai baik dan lengkap dan lebih terjangkau dibandingkan dengan kondisi sarana di tempat pemandangan di Desa Jikumerasa. Dimana aktifitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat yaitu berekreasi karena terdapat masyarakat yang berada pada usia sekolah. masyarakat yang bekerja sebagai pns dan melakukan kegiatan bekerja setiap hari dan juga melakukan kegiatan berbelanja untuk mencukupi kebutuhan mereka setiap hari. sehingga kerja sarana diatas mendapatkan sarana yang paling penting untuk masyarakat bisa melakukan kegiatan sehari-hari.

Selanjutnya akan dibahas kondisi prasarana di tempat pemandangan dan tempat rekreasi. dimana dilakukan perbandingan antara kondisi jaringan air bersih. jaringan listrik. jaringan telekomunikasi. jaringan sanpah dan jaringan jalan yang terdapat di tempat pemandangan di Desa Namlea dan tempat rekreasi yang terdapat di Kota Namlea. Untuk lebih jelasnya mengenai analisa komparasi kondisi sarana di tempat pemandangan dan tempat rekreasi dapat dilihat pada tabel 3.20

Berdasarkan analisa perbandingan untuk kondisi sarana diatas dapat diketahui bahwa pendistribusian jaringan air bersih di tempat rekreasi menggunakan pdam dimana pendistribusianya sangat lancar. sedangkan di tempat pemandangan juga menggunakan pdam namun pendistribusianya tidak lancar dan dibatasi pemakaiannya. sehingga masyarakat di tempat pemandangan cenderung menggunakan sumber air terdekat seperti sumur dan sungai sebagai sumber air bersih. Sedangkan di tempat rekreasi masyarakat biasanya menggunakan sumur sebagai sumber air jika air pdam tidak terjalan lancar.

Jaringan listrik sudah tersedia di tempat pemandangan namun pemakaiannya terbatas. hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat pengguna yang terdapat di tempat pemandangan. sehingga PLN tidak bisa melayani dengan maksimal. Untuk jaringan listrik di tempat rekreasi pelayanannya sudah maksimal karena tersedia di tiap-tiap rumah rekreasi yang di bangun dan pemakaiannya tidak dibatasi.

Tabel 3.21
Hasil Perbandingan Prasarana
di Tempat Penampungan dan Tempat Relokasi

Tempat Penampungan		Tempat Relokasi		Kesimpulan
Jenis Prasarana	Keterangan	Jenis Prasarana	Keterangan	
Prasarana Jaringan Air Bersih		**Prasarana Jaringan Air Bersih**		Pendistribusian jaringan air bersih di tempat relokasi menggunakan pdam dimana pendistribusiannya sangat lancar, sedangkan di tempat penampungan juga menggunakan pdam namun pendistribusiannya tidak lancar dan dibatasi pemakaiannya, sehingga masyarakat di tempat penampungan cenderung menggunakan sumber air terdekat seperti sumur dan sungai sebagai sumber air bersih. Sedangkan di tempat relokasi masyarakat biasanya menggunakan sumur sebagai sumber air jika air pdam tidak berjalan lancar.
▪ Pdam	▪ Pendistribusian menggunakan pdam tidak lancar di tempat penampungan	▪ Pdam	▪ Pendistribusian menggunakan pdam sangat lancar di tempat relokasi	
▪ Sumur	▪ Tersedia di tempat penampungan, sehingga masyarakat umumnya menggunakan air dari sumur sebagai sumber air bersih.	▪ Sumur	▪ Tersedia di tempat relokasi, sehingga masyarakat umumnya juga menggunakan air dari sumur sebagai sumber air bersih.	
▪ Sungai	▪ Terdapat di Desa Jikumerasa dengan jarak sekitar 1 km, masyarakat biasanya menggunakan sebagai sumber air.	▪ Sungai	▪ Masyarakat tidak menggunakan sumber air bersih dari sungai, karena tidak terdapat sungai di Kota Namlea.	

Tabel 3.21
Hasil Perbandingan Prasarana
di Tempat Penampungan dan Tempat Relokasi

Tempat Penampungan		Tempat Relokasi		Kesimpulan
Jenis Prasarana	Keterangan	Jenis Prasarana	Keterangan	
Prasarana Jaringan Air Bersih		Prasarana Jaringan Air Bersih		Pendistribusian jaringan air bersih di tempat relokasi menggunakan pdam dimana pendistribusianya sangat lancar, sedangkan di tempat penampungan juga menggunakan pdam namun pendistribusianya tidak lancar dan dibutuhi pemakaianya sehingga masyarakat di tempat penampungan cenderung menggunakan sumber air terdekat seperti sumur dan sungai sedangkan sumber air bersih. Sedangkan di tempat relokasi masyarakat disanya menggunakan sumur sebagai sumber air jika air pdam tidak berjalan lancar
• Pdam	▪ Pendistribusian menggunakan pdam tidak lancar di tempat penampungan	• Pdam	▪ Pendistribusian menggunakan pdam sangat lancar di tempat relokasi	
• Sumur	▪ Tersedia di tempat penampungan, sehingga masyarakat umumnya menggunakan air dari sumur sebagai sumber air bersih.	• Sumur	▪ Tersedia di tempat relokasi, sehingga masyarakat umumnya juga menggunakan air dari sumur sebagai sumber air bersih.	
• Sungai	▪ Terdapat di Desa Jikumerasa dengan jarak sekitar 1 km, masyarakat disanya menggunakan sebagai sumber air.	• Sungai	▪ Masyarakat tidak menggunakan sumber air bersih dari sungai, karena tidak terdapat sungai di Kota Namlea.	

Tempat Penampungan		Tempat Relokasi		Kesimpulan
Prasarana Jaringan Listrik	Tersedia di tempat penampungan namun pemakaiaanya terbatas.	**Prasarana Jaringan Listrik**	Tersedia di tempat relokasi dan pemakaiannya tidak dibatasi	Jaringan listrik sudah tersedia di tempat penampungan namun pemakaiannya terbatas, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat pengungsi yang terdapat di tempat penampungan, sehingga PLN tidak bisa melayani dengan maksimal. Untuk jaringan listrik di tempat relokasi pelayanannya sudah maksimal karena tersedia di tiap-tiap rumah relokasi yang di bangun dan pemakaiannya tidak dibatasi.
Prasarana Jaringan Telekomunikasi	Hanya tersedia di kantor desa dan juga tidak ada tower di desa ini sehingga tidak memungkinkan untuk memakai telepon pribadi	**Prasarana Jaringan Telekomunikasi**	Hanya tersedia di kantor pemerintahan karena masyarakat tidak lagi menggunakan telepon rumah, adanya tower di kota Namlea sehingga masyarakat lebih memilih untuk menggunakan telepon genggam yang memudahkan komunikasi.	Jaringan telekomunikasi tidak terdapat di tempat penampungan, sehingga masyarakat kesulitan untuk berkomunikasi, masyarakat biasanya berjalan sejauh 4 km untuk mencari signal HP karena di tempat penampungan sendiri tidak terdapat tower untuk telepon genggam. Sedangkan di tempat relokasi, untuk telepon rumah hanya digunakan di perkantoran, karena masyarakat menggunakan telepon genggam untuk berkomunikasi karena adanya tower di sekitar tempat relokasi yang memudahkan komunikasi antar masyarakat.

Kesimpulan	Temuan Kelokasi		Temuan Pemampungan	
Terdapat jentik aedes terseleksi di lokasi penampungan umum berkaporit dan penampungan air dikarenakan penyakyuk wayang ini yang terdapat di lokasi penampungan. sedangkan PLN tidak pisa melayani dengan diskusinya. Untuk lokasi penampungan listrik di lokasi terdapat beberapa yang terseleksi di pisah-pisah untuk sudah maksimal karena terseleksi di lokasi yang di pandu dan berkoordinasi tidak efektif.	Terseleksi di lokasi terdapat dan berkoordinasi tidak efektif.	Terdapat jentik.	Terseleksi di lokasi terdapat umum penampungan berkaporit dan penampungan air.	Terdapat jentik.
Terdapat jentik aedes di lokasi penampungan umum berkaporit dan penampungan air. Telekomunikasi tidak terjadi antara petugas dengan masyarakat. Sedangkan di lokasi terdapat lower untuk telepon dengan lokasi. Untuk telepon dengan masyarakat. Karena di berkantor di lokasi. Sedangkan di lokasi terdapat lower untuk telepon dengan masyarakat. Karena di lokasi terdapat beberapa

Tempat Penampungan		Tempat Relokasi		Kesimpulan
Prasarana Jaringan Sampah	Tidak adanya petugas sampah di Desa ini, pembuangan sampah di lakukan dengan cara di timbun atau dibakar	**Prasarana Jaringan Sampah**	Masyarakat membuang sampah di tempat sampah didepan rumahnya masing-masing yang kemudian diambil oleh petugas sampah yang mereka bayar, lalu di buang ke TPS.	Untuk jaringan sampah di tempat penampungan, tidak terdapat TPS atau TPA sehingga masyarakat biasanya melakukan pembuangan dengan cara di timbun atau di bakar dan juga biasanya di buang ke laut. Sedangkan di tempat relokasi sendiri diambil oleh petugas sampah yang dibayar, bisa juga dibuang langsung ke TPS yang disediakan di tempat relokasi.
Prasarana Jaringan Jalan	Jalan di Tempat Penampungan menggunakan jalan tanah.	**Prasarana Jaringan Jalan**	Jalan di Tempat Relokasi sudah menggunakan aspal dengan jaringan jalan lokal.	Prasarana jaringan jalan di tempat penampungan sudah menggunakan jalan aspal dan juga merupakan jalan lokal yang hanya melayani kebutuhan daerah sekitar saja, begitu pula di tempat relokasi sudah menggunakan jalan aspal dengan jaringan jalan lokal.
Prasarana MCK	Prasarana mck di tempat penampungan kurang memadai dan kurang nyaman untuk digunakan secara bersama.	Prasarana MCK	Tersedia di setiap rumah	Untuk sarana MCK di tempat penampungan sangatlah kurang, hal ini bisa dilihat dengan jumlah MCK yang terbatas dan juga digunakan bersama oleh laki-laki dan perempuan sehingga kadang-kadang para wanita di tempat penampungan tidak nyaman dengan kondisi ini, sedangkan di tempat relokasi sendiri sudah disediakan sarana MCK di rumah-rumah relokasi yang sudah dibangun sehingga masyarakat tidak perlu merasa tidak nyaman lagi dengan kondisi yang ada.

Kesimpulan	Temuan Teknologi		Temuan Sosiokultural	
Untuk jaminan sampah di tempat pembuangan akhir tidak adopsi TPS atau TPA sepenuhnya masyarakat disarankan untuk membuang sampah di tempat pembuangan akhir tidak jauh dari lingkungan rumah tinggi dan bekerja sama dengan pihak kelurahan untuk pengelolaan

Tempat Penampungan		Tempat Relokasi		Kesimpulan
Prasarana Transportasi	Jaringan transportasi yang ada di tempat penampungan hanya berupa ojek, tidak terdapat angkutan umum.	**Prasarana Transportasi**	Jaringan transportasi yang ada di tempat relokasi hanya berupa ojek,dan tidak terdapat angkutan umum, sebagian besar masyarakat menggunakan kendaraan pribadi seperti kendaraan bermotor atau mobil pribadi.	Untuk prasarana transportasi dinilai kurang, karena hanya terdapat ojek untuk kendaraan yang digunakan, sehingga masyarakat tidak leluasa untuk melakukan aktifitas, disamping tidak efektif juga mengeluarkan biaya yang relatif lebih mahal daripada menggunakan angkutan umum.

Sumber: Hasil Analisa

Kesimpulan	Tempat Kejokesi		Tempat Pengambilan	
	Transaksi	Transportasi	Transaksi	Transportasi
Untuk transaksi transportasi digital kurang kesana insyaf terjadinya objek nuzuk kendaraan yang digunakan, sehingga masyarakat tidak lengsung nuzuk melakukan aktifitas, disampingi tidak efektif lagi sehingga mengakibatkan pisya yang terjadi lebih mahal daripada mengunakan sudaliasi umum.	Melihat transportasi yang ada sbs di tempat tejokesi insya penuba objek.dan tidak terjadinya sudaliasi mumu, sesbadisi pasar masyarakat mengunakan bipsdi sebagi kendaraan bipsdi kendaraan pemotor sisa mopli bipsdi.		Melihat transportasi yang ada sbs di tempat pengambilan insya penuba objek tidak terjadinya sudaliasi mumu.	

Jaringan telekomunikasi tidak terdapat di tempat penampungan, sehingga masyarakat kesulitan untuk berkomunikasi, masyarakat biasanya berjalan sejauh 4 km untuk mencari signal HP karena di tempat penampungan sendiri tidak terdapat tower untuk telepon genggam. Sedangkan di tempat relokasi, untuk telepon rumah hanya digunakan di perkantoran, karena masyarakat menggunakan telepon genggam untuk berkomunikasi karena adanya tower di sekitar tempat relokasi yang memudahkan komunikasi antar masyarakat.

Untuk jaringan sampah di tempat penampungan, tidak terdapat TPS atau TPA sehingga masyarakat biasanya melakukan pembuangan dengan cara di timbun atau di bakar dan juga biasanya di buang ke laut. Sedangkan di tempat relokasi sendiri diambil oleh petugas sampah yang dibayar, bisa juga dibuang langsung ke TPS yang disediakan di tempat relokasi.

Prasarana jaringan jalan di tempat penampungan sudah menggunakan jalan aspal dan juga merupakan jalan lokal yang hanya melayani kebutuhan daerah sekitar saja, begitu pula di tempat relokasi sudah menggunakan jalan aspal dengan jaringan jalan lokal.

Kondisi prasarana di tempat relokasi juga sangat lengkap bila dibandingkan dengan kondisi prasarana di tempat penampungan, sehingga memungkinkan masyarakat yang berada di tempat penampungan untuk pindah ke tempat relokasi yang baru dengan dilengkapi sarana prasarana yang memadai.

3.3.4 Analisa Skala Tingkat Pelayanan

Skala tingkat pelayanan meliputi skala tingkat pelayanan sarana di tempat penampungan dan tempat relokasi yang disesuaikan dengan standar penataan ruang tentang kawasan siap bangun (Peraturan Menteri No.32 tahun 2006 tentang kawasan siap bangun) hal ini untuk mengetahui tingkat pelayanan dari masing-masing sarana yang terdapat di tempat penampungan dan tempat relokasi. Pengukuran skala pelayanan ini memakai skor dengan interval 1-5 yang di dapat dari asumsi yaitu 5-sangat dekat, 4-dekat, 3-sedang, 2-jauh dan 1-sangat jauh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.21 dibawah ini.

Jaringan telekomunikasi tidak terdapat di tempat penampungan, sehingga masyarakat kesulitan untuk berkomunikasi. masyarakat biasanya berjalan sejauh 4 km untuk mencari sinyal HP karena di tempat penampungan sendiri tidak terdapat tower untuk telepon genggam. Sedangkan di tempat relokasi, untuk telepon rumah hanya digunakan di perkantoran, karena masyarakat menggunakan telepon genggam untuk berkomunikasi karena adanya tower di sekitar tempat relokasi yang memudahkan komunikasi antar masyarakat.

Untuk jaringan sampah di tempat penampungan, tidak terdapat TPS atau TPA sehingga masyarakat biasanya melakukan pembuangan dengan cara di timbun atau di bakar dan juga biasanya di buang ke laut. Sedangkan di tempat relokasi sendiri diambil oleh petugas sampah yang dibayar. bisa juga dibuang langsung ke TPS yang disediakan di tempat relokasi.

Prasarana jaringan jalan di tempat penampungan sudah menggunakan jalan aspal dan juga merupakan jalan lokal yang hanya melayani kebutuhan daerah sekitar saja. begitu pula di tempat relokasi sudah menggunakan jalan aspal dengan jaringan jalan lokal.

Kondisi prasarana di tempat relokasi juga sangat lengkap bila dibandingkan dengan kondisi prasarana di tempat penampungan. sehingga menumgkinkan masyarakat yang berada di tempat penampungan untuk pindah ke tempat relokasi yang baru dengan dilengkapi sarana prasarana yang memadai.

3.3.4 Analisa Skala Tingkat Pelayanan

Skala tingkat pelayanan meliputi skala tingkat pelayanan sarana di tempat penampungan dan tempat relokasi yang disesuaikan dengan standar pentaan ruang tentang kawasan siap bangun (Peraturan Menteri No.32 tahun 2006 tentang kawasan siap bangun) hal ini untuk mengetahui tingkat pelayanan dari masing-masing sarana yang terdapat di tempat penampungan dan tempat relokasi. Pengukuran skala pelayanan ini memakai skor dengan interval 1-5 yang di dapat dari asumsi yaitu 5-sangat dekat. 4-dekat. 3-sedang. 2-jauh dan 1-sangat jauh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.21 dibawah ini.

Dari hasil analisa skala tingkat pelayanan dapat diketahui bahwa untuk sarana pendidikan di tempat penampungan skala pelayanannya adalah untuk TK skor 3, SD skor 1 smp skor 1 dan sma skor 1 dan merupakan skor yang paling terendah.

Tempat relokasi mempunyai skor yang tertinggi yaitu 5 untuk TK, dan sisanya mempunyai skor 3 yaitu sedang.

Sarana kesehatan di tempat penampungan juga mempunyai skor terendah yaitu skor 1 dan 2 karena radius pelayanan yang jauh, sedangkan di tempat reloksi mempunyai radius pelayanan yang tinggi dengan skor 5 yaitu pada sarana kesehatan berupa rumah sakit dan klinik bersalin dan skor 4 pada sarana kesehatan berupa puskesmas, klinik bersalin, apotik, puskesmas pembantu dan posyandu yang terdapat disekitar tempat relokasi.

Untuk sarana perdagangan dan jasa, di tempat peampungan mempunyai skor 4 yaitu pada pasar, warung dan kios dimana jaraknya relatif dekat dari tempat penampungan pengungsi sedangkan untuk pusat perbelanjaan mempunyai skor 1 karena jaraknya yang sangat jauh dari tempat penampungan.

Sedangkan untuk sarana perdagangan dan jasa di tempat relokasi mempunyai skor antara 3-5, dengan skor tertinggi (5) yaitu pasar, skor 4 yaitu warung dan kios dan skor 3 yaitu pusat perbelanjaan.

Skala pelayanan yang tertinggi yaitu masyarakat yang mempunyai kebutuhan untuk melakukan kegiatan bersekolah karena dilakukan setiap hari, kegiatan perdagangan dan jasa, serta kegiatan kesehatan yang harus dilayani setiap hari, dan juga kegiatan perkantoran.

Dari hasil analisa yang dilakukan dapat diketahui skala pelayanan di tempat relokasi lebih baik daripada tempat penampungan, hal ini dipengaruhi oleh jangkauan pelayanan yang mudah dicapai di tempat relokasi, sedangkan di tempat penampungan jangkauan pelayanan sangat jauh sehingga mempengaruhi skala pelayanan.

Berdasarkan kondisi yang ada tidak bisa membandingkan antara tempat penampungan yang hanya berupa tempat sementara dengan tempat relokasi sebagai tempat tinggal final masyarakat pengungsi, namun berdasarkan beberapa

Dari hasil analisa skala tingkat pelayanan dapat diketahui bahwa untuk sarana pendidikan di tempat penampungan skala pelayanannya adalah untuk TK skor 3, SD skor 1 smp skor 1 dan sma skor 1 dan merupakan skor yang paling terendah.

Tempat relokasi membutuhkan skor yang tertinggi yaitu 5 untuk TK, dan sisanya membutuhkan skor 3 yaitu sedang.

Sarana kesehatan di tempat penampungan juga membutuhkan skor terendah yaitu skor 1 dan 2 karena radius pelayanan yang jauh. sedangkan di tempat relokasi membutuhkan radius pelayanan yang tinggi dengan skor 5 yaitu pada sarana kesehatan berupa rumah sakit dan klinik bersalin dan skor 4 pada sarana kesehatan berupa puskesmas, klinik bersalin, apotik, puskesmas pembantu dan posyandu yang terdapat disekitar tempat relokasi.

Untuk sarana perdagangan dan jasa, di tempat penampungan membutuhkan skor 4 yaitu pada pasar, warung dan kios dimana jaraknya relatif dekat dari tempat penampungan pengungsi sedangkan untuk pusat perbelanjaan membutuhkan skor 1 karena jaraknya yang sangat jauh dari tempat penampungan.

Sedangkan untuk sarana perdagangan dan jasa di tempat relokasi membutuhkan skor antara 3-5, dengan skor tertinggi (5) yaitu pasar, skor 4 yaitu warung dan kios dan skor 3 yaitu pusat perbelanjaan.

Skala pelayanan yang tertinggi yaitu masyarakat yang membutuhkan kebutuhan untuk melakukan kegiatan bersekolah karena ditakutkan setiap hari. kegiatan perdagangan dan jasa, serta kegiatan kesehatan yang harus dilayani setiap hari, dan juga kegiatan perkantoran.

Dari hasil analisa yang dilakukan dapat dikotahui skala pelayanan di tempat relokasi lebih baik daripada tempat penampungan. hal ini dipengaruhi oleh jangkauan pelayanan yang mudah dicapai di tempat relokasi. sedangkan di tempat penampungan jangkauan pelayanan sangat jauh sehingga mempengaruhi skala pelayanan.

Berdasarkan kondisi yang ada tidak bisa membandingkan antara tempat penampungan yang hanya berupa tempat sementara dengan tempat relokasi sebagai tempat tinggal final masyarakat pengungsi. namun berdasarkan beberapa

faktor yang mempengaruhi yaitu karena kondisi sarana prasarana di tempat penampungan kurang memadai dengan jumlah masyarakat pengungsi yang masih tergolong banyak maka dilakukan hasil perbandingan antara kondisi sarana prasarana di tempat penampungan dan tempat relokasi.

3.4 Analisa Kebutuhan Masyarakat Terhadap Sarana Prasarana di Tempat Penampungan dan Tempat Relokasi

Kebutuhan untuk memiliki sebuah tempat tinggal bagi para pengungsi adalah kebutuhan yang paling utama, karena pada saat kerusuhan terjadi banyak tempat tinggal milik warga yang mengalami kerusakan akibat dibakar, di rusak dan di hancurkan oleh kelompok masyarakat yang bertikai, sehingga rumah milik warga yang tidak bisa dihuni lagi karena banyak yang sudah rata dengan tanah dan mengalami kerusakan berat. Sehingga masyarakat pengungsi pada umumnya menginginkan sebuah tempat tinggal yang baru yang layak untuk mereka huni dan bukan tinggal di tempat penampungan yang kondisinya kurang bagus dan juga tidak dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai di tempat penampungan pengungsi.

3.4.1 Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana di Tempat Relokasi

Umumnya masyarakat membutuhkan tempat tinggal, masyarakat membutuhkan sarana transportasi untuk menunjang kehidupan sehari-hari, masyarakat membutuhkan fasilitas kesehatan, masyarakat membutuhkan fasilitas pendidikan/keterampilan, masyarakat membutuhkan fasilitas perdagangan dan jasa serta masyarakat membutuhkan fasilitas rohani. Ketersediaan sarana-prasarana ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar mereka dapat melakukan kegiatannya sehari-hari dengan lancar.

faktor yang mempengaruhi yaitu karena kondisi sarana prasarana di tempat penampungan kurang memadai dengan jumlah masyarakat pengungsi yang masih tergolong banyak maka dilakukan hasil perbandingan antara kondisi sarana prasarana di tempat penampungan dan tempat relokasi.

3.4 Analisa Kebutuhan Masyarakat Terhadap Sarana Prasarana di Tempat Penampungan dan Tempat Relokasi

Kebutuhan untuk memiliki sebuah tempat tinggal bagi para pengungsi adalah kebutuhan yang paling utama. karena pada saat kerusuhan terjadi banyak tempat tinggal milik warga yang mengalami kerusakan akibat dibakar, di rusak dan di hancurkan oleh kelompok masyarakat yang bertikai, sehingga rumah milik warga yang tidak bisa dihuni lagi karena banyak yang sudah rata dengan tanah dan mengalami kerusakan berat. Sehingga masyarakat pengungsi pada umumnya menginginkan sebuah tempat tinggal yang baru yang layak untuk mereka huni dan bukan tinggal di tempat penampungan yang kondisinya kurang bagus dan juga tidak dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai di tempat penampungan pengungsi.

3.4.1 Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana di Tempat Relokasi

Umumnya masyarakat membutuhkan tempat tinggal. masyarakat membutuhkan sarana transportasi untuk menunjang kebidupan sehari-hari. masyarakat membutuhkan fasilitas kesehatan, masyarakat membutuhkan fasilitas pendidikan/keterampilan, masyarakat membutuhkan fasilitas perdagangan dan jasa serta masyarakat membutuhkan fasilitas tobani. Ketersediaan sarana-prasarana ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar mereka dapat melakukan kegiatannya sehari-hari dengan lancar.

Tabel 3.22
Skala Pelayanan
di Tempat Penampungan dan Tempat Relokasi

Tempat Penampungan				Tempat Relokasi				Keterangan
Sarana	Jarak	Radius Pelayanan menurut standar	Skala Pelayanan (skor)	Sarana	Jarak	Radius Pelayanan menurut standar	Skala Pelayanan (skor)	
Sarana Pendidikan				**Sarana Pendidikan**				Untuk sarana pendidikan di tempat penampungan skala pelayanannya adalah untuk TK skor 3, SD skor 1 smp skor 1 dan sma skor 1 dan merupakan skor yang paling terendah. Tempat relokasi mempunyai skor yang tertinggi yaitu 5 untuk TK, dan sisanya mempunyai skor 3 yaitu sedang.
▪ TK	▪ 500 meter-1 km	▪ 500 meter	1	▪ TK	▪ 100-500 meter	▪ 500 meter	5	
▪ SD	▪ 500 meter-1 km	▪ 1000meter	3	▪ SD	▪ 500-1km	▪ 1000 meter	3	
▪ SMP	▪ 6-10 Km	▪ 1000 meter	1	▪ SMP	▪ 1 Km-2 Km	▪ 1000 meter	3	
▪ SMA	▪ 15-20 Km	▪ 3000 meter	1	▪ SMA	▪ 1 Km-2 Km	▪ 3000 meter	3	
Sarana Kesehatan				**Sarana Kesehatan**				Sarana kesehatan di tempat penampungan juga mempunyai skor terendah yaitu skor 1 dan 2 karena radius pelayanan yang jauh, sedangkan di tempat reloksi mempunyai radius pelayanan yang tinggi dengan skor 5 yaitu pada sarana kesehatan berupa rumah sakit dan klinik bersalin dan skor 4 pada sarana kesehatan berupa puskesmas, klinik bersalin, apotik, puskesmas pembantu dan
▪ Rumah Sakit	▪ 15-20 Km	▪ 3000 meter	1	▪ Rumah Sakit	▪ 2km-3km	▪ 3000 meter	5	
▪ Puskesmas	▪ 1km-2 Km	▪ 1500 meter	2	▪ Puskesmas	▪ 500 meter–1Km	▪ 1500 meter	4	
▪ Klinik Bersalin	▪ 15-20 Km	▪ 4000 meter	1	▪ Klinik Bersalin	▪ 1 Km-2 Km	▪ 4000 meter	5	
▪ Praktik Dokter	▪ 15-20 Km	▪ 1500 meter	1	▪ Praktik Dokter	▪ 500m-1km	▪ 1500 meter	4	
▪ Apotik	▪ 15-20 Km	▪ 1500 meter	1	▪ Apotik	▪ 500m-1km	▪ 1500 meter	4	
				▪ Puskesmas Pembantu	▪ 500meter- 1000m	▪ 1500 meter	4	
				▪ Posyandu	▪ 500 meter-1km	▪ 1000 meter	4	

Tanpa 3.33

Skala Penjenuhan

di Tempat Pembuangan dan Tempat Kelokasi

Kriteria	Tempat Kelokasi			Tempat Pembuangan			
	Skala	Ranking Penjenuhan di (skor)	Status	Ranking Penjenuhan di (skor)	Jarak	Status
Kurang lebih separuh bangunan di lembah bersumbunggu skala penjenuhan sangat sedikit.	5	5000 meter	▪ Kumuh Sekali	5	▪ 3km-3km	▪ TK Pendudukan
Separuh lebih bangunan di lembah kelokasi terletak pada ketinggian 2 km dari TK, jarak tempuh kelokasi sangat jauh.	4	4000 meter	▪ Kumuh	4	▪ 200 meter-1km	▪ SD
Hampir seluruh bangunan di lembah kelokasi terletak pada ketinggian 1 km dari TK, jarak tempuh kelokasi sangat jauh.	3	3000 meter	▪ Kumuh Sekali	3	▪ 1 km-5 km	▪ SMP
Seluruh bangunan di lembah kelokasi terletak pada ketinggian 1 km dari TK, jarak tempuh kelokasi sangat jauh.	2	2000 meter	▪ Kumuh Sekali	2	▪ 1 km-5 km	▪ SMA
Seluruh bangunan di lembah kelokasi terletak pada ketinggian 1 km dari TK, jarak tempuh kelokasi sangat jauh.	1	1000 meter	▪ Kumuh Sekali	1	▪ 5km-3km	▪ Kumuh Sekali

Tempat Pembuangan				Tempat Kelokasi			
Status Pendudukan	Jarak	Ranking Penjenuhan menurut sejarah	Skala Penjenuhan (skor)	Status	Jarak	Ranking Penjenuhan menurut sejarah	Skala Penjenuhan (skor)
▪ TK ▪ SD ▪ SMP ▪ SMA ▪ Kumuh Sekali ▪ Perkebunan ▪ Klinik ▪ Pasar ▪ Apotik Dokter	▪ 200 meter-1 km ▪ 200 meter-1 km ▪ 0-10 km ▪ 10-50 km ▪ 10-50 km ▪ 10-50 km ▪ 10-50 km ▪ 10-50 km	▪ 200 meter ▪ 1000meter ▪ 1000 meter ▪ 3000 meter ▪ 3000 meter ▪ 4000 meter ▪ 1200 meter ▪ 1200 meter	1 3 1 1 2 1 1 1	▪ TK ▪ SD ▪ SMP ▪ SMA ▪ Kumuh Sekali ▪ Perkebunan ▪ Klinik ▪ Tradisional Pengobatan ▪ Apotik Dokter ▪ Posyandu	▪ 100-200 meter ▪ 200-1km ▪ 1 km-5 km ▪ 1 km-5 km ▪ 200 meter-1km ▪ 200meter-1000m ▪ 200m-1km ▪ 200 meter-1km ▪ 200 meter-1km	▪ 200 meter ▪ 1000 meter ▪ 3000 meter ▪ 3000 meter ▪ 3000 meter ▪ 1200 meter ▪ 1200 meter ▪ 1000 meter ▪ 1000 meter	5 4 3 3 2 4 4 4 4

Tempat Penampungan				Tempat Relokasi				
▪ Puskesmas Pembantu ▪ Posyandu	▪ 100 -500 meter ▪ 100-500 meter	▪ 1500 meter ▪ 1000 meter	2 2					posyandu yang terdapat disekitar tempat relokasi.
Sarana Perdagangan Dan Jasa ▪ Pasar ▪ ▪ Pusat Perbelanjaan ▪ Warung ▪ Kiios	▪ 500 M-1 Km ▪ 15-20 Km ▪ 100 meter-500 meter ▪ 100 meter-500 meter	▪ 3000 meter ▪ 2000 meter ▪ 300 meter ▪ 300 meter	5 1 4 4	**Sarana Perdagangan Dan Jasa** ▪ Pasar ▪ Pusat Perbelanjaan ▪ Warung ▪ Kiios	▪ 1km-2km ▪ 1km-2km ▪ 100 meter - 500 meter ▪ 100 meter-500 meter	▪ 3000 meter ▪ 2000 meter ▪ 300 meter ▪ 300 meter	5 3 4 4	Untuk sarana perdagangan dan jasa, di tempat peampungan mempunyai skor 4 yaitu pada pasar, warung dan kios dimana jaraknya relatif dekat dari tempat penampungan pengungsi sedangkan untuk pusat perbelanjaan mempunyai skor 1 karena jaraknya yang sangat jauh dari tempat penampungan. Sedangkan untuk sarana perdagangan dan jasa di tempat relokasi mempunyai skor antara 3-5, dengan skor tertinggi (5) yaitu pasar, skor 4 yaitu warung dan kios dan skor 3 yaitu pusat perbelanjaan

Sumber: Hasil Analisa

Tempat Penampungan				Tempat Relokasi			
▪ Puskesmas ▪ Posyandu	▪ 100 -500 meter ▪ 100-500 meter	▪ 1500 meter ▪ 1000 meter	2 2				posyandu yang terdapat disekitar tempat relokasi.
Sarana Perdagangan Dan Jasa ▪ Pasar ▪ Pusat Perbelanjaan an ▪ Warung ▪ Kilos	▪ 500 M-1 Km ▪ 15-20 Km ▪ 100 meter-500 meter ▪ 100 meter-500 meter	▪ 3000 meter ▪ 2000 meter ▪ 300 meter ▪ 300 meter	5 1 4 4	**Sarana Perdagangan Dan Jasa** ▪ Pasar ▪ Pusat Perbelanjaan ▪ Warung ▪ Kilos	▪ 1km-2km ▪ 1km-2km ▪ 100 meter - 500 meter ▪ 100 meter-500 meter	▪ 3000 meter ▪ 2000 meter ▪ 300 meter ▪ 300 meter	5 3 4 4	Untuk sarana perdagangan dan jasa, di tempat penampungan mempunyai skor 4 yaitu pasar, warung dan kios dimana jaraknya relatif dekat dari tempat penampungan pengungsi sedangkan untuk pusat perbelanjaan mempunyai skor 1 karena jaraknya yang sangat jauh dari tempat penampungan. Sedangkan untuk sarana perdagangan dan jasa di tempat relokasi memunyai skor antara 3-5, dengan skor tertinggi (5) yaitu pasar, skor 4 yaitu warung dan kios dan skor 3 yaitu pusat perbelanjaan

Berdasarkan standar permukiman yang sehat, maka kebutuhan masyarakat yang utama disini adalah kebutuhan permukiman yang dilengkapi dengan berbagai macam perlengkapan dan pelayanan tertentu. Perlengkapan-perlengkapan tersebut adalah ketersediaan sarana utilitas. Selain itu, pada perumahan juga harus disediakan kebutuhan hidup sehari-hari seperti makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya yang seluruhnya harus disediakan dalam jarak yang tidak terlampau jauh dari perumahan mereka serta transportasi yang memadai.

Untuk prasarana yang di perlukan sangat diperlukan jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan jalan dan jaringan sampah sebagai sarana pendukung yang harus tersedia di dalam suatu lingkungan permukiman guna mendukung kegiatan dan aktifitas yang dilakukan dan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.sehari-hari.

3.4.2 Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana di Tempat Penampungan

Analisa ini berisi tentang kebutuhan sarana prasarana yang harus tersedia di tempat penampungan, dengan melihat sarana prasarana eksisting yang ada di tempat penampungan. Analisa ini dilakukan dengan menggunakan analisa proyeksi sarana prasarana dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan akan sarana prasarana sehingga dapat menunjang perkembangan daerah itu sendiri. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil proyeksi kebutuhan sarana prasarana di tempat penampungan dapat dilihat pada tabel 3.23 dibawah ini.

Berdasarkan standar permukiman yang sehat, maka kebutuhan masyarakat yang utama disini adalah kebutuhan permukiman yang dilengkapi dengan berbagai macam perlengkapan dan pelayanan tercntu. Perlengkapan-perlengkapan tersebut adalah keterscdiaan sarana utilitas. Selain itu, pada perumahan juga harus disediakan kebutuhan hidup sehari-hari seperti makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya yang selurulnya harus disediakan dalam jarak yang tidak terlampau jauh dari perumahan mereka serta transportasi yang mcmadai.

Untuk prasarana yang di perlukan sangat dipcrlukan jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan jalan dan jaringan sampah sebagai sarana pendukung yang harus tersedia di dalam suatu lingkungan permukiman guna mendukung kegiatan dan aktifitas yang dilakukan dan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.sehari-hari.

3.4.2 Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana di Tempat Penampungan

Analisa ini berisi tentang kebutuhan sarana prasarana yang harus tersedia di tempat penampungan. dengan melihat sarana prasarana eksisting yang ada di tempat penampungan. Analisa ini dilakukan dengan menggunakan analisa proyeksi sarana prasarana dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan akan sarana prasarana sehingga dapat menunjang perkembangan daerah itu sendiri. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil proyeksi kebutuhan sarana prasarana di tempat penampungan dapat dilihat pada tabel 3.23 dibawah ini.

Tabel 3.23
Kebutuhan Sarana di Tempat Penampungan

No	Tempat Penampungan			Kesimpulan
	Jenis Sarana	Jumlah Eksisting (unit)	Hasil Proyeksi (unit)	
1	Sarana Pendidikan ▪ TK ▪ SD ▪ SMP ▪ SMA	1 1 0 0	1 2 1 1	Penambahan unit-unit sekolah untuk sarana pendidikan, dimana dilakukan penambahan untuk sarana berupa TK, SD, SMP dan SMA.
2	Sarana Kesehatan ▪ Puskesmas pembantu ▪ Klinik Bersalin ▪ Praktik Dokter ▪ Posyandu ▪ Puskesmas	1 0 0 1 1	1 1 1 1 0	Penambahan sarana kesehatan berupa puskesmas pembantu, klinik bersalin, dan praktik dokter.
3	Sarana Perdagangan ▪ Pasar ▪ Pusat perbelanjaan ▪ Toko ▪ Warung ▪ Kios	1 0 2 4 5	0 0 5 5 5	Untuk sarana perdagangan dan niaga, dilakukan penambahan sarana berupa toko, kios dan warung .
	Sarana Peribadatan ▪ Masjid ▪ Musholla ▪ Gereja ▪ Pura ▪ Wihara	1 1 0 0 0		Untuk sarana peribadatan tidak adanya penambahan, karena jumlah penduduk pendukung sudah mencukupi kebutuhan
	Sarana Ruang Terbuka ▪ Tempat bermain ▪ Taman ▪ Lapangan olahraga	1 0 0	5 1 0	Untuk sarana ruang terbuka, dibutuhkan sarana berupa tempat bermain sebanyak 5 unit, taman 1 unit, dan untuk lapangan olahraga bisa menggunakan lapangan olah raga di tempat lain.

Sumber: Hasil Analisa 2010

Tabel 3.23

Kebutuhan Sarana di Tempat Penampungan

No	Jenis Sarana	Tempat Penampungan: Jumlah Existing (unit)	Tempat Penampungan: Hasil Proyeksi (unit)	Kesimpulan
1	Sarana			Pemanfaatan unit-unit
	Pendidikan	1	1	sekolah untuk sarana
	▫ TK	1	2	pendidikan, dimana
	▫ SD	0	1	dilakukan pembangunan
	▫ SMP	0	1	untuk sarana berupa TK,
	▫ SMA			SD, SMP dan SMA.
2	Sarana Kesehatan			Pemanfaatan sarana
	▫ Puskesmas pembantu	1	1	kesehatan berupa puskesmas pembantu,
	▫ Klinik Bersalin	0	1	klinik bersalin, dan praktik
	▫ Praktik Dokter	0	1	dokter.
	▫ Posyandu	1	1	
	▫ Puskesmas	1	0	
3	Sarana			Untuk sarana
	Perdagangan	1	0	perdagangan dan niaga,
	▫ Pasar	0	0	dilakukan pembangunan
	▫ Pusat perbelanjaan	2	5	sarana berupa toko, kios
		4	5	dan warung
	▫ Toko	5	5	
	▫ Warung			
	▫ Kios			
	Sarana			Untuk sarana perbaoatan
	Perbadatan	1		tidak adanya
	▫ Masjid	1		pemambahan, karena
	▫ Musholla	0		jumlah penduduk
	▫ Gereja	0		pendukung sudah
	▫ Pura	0		mencukupi kebutuhan
	▫ Vihara			
	Sarana Ruang Terbuka			Untuk sarana ruang terbuka dibutuhkan
	▫ Tempat bermain	1	5	sarana berupa tempat
	▫ Taman	0	1	bermain sebanyak 5 unit,
	▫ Lapangan olahraga	0	0	taman 1 unit, dan untuk lapangan olahraga bisa menggunakan lapangan olah raga di tempat lain.

Sumber: Hasil Analisa 2010

Keterangan:

1. Sarana Pendidikan

   Jumlah sarana pendidikan yang ada pada saat ini di daerah penampungan pengungsi adalah berupa 1 unit TK dan 1 unit sd, dimana sarana yang ada tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat bersekolah ke luar Desa untuk menempuh pendidikan lebih lanjut, seperti siswa SMP dan SMA yang bersekolah di luar Desa dengan menempuh jarak 6-10 km. Sehingga berdasarkan hasil proyeksi yang dilakukan maka dibutuhkan penambahan sarana TK 1 unit, SD 1 unit, SMP 1 unit dan SMA 1 unit.

2. Sarana Kesehatan

   Jumlah sarana kesehatan yang terdapat di tempat penampungan hanya berupa puskesmas 1 unit yang terdapat di Desa Jikumerasa, puskesmas pembantu 1 unit dan posyandu 1 unit. Berdasarkan hasil poyeksi diperlukan penambahan puskesmas pembantu 1 unit, klinik bersalin 1 unit, praktik dokter 1 unit dan posyandu 1 unit. Sarana kesehatan selama dirasakan sangat minim sehingga masyarakat melakukan perjalanan untuk berobat ke Kota Namlea dengan jarak antara 15-20 km.

3. Sarana Perdagangan dan Niaga

   Sarana perdagangan dan niaga yang terdapat saat ini adalah berupa pasar 1 unit, toko 2 unit, warung 4 unit dan kios 5 unit. Berdasarkan proyeksi yang dilakukan, maka diperlukan penambahan untuk toko 5 unit, warung 5 unit dan kios 5 unit. Untuk sarana pusat perbelanjaan, masyarakat umumnya melakukan perjalanan ke Kota Namlea.

4. Sarana Peribadatan

   Sarana peribadatan yang ada dinilai sudah mencukupi kebutuhan masyarakat dengan penduduk pendukung minimum adalah sekitar 20.000 orang sehingga tidak perlu dilakukan penambahan untuk sarana peribadatan.

5. Sarana Ruang Terbuka

   Sarana ruang terbuka yang terdapat di tempat penampungan yaitu, taman 1 unit yang dinilai kurang bisa mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga berdasarkan proyeksi dibutuhkan penambahan 5 unit taman bermain yang

Keterangan:

1. Sarana Pendidikan

Jumlah sarana pendidikan yang ada pada saat ini di daerah penampungan pengungsi adalah berupa 1 unit TK dan 1 unit sd. dimana sarana yang ada tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. sehingga masyarakat bersekolah ke luar Desa untuk menempuh pendidikan lebih lanjut, seperti siswa SMP dan SMA yang bersekolah di luar Desa dengan menempuh jarak 6-10 km. Sehingga berdasarkan hasil proyeksi yang dilakukan maka dibutuhkan penambahan sarana TK 1 unit, SD 1 unit, SMP 1 unit dan SMA 1 unit.

2. Sarana Kesehatan

Jumlah sarana kesehatan yang terdapat di tempat penampungan hanya berupa puskesmas 1 unit yang terdapat di Desa Jikumerasa, puskesmas pembantu 1 unit dan posyandu 1 unit. Berdasarkan hasil poyeksi diperlukan penambahan puskesmas pembantu 1 unit, klinik bersalin 1 unit, praktik dokter 1 unit dan posyandu 1 unit. Sarana kesehatan selama dirasakan sangat minim sehingga masyarakat melakukan perjalanan untuk berobat ke Kota Namlea dengan jarak antara 15-20 km.

3. Sarana Perdagangan dan Niaga

Sarana perdagangan dan niaga yang terdapat saat ini adalah berupa pasar 1 unit, toko 2 unit, warung 4 unit dan kios 5 unit. Berdasarkan proyeksi yang dilakukan, maka diperlukan penambahan untuk toko 5 unit, warung 5 unit dan kios 5 unit. Untuk sarana pusat perbelanjaan, masyarakat umumnya melakukan perjalanan ke Kota Namlea.

4. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan yang ada dinilai sudah mencukupi kebutuhan masyarakat dengan pendudukung minimum adalah sekitar 20.000 orang sehingga tidak perlu dilakukan penambahan untuk sarana peribadatan.

5. Sarana Ruang Terbuka

Sarana ruang terbuka yang terdapat di tempat penampungan yaitu taman 1 unit yang dinilai kurang bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. sehingga berdasarkan proyeksi dibutuhkan penambahan 5 unit taman bermain yang

berada di tengah kelompok tetangga, dan 1 unit taman, untuk lapangan olahraga bisa dilakukan di luar Desa.

Selanjutnya akan dibahas mengenai kebutuhan prasarana di tempat penampungan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.24 berikut ini.

Tabel 3.24
Proyeksi Kebutuhan Prasarana di Tempat Penampungan

No	Jenis Prasarana	Keterangan	Berdasarkan standar	Kesimpulan
1	**Prasarana Jaringan Air Bersih** ▪ Pdam ▪ Sumur ▪ Sungai	▪ Pendistribusian menggunakan pdam tidak lancar di tempat penampungan ▪ Tersedia di tempat penampungan, sehingga masyarakat umumnya menggunakan air dari sumur sebagai sumber air bersih. ▪ Terdapat di Desa Jikumerasa dengan jarak sekitar 1 km, masyarakat biasanya menggunakan sebagai sumber air.	Pembangunan air minum harus memenuhi standar perhitungan volume air minum minimal untuk kebutuhan rumah tangga yaitu 60 liter/orang/hari.	Pendistribusian 60 liter/orang/ hari, sedangkan di tempat penampungan distribusi kurang lancar. Sehingga masyarakat menggunakan sumur dan sungai terdekat
2	**Prasarana Jaringan Listrik**	Tersedia di tempat penampungan namun terbatas	Untuk standar pemakaian listrik yaitu 1 orang = 95 watt/ hari. Jadi untuk perumahan = 95 watt/ har x jumlah penduduk.	Pemakaian 95 watt/orang/hari, namun penyediaannya terbatas, sehingga masyarakat kesulitan untuk menjalankan aktifitas,
3	**Prasarana Jaringan Telekomunikasi**	Hanya tersedia di kantor desa dan juga tidak ada tower di desa ini sehingga tidak memungkinkan untuk memakai telepon pribadi	1 satuan sambung per 250 penduduk.	Pemakaian 1 satuan sambung per 250 penduduk, namun di tempat penampungan yang terdapat di Desa Jikumerasa tidak terdapat sambungan telepon
4	**Prasarana Jaringan Sampah**	Tidak adanya petugas pembuangan sampah di Desa ini, pembuangan sampah di lakukan dengan cara di timbun atau dibakar	Jaringan sampah berdasarkan standar yaitu 1 orang = 2,9 kg/ hari. Untuk perumahan = 2,9 kg x jumlah penduduk.	Berdasarkan standar, jaringan sampah 2,9 kg/orang/ hari, namun tidak terdapat petugas pembuangan sampah, sehingga pembuangan sampah dilakukan dengan cara dibakar, ditimbun dan juga dibuang ke laut.

Sumber: Hasil Analisa 2010

Untuk jaringan pdam pendistribusian 60 liter/orang/ hari, sedangkan di tempat penampungan distribusi kurang lancar. Sehingga masyarakat menggunakan sumur dan sungai terdeka untuk keperluan air bersih. Jaringan listrik dengan pemakaian 95 watt/orang/hari, namun penyediaannya terbatas,

berada di tengah kelompok tetangga, dan 1 unit taman. untuk lapangan olahraga bisa dilakukan di luar Desa.

Selanjutnya akan dibahas mengenai kebutuhan prasarana di tempat penampungan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.24 berikut ini.

Tabel 3.24

Proyeksi Kebutuhan Prasarana di Tempat Penampungan

No	Jenis Prasarana	Keterangan	Persyaratan standar	Kesimpulan
1	Prasarana Jaringan Air Bersih • Pipa • Sumur • Sungai	• Perkiraan kebutuhan mengguna-kan pipa tidak lancar di tempat penampungan • Tersedia di tempat penampungan, sehingga masyarakat mengguna-kan air dan sumur sebagai sumber air bersih. • Terdapat di Desa Ukumeeso dan jaraknya sekitar 1 km, masyarakat biasanya menggunakan sebagai sumber air.	Pada tempatnya air minum harus memenuhi standar air minum dan air minum harus tersedia di untuk kebutuhan tangga, yaitu 60 liter/orang/hari	Pemenuhannya 60 liter/orang/ hari, sedangkan di tempat penampungan kurang lancar, sehingga masyarakat mengguna-kan sumur dan sungai
2	Prasarana Jaringan Listrik	Tersedia di tempat penampungan namun terbatas	Untuk standar penerangan lampu yang = 95 watt/orang/hari maka untuk penduduk	Pemenuhan 95 watt/orang/hari, namun penyediaannya terbatas.
3	Prasarana Jaringan Telekomunikasi	Tidak terpasang di tempat pengungsian sehingga untuk menyalakan untuk menukar telepon pribadi	1 pelanggan sama dengan 250 penduduk.	Pemenuhan 1 saluran sambung per 250 penduduk, namun di tempat penampungan yang terdapat di Desa Ukumeeso tidak tersedia sambungan telepon
4	Prasarana Jaringan Saluran	Tidak adanya tempat pembuangan sampah di tempat pembuangan sampah di lakukan dengan cara di bakar atau dibakar	Jaringan saluran pembuangan standar yaitu 1 orang = 2,5 kg/hari Untuk penduduk = 2,5 kg x jumlah penduduk	Pemenuhan standar jaringan sampah 2,5 kg/orang/hari, namun tidak terdapat tempat pembuangan sampah, sehingga penduduk membuang sampah dengan cara dibakar dan juga dibuang ke sungai

Sumber: Hasil Analisa 2010

Untuk jaringan *pdam* pendistribusian 60 liter/orang/ hari, sedangkan di tempat penampungan distribusi kurang lancar. Sehingga masyarakat menggunakan sumur dan sungai terdeka untuk kepeluan air bersih. Jaringan listrik dengan pemakaian 95 watt/orang/hari, namun penyediaannya terbatas.

sehingga masyarakat kesulitan untuk menjalankan aktifitas sehari-hari, pada waktu malam masyarakat biasanya menggunakan lilin atau obor untuk keperluan penerangan.

Prasarana jaringan telekomunikasi yang ada pemakaiannya 1 satuan sambung per 250 penduduk, namun di tempat penampungan yang terdapat di Desa Jikumerasa tidak terdapat sambungan telepon sehingga untuk jaringan telepon tidak terlaksana dengan baik dan juga tidak terdapat tower disini sehingga masyarakat yang ada kesulitan untuk berkomunikasi menggunakan telepon rumah atau handphone.

Berdasarkan standar, jaringan sampah 2,9 kg/orang/ hari, namun tidak terdapat petugas pembuangan sampah, sehingga pembuangan sampah dilakukan dengan cara dibakar, ditimbun dan juga dibuang ke laut.

3.4.3 Skala Tingkat Pelayanan Sarana di Tempat Penampungan

Skala tingkat pelayanan yang dimaksudkan disini adalah pelayanan yang berskala lokal maupun skala regional, dimana untuk skala lokal dilihat dari jarak pencapaian maksimum dari tempat penampungan, jika jarak sesuai dengan standar maka termasuk kedalam skala lokal, tetapi apabila jarak dari tempat penampungan ke pusat kegiatan relatif jauh maka termasuk ke dalam skala regional.

Berdasarkan analisa yang dilakukan maka diketahui untuk sarana pendidikan berupa TK dan SD termasuk ke dalam skala lokal, dilihat dari radius pencapaian maksimum dan jarak dari tempat penampungan ke pusat kegiatan. Untuk sarana pendidikan berupa SMP dan SMA karena tidak tersedia di sekitar tempat penampungan maka termasuk ke dalam skala regional.

Sarana kesehatan yang termasuk ke dalam skala lokal adalah berupa puskesmas, posyandu, klinik bersalin dan praktik dokter, namun di tempat penampungan yang terlayani dengan baik hanya puskesmas dan posyandu, sedangkan sarana lainnya tidak terlayani dengan baik. Untuk sarana kesehatan berupa rumah sakit dan klinik bersalin masuk ke dalam skala regional yang mencakup seluruh kecamatan yang ada.

sehingga masyarakat kesulitan untuk menjalankan aktifitas sehari-hari, pada waktu malam masyarakat biasanya menggunakan lilin atau obor untuk keperluan penerangan.

Prasarana jaringan telekomunikasi yang ada pemakaiannya 1 saluran sambung per 250 penduduk, namun di tempat pencampuran yang terdapat di Desa Jikumerasa tidak terdapat sambungan telepon sehingga untuk jaringan telepon tidak terlaksana dengan baik dan juga tidak terdapat tower disini sehingga masyarakat yang ada kesulitan untuk berkomunikasi menggunakan telepon rumah atau handphone.

Berdasarkan standar jaringan sampah 2,9 kg/orang/ hari, namun tidak terdapat petugas pembuangan sampah, sehingga pembuangan sampah dilakukan dengan cara dibakar, ditimbun dan juga dibuang ke laut.

3.4.3 Skala Tingkat Pelayanan Sarana di Tempat Pencampuran

Skala tingkat pelayanan yang dimaksudkan disini adalah pelayanan yang berskala lokal maupun skala regional, dimana untuk skala lokal dilihat dari jarak pencapaian maksimum dari tempat pencampuran, jika jarak sesuai dengan standar maka termasuk kedalam skala lokal, tetapi apabila jarak dari tempat pencampuran ke pusat kegiatan relatif jauh maka termasuk ke dalam skala regional.

Berdasarkan analisa yang dilakukan maka dikelahui untuk sarana pendidikan berupa TK dan SD termasuk ke dalam skala lokal, dilihat dari radius pencapaian maksimum dan jarak dari tempat pencampuran ke pusat kegiatan. Untuk sarana pendidikan berupa SMP dan SMA karena tidak tersedia di sekitar tempat pencampuran maka termasuk ke dalam skala regional.

Sarana kesehatan yang termasuk ke dalam skala lokal adalah berupa puskesmas, posyandu, klinik bersalin dan praktik dokter, namun di tempat pencampuran yang terdapat dengan baik hanya puskesmas dan posyandu, sedangkan sarana lainnya tidak terdapat dengan baik. Untuk sarana kesehatan berupa rumah sakit dan klinik bersalin masuk ke dalam skala regional yang mencakup seluruh kecamatan yang ada.

Untuk sarana perdagangan dan niaga termasuk kedalam skala lokal yang melayani tempat penampungan, dimana yang termasuk ke dalam sarana ini adalah pasar, toko, warung dan kios, sedangkan untuk pusat perbelanjaan masuk kedalam skala regional yang melayani skala yang lebih besar dan dengan jangkauan yang agak jauh dari tempat penampungan, sedangkan untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga yang lebih lengkap lagi, masyarakat biasanya melakukan perjalanan ke Kota Ambon dengan waktu 1 hari menggunakan kapal laut dan dengan biaya yang dikeluarkan jauh lebih mahal. Pada umumnya pedaganga yang ada berbelanka ke Kota Ambon, sehingga harga barang yang terdapat di Kecamatan Namlea sedikit lebih mahal dibandingkan dengan Kota Ambon. Hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan oleh pedagang sedikit lebih mahal karena jarak ke Kota Ambon yang memakan waktu 1 hari dengan menggunakan kapal laut, karena tidak bisa menggunakan jalur darat.

Sarana perkantoran yang terdapat di Desa Jikumerasa hanya berupa kantor desa yang melayani skala lokal, dan untuk sarana perkantoran lainnya masuk kedalam skala regional karena letaknya yang berada di Kota Namlea yang merupakan Ibukota Kecamatan Namlea, dengan jarak tempuh yang jauh dari tempat penampungan.

Untuk sarana peribadatan yang termasuk kedalam skala lokal hanya Masjid, Musholla dan Gereja dengan jarak tempuh yang relatif dekat, sedangkan untuk sarana berupa Pura dan Wihara termasuk ke dalam skala regional dengan waktu tempuh yang lama yaitu selama 1 hari dan dengan biaya yang relatif mahal karena hanrus menmpuh perjalanan dengan menggunakan kapal laut atau ferry yang beroperasi tidak setiap hari namun pada hari-hari yang telah di tentukan.

Untuk sarana perdagangan dan niaga termasuk kedalam skala lokal yang melayani tempat penampungan. dimana yang termasuk ke dalam sarana ini adalah pasar, toko, warung dan kios, sedangkan untuk pusat perbelanjaan masuk kedalam skala regional yang melayani skala yang lebih besar dan dengan jangkauan yang agak jauh dari tempat penampungan. sedangkan untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga yang lebih lengkap lagi, masyarakat biasanya melakukan perjalanan ke Kota Ambon dengan waktu 1 hari menggunakan kapal laut dan dengan biaya yang dikeluarkan jauh lebih mahal. Pada umumnya pedagang yang ada berbelanka ke Kota Ambon. sehingga harga barang yang terdapat di Kecamatan Namlea sedikit lebih mahal dibandingkan dengan Kota Ambon. Hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan oleh pedagang sedikit lebih mahal karena jarak ke Kota Ambon yang memakan waktu 1 hari dengan menggunakan kapal laut, karena tidak bisa menggunakan jalur darat.

Sarana perkantoran yang terdapat di Desa Jikumerasa hanya berupa kantor desa yang melayani skala lokal, dan untuk sarana perkantoran lainnya masuk kedalam skala regional karena letaknya yang berada di Kota Namlea yang merupakan Ibukota Kecamatan Namlea. dengan jarak tempuh yang jauh dari tempat penampungan.

Untuk sarana peribadatan yang termasuk kedalam skala lokal hanya Masjid, Musholla dan Gereja dengan jarak tempuh yang relatif dekat. sedangkan untuk sarana berupa Pura dan Wihara termasuk ke dalam skala regional dengan waktu tempuh yang lama yaitu selama 1 hari dan dengan biaya yang relatif mahal karena harus menumpuh perjalanan dengan menggunakan kapal laut atau ferry yang beroperasi tidak setiap hari namun pada hari-hari yang telah di tentukan.

Tabel 3.25
Penentuan Skala Pelayanan Sarana di Tempat Penampungan

No	Jenis Sarana	Jumlah sarana (unit)	Jarak Eksisting	Jarak Menurut Standart	Skala		Terlayani		Kesimpulan
					Lokal	Regional	Ya	Tidak	
1	Sarana Pendidikan ▪ TK ▪ SD ▪ SMP ▪ SMA ▪ UNIVERSITAS	 1 1 0 0 0	 ▪ 500 meter-1 km ▪ 500 meter-1 km ▪ 6-10 Km ▪ 15-20 Km ▪ Memakan waktu 1 hari perjalanan dengan menggunakan kapal laut ke Kota Ambon	 ▪ 500 meter ▪ 1000 meter ▪ 1000 meter ▪ 3000 meter	 √ √	 √ √ √	 √ √	 √ √ √	Sarana pendidikan berupa TK dan SD termasuk ke dalam skala lokal, dilihat dari radius pencapaian minimum dan jarak dari tempat penampungan ke pusat kegiatan. Untuk sarana pendidikan berupa SMP dan SMA karena tidak tersedia di sekitar tempat penampungan maka termasuk ke dalam skala regional, serta universitas yang tidak terdapat di Kabupaten Buru
2	Sarana Kesehatan ▪ Rumah Sakit ▪ Puskesmas Pembantu ▪ Klinik Bersalin ▪ Praktik Dokter ▪ Apotik ▪ Posyandu	 0 1 0 0 0 1	 ▪ 15-20 Km ▪ 500 M-2 Km ▪ 15-20 Km ▪ 15-20 Km ▪ 15-20 Km ▪ 100-500 meter	 ▪ 3000 meter ▪ 4000 meter ▪ 1500 meter ▪ 1500 meter ▪ 500 meter	 √ √ √ √	 √ √	 √ √	 √ √ √ √	Skala lokal adalah berupa puskesmas, posyandu, klinik bersalin dan praktik dokter, namun di tempat penampungan yang terlayani dengan baik hanya puskesmas dan posyandu. sarana kesehatan berupa rumah sakit dan klinik bersalin masuk ke dalam skala regional yang mencakup seluruh kecamatan yang ada.
3	Sarana Perdagangan dan Niaga ▪ Pasar ▪ Pusat Perbelanjaan ▪ Toko ▪ Warung ▪ Kios	 1 0 2 4 5	 ▪ 500 M-1 Km ▪ 15-20 Km ▪ 100 meter-500 meter ▪ 100 meter-500 meter ▪ 100 meter-500 meter	 ▪ 1000 meter ▪ 5000 meter ▪ 500 meter ▪ 500 meter ▪ 500 meter	 √ √ √	 √ 	 √ √ √	 √ 	Yang termasuk ke dalam skala lokal adalah pasar, toko, warung dan kios, sedangkan untuk pusat perbelanjaan masuk kedalam skala regional yang melayani skala yang lebih besar
	Sarana Perkantoran ▪ Kantor Desa ▪ Kantor Pemerintahan ▪ Bank	 1 0 0	 ▪ 500 M-1 Km ▪ 15-20 Km ▪ 15-20 Km	1000 meter	√	√	√	√	Sarana perkantoran yang terdapat di Desa Jikumerasa hanya berupa kantor desa yang melayani skala lokal, dan untuk sarana perkantoran lainnya masuk kedalam skala

Tabel 3.25
Penentuan Skala Pelayanan Sarana di Tempat Penampungan

No	Jenis Sarana	Jumlah sarana (unit)	Jarak Resisting	Jarak Menurut Standar	Skala		Terhalang		Kesimpulan
					Lokal	Regional	Ya	Tidak	
1	Sarana Pendidikan								
	▪ TK	1	▪ 500 meter-1 Km	▪ 500 meter	√		√		Sarana pendidikan berupa TK dan SD termasuk ke dalam skala lokal dimana dari radius pencapaian minimum dan jarak dari tempat penampungan ke pusat kepisian. Untuk sarana pendidikan berupa SMP dan SMA karena jarak tersedia di sekitar tempat penampungan maka termasuk ke dalam skala regional serta universitas yang letak terdapat di Kabupaten Buru
	▪ SD	1	▪ 500 meter-1 Km	▪ 1000 meter	√		√		
	▪ SMP	0	▪ 0-10 Km	▪ 1000 meter		√		√	
	▪ SMA	0	▪ 15-20 Km	▪ 3000 meter		√		√	
	▪ UNIVERSITAS	0	▪ Memerlukan waktu 1 hari perjalanan dengan menggunakan kapal laut ke Kota Ambon			√		√	
2	Sarana Kesehatan								
	▪ Rumah Sakit	0	▪ 15-20 Km						Skala lokal adalah berupa puskesmas, posyandu, klinik bersalin dan praktik dokter, namun di tempat penampungan yang terhalang dengan baik hanya puskesmas dan posyandu. Sarana kesehatan berupa rumah sakit dan klinik bersalin masuk ke dalam skala regional yang mencakup seluruh kecamatan yang ada.
	▪ Puskesmas Pembantu	1	▪ 500 M-2 Km	▪ 2500 meter	√		√		
	▪ Klinik Bersalin	0	▪ 15-20 Km	▪ 4500 meter	√			√	
	▪ Praktik Dokter	0	▪ 15-20 Km	▪ 1500 meter	√			√	
	▪ Apotik	0	▪ 15-20 Km	▪ 1500 meter		√		√	
	▪ Posyandu	1	▪ 1-00 Meter	▪ 500 meter	√		√		
3	Sarana Perdagangan dan Niaga								
	▪ Pasar	1	▪ 500 M-1 Km	▪ 1000 meter	√				Yang termasuk ke dalam skala lokal adalah pasar, toko, warung dan kios, sedangkan untuk pusat perbelanjaan masuk kedalam skala regional yang meliputi skala yang lebih besar.
	▪ Pusat Perbelanjaan	0	▪ 15-20 Km	▪ 5000 meter			√		
	▪ Toko	2	▪ 100 meter-500 meter	▪ 500 meter	√				
	▪ Warung	4	▪ 100 meter-500 meter	▪ 500 meter	√				
	▪ Kios	6	▪ 100 meter-500 meter	▪ 500 meter	√				
							√		
							√		
	Sarana Perkantoran								
	▪ Kantor Desa	1	▪ 500 M-1 Km	1000 meter	√		√		Sarana perkantoran yang terdapat di Desa Jamursess baru berupa kantor desa yang melayani skala lokal, dan untuk sarana perkantoran lainnya masuk kedalam skala
	▪ Kantor Pemerintahan	0	▪ 15-20 Km			√		√	
	▪ Bank	0	▪ 15-20 Km						

	▪ Kantor Pos	0 0	▪ 15-20 Km ▪ 15-20 Km			√ √		√ √	regional karena letaknya yang berada di Kota Namlea
4	Sarana Peribadatan ▪ Masjid ▪ Musholla ▪ Gereja ▪ Pura ▪ Wihara	1 1 1 0 0	▪ 500 M-1 Km ▪ 100 -500meter ▪ 15-20 Km ▪ Memakan waktu 1 hari perjalanan dengan menggunakan kapal laut ke Kota Ambon ▪ Memakan waktu 1 hari perjalanan dengan menggunakan kapal laut ke Kota Ambon		√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	Masjid dan Gereja merupakan skala lokal, dimana bisa dijangkau dengan jarak yang tidak jauh, sedangkan untuk Pura dan Wihara masuk kedalam kategori skala regional karena tidak terdapat di Kabupaten Buru.

Sumber: Hasil Analisa 2010

	▪ Kantor Pos	0 0	▪ 15-20 Km ▪ 15-20 Km			√ √		√ √	regional karena lalunya yang berada di Kota Nanjas
4	**Sarana Peribadatan**								Masjid dan Gereja merupakan sarat lokal, dimana bisa digunakan dengan jarak yang tidak jauh, sedangkan untuk Pura dan Wihara masuk kedalam kategori skala regional karena tidak terdapat di Kabupaten Buru.
	▪ Masjid	1	▪ 500 M-1 Km		√		√		
	▪ Musholla	1	▪ 102 -500meter		√		√		
	▪ Gereja	1	▪ 15-20 Km		√		√		
	▪ Pura	0	▪ Memakan waktu 1 hari perjalanan dengan menggunakan kapal laut ke Kota Ambon			√		√	
	▪ Wihara	0	▪ Memakan waktu 1 hari perjalanan dengan menggunakan kapal laut ke Kota Ambon			√		√	

Sumber: Hasil Analisa 2010

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan diatas, maka di dapatkan untuk pelayanan sarana di tempat penampungan masih bersifat skala lokal, namun masih belum terlayani dengan baik, hal ini dapat dilihat dari skala pelayanan yang ada, dimana arah pergerakan masyarakat menuju ke Kota Namlea dengan jarak tempuh yang lumayan jauh, hal ini dikarenakan kondisi sarana di Kota Namlea lebih memadai dan terjangkau dibandingkan dengan kondisi sarana di tempat penampungan yang terdapat di Desa Jikumerasa.

Dari hasil analisa kebutuhan sarana prasarana di atasa dapat disimpulkan bahwa kebutuhan masyarakat yang paling utama di tempat penampungan adalah kebutuhan akan sarana prasarana yang bergerak di sektor publik, yaitu sarana pendidikan, sarana perdagangan dan jasa dan juga sarana kesehatan, sedangkan untuk prasarananya adalah ketersediaan jaringan air bersih dan juga jaringan telekomunikasi. Walaupun tempat penampungan hanya bersifat sementara, namun masyarakat pengungsi yang masih tinggal di tempat penampungan membutuhkan ketersediaan sarana prasarana tersebut dalam lingkungan tempat penampungan dengan jangkauan yang dekat dan relatif mudah dijangkau.

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan diatas, maka di dapatkan untuk pelayanan sarana di tempat penampungan masih bersifat skala lokal, namun masih belum terlayani dengan baik. hal ini dapat dilihat dari skala pelayanan yang ada. dimana arah pergerakan masyarakat menuju ke Kota Namlea dengan jarak tempuh yang lumayan jauh. hal ini dikarenakan kondisi sarana di Kota Namlea lebih memadai dan terjangkau dibandingkan dengan kondisi sarana di tempat penampungan yang terdapat di Desa Jikumerasa.

Dari hasil analisa kebutuhan sarana prasarana di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan masyarakat yang paling utama di tempat penampungan adalah kebutuhan akan sarana prasarana yang bergerak di sektor public. yaitu sarana pendidikan, sarana perdagangan dan jasa dan juga sarana kesehatan. sedangkan untuk prasarannya adalah ketersediaan jaringan air bersih dan juga jaringan telekomunikasi. Walaupun tempat penampungan hanya bersifat sementara. namun masyarakat pengungsi yang masih tinggal di tempat penampungan membutuhkan ketersediaan sarana prasarana tersebut dalam lingkungan tempat penampungan dengan jangkauan yang dekat dan relatif mudah dijangkau.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang di dapat adalah berdasarkan hasil analisa kebutuhan sarana prasarana di tempat penampungan di dapatkan sarana prasarana yang ada belum memadai dengan skala pelayanan yang tidak terlayani dengan baik sehingga dari hasil perbandingan kondisi sarana prasarana yang dilakukan pada tempat penampungan dan tempat relokasi, didapatkan kondisi sarana prasarana di tempat penampungan sangat kurang memadai dan mencukupi kebutuhan masyarakat sedangkan di tempat relokasi yang baru sudah bisa mencukupi kebutuhan masyarakat, serta berdasarkan aspirasi masyarakat, relokasi permukiman pengungsi harus tersedia sarana prasarana yang lengkap dengan jangkauan yang relatif mudah dijangkau dan di sesuaikan dengan aspirasi atau pendapat masyarakat. Dimana faktor-faktor yang berpengaruh sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan relokasi adalah karakteristik masyarakat, karakteristik ekonomi masyarakat dan ketersediaan sarana prasarana dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman relokasi.

Aspirasi masyarakat di hasilkan dalam upaya peningkatan kualitas tempat relokasi di lakukan melalui tahapan, antara lain:

1. Faktor Karakteristik Sosial Masyarakat
    a. Karakter masyarakat di tempat penampungan dipengaruhi oleh mata pencaharian masyarakat, asal masyarakat serta kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat pengungsi.
    b. Pembentukan karakter masyarakat, agar masyarakat bisa mandiri sehingga bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.
    c. Mengoptimalkan potensi yang di miliki masyarakat berdasarkan karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang ada.
    d. Peningkatan kebersamaan masyarakat untuk berperan serta dalam bentuk aspirasi maupun keterlibatan langsung.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan maka kesimpulan yang di dapat sebagai berikut:

1. Faktor Karakteristik Sosial Ekonomi
   a. Karakter masyarakat di wilayah pengumpulan dipengaruhi oleh masa pengembangan masyarakat, hasil masyarakat serta kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat pengunjung.
   b. Pemerintah kawasan masyarakat, agar masyarakat pisa memiliki sepinggu pisa memenuhi kepentingannya sendiri.
   c. Mengoptimalkan potensi yang di miliki masyarakat perdesaan pesisir sehingga dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat yang ada.
   d. Pemungkinan kepercayaan masyarakat untuk perbaiki serta dalam pentuk sebagai mampu kerangkapan jangkauan.

e. Pembangunan sarana prasarana umum ditempat relokasi yang disesuaikan dengan harapan masyarakat dengan tingkat kebutuhan masing-masing masyarakat

f. Pendapat masyarakat ditempat penampungan mengenai jarak dari tempat relokasi ke pusat kegiatan juga diperhatikan agar mudah dijangkau oleh masyarakat serta menghemat biaya.

2. Faktor Ekonomi Masyarakat

Masyarakat yang ada sudah mulai memperbaiki kondisi ekonomi pasca konflik sosial yang terjadi. Kondisi ekonomi berpengaruh terhadap tempat relokasi, dimana tingkat pengeluaran di permukiman baru dimana jika jumlah pendapatan masyarakat per bulan besar maka tingkat pertumbuhan atau perkembangan daerah relokasi akan semakin cepat, begitu pula sebaliknya jika pendapatan masyarakat perbulan relatif kecil maka tingkat pertumbuhan atau perkembangan daerah relokasi akan semakin lambat dan jika jumlah pangeluaran masyarakat per bulan besar maka tingkat pertumbuhan atau perkembangan daerah relokasi akan semakin lambat, begitu pula sebaliknya jika jumlah pengeluaran masyarakat perbulan relatif kecil maka tingkat pertumbuhan atau perkembangan daerah relokasi akan semakin cepat.

3. Faktor Ketersediaan sarana prasarana

Dari hasil analisa yang dilakukan maka kebutuhan sarana prasarana yang paling utama adalah sarana publik berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan serta sarana perdagangan dan niaga, untuk prasarana yaitu ketersediaan jaringan air bersih, jaringan listrik serta prasarana MCK yang dinilai kurang dan juga diketahui bahwa kondisi sarana prasarana umum di tempat penampungan sangat kurang dan dijangkau dengan jarak yang jauh, sedangkan kondisi sarana prasarana di tempat relokasi tergolong cukup lengkap dan dapat melayani kebutuhan masyarakat dan dapat dijangkau dengan kondisi yang relatif terjangkau dan tanpa mengeluarkan biaya yang banyak.

e. Pembangunan sarana prasarana umum ditempat relokasi yang disesuaikan dengan harapan masyarakat dengan tingkat kebutuhan masing-masing masyarakat

f. Pendapat masyarakat ditempat penampungan mengenai jarak dari tempat relokasi ke pusat kegiatan juga diperhatikan agar mudah dijangkau oleh masyarakat serta menghemat biaya.

2. Faktor Ekonomi Masyarakat

Masyarakat yang ada sudah mulai memperbaiki kondisi ekonomi pasca konflik sosial yang terjadi. Kondisi ekonomi berpengaruh terhadap tempat relokasi, dimana tingkat pengeluaran di permukiman baru dimana jika jumlah pendapatan masyarakat per bulan besar maka tingkat pertumbuhan atau perkembangan daerah relokasi akan semakin cepat. begitu pula sebaliknya jika pendapatan masyarakat perbulan relatif kecil maka tingkat pertumbuhan atau perkembangan daerah relokasi akan semakin lambat dan jika jumlah pangeluaran masyarakat per bulan besar maka tingkat pertumbuhan atau perkembangan daerah relokasi akan semakin lambat. begitu pula sebaliknya jika jumlah pengeluaran masyarakat perbulan relatif kecil maka tingkat pertumbuhan atau perkembangan daerah relokasi akan semakin cepat.

3. Faktor Ketersediaan sarana prasarana

Dari hasil analisa yang dilakukan maka kebutuhan sarana prasarana yang paling utama adalah sarana publik berupa sarana pendidikan. sarana kesehatan serta sarana perdagangan dan niaga. untuk prasarana yaitu ketersediaan jaringan air bersih. jaringan listrik serta prasarana MCK yang dimiliki kurang dan juga dikotahui bahwa kondisi sarana prasarana umum di tempat penampungan sangat kurang dan dijangkau dengan jarak yang jauh. sedangkan kondisi sarana prasarana di tempat relokasi tergolong cukup lengkap dan dapat melayani kebutuhan masyarakat dan dapat dijangkau dengan kondisi yang relatif terjangkau dan tanpa mengeluarkan biaya yang banyak.

Untuk prasarana transportasi dinilai sangat kurang, karena hanya terdapat ojek untuk melakukan perjalanan.

Semua hal di atas dilakukan dalam upaya untuk mengetahui kebutuhan masyarakat akan sarana prasarana yang tidak terlayani dengan baik di tempat penampungan serta peningkatan kualitas sarana prasarana di tempat relokasi dengan membandingkan kondisi sarana prasarana di tempat penampungan yang di sesuaikan dengan aspirasi atau keinginan masyarakat yang akan pindah ke tempat relokasi yang baru.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan yang merupakan kendala dalam menentukan kebutuhan sarana prasarana di tempat penampungan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sarana prasarana di tempat penampungan perlu dilakukan penambahan sarana dan prasarana, sehingga peneliti mengajukan beberapa studi lanjutan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat serta menunjang kegiatan yang dilakukan, studi lanjutan tersebut antara lain adalah:

1. Studi lanjutan mengenai evaluasi aspirasi masyarakat mengenai relokasi permukiman yang di lakukan.
2. Studi lanjutan berupa pembangunan sarana prasarana pendidikan berupa yaitu pembangunan SMP dan SMP di tempat penampungan yang terdapat di Desa Jikumerasa sehingga masyarakat tidak perlu bersekolah ke luar Desa, dan juga pembangunan universitas di Kabupaten agar dapat melayani kebutuhan masyarakat sekitar.
3. Studi lanjutan mengenai pembangunan sarana perdagangan dan niaga berupa pusat perbelanjaan sehingga bisa mencukupi kebutuhan masyarakat.
4. Studi lanjutan mengenai pembangunan sarana prasarana kesehatan yaitu penambahan sarana klinik bersalin, puskesmas pembantu serta posyandu dan praktik dokter

Untuk prasarana transportasi dimiliki sungai kurang. karena hanya terdapat ojek untuk melakukan perjalanan.

Semua hal di atas dilakukan dalam upaya untuk mengetahui kebutuhan masyarakat akan sarana prasarana yang tidak terlayani dengan baik di tempat pemanpungan serta peningkatan kualitas sarana prasarana di tempat relokasi dengan memberdingkan kondisi sarana prasarana di tempat pemanpungan yang di sesuaikan dengan aspirasi atau keinginan masyarakat yang akan pindah ke tempat relokasi yang baru.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dikctahui bahwa terdapat permasalahan yang merupakan kendala dalam menemukan kebutuhan sarana prasarana di tempat pemanpungan. sehingga untuk mengetahui kebutuhan sarana prasarana di tempat pemanpungan perlu dilakukan pemanbahan sarana dan prasarana. sehingga penelitl mengajukan beberapa studi lanjutan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat serta memunjang kegiatan yang dilakukan, studi lanjutan tersebut antara lain adalah:

1. Studi lanjutan mengenai evaluasi aspirasi masyarakat mengenai relokasi permukiman yang di lakukan.
2. Studi lanjutan berupa pembangunan sarana prasarana pendidikan berupa yaitu pembangunan SMP dan SMP di tempat pemampungan yang terdapat di Desa Jikumerasa sehingga masyarakat tidak perlu bersekolah ke luar Desa. dan juga pembangunan universitas di Kabupaten agar dapat melayani kebutuhan masyarakat sekitar.
3. Studi lanjutan mengenai pembangunan sarana perdagangan dan niaga berupa pusat perbelanjaan sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Studi lanjutan mengenai pembangunan sarana prasarana kesehatan yaitu pembahan sarana klinik bersalin. puskesmas pembantu serta posyandu dan praktik dokter

5. Studi lanjutan mengenai kondisi prasarana yang rusak agar segera di benahi demi kelancaran aktifitas warga, karena dengan adanya pemadaman listrik bergulir yang memakan waktu lama hampir 1 hari penuh, serta distribusi air yang kurang lancar dimana airnya bisa tidak mengalir 1-2 hari, mengakibatkan aktifitas warga menjadi terganggu.
6. Studi lanjutan mengenai peranan angkutan umum dalam kota agar masyarakat bisa dengan mudah melakukan aktifitasnya, misalnya aktifitas ekonomi jika masyarakat berbelanja cukup banyak, mereka akan kesulitan memegang barang-barang tersebut saat menggunakan motor dan saat melakukan perjalanan yang jauh.

5. Studi lanjutan mengenai kondisi prasarana yang rusak agar segera di benahi demi kelancaran aktifitas warga. Karena dengan adanya permadanan listrik berguliir yang memakan waktu lama hampir 1 hari penuh, serta distribusi air yang kurang lancar dimana airnya bisa tidak mengalir 1-2 hari, mengakibatkan aktifitas warga menjadi terganggu.
6. Studi lanjutan mengenai peranan angkutan umum dalam kota agar masyarakat bisa dengan mudah melakukan aktifitasnya. misalnya aktifitas ekonomi jika masyarakat berbelanja cukup banyak. mereka akan kesulitan membawang barang-barang tersebut saat menggunakan motor dan saat melakukan perjalanan yang jauh.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Asyari, Sapari Iman. 1993. Sosiologi Kota dan Desa. Penerbit Usaha Nasional. Surabaya.
- Blaang, Djemabut. 1986. Perumahan dan Permukiman Sebagai Kebutuhan Pokok. Penerbit yayasan obor Indonesia. Jakarta.
- Budiharjo, Eko. 1992. Sejumlah Masalah Permukiman Kota. Penerbit Alumni. Bandung.
- Koentjaraningrat, 1990. Pengantar Ilmu Antropologi. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Subagyo, Pangestu. 2003. Statistik Deskriptif. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Mansyur, Cholil. 1993. Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa. Penerbit Usaha Nasional. Surabaya.
- Sastra, Suparno & Marlina, Endi. 2005. Perencanaan Dan Pengembangan Perumahan. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1998. Sosiologi Suatu Pengantar. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. Penerbit PT.Refika Aditama. Bandung.
- Winardi, 2007. Manajemen Konflik. Penerbit cv Mandar Maju. Bandung.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman.

3. Tugas Akhir

- Salampessy, Rini Melanie: Arahan konsep ruang bersama dalam upaya meminimalisasi konflik dan seregrasi wilayah di Kota Ambon. Tugas akhir, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSP-ITN Malang.2004

4. Internet

- http://www.google.com. Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) Indonesia ,Prinsip-prinsip panduan bagi pengungsian internal, 07-09.2007, 15.50.
- http://www.google.com. **Buku Panduan Tentang Pemukiman Kembali, *Suatu Petunjuk Praktis* , Asian Development Bank, 1999, hal 46 04-01.2009, 18.40**

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Asyari, Supari Iman. 1993. Sosiologi Kota dan Desa. Penerbit Usaha Nasional. Surabaya.
- Blaang, Djemabut. 1986. Perumahan dan Permukiman Sebagai Kebutuhan Pokok. Penerbit yayasan obor Indonesia. Jakarta.
- Budihardjo, Eko. 1992. Sejumlah Masalah Permukiman Kota. Penerbit Alumni. Bandung.
- Koentjaraningrat. 1990. Pengantar Ilmu Antropologi. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Subagyo. Pangestu. 2003. Statistik Deskriptif. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Mansyur. Chofil. 1993. Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa. Penerbit Usaha Nasional. Surabaya.
- Sastra. Suparno & Marlina. Endi. 2005. Perencanaan Dan Pengembangan Perumahan. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1998. Sosiologi Suatu Pengantar. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suharno, Edi. 2005. Memhangun Masyarkat Memberdayakan Masyarakat. Penerbit PT.Refika Aditama. Bandung.
- Winardi. 2007. Manajemen Konflik. Penerbit cv Mandar Maju. Bandung.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman.

3. Tugas Akhir

- Salampessy. Rini Melanie: Analisis konsep ruang bersama dalam upaya meminimalisasi konflik dan sengketa wilayah di Kota Ambon. Tugas akhir. Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. FTSP-ITN Malang.2004

4. Internet

- [illegible]. Koordinasi Urusan Komunikasi (Of. HA) Indonesia .Prinsip-prinsip panduan bagi pengungsian internal. 07-09-2007. 15.50.
- [illegible]. Buku Panduan Tentang Pemukiman. Kumoh. Nama Penulis Tidak Asian Development Bank, 1999, hal 46 04-01-2009. 15.40

Tabel 3.5
Jumlah Jumlah Penduduk Untuk Sarana Pendidikan

No	Jenis Sarana Pendidikan	Existing	Daya Tampung	Jumlah Penduduk
1	TK	1	80	35
2	SD	1	240	127
3	SMP	0	240	139
4	SMA	0	200	145

Jumlah Penduduk Menurut Usia Pendidikan di Tempat Penampungan

TK = (1/5 X 35) + (1/5 x 127)
= 7+ 25
= 32

SD = (4/5 x 127) + (3/5 x 139)
= 102 + 83
= 185

SMP = 2/5 x 139 + 1/5 x 145
= 56 + 29
= 85

SMA = 3/5 x 145
= 87

Jumlah Penduduk Menurut Usia Pendidikan di Desa Jikumerasa, dimana jumlah penduduk disini didapat dari jumlah penduduk keseluruhan–jumlah penduduk di tempat penampungan, sehingga didapatkan hasil berikut.

TK = (1/5 X 189) + (1/5 x 237)
= 38 + 47
= 85

SD = (4/5 x 237) + (3/5 x 314)
= 190 + 99
= 289

SMP = 2/5 x 314 + 1/5 x 223
= 126 + 45
= 171

SMA = 3/5 x 223
= 134

3.1.1.1. Analisa Kebutuhan Sarana Pendidikan

Untuk memproyeksikan jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan rumus yang digunakan adalah sbb:

- TK (umur 4 – 5 tahun) = (1/5 x jumlah 0 – 4 tahun)+(1/5 x jumlah 5 – 9 tahun)

- SD (umur 6 – 12 tahun) = (4/5 x jumlah 5 – 9 tahun)+(3/5 x jumlah 10 – 14 tahun)
- SMP (umur 13 – 15 tahun) = (2/5 x jumlah 10 – 14 tahun)+(1/5 x jumlah 15 – 19 tahun)
- SMA (umur 16 – 18 tahun) = (3/5 x jumlah 15 – 19 tahun)

Analisa menggunakan metode standar PU, yang mana standar 1 TK = 2 kelas x 40 anak = 80 anak, standart 1 SD = 6 kelas x 40 anak = 240, standart 1 SMP adalah 6 kelas x 40 anak = 240. Standart 1 SMA adalah 5 kelas x 40 anak = 200.

Berdasarkan hasil proyeksi diatas, maka didapatkan hasil proyeksi di tempat penampungan dan di Desa Jikumerasa adalah sebagai berikut:

TK = 32 + 85
= 117

SD = 185 + 289
= 474

SMP = 126 + 45
= 171

SMA = 87 + 134
= 221

Jumlah Kebutuhan Sarana Pendidikan di tempat penampungan

TK = 117 / 80 = 1.4 = 1
SD = 474/ 240 = 1.9 = 2
SMP = 171/240 = 0.7 = 1
SMA = 221/ 200 = 1.1 = 1

Berdasarkan analisa yang dilakukan diatas, maka didapatkan untuk sarana pendidikan berupa TK tidak terdapat penambahan 1 unit TK menjadi 2 unit TK, sarana SD terdapat penambahan 2 unit SD menjadi 3 unit, sarana SMP terdapat penambahan 1 unit SMP, dan untuk sarana SMA terdapat penambahan 1 unit SMA.

3.1.1.2 Analisa Kebutuhan Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan berdasarkan Standar Pu yang digunakan yaitu:

1. Puskesmas pembantu: berdasarkan standar yang digunakan, minimum penduduk pendukung adalah 1000 jiwa dengan radius pencapaian 2000 meter

   Daya tampung $= \frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{Daya Tampung}}$

   $= \frac{1.319}{1000}$

   $= 1.3 = 1$ unit

2. Klinik bersalin, berdasarkan standar yang digunakan, minimum penduduk pendukung untuk sarana ini adalah 1000 jiwa dengan radius pencapaian 2000 meter.

   Daya tampung $= \frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{Daya Tampung}}$

   $= \frac{1.319}{1000}$

   $= 1.3 = 1$ unit

3. Untuk sarana berupa praktik dokter, minimum penduduk yang dilayani yaitu 5000 jiwa, dengan radius pencapaian sekitar 1500 meter.

   Berdasarkan jumlah penduduk yang terdapat di penampungan, maka dilakukan proyeksi terhadapat 1 Desa sehingga bisa mendapat jumlah unit yang harus dilayani.

   Daya tampung $= \frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{Daya Tampung}}$

   $= \frac{3198}{5000}$

   $= 0.6 = 1$ unit

4. Posyandu, minimum penduduk pendukung untuk sarana ini adalah 1250 jiwa dengan pencapaian maksimum 500 meter.

   Daya tampung $= \frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{Daya Tampung}}$

   $= \frac{1.319}{1259}$

   $= 1.05 = 1$ unit

5. Puskesmas, minimum jumlah penduduk yang dilayani adalah 120.000 jiwa dengan radius pencapaian maksimum 3000 meter, sehingga tidak diperlukan penambahan unutuk sarana kesehatan berupa puskesmas.

Dari analisa yang dilakukan diatas, maka didapatkan hasli perlu adanya sarana kesehatan berupa puskesmas sekitar 1 unit, klinik bersalin 1 unit, praktik dokter 1 unit, dan posyandu sekitar 1 unit yang harus tersedia di tempat penampungan dan di Desa Jikumerasa.

3.1.1.3. Analisa Kebutuhan Sarana Perdagangan dan jasa

Untuk sarana perdagangan dan jasa terdiri dari pasar, pusat perbelanjaan, toko, warung dan kios, untuk lebih lengkap mengenai kebutuhan sarana perdagangan dan jasa pada tempat penampungan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pusat perbelanjaan dengan penduduk pendukung minimum adalah 30.000, dengan jarak pencapaian maksimum adalah 5000 meter, sehingga bisa dilakukan diluar tempat penampungan.
2. Sarana toko dengan jumlah penduduk pendukung minimum adalah 250 orang dengan jarak pencapaian maksimum 250 meter.

$$\text{Daya tampung} = \frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{Daya Tampung}}$$
$$= \frac{1319}{250}$$
$$= 5.2 = 5 \text{ unit}$$

3. Warung dengan jumlah penduduk pendukung sekitar 250 jiwa dengan jarak pencapaian maksimum adalah 250 meter.

$$\text{Daya tampung} = \frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{Daya Tampung}}$$
$$= \frac{1319}{250}$$
$$= 5.2 = 5 \text{ unit}$$

4. Kios dengan jumlah penduduk pendukung sekitar 250 jiwa dengan jarak pencapaian maksimum adalah 250 meter.

$$\text{Daya tampung} = \frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{Daya Tampung}}$$
$$= \frac{1319}{250}$$
$$= 5.2 = 5 \text{ unit}$$

Dari analisa yang dilakukan diatas, maka didapatkan hasil perlu adanya sarana kesehatan berupa puskesmas sekitar 1 unit, klinik bersalin 1 unit, praktik dokter 1 unit, dan posyandu sekitar 1 unit yang harus tersedia di tempat penampungan dan di Desa Jikumerasa.

3.1.1.3. Analisa Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa

Untuk sarana perdagangan dan jasa terdiri dari pasar, pusat perbelanjaan, toko, warung dan kios, untuk lebih lengkap mengenai kebutuhan sarana perdagangan dan jasa pada tempat penampungan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pusat perbelanjaan dengan pendudukung minimum adalah 30.000, dengan jarak pencapaian maksimum adalah 5000 meter. sehingga bisa dilakukan diluar tempat penampungan.
2. Sarana toko dengan jumlah pendudukung minimum adalah 250 orang dengan jarak pencapaian maksimum 250 meter.

$$\text{Daya tampung} = \frac{\text{Jumlah pendudukung}}{\text{Daya Tampung}}$$
$$= \frac{1319}{250}$$
$$= 5.2 = 5 \text{ unit}$$

3. Warung dengan jumlah pendudukung sekitar 250 jiwa dengan jarak pencapaian maksimum adalah 250 meter.

$$\text{Daya tampung} = \frac{\text{Jumlah pendudukung}}{\text{Daya Tampung}}$$
$$= \frac{1319}{250}$$
$$= 5.2 = 5 \text{ unit}$$

4. Kios dengan jumlah pendudukung sekitar 250 jiwa dengan jarak pencapaian maksimum adalah 250 meter.

$$\text{Daya tampung} = \frac{\text{Jumlah pendudukung}}{\text{Daya Tampung}}$$
$$= \frac{1319}{250}$$
$$= 5.2 = 5 \text{ unit}$$

Berdasarkan hasil analisa diatas maka didapatkan, jumlah kebutuhan sarana perdagangan di tempat penampungan yaitu untuk pusat perbelanjaan bisa dilakukan di luar tempat penampungan, toko harus disediakan 5 unit, warung 5 unit dan juga kios 5 unit.

3.1.1.4 Analisa Kebutuhan Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga

Stándar fasilitas peribadatan tingkat kawasan dengan penduduk minimum 20.000 jiwa dan luas bangunan peribadatan sesuai dengan agamanya ± 1000 m2

3.1.1.5 Analisa Kebutuhan Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga

Untuk kebutuhan sarana ruang terbuka terdiri dari, tempat bermain, taman dan lapangan olahraga. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini.

1. Tempat bermain dengan penduduk pendukung minimum dan 250 jiwa dan radius pencapaian 100 m dan berada di tengah kelompok tetangga.

$$\text{Daya tampung} = \frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{Daya Tampung}}$$
$$= \frac{1319}{250}$$
$$= 5.2 = 5 \text{ unit}$$

2. Taman , dengan penduduk pendukung minimum dan 2500 jiwa dengan radius pencapaian 1000 meter dan berada di pusat kegiatan lingkungan.

$$\text{Daya tampung} = \frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{Daya Tampung}}$$
$$= \frac{1319}{2500}$$
$$= 0.52 = 1 \text{ unit}$$

3. Lapangan olahraga, dengan penduduk minimum 30.000, sehingga bisa dilakukan diluar tempat penampungan.

Berdasarkan hasil analisa diatas maka didapatkan, jumlah kebutuhan sarana perdagangan di tempat penampungan yaitu untuk pusat perbelanjaan bisa dilakukan di luar tempat penampungan, toko buras disediakan 5 unit, warung 5 unit dan juga kios 5 unit.

3.1.1.4 Analisa Kebutuhan Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga

Standar fasilitas perlindungan tingkat kawasan dengan penduduk minimum 20.000 jiwa dan luas bangunan perlindungan sesuai dengan agunanya ± 1000 m2

3.1.1.5 Analisa Kebutuhan Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga

Untuk kebutuhan sarana ruang terbuka terdiri dari, tempat bermain, taman dan lapangan olahraga. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini.

1. Tempat bermain dengan penduduk pendukung minimum dan 250 jiwa dan radius pencapaian 100 m dan berada di tengah kelompok tetangga.

$$\text{Daya tampung} = \frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{Daya Tampung}}$$
$$= \frac{1.312}{250}$$
$$= 5.2 = 5 \text{ unit}$$

2. Taman , dengan penduduk pendukung minimum dan 2500 jiwa dengan radius pencapaian 1000 meter dan berada di pusat kegiatan lingkungan.

$$\text{Daya tampung} = \frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{Daya Tampung}}$$
$$= \frac{1.312}{2500}$$
$$= 0.52 = 1 \text{ unit}$$

3. Lapangan olahraga, dengan penduduk minimum 30.000, sehingga bisa dilakukan diluar tempat penampungan.

Lampiran Tingkat Pemilihan Aspirasi

Aspirasi Masyarakat	Variabel	Presentase Pemilihan	Tingkat pemilihan
Pendapat mengenai Relokasi	Sangat Setuju	50	Sedang
	Setuju	20	Rendah
	Kurang Setuju	4	Sangat rendah
	Tidak Setuju	0	Sangat rendah
Lokasi Permukiman	Dekat Tempat Kerja	19	Rendah
	Di Pusat Kota	15	Rendah
	Dekat dengan tempat kerja dan di pusat kota	66	Agak tinggi
Fasilitas Umum	Pendidikan	91	Sangat tinggi
	Perkantoran	95	Sangat tinggi
	Kesehatan	92	Sangat tinggi
	Peribadatan	88	Tinggi
	Perdagangan dan Jasa	95	Sangat tinggi
Sarana Utilitas	Jaringan Listrik	100	Sangat tinggi
	Jaringan Air Bersih	100	Sangat tinggi
	Jaringan Telepon	47	Sedang
	Jaringan jalan	61	Agak tinggi
	Tempat Pembuangan Sampah	88	Tinggi

Sumber: Hasil Analisa

$$K = 1 + 3{,}3 \log n$$
$$= 1 + 3{,}3 \log 74 \ (1{,}8692)$$
$$= 7.168$$
$$= 72$$

$$R = \frac{\text{Presentase Tertinggi-Presentase Terendah}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

$$R = \frac{100-0}{7}$$
$$= 14.28$$
$$= 14$$

Interval Hierarki (R) Pemilihan = 14.28=14

0- 14 = Sangat rendah

15-29 = Rendah

30-44 = Agak Sedang

45-59 = Sedang

60-74 = Agak Tinggi

75-89 = Tinggi

90-100 = Sangat Tinggi

Interval Pengukuran Berdasarkan Standar Kawasan Siap Bangun (Permen No 32 tahun 2006)

Fasilitas	Radius Pelayanan (m)	Sangat Dekat	Dekat	Sedang	Jauh	Sangat Jauh
Sekolah						
TK	500 m	0-100 m	100-200 m	200-300 m	300-400 m	400-500 m
SD	1000 m	0-200 m	200-400m	400-600 m	600-800 m	800-1000 m
SMP	2500 m	0-500 m	500-1000m	1000-1500 m	1500-2000 m	2000-2500 m
SMA	3500 m	0-700 m	700-1300m	1300-2000m	2000-2600	2600-3300 m
Peribadatan						
Masjid	1500 m	0-300 m	300-600 m	600-900 m	900-1200 m	1200-1500 m
Gereja	1500 m	0-300 m	300-600 m	600-900 m	900-1200 m	1200-1500 m
Kesehatan						
Rumah Sakit	3000 m	0-600 m	600-1200 m	1200-1800 m	1800-2400 m	2400-3000m
Puskesmas	1500 m	0-300 m	300-600 m	600-900 m	900-1200 m	1200-1500 m
Klinik Bersalin	1000 m	0-400 m	400-800 m	800-1200m	1200-1600 m	1600-2000 m
Praktik Dokter	1500 m	0-300 m	300-600 m	600-900 m	900-1200 m	1200-1500 m
Apotik	1500 m	0-300 m	300-600 m	600-900 m	900-1200 m	1200-1500 m

Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Institut Teknologi Nasional Malang
Jalan Bendungan Sigura-Gura No.2 Malang Telp. (0341) 567154

QUISIONER UNTUK MASYARAKAT PENGUNGSI PASCA KERUSUHAN KOTA NAMLEA, KABUPATEN BURU

Tema Penelitian:
Identifikasi Kebutuhan Sarana Prasarana Di Tempat Penampungan Pengungsi Akibat Konflik Sosial di Desa Jikumerasa

Tujuan penyebaran Quisioner:
Quisioner ini disebarkan kepada masyarakat yang tinggal dilokasi penampungan pengungsi Kota Namlea Kabupaten BURU dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan data langsung yang berhubungan dengan penelitian tugas akhir Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, ITN MALANG.

I. Identitas Responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis kelamin :
4. Alamat :
5. Daerah asal :
6. Pekerjaan :
   a. Pekerjaan tetap :
   b. Pekerjaan sampingan :
7. Status Dalam Keluarga :
   a. Kepala keluarga c. Famili e. lain-lain
   b. Ibu Rumah Tangga d. Anak
8. Jumlah Anggota Keluarga: Orang
9. Pendidikan Terakhir:
   a. SD d. Akademi
   b. SMP e. PT
   c. SMA f. Lainnya.

II. Kependudukan

1. Apakah saudara merupakan penduduk asli Kota Namlea?
   a. Ya b. Tidak
2. Jika tidak darimanakah asal saudara?
   a. Maluku c. Sulawesi
   b. Jawa d. Sumatera
   f. Lainnya, sebutkan.....
3. Jika saudara bukan penduduk asli Kota Namlea, apa motivasi saudara untuk tinggal di Kota Namlea?
   a. Pekerjaan e. Lokasi yang nyaman
   b. Berkumpul dengan keluarga f. Lain-lain, sebutkan....
   c. Pekerjaan dan keluarga
5. Berapa jumlah keluarga anda yang tinggal di tempat penampungan pengungsi ini?
   a. 3 orang c. 5 orang e. Lainnya
   b. 4 orang d. 6 orang
6. Bagaimana kondisi rumah saudara pasca konflik yang terjadi?

QUISIONER UNTUK MASYARAKAT PENGUNJUNG PASCA KERUSUHAN KOTA NAMLEA, KAB. BURU

Tema Penelitian:
Identifikasi Kebutuhan Sarana Prasarana Di Tempat Penampungan Pengungsi

Akibat Konflik Sosial di Desa Jikumerasa

Tujuan penyebaran Quisioner:
Quisioner ini disebarkan kepada masyarakat yang tinggal dilokasi penampungan pengungsi Kota Namlea Kabupaten BURU dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan data langsung yang berhubungan dengan penelitian tugas akhir Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. ITN MALANG.

I. Identitas Responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis kelamin :
4. Alamat :
5. Daerah asal :
6. Pekerjaan :
   a.Pekerjaan tetap :
   b.Pekerjaan sampingan :
7. Status Dalam Keluarga :
   a. Kepala keluarga c. Famili e. lain-lain
   b. Ibu Rumah Tangga d. Anak
8. Jumlah Anggota Keluarga: Orang
9. Pendidikan Terakhir:
   a.SD d. Akademi
   b.SMP e. PT
   c.SMA f. Lainnya.

II. Kependudukan

1. Apakah saudara merupakan penduduk asli Kota Namlea?
   a. Ya b. Tidak
2. Jika tidak darimanakah asal saudara?
   a. Maluku c. Sulawesi
   b.Jawa d. Sumatera
   f. Lainnya. sebutkan.....
3. Jika saudara bukan penduduk asli Kota Namlea, apa motivasi saudara untuk tinggal di Kota Namlea?
   a. Pekerjaan c. Lokasi yang nyaman
   b. Berkumpul dengan keluarga f. Lain-lain. sebutkan....
   c. Pekerjaan dan keluarga
5. Berapa jumlah keluarga anda yang tinggal di tempat penampungan pengungsi ini?
   a.3 orang c. 5 orang e. Lainnya
   b.4 orang d. 6 orang
6. Bagaimana kondisi rumah saudara pasca konflik yang terjadi?

a. Terbakar
b. Rusak
c. Hancur
d. Ditempati orang lain
e. Lainnya, sebutkan....

7. Menurut saudara, apakah lokasi tempat tinggal saudara sekarang ini sudah nyaman:
   a. Ya
   b. Belum
8. Jika belum, alasannya:
   a. Kondisi keamanan
   b. Kurang nyaman
   c. Lainnya, sebutkan.....
9. Bagaimana bentuk dan kondisi permukiman di lingkungan tempat tinggal saudara sekarang:
   a. Kondisi baik
   b. Kondisi sangat baik
   c. Kondisi sedang
   d. Kondisi buruk
   e. Kondisi sangat buruk

III. Aspirasi Masyarakat Terhadap Relokasi Permukiman Pengungsi

1. Menurut anda fungsi rumah sebagai apa?
   a. Tempat berteduh dan istirahat
   b. Tempat berkumpul dengan anggota keluarga
   c. Tempat bersilahturahmi antara keluarga
   d. Lainnya, sebutkan.....
2. Apa alasan anda untuk menerima fasilitas rumah yang diberikan oleh pemerintah?
   a. Karena tidak mempunyai rumah lagi
   b. Karena diberikan secara Cuma-cuma
   c. Lainnya, sebutkan....
3. Bagaimana pendapat anda mengenai di adakannya relokasi permukiman?
   a. Sangat setuju
   b. Setuju
   c. Kurang setuju
   d. Tidak setuju
4. Menurut anda, bagaimana sebaiknya lokasi permukiman relokasi?
   a. Dekat Tempat Kerja
   b. Di Pusat Kota
   c. Dekat tempat kerja dan di Pusat Kota
   d. Lainnya.
5. Bagaimana pendapat anda mengenai jarak Tempat Relokasi dengan Tempat Kerja?
   a. Dekat (500 m- 1 km)
   b. Sedang (1km-2km)
   c. Jauh ($\geq$ 2 Km)
   d. Tidak ada jarak
6. Bagaimana pendapat anda mengenai jarak Tempat Relokasi ke daerah pendidikan?
   a. Dekat (500 m- 1 km)
   b. Sedang (1km-2km)
   c. Jauh ($\geq$ 2 Km)
   d. Tidak ada jarak
7. Bagaimana pendapat anda mengenai jarak Tempat Relokasi ke daerah peribadatan?

a. Dekat (500 m- 1 km)
b. Sedang (1km-2km)
c. Jauh (≥ 2 Km)
d. Tidak ada jarak

8. Bagaimana pendapat anda mengenai jarak Tempat Relokasi dengan fasilitas kesehatan?
   a. Dekat (500 m- 1 km)
   b. Sedang (1km-2km)
   c. Jauh (≥ 2 Km)
   d. Tidak ada jarak
9. Bagaimana pendapat anda mengenai jarak Tempat Relokasi ke daerah perdagangan dan jasa?
   a. Dekat (500 m- 1 km)
   b. Sedang (1km-2km)
   c. Jauh (≥ 2 Km)
   d. Tidak ada jarak
10. Bagaimana ketersediaan Fasilitas di tempat relokasi?
    a. Lengkap b. Tidak Lengkap
11. Jika tidak lengkap, fasilitas apakah yang harus tersedia di tempat relokasi?
    a. Fasilitas perkantoran c. Fasilitas Peribadatan
    b. Fasilitas Pendidikan d. Faslitas Perdagangan dan Jasa
12. Bagaimana dengan sarana utilitas yang tersedia?
    a. Lengkap b. Tidak Lengkap
13. Jika tidak lengkap, sarana utilitas apakah yang harus tersedia di tempat relokasi?
    a. Jalan d. Telepon
    b.Listrik e. Pembuangan Sampah
    c. Air Bersih f. Lainnya, sebutkan....
14. Alat transportasi yang di gunakan ke daerah kegiatan?
    a. Sepeda
    b. Mobil pribadi
    c. Motor
    d. Ojek
    e. Angkutan kota

IV. Aspek Ekonomi

1. Jenis pekerjaan:

a. Pegawai negeri (aktif/ pensiunan)

Instansi tempat bekerja	Posisi pada instansi		Pengahsilan/bulan (Rp)
	Golongan	Jabatan	

b. Anggota TNI/POLRI (aktif/purnawirawan)

Instansi tempat bekerja	Posisi pada instansi		Pengahsilan/bulan (Rp)
	Golongan	Jabatan	

c. Guru (aktif/ pensiunan

Instansi tempat bekerja	Posisi pada instansi		Pengahsilan/bulan (Rp)
	Golongan	Jabatan	

d. Petani

Jenis pertanian yang digarap	Status lahan garapan		Pengahsilan/bulan (Rp)
	Hibahan pemerintah	Disewakan orang	

e. Pedagang

Jenis usaha	Pengahsilan/bulan (Rp)

2. Apakah saudara mempunyai penghasilan tambahan?
   a. Ya b. Tidak
3. Jika ya, berapa penghasilan tambahan/ bulan?
   a. Rp. 100.000- Rp. 500.000 c. Rp. 1.000.000-Rp.2.000.000
   b. Rp. 500.000-Rp. 1.000.000 d. Rp. >.2.000.000
4. Berapa pengeluaran anda tiap bulan?
   a. Rp. 100.000- Rp. 500.000 c. Rp. 1.000.000-Rp.2.000.000
   b. Rp. 500.000-Rp. 1.000.000 d. Rp. >.2.000.000
5. Apakah kerusuhan sosial yang terjadi berpengaruh terhadap kondisi ekonomi saudara sekeluarga?
   a. Ya b. Tidak
6. Jika berpengaruh terhadap kondisi ekonomi anda, seperti apa pengaruhnya? Jelaskan .....

d. Pelanggan

Jenis pelanggan yang ditawarkan	Nama lokasi pelanggan	
	Hibahkan perusahaan	Dijual atau sewa

e. Pedagang

Jenis usaha	Pengeluaran bulan (Rp)

2. Apakah saudara memprediksi pengeluaran tambahan?
   a. Ya b. Tidak
3. Jika ya, berapa pengeluaran tambahan/ bulan?
   a. Rp. 100.000- Rp. 500.000 c. Rp. 1.000.000-Rp.2.000.000
   b. Rp. 500.000-Rp. 1.000.000 d. Rp. >2.000.000
4. Berapa pengeluaran anda tiap bulan?
   a. Rp. 100.000- Rp. 500.000 c. Rp. 1.000.000-Rp.2.000.000
   b. Rp. 500.000-Rp. 1.000.000 d. Rp. >2.000.000
5. Apakah kerusuhan sosial yang terjadi berpengaruh terhadap kondisi ekonomi saudara sekeluarga?
   a. Ya b. Tidak
6. Jika berpengaruh terhadap kondisi ekonomi anda, seperti apa pengaruhnya?
   Jelaskan .....

Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Institut Teknologi Nasional Malang
Jalan Bendungan Sigura-Gura No.2 Malang Telp. (0341) 567154

TABEL
REKAPAN QUISIONER UNTUK MASYARAKAT PENGUNGSI KECAMATAN NAMLEA, KABUPATEN BURU

Pertanyaan	Jawaban Responden					Jumlah	%
	a	b	c	d	e		
Apakah saudara merupakan penduduk asli Kota Namlea?							
a. Ya	9					9	12
b. b. Tidak		65				65	88
Jika tidak darimanakah asal saudara?							
a. Maluku	20					20	27
b.Jawa		23				23	31
c. Sulawesi			18			18	24
d. Sumatera							
e. Lainnya, sebutkan.....							
Jika saudara bukan penduduk asli Kota Namlea, apa motivasi saudara untuk tinggal di Kota Namlea?							
a. Pekerjaan	23					23	31
b. Berkumpul dengan keluarga		11				11	15
c. Lokasi yang nyaman			40			40	54
Jumlah keluarga yang tinggal di tempat penampungan pengungsi.							
a.3 orang	24					24	32
b.4 orang		28				28	38
c. 5 orang.			11			11	15
d. 6 orang				7		7	10
e. > 7 orang					4	4	5
Kondisi rumah saudara pasca konflik yang terjadi.							
a.Terbakar	29					29	39
b. Rusak		22				22	30
c. Hancur			18			18	24
d. Ditempati orang lain				5		5	7
e. Lainnya, sebutkan....					0	0	0
Apakah lokasi tempat tinggal saudara sekarang ini sudah nyaman							
a.Ya	25					15	34
b. Belum		49				49	66
Bentuk dan kondisi permukiman di lingkungan tempat tinggal saudara sekarang.							
a.Kondisi sangat baik	7					7	10
b.Kondisi baik		9				9	12
c.Kondisi sedang			10			10	13
d.Kondisi buruk				26		26	35
e.Kondisi sangat buruk					22	22	30
Menurut anda fungsi rumah sebagai apa							
a.Tempat berteduh dan istirahat	37					37	50
b.Tempat berkumpul dengan anggota keluarga		21				21	28
c.Tempat bersilahturahmi antara keluarga			16			16	22
d.Lainnya, sebutkan.....							

No	Answer	Number of Correct Answers					
		a	b	c	d	e	
1	ABET						
2	KEKAYAN ÖDÜLÜNÜZÜ ÜÇÜNCÜ MAĞAZAMIZDAN TEŞEKKÜR EDİLİR						
3	KEKAYAN NAMLEA KABUPATEN BULU						
4	Terima kasih atas kunjungan anda di toko kami						
5	Thank you for your purchase at our store						
6	Obrigado pela sua visita à nossa loja						
7	Gracias por su visita a nuestra tienda						
8	Merci de votre visite dans notre magasin						
9	Vielen Dank für Ihren Besuch in unserem Geschäft						
10	Grazie per la vostra visita nel nostro negozio						
11	Спасибо за посещение нашего магазина						
12	Dziękujemy za wizytę w naszym sklepie						
13	Dank voor uw bezoek aan onze winkel						
14	Tack för ditt besök i vår butik						
15	Takk for at du handlet i vår butikk						
16	Tak for dit besøg i vores butik						
17	Kiitos käynnistänne kaupassamme						
18	Děkujeme za návštěvu našeho obchodu						
19	Ďakujeme za návštevu nášho obchodu						
20	Köszönjük, hogy üzletünket választotta						
21	Mulțumim pentru vizita în magazinul nostru						
22	Благодарим за посещението на нашия магазин						
23	Ačiū, kad apsilankėte mūsų parduotuvėje						
24	Paldies par apmeklējumu mūsu veikalā						
25	Täname külastuse eest meie poes						
26	Hvala vam što ste posjetili našu trgovinu						
27	Hvala, ker ste obiskali našo trgovino						
28	Ačiū, kad apsilankėte mūsų parduotuvėje						
29	Hvala vam što ste posjetili našu trgovinu						
30	Hvala, ker ste obiskali našo trgovino						
31	Ačiū, kad apsilankėte mūsų parduotuvėje						
32	Hvala vam što ste posjetili našu trgovinu						
33	Hvala, ker ste obiskali našo trgovino						
34	Ačiū, kad apsilankėte mūsų parduotuvėje						
35	Hvala vam što ste posjetili našu trgovinu						
36	Hvala, ker ste obiskali našo trgovino						
37	Ačiū, kad apsilankėte mūsų parduotuvėje						
38	Hvala vam što ste posjetili našu trgovinu						
39	Hvala, ker ste obiskali našo trgovino						
40	Ačiū, kad apsilankėte mūsų parduotuvėje						

		Jawaban Responden						
9	Pendapat anda mengenai di adakannya relokasi permukiman							
	a.Sangat setuju	50					50	67
	b.Setuju		20				20	28
	c.Kurang setuju			4			4	5
	d.Tidak setuju				0		0	
10	Menurut anda, bagaimana sebaiknya lokasi permukiman relokasi?							
	a.Dekat Tempat Kerja	14					14	19
	b.Di Pusat Kota		11				11	15
	c.Dekat tempat kerja dan di Pusat Kota			49			49	66
	d.Lainnya.				0		0	
11	Bagaimana pendapat anda mengenai jarak Tempat Relokasi dengan Tempat Kerja?							
	a.Dekat (500 m- 1 km)	45					45	61
	b.Sedang (1km-2km)		29				29	39
	c.Jauh (≥ 2 Km)			0			0	0
	d.Tidak ada jarak				0		0	0
12	Bagaimana pendapat anda mengenai jarak Tempat Relokasi ke daerah pendidikan?							
	a.Dekat (500 m- 1 km)	42					42	57
	b.Sedang (1km-2km)		32				32	43
	c.Jauh (≥ 2 Km)			0			0	0
	d.Tidak ada jarak				0		0	0
13	Bagaimana pendapat anda mengenai jarak Tempat Relokasi ke daerah peribadatan?							
	a.Dekat (500 m- 1 km)	38					38	52
	b.Sedang (1km-2km)		21				21	29
	c.Jauh (≥ 2 Km)			0			0	0
	d.Tidak ada jarak				15		15	20
14	Bagaimana pendapat anda mengenai jarak Tempat Relokasi dengan fasilitas kesehatan?							
	a.Dekat (500 m- 1 km)	48					48	65
	b.Sedang (1km-2km)		26				26	35
	c.Jauh (≥ 2 Km)			0			0	
	d.Tidak ada jarak				0		0	
15	Bagaimana pendapat anda mengenai jarak Tempat Relokasi ke daerah perdagangan dan jasa?							
	a.Dekat (500 m- 1 km)	41					41	55
	b.Sedang (1km-2km)		33				33	45
	c.Jauh (≥ 2 Km)			0			0	
	d.Tidak ada jarak				0		0	
16	Fasilitas apakah yang harus tersedia di tempat relokasi?							
	a.Fasilitas perkantoran	70					70	95
	b.Fasilitas Pendidikan		67				67	91
	c.Fasilitas Peribadatan			65			65	88
	d.Fasilitas Kesehatan				68		68	92
	e.Fasilitas Perdagangan dan Jasa					70	70	95
17	Sarana utilitas apakah yang harus tersedia di tempat relokasi							
	a.Listrik	74					74	100
	b.Air Bersih		74				74	100
	c.Telepon			35			35	47

		Jawaban Responden						
	d.Pembuangan Sampah				65		65	88
	e. Jaringan jalan					45	45	61
8	Alat transportasi yang di gunakan ke daerah kegiatan?							
	a.Sepeda	6					6	8
	b.Mobil pribadi		5				5	7
	c.Motor			35			35	47
	d.Ojek				28		28	38
	e.Angkutan kota					0	0	
9	Jenis pekerjaan							
	a.Pegawai negeri sipil (aktif/ pensiunan)	26					26	35
	b.Anggota TNI/POLRI (aktif/purnawirawan)		19				19	26
	c.Guru (aktif/ pensiunan)			9			9	12
	d.Nelayan				13		13	18
	e.Pedagang					7	7	9
0	Berapa penghasilan per bulan?							
	a.Rp. 100.000- Rp. 500.000	12					12	16
	b.Rp. 500.000-Rp. 1.000.		21				21	29
	c.Rp. 1.000.000-Rp.2.000.000000			26			26	35
	d.Rp. >.2.000.000				15		15	20
1	Berapa pengeluaran per bulan?							
	a.Rp. 100.000- Rp. 500.000	11					11	15
	b.Rp. 500.000-Rp. 1.000.		23				23	31
	c.Rp. 1.000.000-Rp.2.000.000000			27			27	36
	d.Rp. >.2.000.000				13		13	18
2	Apakah kerusuhan sosial yang terjadi berpengaruh terhadap kondisi ekonomi saudara sekeluarga							
	a.Ya	48					48	65
	b.Tidak		26				26	35

Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Institut Teknologi Nasional Malang
Jalan Bendungan Sigura-Gura No.2 Malang Telp. (0341) 567154

Wawancara : Masyarakat Pengungsi

PENELITIAN TUGAS AKHIR

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SARANA PRASARANA DI TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI AKIBAT KONFLIK SOSIAL DI DESA JIKUMERASA DI KECAMATAN NAMLEA KABUPATEN BURU

Nama : Vitasari Latuconsina

NIM : 02.24.076

Perihal : Pengumpulan Data untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir

Tujuan: Untuk mengetahui karakteristik masyarakat pengungsi, kebutuhan masyarakat pengungsi dalam kaitan dengan masalah permukiman serta ketersediaan sarana dan prasarana ditempat relokasi di kota Ambon khususnya di Kecamatan Namlea .

1. Bagaimana pendapat anda tentang kondisi fisik meliputi kondisi perumahan, dll. Kondisi sosial meliputi hubungan kerjasama antar masyarakat serta kondisi ekonomi meliputi tingkat pendapatan kota ambon pasca kerusuhan yang terjadi?
2. Apa alasan anda mengungsi dari tempat tinggal anda yang lama dan darimana asal anda?
3. Berapa jumlah masyarakat pengungsi di Kecamatan Namlea?
4. Bagaimana kondisi perumahan anda pasca kerusuhan dan penanganan seperti apa yang telah dilakukan anda untuk membangun tempat tinggal anda kembali?
5. Bagaimana tanggapan pemerintah mengenai masalah permukiman serta kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat pengungsi?
6. Bagaimana bantuan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat pengungsi terkait dengan kondisi perumahan dan permukiman masyarakat di kota ambon?
7. Bantuan seperti apa yang telah diberikan pemerintah untuk masyarakat? berupa bantuan fisik, sosial dan bantuan ekonomi.

Wawancara : Masyarakat Pengungsi

PENELITIAN TUGAS AKHIR

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SARANA PRASARANA DI TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI AKIBAT KONFLIK SOSIAL DI DESA JIKUMERASA DI KECAMATAN NAMLEA KABUPATEN BURU

Nama : Vitasari Latuconsina

NIM : 02.24.076

Profil : Pengumpulan Data untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir

1. Bagaimana pendapat anda tentang kondisi fisik rneliputi kondisi permukiman.
dll. Kondisi sosial meliputi hubungan kerjasama antar masyarakat serta kondisi ekonomi meliputi tingkat pendapatan kota tanbon pasca kerusuhan yang terjadi?
2. Apa alasan anda mengungsi dari tempat tinggal anda yang lama dan datinnara asal anda?
3. Berapa jumlah masyarakat pengungsi di Kecamatan Namlea?
4. Bagaimana kondisi permukiman anda pasca kerusuhan dan pengungsian seperti apa yang telah dilakukan anda untuk membangun tempat tinggal anda kembali?
5. Bagaimana tanggapan pemerintah mengenai masalah pemukiman serta kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat pengungsi?
6. Bagaimana bantuan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat pengungsi terkait dengan kondisi permukiman dan permukiman masyarakat di kota ambon?
7. Bantuan seperti apa yang telah diberikan pemerintah untuk masyarakat? berupa bantuan fisik sosial dan bantuan ekonomi.

8. Seperti apa bantuan fisik, sosial serta bantuan ekonomi yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat pengungsi?
9. Bagaimana kondisi masyarakat yang tinggal di tempat penampungan?
10. Bagaimana kondisi sarana prasarana yang ada di tempat penampungan?
11. Apakah ketersediaan sarana prasarana yang ada di tempat penampungan sudah mencukupi kebutuhan masyarakat dan sudah terlayani dengan baik?
12. Jika belum terlayani dengan baik, bagaimana cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut?
13. Jika dilakukan pembangunan kembali tempat tinggal untuk masyarakat pengungsi, pembangunan seperti apa yang anda inginkan?
14. Jika dilakukan Relokasi permukiman, bagaimana dengan ketersediaan sarana prasarana penunjang di tempat relokasi?
15. Apakah pembangunan sesuai dengan pola ruang pasca kerusuhan, pembangunan permukiman sesuai dengan tata ruang sebelum kerusuhan atau pembangunan permukiman dengan pola campuran antar etnik agama?
16. Apakah upaya pemerintah dalam rangka pembangunan permukiman untuk masyarakat pengungsi sudah berhasil dan sesuai dengan kebutuhan para pengungsi?
17. Apakah indikasi yang menunjukan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan permukiman untuk masyarakat pengungsi?

8. Seperti apa bantuan fisik, sosial serta bantuan ekonomi yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat pengungsi?
9. Bagaimana kondisi masyarakat yang tinggal di tempat pengungsian?
10. Bagaimana kondisi sarana prasarana yang ada di tempat pengungsian?
11. Apakah ketersediaan sarana prasarana yang ada di tempat pengungsian sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dan sudah terlayani dengan baik?
12. Jika belum terlayani dengan baik, bagaimana cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut?
13. Jika dilakukan pembangunan kembali tempat tinggal untuk masyarakat pengungsi, pembangunan seperti apa yang anda inginkan?
14. Jika dilakukan Relokasi permukiman, bagaimana dengan ketersediaan sarana prasarana penunjang di tempat relokasi?
15. Apakah pembangunan sesuai dengan pola ruang pasca kerusuhan, pembangunan permukiman sesuai dengan tata ruang sebelum kerusuhan atau pembangunan permukiman dengan pola campuran antar etnik agama?
16. Apakah upaya pemerintah dalam rangka pembangunan permukiman untuk masyarakat pengungsi sudah berhasil dan sesuai dengan kebutuhan para pengungsi?
17. Apakah indikasi yang menunjukan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan permukiman untuk masyarakat pengungsi?

Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Institut Teknologi Nasional Malang
Jalan Bendungan Sigura-Gura No.2 Malang Telp. (0341) 567154

DESAIN SURVEY

PENELITIAN TUGAS AKHIR

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SARANA PRASARANA DI TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI AKIBAT KONFLIK SOSIAL DI DESA JIKUMERASA DI KECAMATAN NAMLEA KABUPATEN BURU

Kepada : Yth. Kepala Kantor Kimpraswil

Di -

Namlea

Nama : Vitasari Latuconsina

NIM : 02.24.076

Perihal : Pengumpulan Data untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir

Tujuan :Memperoleh data/informasi mengenai kondisi permukiman dan penanganan masalah permukiman untuk masyarakat pengungsi di Kecamatan Namlea.

Tabel Kebutuhan Data

No	Jenis data	Bentuk data				Tahun					Keterangan
		T	P	U	F/G	2003	2004	2005	2006	2007	
1	- Jaringan air bersih -.Jaringan Listrik -.Jaringan Jalan - Jaringan drainase - Sistem jaringan sampah		√	√	√	√	√	√	√	√	Data ini digunakan untuk mengetahui Data ini digunakan untuk mengetahui jumlah dan jenis sarana- prasarana yang ada di Kecamatan Namlea
2	Fasilitas			√	√						Data ini digunakan untuk mengetahui jumlah dan jenis fasilitas di Kecamatan Namlea
2	Strategi yang dibuat oleh pemerintah dalam perbaikan di bidang permukiman			√		√	√	√	√	√	Data ini digunakan untuk mengetahui adanya kebijakan ataupun strategi yang pernah dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta dalam rangka memukimkan masyarakat pengungsi.

Keterangan :

T : Tabel

P : Peta

U : Uraian

F/G : Foto/Gambar

PEMERINTAH KABUPATEN BURU

DESA WAKAL

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SARANA PRASARANA DI TEMPAT PENAMPUNGAN
PENGUNGSI AKIBAT KONFLIK SOSIAL DI DESA WAKAL
DI KECAMATAN NAMLEA KABUPATEN BURU

Kabupaten : Xxx Kabupaten Kantor Kantorxxxx

DI :

Kondisi

Nama : Alfasani Lasamessina

NIM : 05.54.070

Pertanyaan : Pengumpulan Data untuk pengerjaan laporan Tugas Akhir.

Tujuan : Mengetahui data/informasi mengenai kondisi penampungan dan pengungsi

masalah penampungan untuk mengetahui pengungsi di Kecamatan Namlea

Tapel Kepulauan Data

Keterangan :

T : Tapel

P : Pola

U : Utama

Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Institut Teknologi Nasional Malang
Jalan Bendungan Sigura-Gura No.2 Malang Telp. (0341) 567154

II. Wawancara

1. Bagaimana kondisi permukiman masyarakat pasca kerusuhan Kota Ambon khususbya di Kecamatan Namlea, Kabupaten BURU?
2. Bagaimana kondisi sarana prasarana pasca kerusuhan di Kecamatan Namlea?
3. Bagaimana tanggapan pemerintah tentang kondisi Kecamatan Namlea dilihat dari kondisi fisik, kondisi sosial dan kondisi ekonomi pasca kerusuhan yang terjadi?
4. Berapa jumlah masyarakat pengungsi yang mengungsi ke daerah ini?
5. Apakah strategi yang telah dilakukan pemerintah terkait dengan kondisi fisik, kondisi sosial dan kondisi ekonomi?
6. Apakah strategi yang dilakukan pemerintah terkait dengan kondisi Kecamatan Namlea saat ini telah berhasil?
7. Apakah indikasi yang menunjukan keberhasilan pemerintah tersebut?
8. Apakah upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengungsi?

Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Institut Teknologi Nasional Malang
Jalan Bendungan Sigura-Gura No.2 Malang Telp. (0341) 567154

DESAIN SURVEY

PENELITIAN TUGAS AKHIR

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SARANA PRASARANA DI TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI AKIBAT KONFLIK SOSIAL DI DESA JIKUMERASA DI KECAMATAN NAMLEA KABUPATEN BURU

Kepada : Yth. Kepala Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik

Di -

Namlea

Nama : Vitasari Latuconsina

NIM : 02.24.076

Perihal : Pengumpulan Data untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir

Tujuan :Memperoleh data/informasi mengenai perekonomian, kondisi sarana dan prasarana, pola penggunaan lahan dan jumlah masyarakat pengungsi sebagai data pendukung untuk mengetahui permasalahan dan potensi yang berkaitan dengan strategi penanganan masalah permukiman untuk masyarakat pengungsi.

I. Tabel Kebutuhan Data

No	Jenis data	Bentuk data				Tahun					Keterangan
		T	P	U	F/G	2003	2004	2005	2006	2007	
1	Jumlah dan laju penduduk di Kota Namlea	√		√		√	√	√	√	√	Data ini digunakan untuk mengetahui jumlah dan laju penduduk Kota Namlea
2	PDRB Kota Namlea Menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku	√				√	√	√	√	√	Data ini digunakan untuk mengetahui tingkat perekonomian masyarakat Kota Namlea.
3	Pola Penggunaan lahan Kota Namlea	√				√	√	√	√	√	Data ini digunakan untuk mengetahui pemanfaatan lahan di Kota Namlea
4	Jumlah penduduk dan jumlah masyarakat yang mengungsi	√				√	√	√	√	√	Data ini digunakan untuk mengetahui jumlah masyarakat pengungsi di Kota Namlea
5	Kondisi sarana dan prasarana dasar pemukiman Kota Namlea dan Desa Jikumerasa	√			√	√	√	√	√	√	Data Ini Digunakan Untuk Mengetahui Kelengkapan Sarana Dan Prasarana Dasar di Kota Namlea dan Desa Jikumerasa.

Keterangan :

T : Tabel
P : Peta
U : Uraian
F/G : Foto/Gambar

PENGANTAR SURVEY

PENGERTIAN TUGAS AKHIR

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SARANA PRASARANA DI TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI AKIBAT KONFLIK SOSIAL DI DESA JIKUMERASA DI KECAMATAN NAMLEA KABUPATEN BURU

Kepada : Yth. Kepala Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik

Di -

Namlea

Nama : Vitasari Latuconsina

NIM : 02.24.076

Perihal : Pengumpulan Data untuk penyusunan Tugas Akhir

Tujuan : Memperoleh data/informasi mengenai perekonomian, kondisi sarana dan prasarana, pola penggunaan lahan dan jumlah masyarakat pengungsi sebagai data pendukung untuk mengetahui permasalahan dan potensi yang berkaitan dengan strategi penanganan masalah permukiman untuk masyarakat pengungsi.

1. Tabel Kebutuhan Data

Keterangan :

T : Tabel
P : Peta
I : Ilustrasi
FG : Foto/Gambar

Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Institut Teknologi Nasional Malang
Jalan Bendungan Sigura-Gura No.2 Malang Telp. (0341) 567154

DESAIN SURVEY

PENELITIAN TUGAS AKHIR

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SARANA PRASARANA DI TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI AKIBAT KONFLIK SOSIAL DI DESA JIKUMERASA DI KECAMATAN NAMLEA KABUPATEN BURU

Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Daerah

Di -

Namlea

Nama : Vitasari Latuconsina

NIM : 02.24.076

Perihal : Pengumpulan Data untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir

Tujuan : Memperoleh data/informasi mengenai Fungsi kawasan dan program pemerintah dalam penanganan permukiman untuk masyarakat pengungsi

I. Tabel Kebutuhan Data

Jenis data	Bentuk data				Tahun					Keterangan
	T	P	U	F/G	2003	2004	2005	2006	2007	
Batas administrasi Kota Namlea		√			√	√	√	√	√	Data ini digunakan untuk mengetahui batas administrasi di Kota Namlea
Fungsi Kawasan wilayah studi		√	√		√	√	√	√	√	Data ini digunakan untuk mengetahui fungsi kawasan di wilayah studi
Strategi yang dibuat oleh pemerintah dalam perbaikan di bidang permukiman.			√		√	√	√	√	√	Data ini digunakan untuk mengetahui adanya kebijakan ataupun strategi yang pernah dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta dalam rangka memukimkan kembali masyarakat pengungsi.

Keterangan :

T : Tabel

P : Peta

U : Uraian

F/G : Foto/Gambar

PESAN SURVEI

PENGUJIAN TUGAS AKHIR

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SARANA PRASARANA DI TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI AKIBAT KONFLIK SOSIAL DI DESA JIKUMERASA DI KECAMATAN NAMLEA KABUPATEN BURU

Kepada : Yth. Kepala Badan Penanganan Bencana

Di -

Namlea

Nama : Vilasari Laurensina

NIM : 02.24.070

Perihal : Pengumpulan Data untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir

Tujuan : Mempercepat dan informasi mengenai Tugas Kunjungan dan program sementara dalam pelaksanaan permukiman untuk masyarakat pengungsi

1. Tabel Kebutuhan Data

Keterangan :

T : Tabel

P : Peta

T : Tulisan

F-G : Foto Gambar

Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Institut Teknologi Nasional Malang
Jalan Bendungan Sigura-Gura No.2 Malang Telp. (0341) 567154

II. Wawancara

1. Apakah kebijakan yang dibuat pemerintah terkait strategi penanganan permukiman untuk masyarakat pengungsi?
2. Seperti apa bentuk kebijakan strategi penanganan permukiman untuk masyarakat pengungsi?
3. Strategi apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penanganan masalah permukiman untuk masyarakat pengungsi?
4. Dalam melakukan upaya penanganan masalah permukiman, apakah terdapat masalah tentang permukiman untuk masyarakat pengungsi yang ditemui di lapangan?
5. Jika terdapat masalah terkait dengan permukiman untuk masyarakat pengungsi, seperti apa pemecahan masalahnya?
6. Upaya apa yang akan di lakukan pemerintah terkait dengan permasalahan yang ditemui di lapangan?

II. Wawancara

1. Apakah kebijakan yang dibuat pemerintah terkait strategi penanganan permukiman untuk masyarakat pengungsi?
2. Seperti apa bentuk kebijakan strategi penanganan permukiman untuk masyarakat pengungsi?
3. Strategi apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penanganan masalah permukiman untuk masyarakat pengungsi?
4. Dalam melakukan upaya penanganan masalah permukiman, apakah terdapat masalah tentang permukiman untuk masyarakat pengungsi yang diterimi di lapangan?
5. Jika terdapat masalah terkait dengan permukiman untuk masyarakat pengungsi, seperti apa pemecahan masalahnya?
6. Upaya apa yang akan di lakukan pemerintah terkait dengan permasalahan yang diterimi di lapangan?